

INFO KAJIAN
BAPPENAS



Investasi,
Pendanaan dan
Pemulihan Ekonomi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	ii
1. Pengembangan Model Investasi Regional.....	1
2. Pengembangan Model Analisis Perdagangan dan Investasi.....	21
3. Analisis Korelasi Antara Terms and Conditions Pinjaman, Biaya Pinjaman dan Rules of Origin Dalam Pengadaan Barang/Jasa	33
4. Penyusunan Pedoman Pemenuhan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pinjaman Luar Negeri.....	48
5. Analisa Langkah-Langkah Percepatan Pemulihan Ekonomi	60
6. Studi Efektifitas Kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2009 terhadap Perekonomian.....	69
7. Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan.....	76
8. Penyusunan Indeks Efektivitas Transportasi Perintis Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah.....	87
9. Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumberdaya Air	104
10. Strategi Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan.....	119



SUSUNAN REDAKSI

Pelindung

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA

Pengarah

Dr. Slamet Seno Adji, MA

Pemimpin Redaksi

Drs. Daroedono, MA

Redaktur Pelaksana

Dr. Ir. Yahya Rahmana Hidayat, M.Sc
Drs. Setia Budi, MA
Ir. Yudo Dwinanda Priaadi, MS
Leonardo Adypurnama, SP, MS, Ph.D
Dr. Ir. Herry Darwanto, M.Sc
Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, M.Sc
Dr. Yulius, MA
Dr. Ir. Anwar Sunari, MP
Dr. Muhammad Cholifahani, SE, M.Sc
Dr. Drs. Guspika, MBA
Amalia Adininggaar Widyasanti, MT, M.Si,
M.Eng, Ph.D
Ir. R. Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB
Nur Syarifah, SH, LLM
M. Nasir, S.Kom, M.Si
Ir. Erianti Puspa, MM
Shri Mulyanto, S.Sos, MT, M.Sc
Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS

Bagian Keuangan

Mukijo, SAP

Setting/Layout

Maharani, SE

Distribusi

Ismet M. Suhud, SE, MAP
Subay, SE
Kahmal Jumadi, S.Sos
Asriani, S.Sos, MM
Prihanto Wahyu Utomo

Sekretariat

Biro Perencanaan, Organisasi,
dan Tata Laksana
Telp: 021-3905650 ext. 1538
Fax: 021-31901161

Pengantar Redaksi

INFO KAJIAN KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS merupakan media publikasi hasil kajian yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas. Info Kajian Bappenas Volume 8 No. 1 menampilkan beberapa kajian yang dilakukan pada tahun 2010. Edisi kali ini mengambil tema Investasi, Pendanaan, dan Pemulihan Ekonomi.

Kajian yang berkaitan dengan investasi dan pendanaan adalah kajian **Pengembangan Model Investasi Regional** yang bertujuan untuk mengetahui dampak investasi terhadap kinerja wilayah dengan membangun model investasi regional; kajian **Pengembangan Model Analisis Perdagangan dan Investasi** yang berfokus pada ekspor, impor, dan investasi; kajian **Analisis Korelasi antara Terms and Conditions Pinjaman, Biaya Pinjaman, dan Rules of Origin dalam Pengadaan Barang/Jasa** yang tujuannya melakukan telaah atas *terms and conditions*, biaya pinjaman, dan *rules of origin*; serta kajian **Penyusunan Pedoman Pemenuhan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pinjaman Luar Negeri** yang bertujuan untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) pada tiap-tiap kriteria kesiapan dalam menerima pinjaman luar negeri.

Tema lain yang juga disajikan adalah mengenai pemulihan ekonomi. Kajian yang relevan dengan tema ini adalah kajian **Analisa langkah-langkah Percepatan Pemulihan Ekonomi** yang antara lain menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah (fiskal, moneter, dan sektoral) terhadap besaran-besaran ekonomi makro; kajian **Studi Efektifitas Kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2009 terhadap Perekonomian** yang bertujuan memberikan sumbangan pemikiran dalam perencanaan kebijakan keuangan negara; kajian **Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan** yang memetakan semua permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan energy terbarukan; kajian **Penyusunan Indeks Efektivitas Transportasi Perintis untuk Mendukung Pengembangan Wilayah** yang mengembangkan indikator untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kebijakan pelaksanaan pemberian subsidi transportasi perintis; kajian **Penyelesaian Konflik Pengelolaan Sumberdaya Air** yang memaparkan persoalan konflik sumber daya air dan cara penyelesaiannya; kajian **Strategi Sosialisasi Kebijakan Pembangunan jangka Menengah Bidang Tata Ruang dan Pertanian** yang salah satu tujuannya adalah merumuskan sistem penyebaran informasi pada kelompok sasaran.

Kami berharap Info Kajian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas dan khususnya para pengambil keputusan bidang perencanaan pembangunan nasional. Kritik dan saran sangat kami nantikan untuk perbaikan Info Kajian Bappenas edisi selanjutnya dan dapat disampaikan melalui Sekretariat Jurnal Info Kajian.

Salam,

Redaksi

PENGEMBANGAN MODEL INVESTASI REGIONAL

DIREKTORAT PENGEMBANGAN WILAYAH
email : dit.pw@bappenas.go.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak investasi terhadap kinerja wilayah dengan membangun model investasi regional, dan pada akhirnya akan merumuskan strategi kebijakan investasi. Spesifikasi model dirumuskan dalam bentuk persamaan simultan dan diduga dengan metode *Two Stages Least Squares*. Skenario simulasi model digunakan metode Gauss-Siedel, dengan range data sekunder tahun 1975 sampai tahun 2009.

Hasil pendugaan memiliki tanda dan besaran yang logis dari sudut pandang teori ekonomi. Variabel investasi swasta dan investasi pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang berbeda di setiap wilayah. Arus perdagangan antar-wilayah ditentukan unsur permintaan dan jarak antar-wilayah, sedangkan arus migrasi penduduk relatif lebih ditentukan oleh faktor *beaten path* dibandingkan dengan perbedaan faktor upah dan kinerja perekonomian daerah yang akan dikunjungi oleh para migran.

Skenario kebijakan peningkatan investasi swasta dan investasi pemerintah berdampak positif bagi kinerja perekonomian wilayah yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB meningkat, menurunnya jumlah penduduk miskin dan jumlah pengangguran, kecuali di beberapa wilayah tingkat kemiskinan masih terlihat mengalami peningkatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan inflasi yang terjadi di daerah tersebut, karena inflasi merupakan inherent di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri. Gangguan dalam perekonomian memang nyata terjadi, dan tanpa adanya fleksibilitas harga-upah yang sempurna, tidaklah mungkin memulihkan kondisi tenaga kerja penuh (*full employment*) dengan tingkat harga yang stabil dalam jangka pendek.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keberagaman, baik dalam sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Kesatuan dalam keberagaman tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk diimplementasikan di Indonesia. Menurut Geertz, “[Indonesia] akan makmur jika dapat menerima dan memanfaatkan keberagamannya dan sebaliknya akan terpecah-pecah jika mencoba untuk menghilangkan keberagaman tersebut” (Hill, 1996).

Indonesia perlu menjalankan kebijakan yang akan mengoptimasi pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan selain memerlukan intervensi kebijakan yang berpihak pada kearifan lokal yang berbasis kewilayahan, juga memerlukan strategi pembangunan yang bersifat lintas wilayah dan lintas sektor. Strategi ini diperlukan agar wilayah tersebut dapat berkembang mencapai tingkat yang diinginkan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya alam secara harmonis dengan pendekatan komprehensif yang memperhatikan keseimbangan fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

Meskipun analisis ekonomi umumnya tidak menyinggung hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, namun sebagian besar teori mengisyaratkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sesuatu yang harus dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang menguras sumberdaya alam tanpa diimbangi dengan akumulasi kapital dan investasi dalam pemeliharannya akan berdampak terhadap rusaknya kelestarian (*sustainability*) dari sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penyusutan dan degradasi dari sumberdaya tersebut juga telah memperparah terjadinya ketidakseimbangan (*unbalance growths*) pembangunan antar wilayah (provinsi, kabupaten/kota, wilayah perdesaan-perkotaan) dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, bahkan ketidakmerataan pendapatan antar kelompok tersebut pada akhirnya akan mengarah pada melebarnya tingkat kemiskinan. Disamping itu, persoalan-persoalan penting lainnya di daerah yang selama ini kita hadapi antara lain:

1. Investasi setiap daerah yang tidak merata;
2. Investasi saat ini terlihat jelas terpusat di Jawa – Bali;
3. Investasi swasta yang langka terutama di wilayah KTI (Kawasan Timur Indonesia);
4. Daya saing daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah yang rendah;
5. Belum kondusifnya iklim untuk investasi di daerah;

6. Kegiatan ekonomi yang masih terkonsentrasi pada beberapa daerah dan sektor tertentu saja;
7. Belum termanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya wilayah;
8. Produktivitas wilayah yang rendah;
9. Masih banyaknya wilayah-wilayah miskin seperti perbatasan, pesisir, dan kawasan tertinggal;
10. Kurangnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, LSM dalam pembangunan.

Seluruh permasalahan tersebut merupakan akumulasi dari kurang terintegrasinya berbagai kebijakan pembangunan. Maka pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini perlu dirubah memakai pendekatan regional. Salah satu implikasi terpenting dari kecenderungan perubahan ini, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi adalah apa yang dikenal dengan integrasi ekonomi menjadi satu kesatuan ekonomi kawasan. Arus lalu lintas perdagangan barang dan jasa serta investasi antar negara akan semakin meluas, intensif, dan dinamis.

Otonomi daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah itu sendiri, karena kewenangannya yang lebih luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Dengan latar belakang demografi, geografis, infrastruktur dan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, maka salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah keberagaman daerah dalam hal kinerja pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan kesenjangan antardaerah. Pendekatan pembangunan berbasis wilayah merupakan jawaban untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan potensi lokal secara lebih efektif guna mendorong keserasian dan keseimbangan pembangunan wilayah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

1.2. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan permasalahan studi yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari kajian ini adalah:

1. Membangun model investasi wilayah (regional) berbasis model-model yang telah dikembangkan sebelumnya (Model MRIO- CGE – Ekonometrika, model keterkaitan regional);
2. Melakukan berbagai simulasi kebijakan investasi di setiap wilayah;
3. Menganalisis pola dampak dari kebijakan investasi keterkaitan kebijakan nasional, regional, sektoral maupun tata ruang terhadap perekonomian suatu daerah;
4. Merumuskan strategi kebijakan, program pembangunan prioritas, kewenangan serta instrumen kebijakan investasi berdasarkan hasil model yang dibangun untuk periode jangka pendek, menengah dan panjang.

1.3. Sasaran

Mengacu pada latar Belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terumuskannya konsep model investasi wilayah berbasis model-model yang telah dikembangkan sebelumnya;
2. Terlaksananya berbagai simulasi kebijakan investasi di setiap wilayah;
3. Terlaksananya analisis pola dampak dari kebijakan investasi keterkaitan kebijakan nasional, regional, sektoral maupun tata ruang terhadap perekonomian suatu daerah;
4. Tersusunnya strategi kebijakan, program pembangunan prioritas, kewenangan serta instrumen kebijakan investasi berdasarkan hasil model yang dibangun untuk periode jangka pendek, menengah dan panjang.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Pengembangan Model Investasi Wilayah dititikberatkan pada serangkaian kegiatan untuk mengembangkan model investasi wilayah dari berbagai model pengembangan wilayah yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan lebih menitikberatkan pada keterkaitan regional, sektoral dan tata ruang. Merumuskan skenario dan alternatif kebijakan investasi, dan melakukan simulasi dampak kebijakan investasi terhadap pembangunan wilayah. Ruang lingkup kegiatan pengembangan model investasi wilayah adalah:

1. Pengumpulan data-data dan literatur dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. Data statistik terbaru: sensus, laporan, dan lainnya.
 - b. Data regional dan sektoral terbaru: data regional dari Provinsi dan data sektoral departemen teknis, LPND, data dari universitas dan lembaga-lembaga kajian;
 - c. Kebijakan-kebijakan nasional, regional, sektoral dan tata ruang yang terkait dengan investasi pembangunan daerah;
 - d. Literatur-literatur terkait untuk penyusunan Model Investasi Wilayah.
2. Pengumpulan data primer dan sekunder serta kunjungan lapangan ke lima provinsi, yaitu Provinsi Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta.
3. Analisis data dan pengkajian literatur untuk pengembangan Model Investasi Wilayah.
4. *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti antara lain oleh unsur-unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, pakar, serta perguruan tinggi, untuk memperoleh masukan dalam pengembangan Model Investasi Wilayah.
5. Konsinyasi penyusunan laporan kajian pengembangan Model Investasi Wilayah.
6. Sosialisasi dan Diskusi hasil Kajian berupa Lokakarya/workshop dengan mengundang *stakeholders* terkait untuk diseminasi hasil kajian di tingkat pusat.

1.5. Keluaran

Setelah membangun model Investasi Regional, maka output yang diharapkan dari kajian ini adalah Skenario Pembangunan antarwilayah yang berpedoman pada Konsep perencanaan keterkaitan pembangunan regional. Skenario ini antara lain berisi rekomendasi kebijakan investasi dan prioritas dalam perencanaan pembangunan baik dalam Periode Jangka Pendek (tahunan), Jangka Menengah (5 tahun) dan jangka panjang.

II. METODOLOGI

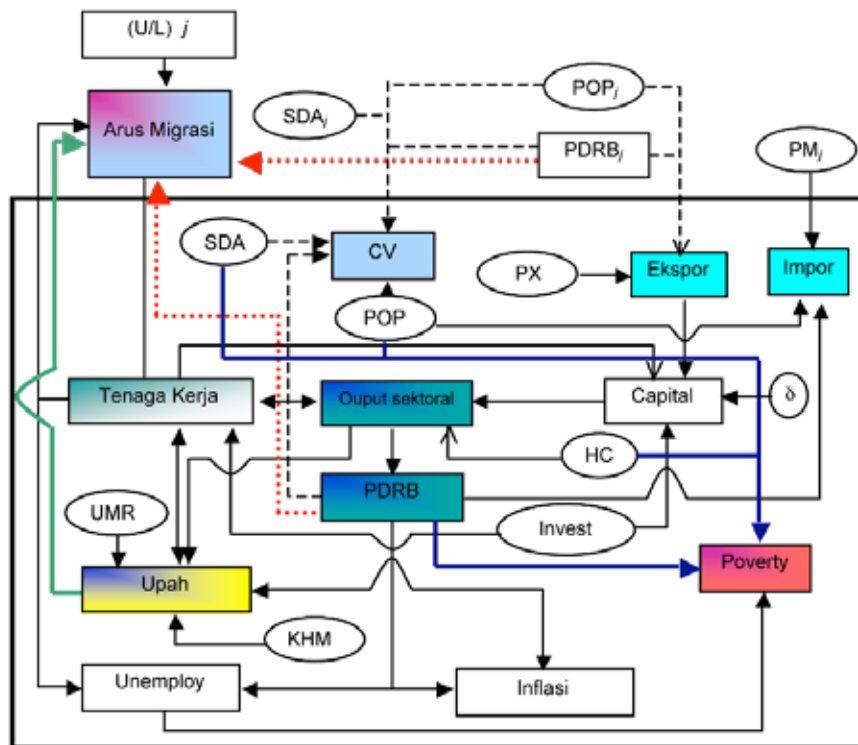
II.1. Spesifikasi Model

Model ekonometrika merupakan suatu pola khusus dari model aljabar, yakni suatu unsur yang bersifat *stochastic* yang mencakup satu atau lebih peubah pengganggu (Intriligator, 1978). Menurut Koutsoyiannis, (1977) Model ekonometrika merupakan gambaran dari hubungan masing-masing variabel penjelas (*explanatory variables*) terhadap peubah endogen (*dependent variables*) khususnya yang menyangkut tanda dan besaran (*magnitude and sign*) dari penduga parameter sesuai dengan harapan teoritis secara apriori ekonomi dengan kata lain, model yang baik haruslah memenuhi kriteria teori ekonomi (*theoretically meaningful*), kriteria statistika dan kriteria ekonometrika.

Tahapan membangun model diawali dengan suatu pemahaman fenomena perekonomian yang dihipotesiskan terjadi sebagai akibat dari keterkaitan regional yang akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Spesifikasi model dilakukan dengan memformulasikan model yang paling sesuai dengan sistem atau fenomena aktual yang diabstraksikan. Setelah model dispesifikasikan atau diformulasikan, selanjutnya model diestimasi dengan menggunakan teknik estimasi yang paling sesuai, sehingga memberikan hasil estimasi yang terbaik. Tahap berikutnya adalah evaluasi untuk mengetahui apakah model tersebut secara teoritis bermakna dan secara kuantitatif memuaskan. Jika hal ini telah terpenuhi maka akan dilakukan peramalan variabel endogen dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Tahap terakhir adalah melakukan simulasi kebijakan peramalan.

Dalam kajian pengembangan investasi regional dimana data dikumpulkan dari masing-masing *region* (provinsi) dan di analisis juga berdasarkan *region*. Provinsi yang akan dikaji dalam hal ini adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia (33 provinsi).

Spesifikasi model yang dirumuskan dalam kajian ini adalah sangat terkait dengan tujuan penelitian yaitu merumuskan model investasi regional. Model yang dibangun adalah sistem persamaan simultan dinamis. Model investasi regional dibangun berdasarkan kerangka teori ekonomi dan kajian empiris yang relevan, yang diharapkan mampu menunjukkan kinerja perekonomian daerah secara sederhana dan jelas. Spesifikasi model dalam kajian ini dibagi dalam enam blok, yaitu blok output, blok tenaga kerja, blok harga, blok kemiskinan, blok migrasi dan blok perdagangan. Simplifikasi model ditampilkan pada Gambar 2.1.



Gambar 4.1: Simplifikasi Model Investasi Regional

Pada Gambar 2.1 merupakan penyederhanaan dari model investasi regional secara utuh, mengingat persamaan dalam model investasi regional ini lebih dari 1000 persamaan, maka tidak semua provinsi dan *explanatory variables* dinyatakan di dalamnya, namun demikian seluruh blok ditampilkan.

II.2. Prosedur Analisis

II.2.1. Identifikasi Model

Identifikasi model ditentukan atas dasar "order condition" sebagai syarat keharusan dan "rank condition" sebagai syarat kecukupan. Menurut Koutsoyiannis (1977), rumusan identifikasi model persamaan struktural berdasarkan order condition ditentukan oleh:

$$(K - M) > (G - 1)$$

dimana:

K = Total peubah dalam model, yaitu peubah *endogen* dan peubah *predetermined*.

M = Jumlah peubah endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model, dan

G = Total persamaan dalam model, yaitu jumlah peubah endogen dalam model.

Jika dalam suatu persamaan dalam model menunjukkan kondisi sebagai berikut.

$(K - M) > (G - 1)$ = maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (*overidentified*)

$(K - M) = (G - 1)$ = maka persamaan tersebut dinyatakan teridentifikasi secara tepat (*exactly identified*), dan

$(K - M) < (G - 1)$ = maka persamaan tersebut dinyatakan tidak teridentifikasi (*unidentified*).

Hasil identifikasi untuk setiap persamaan struktural haruslah *exactly identified* atau *overidentified* untuk dapat menduga parameter-parameternya.

II.2.2. Metode Pendugaan Model

Dari hasil identifikasi model, model dinyatakan *exactly identified* atau *over identified*, dalam hal ini untuk pendugaan model dapat dilakukan dengan 2SLS (*Two Stage Least Squares*), dengan beberapa pertimbangan, yaitu penerapan 2SLS menghasilkan taksiran yang konsisten, lebih sederhana dan lebih mudah.

Untuk mengetahui dan menguji apakah variabel penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik F, dan untuk menguji apakah masing-masing variabel penjelas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel endogen, maka pada setiap persamaan digunakan uji statistik t.

II.2.3. Validasi Model

Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi alternatif kebijakan atau non kebijakan dan peramalan, maka perlu dilakukan suatu validasi model, dengan tujuan untuk menganalisis sejauhmana model tersebut dapat mewakili dunia nyata.

Dalam penelitian ini, kriteria statistik untuk validasi nilai pendugaan model ekonometrika yang digunakan adalah *Root Means Percent Square Error (RMSPE dan Theil's Inequality Coefficient (U)* (Pindyck and Rubinfeld, 1991). Kriteria-kriteria dirumuskan sebagai berikut:

$$RMSPE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\frac{Y_t^s - Y_t^a}{Y_t^a} \right)^2}$$

$$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s - Y_t^a)^2}}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^s)^2} + \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Y_t^a)^2}}$$

dimana:

Y_t^s = nilai hasil simulasi dasar dari variabel observasi

Y_t^a = nilai aktual variabel observasi

n = jumlah periode observasi

Statistik RMSPE digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai peubah endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya. Sedangkan nilai statistik U bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk analisis simulasi peramalan. Nilai koefisien Theil (U) berkisar antara 1 dan 0. Jika $U = 0$ maka pendugaan model sempurna, jika $U = 1$ maka pendugaan model naif. Pada dasarnya makin kecil nilai RMSPE dan U-Theil's dan makin besar nilai R^2 , maka pendugaan model semakin baik.

II.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rentang waktu (*time series*) dari tahun 1975 sampai dengan tahun 2009. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa instansi yang terkait yaitu Biro Pusat Statistik (BPS). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan merupakan catatan bahwa dalam kajian ini harga dideflasi dengan indeks harga sesuai dengan indeks harga masing-masing dengan tujuan untuk menghilangkan atau menghindari pengaruh inflasi. Sehingga harga nominal yang diperoleh secara langsung dapat menjadi harga riil.

III. HASIL MODEL INVESTASI REGIONAL

III.1. Validasi Model

Untuk mengetahui apakah model cukup valid untuk membuat suatu simulasi dan peramalan, maka perlu dilakukan suatu uji validasi model, dengan tujuan untuk menganalisis sejauhmana model tersebut dapat mewakili fenomena investasi regional. Kriteria statistik digunakan adalah *Root Means Percent Square Error (RMSPE)* yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai peubah endogen hasil pendugaan menyimpang dari alur nilai-nilai aktualnya dalam ukuran relatif (persen), atau seberapa dekat nilai dugaan itu mengikuti perkembangan nilai aktualnya, sedangkan *Theil's Inequality Coefficient (U)*, yang bermanfaat untuk mengetahui kemampuan model untuk melakukan simulasi dan analisis kebijakan. Pada dasarnya makin kecil nilai RMSPE dan U-Theil's, maka pendugaan model semakin baik (Pindyck and Rubinfeld, 1991).

Hasil validasi model menunjukkan bahwa nilai RMSPE seluruh persamaan perilaku nilai RMPSE dibawah 10%, yang menunjukkan bahwa persamaan perilaku yang hanya menyimpang 10 persen dari nilai aktualnya. Dengan kata lain bahwa model ini dapat dijadikan sebagai model peramalan. Sedangkan dilihat dari nilai *Theil's Inequality Coefficient (U)*, model ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah model untuk alternatif simulasi kebijakan, karena nilai U-Theil seluruhnya berada di bawah 0.2. Hanya terdapat 2 persamaan perilaku yang nilai U-Theil berada diantara 0.37 – 0.47, yaitu persamaan perilaku Persamaan PDRB provinsi Bangka Belitung, persamaan dan Persamaan Pengangguran provinsi Kalimantan Barat. Dengan kata lain bahwa, secara keseluruhan model ini dapat digunakan untuk melakukan peramalan perilaku dan simulasi alternatif kebijakan.

III.2. Hasil Prediksi (Baseline)

Hasil analisis model investasi regional memberikan informasi kondisi keterkaitan peubah-peubah produk domestik regional bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, upah, permintaan tenaga kerja, dan angkatan kerja.

Tabel 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Berdasarkan Provinsi, Tahun, 2010-2014 (%)

Code	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
11	Aceh	6.05	3.49	5.52	6.11	5.20	5.39
12	Sumatera Utara	6.33	4.55	4.78	5.06	5.21	4.99
13	Sumatera Barat	5.37	5.59	5.81	6.10	6.24	6.02
14	Riau	5.90	5.21	5.51	5.86	6.07	5.71
15	Jambi	4.66	4.86	4.06	4.33	4.46	4.47
16	Sumatera Selatan	6.13	5.40	5.67	5.99	6.17	5.87
17	Bengkulu	5.17	4.39	4.61	4.89	5.03	4.82
18	Lampung	5.08	4.30	4.53	4.82	4.96	4.74
19	Kep. Bangka Belitung	5.12	4.28	4.45	4.69	5.79	4.87
21	Kep. Riau	6.05	6.36	6.66	6.35	6.38	6.56
31	DKI Jakarta	6.78	6.98	7.20	6.98	6.61	7.11
32	Jawa Barat	6.17	5.40	5.64	5.94	6.09	6.05
33	Jawa Tengah	5.36	4.59	4.83	5.13	5.29	5.04
34	DI Yogyakarta	4.43	4.66	4.90	5.19	5.34	5.50
35	Jawa Timur	5.51	4.73	4.96	5.25	5.40	5.17
36	Banten	5.58	4.80	5.03	5.31	5.46	5.24
51	Bali	4.77	4.89	5.36	5.14	5.27	5.08
52	Nusa Tenggara Barat	4.07	4.31	3.55	3.85	6.01	4.36
53	Nusa Tenggara Timur	5.31	4.55	4.79	5.09	5.25	5.00
61	Kalimantan Barat	5.02	4.27	4.53	4.85	5.02	4.74
62	Kalimantan Tengah	5.62	4.83	5.06	5.35	5.49	5.27
63	Kalimantan Selatan	4.10	4.34	3.58	3.88	5.03	4.19
64	Kalimantan Timur	5.05	4.37	4.68	5.04	5.26	4.88
71	Sulawesi Utara	4.51	3.78	4.06	4.38	4.57	4.26
72	Sulawesi Tengah	6.08	5.83	6.00	6.24	6.34	6.22
73	Sulawesi Selatan	5.03	4.20	4.38	5.62	6.73	5.19
74	Sulawesi Tenggara	4.44	3.65	3.87	4.15	4.29	4.08
75	Gorontalo	5.33	4.47	4.63	4.85	4.94	4.84
76	Sulawesi Barat	4.08	3.22	4.60	5.23	6.69	4.76

Code	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
81	Maluku	4.97	4.25	4.52	4.85	5.04	4.73
82	Maluku Utara	5.03	4.30	4.57	4.90	5.08	4.78
91	Papua Barat	4.24	5.29	6.33	4.30	6.10	5.25
94	Papua	5.29	6.34	5.38	5.35	6.15	5.70
Nasional		5.45	4.74	4.97	5.18	5.54	5.18

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010.

Hasil prediksi pada peubah-peubah tersebut, baik prediksi tanpa ada perubahan pada peubah-peubah penjelasnya (baseline/simulasi dasar) maupun prediksi dengan adanya perubahan pada peubah-peubah penjelasnya (skenario perubahan). Nilai pertumbuhan produk domestik regional bruto Tahun 2010-2014 ditampilkan pada Tabel 5.1.

Hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2010 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi NAD mencapai 6.05 persen, pada tahun 2010 dan rata-rata dari tahun 2010-2014 perekonomian NAD relatif stabil yang ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5.39 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada provinsi Sulawesi Barat (4.08 persen) dan yang tertinggi adalah terdapat di pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat. Secara nasional terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata pada tahun 2010 adalah 5.45 dan pertumbuhan tahun 2010-2014 rata-rata mencapai 5.18 persen.

Tabel 3.2. Proyeksi Kemiskinan Berdasarkan Provinsi, Tahun 2010-2014 (%)

Code	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
11	Aceh	20.28	19.01	17.75	15.08	14.27	17.28
12	Sumatera Utara	10.29	9.75	9.21	8.24	7.01	8.90
13	Sumatera Barat	7.49	7.02	6.55	6.33	4.48	6.37
14	Riau	8.31	7.27	6.23	5.52	5.40	6.54
15	Jambi	7.39	6.63	5.87	5.73	4.25	5.97
16	Sumatera Selatan	14.69	13.79	12.89	10.95	11.14	12.69
17	Bengkulu	16.29	15.32	14.35	12.10	11.97	14.01
18	Lampung	18.07	16.82	15.57	14.05	13.62	15.62
19	Kep. Bangka Belitung	6.19	5.88	5.56	4.75	3.62	5.20
21	Kep. Riau	7.40	7.03	6.67	5.76	4.34	6.24
31	DKI Jakarta	2.72	2.59	2.46	2.05	0.54	2.07
32	Jawa Barat	9.02	8.52	8.02	6.92	4.14	7.32
33	Jawa Tengah	14.63	13.79	12.95	11.27	11.48	12.82
34	DI Yogyakarta	15.20	14.24	13.28	11.25	11.32	13.06
35	Jawa Timur	14.43	13.44	12.45	10.68	11.09	12.42
36	Banten	6.51	6.02	5.52	4.79	3.11	5.19
51	Bali	4.07	3.96	3.85	3.02	2.26	3.43
52	Nusa Tenggara Barat	21.18	20.11	19.05	17.45	15.41	18.64
53	Nusa Tenggara Timur	22.38	20.48	18.58	15.73	16.91	18.82
61	Kalimantan Barat	7.99	7.45	6.91	5.62	4.63	6.52
62	Kalimantan Tengah	6.78	6.39	6.01	5.21	3.59	5.59
63	Kalimantan Selatan	3.93	3.90	3.87	3.75	1.01	3.29
64	Kalimantan Timur	5.70	5.37	5.05	4.45	2.02	4.52
71	Sulawesi Utara	9.02	8.45	7.89	6.87	3.04	7.05
72	Sulawesi Tengah	17.13	16.06	14.99	12.62	12.03	14.56
73	Sulawesi Selatan	11.08	10.30	9.52	8.73	6.04	9.13
74	Sulawesi Tenggara	17.72	16.74	15.75	13.35	14.08	15.53
75	Gorontalo	24.06	21.75	19.45	15.50	19.03	19.96
76	Sulawesi Barat	14.00	13.62	13.25	11.12	10.01	12.40
81	Maluku	26.90	25.71	24.52	20.51	22.00	23.93

Code	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
82	Maluku Utara	9.26	8.73	8.20	7.25	5.20	7.73
91	Papua Barat	34.59	31.58	28.58	23.65	19.36	27.55
94	Papua	36.95	33.59	30.23	28.78	22.26	30.36
Nasional		13.68	12.77	11.85	10.27	9.11	11.54

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010

Membbaiknya kinerja ekonomi di masing-masing provinsi diikuti juga dengan penurunan jumlah tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah. Tingkat kemiskinan terbesar terlihat di wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Secara keseluruhan terlihat bahwa tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2010 mencapai 13.68 persen, dan mengalami kecenderungan yang menurun hingga mencapai 9.11 persen pada tahun 2014.

Tingkat pengangguran tertinggi terletak di provinsi Banten dan Jawa Barat. Secara keseluruhan terlihat bahwa tingkat pengangguran tertinggi terletak di pulau Jawa. Dilihat secara nasional tingkat pengangguran pada tahun 2010 mencapai 9.43 persen dan terlihat memiliki kecenderungan yang menurun hingga pada tahun 2010 mencapai 7.86 persen (Tabel 5.3).

Tabel 3.3. Proyeksi Tingkat Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Provinsi, Tahun 2010-2014

Code	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
11	Aceh	10.75	9.47	8.30	8.10	7.71	8.87
12	Sumatera Utara	13.95	12.32	12.40	11.60	11.45	12.34
13	Sumatera Barat	11.85	10.41	10.30	9.60	9.56	10.34
14	Riau	8.95	7.85	8.20	7.25	7.62	7.97
15	Jambi	7.25	6.26	5.50	5.10	5.14	5.85
16	Sumatera Selatan	11.25	9.98	9.60	9.00	8.88	9.74
17	Bengkulu	5.45	4.67	3.90	3.50	3.69	4.24
18	Lampung	8.55	7.45	7.20	6.55	6.72	7.29
19	Kep. Bangka Belitung	6.65	5.73	4.70	4.45	4.41	5.19
21	Kep. Riau	6.25	5.39	4.40	4.10	3.55	4.74
31	DKI Jakarta	13.95	12.31	11.20	11.00	10.37	11.77
32	Jawa Barat	14.05	12.42	11.80	11.35	10.86	12.10
33	Jawa Tengah	10.35	9.16	8.00	7.80	7.42	8.55
34	DI Yogyakarta	8.65	7.55	6.70	6.35	6.33	7.12
35	Jawa Timur	9.75	8.50	8.30	7.65	7.74	8.39
36	Banten	19.55	17.48	18.50	17.20	16.91	17.93
51	Bali	7.45	6.54	5.70	5.30	5.40	6.08
52	Nusa Tenggara Barat	6.45	5.62	4.40	4.25	4.25	4.99
53	Nusa Tenggara Timur	4.45	3.78	3.40	2.80	3.23	3.53
61	Kalimantan Barat	8.75	7.75	7.40	6.80	6.33	7.41
62	Kalimantan Tengah	6.85	5.92	5.30	4.85	4.25	5.43
63	Kalimantan Selatan	8.15	7.19	6.30	5.95	5.91	6.70
64	Kalimantan Timur	11.65	10.25	8.10	8.40	7.24	9.13
71	Sulawesi Utara	13.55	11.92	11.00	10.70	10.20	11.47
72	Sulawesi Tengah	9.65	8.42	8.50	7.70	7.12	8.28
73	Sulawesi Selatan	10.15	8.86	7.20	7.25	6.05	7.90
74	Sulawesi Tenggara	6.65	5.75	4.30	4.25	4.10	5.01
75	Gorontalo	7.55	6.62	5.20	5.15	4.95	5.89
76	Sulawesi Barat	7.05	6.13	5.00	4.80	4.78	5.55
81	Maluku	11.05	9.74	7.80	8.00	7.66	8.85
82	Maluku Utara	7.65	6.75	5.30	5.25	5.06	6.00
91	Papua Barat	10.45	9.20	7.60	7.65	7.18	8.42
94	Papua	6.65	5.78	8.50	6.35	4.70	6.40
Nasional		9.43	8.28	7.58	7.15	6.87	7.86

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010

Dalam kajian ini, tingkat inflasi diwakili oleh indeks harga konsumen (*consumer prices index, CPI*). Pada tahun 2010-2014 seluruh provinsi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.4. Proyeksi Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen Berdasarkan Provinsi, Tahun 2010-2014 (%)

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh	114.75	118.77	124.11	129.70	135.53
Sumatera Utara	121.55	127.63	133.37	139.37	145.64
Sumatera Barat	128.65	137.01	143.17	149.62	156.35
Riau	133.55	143.56	150.02	156.77	163.83
Jambi	110.38	113.14	118.23	123.55	129.11
Sumatera Selatan	138.59	150.37	157.13	164.20	171.59
Bengkulu	161.15	181.57	189.74	198.28	207.20
Lampung	114.75	118.77	124.11	129.70	135.53
Kep. Bangka Belitung	125.30	132.56	138.53	144.76	151.28
Kep. Riau	133.55	143.56	150.02	156.77	163.83
DKI Jakarta	123.88	130.70	136.58	142.72	149.15
Jawa Barat	119.25	124.62	130.23	136.09	142.21
Jawa Tengah	118.57	123.73	129.29	135.11	141.19
DI Yogyakarta	118.80	124.02	129.60	135.44	141.53
Jawa Timur	116.47	120.99	126.44	132.13	138.07
Banten	103.03	103.81	108.48	113.36	118.46
Bali	119.46	124.89	130.51	136.38	142.52
Nusa Tenggara Barat	200.53	238.64	249.37	260.60	272.32
Nusa Tenggara Timur	146.41	161.05	168.30	175.87	183.79
Kalimantan Barat	119.53	124.98	130.60	136.48	142.62
Kalimantan Tengah	140.90	153.51	160.42	167.64	175.18
Kalimantan Selatan	120.63	126.42	132.11	138.05	144.26
Kalimantan Timur	118.11	123.13	128.68	134.47	140.52
Sulawesi Utara	143.77	157.42	164.51	171.91	179.65
Sulawesi Tengah	128.65	137.01	143.17	149.62	156.35
Sulawesi Selatan	114.02	117.82	123.13	128.67	134.46
Sulawesi Tenggara	154.56	172.34	180.09	188.19	196.66
Gorontalo	124.12	131.01	136.90	143.06	149.50
Sulawesi Barat	124.12	131.01	136.90	143.06	149.50
Maluku	143.77	157.42	164.51	171.91	179.65
Maluku Utara	147.22	161.20	168.46	176.04	183.96
Papua Barat	140.12	152.46	159.32	166.49	173.98
Papua	140.12	152.46	159.32	166.49	173.98

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010

Untuk setiap tahun, pertumbuhan indeks harga konsumen bervariasi antara provinsi. Secara nasional terlihat bahwa pertumbuhan indeks harga konsumen tahun 2008-2010 mengalami penurunan sebesar 2.48%, 1.31% dan 0.46% secara berturut-turut. Sedangkan pada tahun 2011-2014 pertumbuhan indeks harga konsumen mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan indeks harga konsumen turun sebesar 0.25 persen (Tabel 5.4).

III.3. Skenario Kebijakan

Simulasi dilakukan pada peubah-peubah yang merupakan instrumen kebijakan yang meliputi investasi swasta, investasi pemerintah, tingkat UMR dan belanja pelayanan publik. Adapun skenario simulasi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan investasi swasta sebesar 10 persen di kepulauan Jawa-Bali dan Sumatera, dan peningkatan 5 persen di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, NT, Maluku dan Papua.
2. Peningkatan investasi pemerintah sebesar 10 persen di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, NT, Maluku dan Papua, dan peningkatan 5 persen di kepulauan Jawa-Bali dan Sumatera.

Skenario-skenario tersebut memberikan dampak pada perubahan peubah-peubah endogen yang berbeda-beda. Skenario kebijakan dari peningkatan investasi swasta dan pemerintah terhadap kinerja ekonomi wilayah akan diuraikan pada bagian berikut ini.

III.3.1. Investasi Swasta

Peningkatan investasi swasta sebesar 10 persen di kepulauan Jawa-Bali dan Sumatera, dan peningkatan 5 persen di kepulauan Kalimantan, Sulawesi, NT, Maluku dan Papua terhadap kinerja makroekonomi wilayah ditampilkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Peningkatan PDRB Sektorial Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9
Aceh	5.48	6.79	7.78	0.73	0.90	4.47	7.01	8.45	3.70
Sumatera Utara	5.23	5.34	5.73	3.31	1.66	6.90	1.37	6.92	5.20
Sumatera Barat	6.15	6.43	7.21	0.93	0.09	5.05	6.18	2.57	6.31
Riau	6.35	7.90	3.48	4.70	4.76	1.43	2.69	6.30	7.78
Jambi	4.05	4.32	3.75	7.13	8.10	1.44	5.53	3.78	2.93
Sumatera Selatan	4.11	5.66	6.34	4.53	8.03	5.64	6.54	1.68	0.88
Bengkulu	2.36	4.01	0.14	7.69	3.20	7.85	7.88	3.25	5.76
Lampung	4.24	6.31	5.94	5.15	5.85	4.44	4.88	2.38	6.73
Kep. Bangka Belitung	5.23	7.21	6.32	2.55	3.92	3.69	6.69	4.66	5.51
Kep. Riau	3.45	5.75	4.47	4.43	3.00	5.66	0.29	3.27	0.74
DKI Jakarta	1.25	0.52	3.04	6.54	2.30	3.39	4.85	6.82	3.73
Jawa Barat	6.56	2.39	4.69	0.56	8.11	6.92	5.56	2.77	2.03
Jawa Tengah	3.35	4.97	1.30	8.35	7.89	6.81	6.53	8.40	4.11
DI Yogyakarta	4.32	2.75	7.69	0.91	7.45	8.18	1.80	2.60	2.46
Jawa Timur	6.69	6.34	0.97	0.12	6.59	5.68	0.07	5.54	2.19
Banten	1.02	1.30	4.63	2.83	5.44	8.02	2.76	0.50	8.11
Bali	4.90	4.62	6.20	6.71	1.74	2.37	7.00	5.56	3.80
Nusa Tenggara Barat	5.02	5.90	7.80	6.31	7.01	5.03	3.76	2.21	5.80
Nusa Tenggara Timur	5.64	5.89	5.68	3.36	5.29	5.40	2.03	7.38	8.48
Kalimantan Barat	5.93	7.48	8.39	4.64	3.68	8.01	7.20	0.47	7.11
Kalimantan Tengah	5.32	0.97	3.04	5.51	2.62	0.72	4.51	0.16	8.31
Kalimantan Selatan	4.35	1.07	5.93	0.44	4.99	5.30	6.15	0.48	6.44
Kalimantan Timur	4.56	6.74	6.99	4.32	3.29	5.58	7.72	1.15	6.83
Sulawesi Utara	3.69	2.11	1.32	5.61	7.48	0.34	6.25	6.37	4.91
Sulawesi Tengah	5.45	5.79	8.22	7.94	5.62	1.88	3.11	1.03	4.40
Sulawesi Selatan	5.39	4.80	2.41	4.46	8.32	6.46	6.28	7.23	3.76
Sulawesi Tenggara	2.99	5.48	1.83	5.53	8.02	0.10	5.44	5.38	3.23
Gorontalo	4.75	0.33	1.37	8.08	3.94	0.78	7.58	0.92	3.87
Sulawesi Barat	5.43	6.98	1.27	6.81	3.31	2.16	2.73	0.09	0.54
Maluku	3.22	0.58	4.73	0.82	2.70	3.21	3.75	4.45	0.98
Maluku Utara	2.85	3.61	3.10	1.03	1.83	7.46	3.31	7.04	2.07
Papua Barat	1.68	0.19	8.12	7.05	1.66	3.25	4.08	1.42	5.32
Papua	4.37	4.48	4.80	1.09	3.57	3.61	5.87	5.34	0.56
Nasional	4.41	4.39	4.69	4.25	4.62	4.46	4.77	3.84	4.38

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010

Keterangan:

Y1= Sektor Pertanian	Y6= Sektor Perdagangan
Y2= Sektor Pertambangan	Y7= Sektor Angkutan

Y3= Sektor Industri	Y8= Sektor Keuangan
Y4= Sektor Listrik, gas dan air	Y9= Sektor Jasa-Jasa
Y5= Sektor Bangunan	

Pada Table 5.5 terlihat bahwa kenaikan investasi swasta memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah yang digambarkan dari kenaikan PDRB sektoral provinsi. Pertumbuhan PDRB sektoral di masing-masing provinsi relative bervariasi untuk setiap sektor. Pertumbuhan PDRB sektoral terbesar terdapat di sektor transportasi darat, industry pengolahan dan sektor pertanian, dan yang terendah adalah sektor sektor keuangan. Kenaikan PDRB Sektoral akan mendorong pada permintaan tenaga kerja sektoral, dimana permintaan tenaga kerja sektoral untuk setiap provinsi mengalami peningkatan meskipun relatif kecil yaitu rata-rata kurang dari 1 persen (Tabel 3.6)

Tabel 3.6. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektoral, Periode 2009-2014 (%)

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Rerata
Aceh	0.18	0.90	1.24	0.71	0.42	0.64	0.61	0.84	0.55	0.68
Sumatera Utara	0.14	0.69	0.68	1.04	0.15	0.50	0.77	0.41	0.15	0.50
Sumatera Barat	0.18	0.40	1.09	1.11	0.10	0.58	1.00	0.51	0.85	0.65
Riau	0.18	1.00	0.44	0.31	0.89	1.05	1.08	0.50	0.61	0.67
Jambi	0.15	0.88	0.81	0.58	0.05	1.19	0.38	0.16	0.92	0.57
Sumatera Selatan	0.09	0.09	0.41	0.55	0.22	0.13	1.16	0.29	0.14	0.34
Bengkulu	0.17	0.71	0.23	0.91	0.01	1.04	1.00	0.47	1.18	0.64
Lampung	0.19	0.67	0.95	0.86	0.25	0.74	1.21	1.23	0.16	0.69
Kep. Bangka Belitung	0.11	0.33	0.49	0.03	1.17	0.34	0.95	0.13	0.05	0.40
Kep. Riau	0.16	0.82	0.57	0.65	0.57	0.07	0.92	0.76	0.63	0.57
DKI Jakarta	0.18	1.07	0.24	1.12	1.13	0.56	0.33	1.12	0.21	0.66
Jawa Barat	0.18	0.99	0.34	0.68	0.33	1.02	0.11	1.18	1.09	0.66
Jawa Tengah	0.15	0.08	0.26	1.06	0.35	0.54	1.12	0.40	1.04	0.56
DI Yogyakarta	0.16	1.03	0.10	0.51	0.96	0.37	0.48	1.05	0.55	0.58
Jawa Timur	0.13	0.89	0.73	0.08	0.88	0.53	0.22	0.39	0.47	0.48
Banten	0.20	1.24	0.75	1.09	0.99	0.80	0.18	0.60	0.90	0.75
Bali	0.14	0.84	0.82	0.46	0.23	0.18	0.32	0.48	1.10	0.51
Nusa Tenggara Barat	0.18	0.61	0.69	0.90	0.10	0.72	1.00	0.52	1.20	0.66
Nusa Tenggara Timur	0.17	0.58	0.35	0.64	0.38	0.42	1.06	0.80	1.19	0.62
Kalimantan Barat	0.17	1.24	0.16	0.63	0.58	0.46	0.55	0.98	0.96	0.64
Kalimantan Tengah	0.20	0.21	1.15	1.05	0.66	0.49	0.95	0.68	1.09	0.72
Kalimantan Selatan	0.18	0.92	0.33	0.88	0.78	0.94	0.49	0.56	0.71	0.64
Kalimantan Timur	0.18	1.09	1.24	0.14	0.67	0.61	0.52	1.04	0.28	0.64
Sulawesi Utara	0.13	0.44	0.30	0.84	0.81	0.02	0.94	0.00	0.85	0.48
Sulawesi Tengah	0.14	1.24	0.03	0.70	0.49	0.32	0.77	0.14	0.66	0.50
Sulawesi Selatan	0.14	0.93	0.69	0.44	0.71	0.44	0.02	0.06	1.20	0.51
Sulawesi Tenggara	0.17	0.78	0.12	0.31	0.97	0.66	0.49	1.06	1.19	0.64
Gorontalo	0.15	1.13	0.66	0.71	1.15	0.23	0.14	0.83	0.07	0.56
Sulawesi Barat	0.13	0.89	0.50	0.03	0.25	0.91	0.27	1.13	0.11	0.47
Maluku	0.19	0.30	0.76	0.66	0.93	0.70	1.15	1.05	0.63	0.71
Maluku Utara	0.18	0.58	0.81	1.13	1.12	0.67	0.11	0.46	0.76	0.65
Papua Barat	0.17	0.30	1.20	0.20	0.49	0.80	0.95	0.63	0.95	0.63
Papua	0.13	0.21	0.11	0.98	0.43	0.15	1.12	0.29	0.75	0.46

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010.

Selain mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja, dampak dari peningkatan investasi swasta tersebut akan mendorong pada peningkatan Upah tenaga kerja sektoral (Tabel 5.7)

Tabel 3.7. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Upaha Tenaga Kerja Sektoral, Periode 2009-2014 (%)

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Rerata
Aceh	1.63	2.69	3.54	3.00	1.01	1.73	0.13	2.07	0.99	1.87
Sumatera Utara	1.60	2.80	1.29	3.46	0.95	1.24	1.61	0.77	2.75	1.83
Sumatera Barat	1.57	1.00	1.85	0.69	2.36	2.41	2.03	3.06	1.19	1.80
Riau	2.36	2.93	1.86	1.60	3.95	3.77	3.56	3.06	1.22	2.70
Jambi	2.20	1.74	2.87	2.20	3.15	2.10	2.02	3.37	2.98	2.51
Sumatera Selatan	1.31	2.74	1.13	2.19	1.04	0.04	1.26	0.88	2.88	1.50
Bengkulu	1.99	2.79	2.51	1.96	2.70	3.89	0.92	0.08	3.67	2.28
Lampung	1.89	3.72	3.43	2.66	0.27	0.57	3.77	2.63	0.54	2.16
Kep. Bangka Belitung	1.80	2.06	2.72	3.60	1.77	1.37	1.39	0.79	3.01	2.06
Kep. Riau	1.97	2.89	0.46	1.58	3.56	0.61	3.63	3.47	2.15	2.26
DKI Jakarta	1.79	3.96	1.26	2.67	3.23	1.69	1.09	2.23	0.54	2.05
Jawa Barat	1.83	3.82	1.69	1.87	1.77	3.63	0.02	1.58	2.61	2.09
Jawa Tengah	2.43	3.19	2.58	2.07	3.96	2.64	2.16	3.86	2.11	2.78
DI Yogyakarta	1.77	0.61	2.67	1.31	1.77	3.31	2.83	0.51	3.49	2.03
Jawa Timur	1.60	3.23	2.49	1.50	1.11	0.21	3.50	2.80	0.02	1.83
Banten	1.07	1.26	0.83	0.27	1.65	0.11	0.16	3.20	2.44	1.22
Bali	1.61	0.49	2.81	3.78	1.07	3.75	2.62	0.31	0.11	1.84
Nusa Tenggara Barat	2.32	3.56	1.10	2.78	3.85	1.74	2.81	2.62	3.10	2.65
Nusa Tenggara Timur	1.77	1.56	1.85	2.89	1.76	2.89	2.42	0.55	2.52	2.02
Kalimantan Barat	2.66	3.95	3.97	2.07	2.71	3.36	1.70	3.57	3.40	3.05
Kalimantan Tengah	1.02	1.39	1.26	2.78	0.18	0.98	1.45	1.28	0.15	1.16
Kalimantan Selatan	1.82	0.95	2.50	2.32	0.08	3.10	2.94	3.64	1.38	2.08
Kalimantan Timur	1.77	2.73	1.99	1.04	3.18	2.02	0.40	2.32	2.79	2.03
Sulawesi Utara	1.90	1.13	1.71	1.38	2.88	2.52	1.79	2.33	3.98	2.18
Sulawesi Tengah	1.64	1.29	0.25	2.25	1.52	2.10	3.12	3.42	1.33	1.88
Sulawesi Selatan	1.24	1.94	1.22	1.42	0.34	0.44	2.33	2.62	1.26	1.42
Sulawesi Tenggara	1.42	3.23	0.07	1.02	2.02	2.37	0.69	1.26	2.58	1.63
Gorontalo	1.76	2.90	2.78	1.96	1.96	1.06	1.53	2.62	1.52	2.01
Sulawesi Barat	1.86	3.84	3.32	0.28	2.87	1.89	0.14	2.26	2.69	2.13
Maluku	2.61	2.96	3.60	3.33	3.06	3.33	2.61	2.73	2.68	2.99
Maluku Utara	1.81	0.14	0.41	2.97	2.48	0.35	2.84	3.68	3.92	2.07
Papua Barat	1.41	2.52	2.68	1.05	0.64	0.37	2.01	0.05	3.77	1.61
Papua	1.79	1.46	3.89	3.14	0.74	2.90	0.92	2.01	1.62	2.05

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010

Secara keseluruhan dapat disebutkan bahwa kenaikan PDRB sektoral tersebut akan mendorong permintaan tenaga kerja namun demikian permintaan tenaga kerja kenaikannya relatif kecil, dampak dari kenaikan tenaga kerja direspon oleh kenaikan upah oleh para kerja. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dari kenaikan PDRB secara langsung akan berdampak pada penurunan pada tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

Tabel 3.8. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Tingkat Kemiskinan, Kemiskinan dan CPI, Periode 2010-2014 (%)

Provinsi	PDRB	Unem	Pov	CPI
Aceh	5.81	-1.37	-3.53	0.33
Sumatera Utara	5.90	-1.19	-2.75	0.67
Sumatera Barat	2.10	-2.24	-0.04	0.76

Provinsi	PDRB	Unem	Pov	CPI
Riau	0.52	-3.17	0.57	1.04
Jambi	0.06	-3.77	0.03	1.26
Sumatera Selatan	5.85	-1.28	-2.50	1.04
Bengkulu	1.50	-2.18	-2.32	0.07
Lampung	0.87	-3.12	-0.81	0.58
Kep. Bangka Belitung	1.57	-0.35	-1.80	0.43
Kep. Riau	2.14	-1.95	-3.68	1.24
DKI Jakarta	5.27	-0.28	-2.50	0.27
Jawa Barat	4.17	-3.48	-2.42	0.42
Jawa Tengah	1.95	-3.39	-3.47	0.74
DI Yogyakarta	0.01	-2.45	1.74	2.93
Jawa Timur	2.31	-2.41	-2.06	0.75
Banten	0.08	-3.64	1.45	1.16
Bali	1.75	-4.84	-3.62	0.66
Nusa Tenggara Barat	5.16	-0.40	-2.27	0.34
Nusa Tenggara Timur	1.95	-1.09	-1.55	0.26
Kalimantan Barat	3.25	-2.76	-0.66	0.58
Kalimantan Tengah	5.31	-1.58	-0.72	0.04
Kalimantan Selatan	4.85	-4.37	-2.77	0.61
Kalimantan Timur	2.26	-2.54	-2.99	0.72
Sulawesi Utara	1.81	-4.03	-1.13	0.58
Sulawesi Tengah	2.81	-3.14	-2.00	1.20
Sulawesi Selatan	3.04	-3.93	-2.86	1.13
Sulawesi Tenggara	4.96	-4.75	-0.72	0.46
Gorontalo	4.31	-0.41	-1.43	0.70
Sulawesi Barat	3.48	-2.79	-2.18	0.17
Maluku	4.05	-1.00	-2.20	0.84
Maluku Utara	2.42	-2.17	-0.79	0.96
Papua Barat	2.77	-3.01	1.67	4.12
Papua	2.24	-2.76	0.08	4.25
Nasional	2.93	-2.48	-1.52	0.95

Namun demikian tidak semua provinsi mengalami penurunan tingkat pengangguran. Alasan mengapa pengangguran mengalami kenaikan meskipun PDRB meningkat, yaitu karena kenaikan PDRB lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan inflasi, sehingga membuat daya beli masyarakat yang semakin menurun, dan akan mengarah kepada peningkatan tingkat kemiskinan provinsi, fenomena ini terlihat pada provinsi Riau, Jambi, DIY, Banten, Papua, dan Papua Barat (Tabel 3.8).

Tabel 3.9. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Arus Migrasi Penduduk (Migrasi Masuk) ke Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Migrasi Masuk	Dari						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		-0.691	-0.639	-0.906	-0.389	-0.389	-0.389
Jawa-Bali	-0.165		-0.097	-0.270	-0.361	-0.361	-0.361
Kallimantan	0.008	-0.067		-0.064	-0.373	-0.373	-0.373
Sulawesi	0.000	-0.008	0.001		0.002	0.002	0.002
Nusatenggara	-0.206	-0.045	0.049	-0.188		-0.188	-0.188
Maluku	-0.356	-0.077	0.060	-0.316	-0.316		-0.316
Papua	-0.139	-0.042	0.031	-0.077	-0.077	-0.077	

Dilihat berdasarkan pulau, peningkatan PDRB tersebut juga akan mendorong permintaan tenaga kerja namun demikian permintaan tenaga kerja kenaikannya relatif kecil, dampak dari kenaikan tenaga kerja direspon oleh kenaikan upah oleh para kerja, kenaikan upah tertinggi adalah pulau Kalimantan, yaitu 0.18%. Kenaikan PDRB secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan, namun demikian tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan. Alasan mengapa pengangguran mengalami kenaikan meskipun PDRB meningkat, yaitu karena kenaikan PDRB akan mendorong masuknya penduduk ke wilayah tersebut (migrasi masuk) dan diikuti oleh pola perubahan demografi penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja di wilayah tersebut yang akan menambah jumlah angkatan kerja.

Tabel 3.10. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Arus Migrasi Penduduk (Migrasi Keluar) dari Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Migrasi Keluar dari	Ke						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		-0.505	-0.348	0.005	0.021	-0.232	0.010
Jawa-Bali	-0.449		-0.125	-0.009	0.079	0.376	0.167
Kallimantan	-0.558	-0.798		-0.094	-0.181	0.072	-0.058
Sulawesi	-2.165	-0.825	-0.669		0.066	-0.233	0.467
Nusatenggara	-0.844	-0.632	0.255	-0.012		-0.180	0.316
Maluku	-0.686	-0.481	0.174	-0.003	-0.135		0.074
Papua	-0.813	-0.577	0.097	-0.001	-0.096	-0.104	

Perubahan pola demografi penduduk tersebut dan peningkatan jumlah angkatan kerja baik masuk maupun yang keluar dari wilayah tersebut, tidak seluruhnya mampu diserap lapangan kerja. Peningkatan investasi swasta juga berdampak terhadap arus perdagangan (ekspor dan impor) antar wilayah dengan arah dan besaran yang berbeda. Pada Tabel 5.11. terlihat bahwa ekspor wilayah Sumatera mengalami peningkatan ke setiap daerah tujuan ekspor, begitu juga halnya yang terjadi terhadap daerah wilayah Nusatenggara. Sedangkan ekspor pulau Jawa-Bali ke wilayah Sumatera dan Kalimantan mengalami penurunan, sebaliknya ke daerah tujuan wilayah timur umumnya mengalami peningkatan, wilayah Sulawesi juga mengalami peningkatan ekspor ke daerah tujuannya, kecuali ke daerah tujuan Jawa-Bali mengalami penurunan.

Tabel 3.11. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Arus Perdagangan (Export) Antar Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Export	Ke						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		0.624	0.100	0.010	0.362	0.333	0.441
Jawa-Bali	-0.240		-0.065	0.025	0.107	0.414	0.164
Kallimantan	-0.243	-0.045		0.005	0.084	0.487	0.079
Sulawesi	0.005	-0.154	0.116		0.059	0.300	0.065
Nusatenggara	1.766	2.503	0.749	0.007		1.256	0.063
Maluku	0.434	-0.384	-0.078	-0.017	-0.036		0.034
Papua	0.046	0.178	-0.068	-0.016	-0.001	0.029	

Ekspor wilayah Maluku ke Sumatera dan Papua terlihat juga mengalami peningkatan, sebaliknya ke daerah Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusatenggara ekspor wilayah Maluku mengalami penurunan. Sementara ekspor wilayah Papua ke kawasan barat umum meningkat sebaliknya mengalami penurunan ekspor untuk daerah tujuan kawasan timur (Tabel 3.11).

Tabel 3.12. Dampak Peningkatan Investasi Swasta, terhadap Arus Perdagangan (Import) Antar Wilayah, Periode 2009-2014 (%)

Impor	Dari						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		0.018	-0.092	0.213	0.811	1.156	-0.725
Jawa-Bali	-0.340		-0.310	-0.323	0.720	0.720	0.720
Kallimantan	-0.078	-0.130		-0.011	-0.261	-0.261	-0.261
Sulawesi	0.002	-0.006	-0.004		-0.003	-0.003	-0.003
Nusatenggara	-0.245	-0.279	-0.183	-0.328		-0.281	-0.278
Maluku	0.057	-0.009	0.147	0.021	0.008		0.001
Papua	0.225	0.160	0.186	0.171	0.187	0.187	

Tabel 3.12 terlihat bahwa impor wilayah Sumatera dari wilayah asal Kalimantan dan Papua mengalami penurunan, sebaliknya daerah asal Jawa-Bali, Sulawesi, Nusatenggara dan Maluku mengalami kenaikan, impor Jawa-Bali dari wilayah asal Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mengalami penurunan, namun dari daerah asal NT, Maluku dan Papua mengalami peningkatan. Impor wilayah Kalimantan dari seluruh asal mengalami penurunan, hal yang sama juga berlaku untuk wilayah Nusatenggara dan Sulawesi, kecuali untuk impor Sulawesi dari daerah asal Sumatera. Sementara impor wilayah Papua dari daerah asal semuanya mengalami peningkatan hal yang sama juga terlihat untuk wilayah Maluku, kecuali dari daerah asal Jawa-Bali mengalami penurunan.

III.3.2. Investasi Pemerintah

Dampak peningkatan investasi pemerintah sebesar 5 persen di pulau Sumatera dan Jawa-Bali, dan peningkatan 10 persen di pulau wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terhadap kinerja PDRB sektoral wilayah ditampilkan pada Tabel 5.13.

Tabel 3.13. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Pertumbuhan PDRB Sektoral Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Rerata
Aceh	1.26	1.86	2.95	2.32	7.36	5.28	1.60	0.48	2.79	2.88
Sumatera Utara	1.02	2.78	2.73	5.99	5.79	0.98	7.11	6.99	2.10	3.94
Sumatera Barat	1.98	2.05	0.13	0.47	5.02	2.73	6.67	6.25	0.53	2.87
Riau	2.23	5.19	5.81	6.73	2.67	1.76	2.48	1.95	2.91	3.53
Jambi	2.60	2.87	3.43	2.37	6.99	5.78	6.95	5.89	2.89	4.42
Sumatera Selatan	1.65	1.77	2.86	4.98	4.53	7.19	3.33	1.71	0.27	3.14
Bengkulu	1.65	4.41	5.50	4.55	4.78	5.44	4.54	0.10	3.01	3.77
Lampung	2.88	3.10	2.75	3.94	1.70	2.02	1.13	6.06	6.19	3.31
Kep. Bangka Belitung	1.90	2.34	6.19	1.56	6.33	3.92	0.68	4.88	0.98	3.20
Kep. Riau	2.35	2.13	2.76	5.95	5.59	6.80	3.78	5.27	1.63	4.03
DKI Jakarta	0.23	4.60	5.75	3.48	5.25	4.08	3.95	7.24	2.72	4.14
Jawa Barat	3.25	5.44	3.64	4.30	1.84	3.40	0.32	5.48	6.67	3.81
Jawa Tengah	4.79	4.99	4.26	0.54	7.19	4.84	5.95	3.60	5.48	4.63
DI Yogyakarta	3.83	4.60	0.63	7.47	4.90	4.76	1.19	1.77	7.25	4.04
Jawa Timur	3.67	3.85	1.43	1.10	4.33	4.35	4.04	6.57	3.16	3.61
Banten	1.00	1.14	7.28	4.86	6.49	3.49	6.71	2.17	5.02	4.24
Bali	3.85	4.18	1.65	1.30	2.87	1.71	6.47	1.19	4.62	3.09
Nusa Tenggara Barat	4.94	4.17	6.37	6.40	5.83	0.33	2.07	2.61	0.20	3.66
Nusa Tenggara Timur	4.94	5.32	4.60	6.15	4.58	5.13	5.54	5.23	2.42	4.88
Kalimantan Barat	4.98	6.86	3.19	0.79	2.44	6.46	2.60	4.33	5.14	4.09
Kalimantan Tengah	1.68	2.45	4.75	2.51	3.81	2.34	4.66	7.39	1.39	3.44
Kalimantan Selatan	3.24	3.61	1.67	3.85	1.98	3.81	4.48	2.97	1.51	3.01
Kalimantan Timur	5.73	7.05	3.55	0.82	4.32	3.77	6.87	5.94	6.80	4.98
Sulawesi Utara	2.89	4.41	5.84	2.95	3.78	4.78	4.12	2.73	7.30	4.31
Sulawesi Tengah	3.89	6.15	2.48	2.46	5.36	3.22	2.53	2.73	4.78	3.73
Sulawesi Selatan	2.73	3.94	5.38	6.32	7.26	5.53	0.66	2.91	7.32	4.67
Sulawesi Tenggara	2.90	5.11	7.27	4.81	2.29	2.12	7.42	2.98	0.33	3.91
Gorontalo	3.12	5.35	4.02	0.79	6.31	4.38	7.17	4.73	1.33	4.13
Sulawesi Barat	4.02	5.43	4.45	1.27	1.76	1.25	2.41	3.94	6.73	3.47
Maluku	1.11	1.88	2.03	5.92	1.80	7.13	2.08	2.83	5.80	3.40
Maluku Utara	0.19	0.06	6.77	0.77	4.75	4.67	6.41	7.32	4.72	3.96
Papua Barat	2.59	3.85	3.93	5.02	1.09	2.13	7.41	5.72	1.52	3.70
Papua	2.70	2.49	2.36	0.62	5.27	0.68	5.60	0.85	1.80	2.48
Nasional	2.78	3.80	3.89	3.44	4.43	3.83	4.21	4.02	3.55	3.77

Table 3.13 menunjukkan bahwa kenaikan investasi pemerintah memberikan pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dari kenaikan PDRB sektoral provinsi, dimana kenaikan tertinggi di peroleh oleh provinsi Kalimantan

Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta, sedangkan kenaikan pertumbuhan yang paling kecil diperoleh oleh provinsi Papua, Nangro Aceh Darusalam dan Sumatera Barat. Sedangkan pertumbuhan sektoral tercil adalah sektor pertanian dan sektor Jasa.

Tabel 3.14. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Permintaan Tenaga Kerja Sektoral, Periode 2010-2014 (%)

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Rerata
Aceh	1.77	2.17	0.91	0.71	0.44	0.62	1.12	0.35	1.82	1.10
Sumatera Utara	2.07	2.00	1.56	2.77	2.03	0.95	1.32	0.09	2.25	1.67
Sumatera Barat	2.28	1.67	2.93	2.55	2.00	2.52	1.60	2.35	0.68	2.06
Riau	2.12	1.37	0.58	2.67	0.96	2.69	1.63	2.54	1.38	1.77
Jambi	2.06	2.22	1.32	0.29	1.99	1.39	1.11	2.45	2.06	1.65
Sumatera Selatan	2.04	0.92	0.06	2.23	2.00	1.97	0.78	1.81	2.72	1.61
Bengkulu	1.81	0.73	2.43	1.40	1.47	0.08	1.07	1.31	0.37	1.19
Lampung	2.18	0.75	2.10	0.78	2.55	1.44	1.78	2.51	2.77	1.87
Kep. Bangka Belitung	1.91	0.53	2.17	2.90	0.68	0.25	0.07	1.60	2.17	1.36
Kep. Riau	2.37	2.93	2.90	2.49	2.38	1.20	2.61	2.94	0.37	2.24
DKI Jakarta	2.19	2.55	0.89	2.28	2.89	0.49	2.34	0.80	2.64	1.90
Jawa Barat	2.28	0.18	2.81	2.77	1.93	2.70	2.74	0.54	2.69	2.07
Jawa Tengah	2.16	1.08	0.50	2.85	0.07	2.84	1.81	2.50	2.82	1.85
DI Yogyakarta	2.16	2.92	0.43	1.12	2.38	1.97	0.46	2.56	2.63	1.85
Jawa Timur	1.79	1.23	1.02	1.15	2.77	0.47	1.52	0.31	0.09	1.15
Banten	2.12	2.39	1.12	0.68	2.86	2.05	1.66	0.86	2.20	1.77
Bali	1.96	1.70	1.23	0.94	0.65	0.93	1.68	1.66	2.49	1.47
Nusa Tenggara Barat	2.10	1.30	1.22	2.03	2.15	2.44	1.45	1.48	1.38	1.73
Nusa Tenggara Timur	2.12	2.07	2.25	2.98	2.96	0.19	0.52	0.44	2.36	1.77
Kalimantan Barat	1.93	1.23	0.31	1.65	0.52	1.27	2.26	2.39	1.19	1.42
Kalimantan Tengah	2.10	1.76	2.01	2.62	2.83	0.14	1.30	0.05	2.76	1.73
Kalimantan Selatan	2.19	0.71	2.24	1.42	2.94	2.79	1.61	2.27	0.88	1.89
Kalimantan Timur	2.07	2.57	1.65	1.37	0.95	1.50	1.37	1.93	1.70	1.68
Sulawesi Utara	2.07	1.91	1.32	2.38	0.64	2.66	1.05	2.88	0.16	1.67
Sulawesi Tengah	1.79	0.78	0.45	0.29	1.20	0.35	2.53	0.46	2.46	1.14
Sulawesi Selatan	2.07	0.07	0.49	2.53	2.09	2.15	1.40	1.74	2.45	1.67
Sulawesi Tenggara	2.27	2.74	2.75	2.88	2.51	0.16	0.70	2.97	1.47	2.05
Gorontalo	1.85	2.01	0.58	0.67	0.14	0.81	1.02	2.40	1.83	1.26
Sulawesi Barat	1.98	0.85	2.00	2.15	1.99	1.27	1.96	0.04	1.24	1.50
Maluku	1.95	0.70	2.77	0.43	0.30	1.59	2.69	0.91	1.65	1.44
Maluku Utara	1.86	1.08	0.46	2.52	1.52	0.08	1.54	1.10	1.29	1.27
Papua Barat	1.86	2.85	1.47	0.35	2.91	1.06	0.08	0.70	0.16	1.27
Papua	2.09	1.97	2.93	0.99	0.03	1.56	1.62	2.66	1.62	1.72

Sumber: Analisis Model Investasi Regional, 2010

Peningkatan PDRB sektoral sebagai dampak dari peningkatan investasi pemerintah tersebut akan mendorong pada permintaan tenaga kerja (Table 3.14), tidak hanya itu dimana karena peningkatan tenaga kerja akan akan mendorong pada kenaikan upah sektoral (Tabel 3.15).

Tabel 3.15. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Upah Tenaga Kerja Sektoral, Periode 2010-2014 (%)

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Rerata
Aceh	0.80	1.03	0.47	0.35	0.68	0.26	0.76	1.85	1.16	0.82
Sumatera Utara	1.40	0.14	1.04	1.95	1.63	2.23	0.60	1.81	2.12	1.44

Provinsi	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Rerata
Sumatera Barat	1.50	0.95	0.09	1.12	1.99	2.04	2.47	2.29	1.43	1.54
Riau	1.44	1.32	1.84	1.25	2.33	2.15	0.55	1.38	1.06	1.48
Jambi	1.55	2.08	1.50	0.92	0.82	2.38	2.32	0.76	1.96	1.59
Sumatera Selatan	1.19	1.82	1.52	0.17	2.42	0.03	0.40	2.07	1.33	1.22
Bengkulu	1.11	0.44	1.06	2.14	0.52	2.34	0.60	1.12	0.93	1.14
Lampung	1.27	0.61	0.53	1.66	2.39	1.99	0.97	0.95	1.32	1.30
Kep. Bangka Belitung	1.15	2.37	0.53	0.62	1.20	1.26	0.68	1.13	1.69	1.18
Kep. Riau	0.92	1.11	0.86	0.28	1.22	2.39	0.59	0.42	0.68	0.94
DKI Jakarta	1.14	2.50	1.89	0.28	0.96	0.78	0.88	1.10	0.98	1.17
Jawa Barat	0.90	1.78	1.77	1.56	1.79	0.04	0.04	0.14	0.28	0.92
Jawa Tengah	1.33	0.36	1.14	0.87	2.45	0.96	2.26	0.97	1.89	1.36
DI Yogyakarta	1.11	1.78	1.34	0.24	1.76	1.74	0.64	0.23	1.38	1.13
Jawa Timur	1.06	0.17	0.39	1.07	2.17	0.76	1.86	0.72	1.59	1.09
Banten	0.80	0.40	0.22	0.77	0.08	1.31	1.77	1.81	0.20	0.82
Bali	1.34	0.03	1.28	2.41	1.58	0.88	1.24	1.89	1.74	1.38
Nusa Tenggara Barat	1.04	0.74	1.77	2.21	0.04	1.04	0.87	1.19	0.74	1.07
Nusa Tenggara Timur	1.06	0.52	0.98	0.64	1.61	1.68	0.58	0.47	2.28	1.09
Kalimantan Barat	1.22	1.69	1.45	1.09	1.45	1.92	0.17	1.12	1.17	1.25
Kalimantan Tengah	0.99	0.54	1.63	0.07	0.86	1.01	0.92	1.81	1.33	1.02
Kalimantan Selatan	1.34	1.01	2.08	1.21	1.88	0.21	1.18	2.00	1.44	1.37
Kalimantan Timur	1.23	0.02	2.26	1.51	1.15	1.95	0.20	1.86	1.15	1.26
Sulawesi Utara	1.39	0.04	1.59	1.71	2.17	2.08	0.84	1.11	1.92	1.43
Sulawesi Tengah	1.09	0.92	1.91	1.06	1.01	1.52	0.11	2.07	0.35	1.11
Sulawesi Selatan	0.71	0.30	0.57	1.48	1.03	0.64	0.21	0.48	1.14	0.73
Sulawesi Tenggara	1.63	2.47	2.40	0.23	1.65	1.42	2.05	2.38	0.86	1.68
Gorontalo	0.52	0.32	0.01	1.55	0.39	0.56	0.81	0.19	0.47	0.54
Sulawesi Barat	0.92	0.97	1.68	0.03	2.13	1.41	0.30	0.26	0.78	0.94
Maluku	1.21	0.82	0.17	2.17	0.25	1.78	2.35	0.18	2.29	1.25
Maluku Utara	1.31	0.99	2.43	0.81	2.30	2.17	1.53	0.31	0.26	1.35
Papua Barat	0.92	1.91	0.75	0.37	0.29	2.06	0.54	1.07	0.58	0.94
Papua	1.34	1.50	0.78	0.72	1.89	2.20	1.72	1.24	0.97	1.37

Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang digambarkan oleh peningkatan PDRB Sektor provinsi tersebut secara keseluruhan akan mendorong permintaan tenaga kerja, meskipun kenaikan permintaan tenaga kerja masih relatif kecil. Dampak dari kenaikan tenaga kerja direspon oleh kenaikan upah oleh para. Peningkatan PDRB sektoral provinsi secara langsung menurunkan tingkat pengangguran di setiap provinsi. Selain menurunkan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun terlihat bahwa penurunan kemiskinan tidak terjadi di setiap provinsi. Seperti provinsi DIY, Jawa Timur, Maluku Utara dan Papua Barat. Ada beberapa alasan kenapa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tertentu, yaitu (1) kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari kenaikan inflasi, dan (2) masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral (Tabel 3.16).

Tabel 3.16. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan CPI, Periode 2010-2014 (%)

Provinsi	PDRB	Unem	Pov	CPI
Aceh	3.25	-2.08	-1.93	0.12
Sumatera Utara	3.22	-2.28	-0.05	0.51
Sumatera Barat	2.69	-1.04	-2.18	0.51
Riau	3.57	-2.99	-0.20	0.42

Provinsi	PDRB	Unem	Pov	CPI
Jambi	2.03	-1.15	-1.77	0.30
Sumatera Selatan	0.91	-0.72	1.93	3.40
Bengkulu	1.14	-1.83	-2.21	0.07
Lampung	3.37	-1.46	-2.19	0.09
Kep. Bangka Belitung	2.33	-1.30	-0.10	0.21
Kep. Riau	1.46	-1.11	-3.69	0.56
DKI Jakarta	3.25	-3.18	-0.56	0.19
Jawa Barat	1.20	-0.98	-2.17	0.26
Jawa Tengah	1.92	-1.43	-1.92	0.37
DI Yogyakarta	0.92	-1.37	1.20	4.47
Jawa Timur	2.66	-1.01	1.28	3.59
Banten	0.14	-1.14	-3.21	0.42
Bali	3.54	-3.27	-0.16	0.50
Nusa Tenggara Barat	1.77	-1.03	-2.66	0.31
Nusa Tenggara Timur	0.53	-0.89	-1.66	0.61
Kalimantan Barat	2.47	-1.23	-2.66	0.57
Kalimantan Tengah	0.76	-0.97	-0.72	0.61
Kalimantan Selatan	2.89	-1.28	-0.42	0.14
Kalimantan Timur	2.08	-1.06	-1.31	0.28
Sulawesi Utara	1.95	-1.31	-3.35	0.28
Sulawesi Tengah	3.28	-2.31	-2.29	0.31
Sulawesi Selatan	2.19	-1.31	-1.05	0.55
Sulawesi Tenggara	2.45	-1.23	-0.15	0.28
Gorontalo	3.58	-2.09	-3.68	0.31
Sulawesi Barat	2.21	-2.33	-1.55	0.20
Maluku	2.67	-2.44	-1.69	0.15
Maluku Utara	0.77	-1.37	0.16	3.37
Papua Barat	1.16	-1.40	0.96	2.39
Papua	2.20	-1.46	-2.07	0.37
Nasional	2.14	-1.58	-1.27	0.81

Dilihat berdasarkan pulau terbesar Indonesia, baik investasi swasta maupun investasi pemerintah dalam akan mendorong pada penignatan angkatan kerja, antara lain disebabkan oleh kenaikan PDRB akan mendorong masukkan penduduk ke wilayah tersebut (migrasi masuk) dan diikuti oleh pola perubahan demografi penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja di wilayah tersebut yang akan menambah jumlah angkatan kerja.

Tabel 3.17. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Arus Migrasi Penduduk (Migrasi Masuk) ke Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Migrasi Masuk	Dari						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		-0.288	-0.266	-0.378	-0.162	-0.162	-0.162
Jawa-Bali	-0.018		-0.010	-0.029	-0.039	-0.039	-0.039
Kallimantan	0.023	-0.186		-0.178	-1.032	-1.032	-1.032
Sulawesi	-0.016	-0.252	0.023		0.079	0.079	0.079
Nusatenggara	-1.418	-0.311	0.338	-1.297		-1.297	-1.297
Maluku	-1.090	-0.238	0.185	-0.970	-0.970		-0.970
Papua	-0.492	-0.149	0.112	-0.272	-0.272	-0.272	

Tabel 3.18. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Arus Migrasi Penduduk (Migrasi Keluar) dari Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Migrasi Keluar dari	Ke						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		-0.076	-1.044	-0.068	-0.214	-0.588	-0.046
Jawa-Bali	-0.187		-0.347	-0.306	0.551	1.161	0.593
Kallimantan	-0.107	-0.086		-0.091	-0.706	0.246	-0.207
Sulawesi	-0.908	-0.088	-1.837		0.456	-0.713	1.669
Nusatenggara	-0.345	-0.073	0.715	-0.415		-0.551	1.126
Maluku	-0.276	-0.065	0.486	-0.171	-0.934		0.263
Papua	-0.309	-0.060	0.276	-0.258	-0.656	-0.320	

Perubahan pola demografi penduduk tersebut dan peningkatan jumlah angkatan kerja baik masuk maupun yang keluar dari wilayah tersebut, tidak seluruhnya mampu diserap lapangan kerja, sehingga untuk mengantisipasi naiknya jumlah pengangguran selain dibutuhkan investasi, juga harus diimbangi dengan kemampuan penciptaan lapangan kerja bagi para pekerja baru, selamping kebijakan tersebut reformasi administrasi kependudukan juga menjadi suatu skenario yang tepat baik dalam menurunkan arus pergerakan penduduk.

Ekspor wilayah Sumatera mengalami peningkatan ke daerah Jawa-Bali, Sulawesi, NT dan Maluku sebaliknya ke daerah tujuan Kalimantan dan Papua terlihat mengalami penurunan, lebih detail pola perdagangan antar-wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.19. Kenaikan PDRB karena peningkatan investasi tidak serta merta meningkatkan ekspor wilayah ke daerah tujuannya, dampak kenaikan investasi terhadap ekspor ke daerah tujuan ada wilayah yang berdampak positif dan negatif. Dampak yang sama juga terjadi terhadap arus impor antar-daerah (Tabel 3.20).

Tabel 3.19. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Arus Perdagangan (Export) Antar Wilayah, Periode 2010-2014 (%)

Expor	Ke						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		0.066	0.279	0.345	2.539	1.026	1.575
Jawa-Bali	-0.100		-0.181	0.859	0.743	1.278	0.584
Kallimantan	-0.101	-0.005		0.159	0.587	1.505	0.282
Sulawesi	0.002	-0.016	0.322		0.410	0.924	0.230
Nusatenggara	0.729	0.263	2.096	0.241		3.914	0.225
Maluku	0.180	-0.041	-0.215	-0.544	-0.249		0.121
Papua	0.019	0.019	-0.190	-0.521	-0.009	0.088	

Tabel 3.20. Dampak Peningkatan Investasi Pemerintah, terhadap Arus Perdagangan (Impor) Antar Wilayah, Periode 2009-2014 (%)

Impor	Dari						
	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	NT	Maluku	Papua
Sumatera		0.007	-0.038	0.088	0.336	0.478	-0.302
Jawa-Bali	-0.036		-0.033	-0.034	0.076	0.076	0.076
Kallimantan	-0.215	-0.361		-0.031	-0.724	-0.724	-0.724
Sulawesi	0.079	-0.207	-0.122		-0.093	-0.093	-0.093
Nusatenggara	-1.685	-1.915	-1.265	-2.248		-1.934	-1.909
Maluku	0.176	-0.027	0.452	0.065	0.026		0.003
Papua	0.803	0.569	0.661	0.608	0.664	0.664	

Pada tabel 3.20 menunjukkan bahwa impor wilayah Sumatera dari wilayah asal Kalimantan dan Papua mengalami penurunan, sebaliknya daerah asal Jawa-Bali, Sulawesi, Nusatenggara dan Maluku mengalami kenaikan, impor Jawa-Bali dari wilayah asal Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi mengalami penurunan, namun dari daerah asal NT, Maluku dan Papua mengalami peningkatan. Impor wilayah Kalimantan dari seluruh asal mengalami penurunan, hal yang sama juga berlaku untuk wilayah Nusatenggara dan Sulawesi, kecuali untuk impor Sulawesi dari daerah asal Sumatera. Sementara impor wilayah Papua dari daerah asal semuanya mengalami peningkatan hal yang sama juga terlihat untuk wilayah Maluku, kecuali dari daerah asal Jawa-Bali mengalami penurunan.

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil konstruksi model dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dan implikasi kebijakan yang terkait dengan model investasi regional, yaitu:

1. PDRB Sektoral dipengaruhi secara positif oleh jumlah tenaga kerja, investasi swasta, investasi pemerintah. Secara statistik investasi swasta dan pemerintah sektoral di hampir seluruh provinsi signifikan mempengaruhi PDRB Sektoral dan tetapi responnya adalah inelastis.
2. Arus migrasi penduduk baik migrasi masuk maupun migrasi keluar, dipengaruhi oleh perbedaan upah wilayah, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di suatu wilayah, namun demikian seluruh variabel tersebut secara ekonomi responnya inelastis, artinya bahwa arus migrasi penduduk lebih ditentukan oleh faktor *beaten path* dibandingkan dengan faktor upah dan kinerja perekonomian daerah yang akan dikunjungi oleh para migran.
3. Kerjasama perdagangan antara region selain disebabkan karena karakteristik lokal daerah, juga sangat ditentukan oleh demografi wilayah tersebut. Dalam arti bahwa, jika secara demografi region tersebut berdekatan maka volume perdagangan mereka akan semakin besar.
4. Peningkatan investasi swasta secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi kinerja perekonomian wilayah kecuali, kecuali untuk beberapa provinsi pengangguran masih mengalami peningkatan, yang dinyalir disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang masuk, begitu juga dengan tingkat kemiskinan masih mengalami peningkatan yang disebabkan karena dorongan inflasi yang lebih besar.
5. Peningkatan investasi pemerintah juga secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi kinerja perekonomian wilayah kecuali untuk beberapa provinsi dimana tingkat kemiskinan masih mengalami peningkatan, yang antara lain disebabkan karena migrasi bersih yang semakin meningkat dan adanya kenaikan inflasi yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.
6. Peningkatan upah minimum regional berdampak langsung pada kenaikan upah di seluruh wilayah, yang mengarah pada penurunan jumlah penduduk miskin. Peningkatan upah minimum regional dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja perlu secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi kinerja perekonomian wilayah terutama bagi wilayah pulau Sumatera dan Nustenggara terutama digambarkan oleh turunnya jumlah pengangguran.
7. Kenaikan belanja pelayanan publik berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dari kenaikan PDRB pulau, peningkatan PDRB tersebut akan mendorong pada kenaikan permintaan tenaga kerja namun demikian permintaan tenaga kerja meningkatnya relatif kecil.
8. Peningkatan investasi swasta dan investasi pemerintah secara umum memberikan dampak positif bagi perekonomian provinsi, dan agar tidak berdampak buruk baik kemiskinan, sebaiknya pertumbuhan ekonomi tersebut harus tetap dijaga tidak melebihi peningkatan inflasi.

IV.2. Implikasi Kebijakan

Aktivitas dan kegiatan ekonomi yang terpusat di wilayah pulau Jawa-Bali merupakan hambatan terbesar bagi upaya pemerataan ekonomi antarpulau di Indonesia. Untuk mengurangi atau meminimumkan fenomena tersebut sangat diperlukan kebijakan pemerintah dengan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di wilayah Timur Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk melalui arus migrasi di hampir seluruh pulau memiliki dampak yang berbeda antara pulau, tetapi umum migrasi penduduk ini berdampak pada peningkatan jumlah angkatan tenaga kerja di pulau lain dan hal ini akan mendorong pada peningkatan pengangguran dan penurunan tingkat upah di pulau lain. Untuk mengurangi arus net migrasi ini disarankan kepada pemerintah setempat untuk melakukan intervensi melalui pemberlakuan upah minimum regional yang layak sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum pulau. Untuk menunjang pertumbuhan industri yang dapat di respon dengan positif oleh investor, disarankan kepada pemerintah untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur fisik yang mendukung pada kegiatan industri. Infrastruktur fisik yang penting diantaranya adalah sarana transportasi dan komunikasi dan juga diperlukan intervensi pemerintah setempat untuk memberikan berbagai macam insentif yang meringankan investor yang memilih lokasi usahanya.

Untuk mendorong peningkatan ekspor untuk barang dan jasa yang menjadi unggulan, perlu dilakukan intervensi pemerintah daerah. Disarankan pemerintah daerah berupaya dengan cara memberikan insentif untuk berproduksi bagi para eksportir, seperti kemudahan dalam pengurusan administrasi dan penurunan pajak. Selain itu pemerintah juga berusaha memfasilitasi peningkatan produksi bagi usaha mikro kecil dan menengah yang berorientasi ekspor.

Investasi pemerintah dan swasta secara keseluruhan memberikan dampak positif bagi kinerja perekonomian wilayah, tetapi terlihat pengangguran dan kemiskinan masih terlihat mengalami peningkatan di beberapa provinsi. Dengan kata lain bahwa setiap stimulus yang diberikan harus dibarengi dengan kesiapan wilayah untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pekerja baru, dan reformasi administrasi kependudukan juga menjadi suatu skenario yang tepat baik dalam menurunkan arus pergerakan penduduk, dengan demikian arus masuk penduduk dari suatu wilayah satu ke wilayah lainnya dapat diantisipasi guna menahan kenaikan jumlah penduduk yang menganggur. Disamping hal tersebut pemerintah juga harus tetap menjaga tingkat inflasi tetap stabil untuk mengantisipasi dampak buruk bagi tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chavas, J.P. 1994. Production and Investment Decisions Under Sunk Cost and Temporal Uncertainty. *American Journal of Agricultural Economics*, Edisi Februari 1994. Volume 76 No. 1 : 114-127.
- Claessens, S. 1995. The Emergency of Equity Investment in Developing Country; Overview. *The World Bank Economic Review*, Edisi Januari 1995. Vol. 9. No. 1 : 1-18.
- Colter, J.M. 1984. Ciri-ciri dan Pola Tenaga Kerja Migran dari Daerah Perdesaan. *Rural Dynamic Series No. 24. Studi Dinamika Perdesaan*. Yayasan Penelitian Survey AgroEkonomi, Bogor.
- Damayanti, N.S., 2000. Strategi Kebijakan Ekonomi Indonesia. *"Mungkinkah Krisis Ekonomi Berakhir"*, Pusat Studi Indonesia - Universitas Terbuka, Jakarta.
- Downey, R.A. 1984. Indonesian Inequality: Integrated National Accounting of Who gets Whats, Ph.D. Dissertation. Faculty of Graduate School, Cornell University, Ithaca.
- Erwidodo. 1991. Urbanisasi Temporer di Jawa Barat. Monograph Series No. 4, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Dalam Monograf Dinamika Keterkaitan Desa-Kota di Jawa Barat. Arus Tenaga Kerja, Barang dan Kapital. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
- Fazzari S. M., R.G. Hubbard dan B. Petersen, 1988. Financing Constraints and Corporate Investment. *Brooking Papers on Economics Activity*, No.1:141-195.
- Goolsbee, A. 1994. Investment Tax Incentives and Price of Capital Goods. "Unpublished Paper, M.LT (November).
- Greenwood, J. Z. Hercowitz dan G. W. Huffman, 1988. Investment, Capacity Utilization, dan Real Business Cycle, *The American Economic Review*, Edisi Juni 1988 Vol. 78 No. 3 : 402-417
- Gunawan, M. dan A. Zulham. 1992. Dampak Migrasi Desa Kota Terhadap Sosial Ekonomi Perdesaan (Kasus Migrasi di Perdesaan Jawa Barat). Monograf Series No.4, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor.
- Harris, J.R., F. Schiantarelli dan M.G. Siregar, 1994. The Effect of Financial Liberalization on the Capital Structure and Investment Decisions of Indonesian Manufacturing Establishment. *The World Bank Economic Review*, Edisi Januari 1994. Vol. 8. No. 1 : 18-48
- Hidayat, T. 1991. The Construction of Two Region Social Accounting Matrix for Indonesia and Its Application to Some Equity Issues. Ph.D Dissertation. Department of Economics, Cornell University, Ithaca.
- Intriligator, M. D. 1978. *Econometric Model, Techniques, and Applications*. Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Koutsoyiannis, A. 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Methods*. Second Edition. The MacMillan Press Ltd, London
- McCann, P. 2001. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press. New York.
- Mintchell. 1961. The Cause of Labour Migration in Migrant. *Dalam* I.B. Mantra dan M. Molo. 1985. Konferensi Nasional Pusat Studi Kependudukan III, Jakarta.
- Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld. 1991. *Econometric Models and Economic Forecasts*. Third Edition. McGraw-Hill Inc, New York.
- Pyatt, G. and J.I. Round. 1985. *Regional Account in a SAM Framework*. The World Bank, Washington D.C.
- Richardson, H.W. 1969. *Regional Economics*. Praeger Publisher, New York.
- Rofiqoh. 1994. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi dan Produktivitas Pekerja di Kalimantan Timur. Skripsi Sarjana. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Romer, D. 1996. *Advanced Macroeconomics*. McGraw Hill Companies, Inc. Berkeley, USA.
- Sutomo, S. 1995. Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Syafa'at, N., C. Saleh dan A.S. Bagi. 1998. Dampak Mobilitas Angkatan Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Dalam Otonomi Daerah, Bogor, 16-17 November 1998, Bogor.
- Tirtosudarmo, R. 1985. *Migration Decision Making. The Casae of East Java*. National Institut of Economic and Social Research, Jakarta.
- Todaro, M. P. 2000. *Economic Development*. Pearson Education Limited, New York.
- Treyz, George I. 1993. *Regional Economic Modelling : A Systematic Approach to Economic Forecasting and Policy Analysis*, Kluwer Academic Publisher, USA.
- Tumenggung, Y.A. 1995. An Interregional Computable General Equilibrium Model for Indonesia: Measuring the Regional Economic Consequences of National Tax Policy. Ph.D Dissertation. Regional Science Program, Cornell University, Ithaca.
- Wie, T.K. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif*. LP3ES, Jakarta.
- Wuryanto, L.E. 1996. Fiscal Decentralitation and Economic Performance In Indonesia : An Interregional Computable General Equilibrium Approach. Ph.D. Dissertation. Faculty of Graduate School, Cornell University, Ithaca

PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS PERDAGANGAN DAN INVESTASI

DIREKTORAT PERDAGANGAN, INVESTASI, DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL
email : pikei@bappenas.go.id

ABSTRAK

Investasi dan perdagangan merupakan hal yang terkait satu dengan lainnya, dan merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem ekonomi makro suatu negara. Peran investasi dan perdagangan (ekspor – impor) yang kuat sebagai penyangga perekonomian suatu negara, akan merefleksikan kuatnya pilar perekonomian dan daya saing negara yang bersangkutan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana meningkatkan investasi dan ekspor. Pertanyaan tersebut tidaklah mudah untuk dijawab. Banyak faktor yang mempengaruhi turun naiknya ekspor. Di samping faktor domestik atau faktor *supply side*, faktor permintaan (kondisi perekonomian global juga sangat menentukan). Kajian ini akan menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor dan investasi melalui pengembangan model analisis perdagangan dan investasi. Kajian ini menggunakan model ekonometrika yang dilengkapi dengan metode analisis kualitatif terhadap kebijakan perdagangan dan investasi. Model ekonometrika yang dikembangkan merupakan model sistem persamaan simultan yang terdiri dari blok persamaan ekspor, blok persamaan impor dan blok persamaan investasi. Untuk kebutuhan estimasi model, digunakan data dari Tahun 1990 hingga tahun 2009 dengan frekuensi data triwulanan. Data tahun 2010 hingga triwulan ke dua akan digunakan untuk *fitting/validasi* hasil prediksi model. Dari hasil estimasi model ekspor komoditi pertanian terlihat bahwa ekspor komoditas pertanian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja sektor pertanian itu sendiri. Dari hasil estimasi model menunjukkan bahwa: (1) ekspor komoditas industri manufaktur dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kondisi perekonomian dunia (dengan *proxy* GDP USA, GDP China dan GDP Jepang); (2) ekspor migas Indonesia dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian dunia; (3) variabel yang berpengaruh terhadap ekspor sektor pertambangan dan lainnya adalah kondisi perekonomian dunia; (4) impor barang modal dipengaruhi secara signifikan oleh ekspor total; dan (5) faktor yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMDN (investasi domestik) adalah tingkat suku bunga. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa Ekspor, Impor dan Investasi mempunyai kaitan yang erat satu dengan lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif dan saling terkait antara perdagangan luar negeri dan kebijakan investasi.

1. LATAR BELAKANG

Di tengah krisis global yang melanda dunia sejak kuartal ke tiga tahun 2008, di mana banyak negara mengalami kontraksi ekonomi (perlambatan pertumbuhan ekonomi bahkan pertumbuhan ekonomi negatif), pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa mencapai 6,1% pada tahun 2008 dan 4,2% pada tahun 2009. Pertumbuhan demikian masih terbilang sangat baik, karena pada umumnya pada tahun 2008 dan 2009, perekonomian negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi negatif.

Namun demikian, jika dilihat dari kualitas pertumbuhannya, perekonomian Indonesia masih rendah. Hal ini karena dalam hampir sepuluh tahun terakhir, sumber pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, daripada oleh investasi dan ekspor. Sebagai contoh misalnya adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang bisa tumbuh 6,1%. Dari 6,1% tersebut konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9%, investasi hanya menyumbang sebesar 2,6% dan net ekspor hanya menyumbang pertumbuhan sebesar 0,7%. Sementara jika kita melihat data tahun 2009, di mana krisis global melanda, maka sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia makin didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2% pada tahun 2009, sekitar 3,4% disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah. Investasi hanya menyumbang pertumbuhan sebesar 0,9% dan ekspor turun 4% dan impor juga menurun 7%. Di satu sisi hal demikian dikatakan "masih untung" karena mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah krisis global yang melanda. Namun di sisi lain, kualitas pertumbuhan tersebut ternyata sangat mengkhawatirkan.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih mengkhawatirkan dari sisi penciptaan lapangan kerja karena pertumbuhannya lebih banyak bersumber pada sektor-sektor jasa yang tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian dan manufaktur yang merupakan sumber penciptaan lapangan kerja malah menunjukkan pertumbuhan yang stagnan (kalau tidak boleh dikatakan menurun). Sebagai contoh misalnya jika pada tahun 2000 sektor manufaktur mampu tumbuh 6%, tetapi pada tahun 2008 sektor industri manufaktur hanya tumbuh 3,7% dan hanya menyumbang pertumbuhan satu persen dari pertumbuhan ekonomi 6,1%.

Data-data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun tumbuh "lumayan", namun kualitas pertumbuhannya memburuk, karena pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor konsumsi dan belanja pemerintah adalah pertumbuhan yang tidak *sustainable*. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar antara 4%-6% di mana dengan pertumbuhan ekonomi pada level tersebut tidak mampu mengatasi tingkat pengangguran yang masih sekitar 9%-10% dan tingkat kemiskinan 14%-16%. Andai saja mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lainnya tumbuh lebih tinggi, yakni investasi dan ekspor tumbuh lebih baik, maka bukan hal yang mustahil pertumbuhan perekonomian Indonesia akan bisa mencapai level 7%-9%. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%-9% tersebut, pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan.

Di sisi lain, faktor domestik juga sangat berpengaruh. Iklim investasi yang tidak juga kunjung membaik sangat memukul daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Ketersediaan energi, infrastruktur (jalan, pelabuhan, air, sarana prasarana) dan berbagai aturan baik pada tingkat nasional maupun daerah ikut menghambat iklim investasi. Di samping itu, kondisi makro ekonomi nasional seperti tingkat suku bunga dan nilai tukar diduga ikut mempengaruhi kinerja investasi dan perdagangan (ekspor-impor) Indonesia.

Sementara itu, impor diduga lebih dipengaruhi oleh tingkat investasi dan tingkat permintaan dalam negeri. Mana kala investasi meningkat, maka impor akan barang modal dan bahan baku juga meningkat. Dan ketika perekonomian sedang membaik, daya beli masyarakat membaik, dan atau harga barang impor menurun, maka impor juga akan meningkat.

Untuk meningkatkan net ekspor dan investasi Indonesia, maka kita perlu meningkatkan ekspor lebih besar daripada impor. Agar ekspor Indonesia meningkat maka perlu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Agar daya saing produk meningkat, diperlukan iklim investasi yang kondusif.

2. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan sejalan dengan kebutuhan di Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, kajian ini bertujuan untuk (1) menganalisis keterkaitan ekspor, impor dan investasi; (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor dan investasi; dan (3) Melakukan proyeksi nilai ekspor, impor dan investasi. Tiga tujuan kajian tersebut digunakan untuk menyusun suatu rumusan dan rekomendasi kebijakan dalam bidang perdagangan dan investasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kajian ini menggunakan model ekonometrik perdagangan-investasi. Secara rinci tujuan kajian ini adalah :

Menganalisis perkembangan ekspor, impor dan investasi di Indonesia

Menyusun dan menganalisis model ekonometrika perdagangan dan investasi

Melakukan proyeksi ekspor, impor dan investasi tiga tahun ke depan

Memberikan rekomendasi kebijakan perdagangan dan investasi berdasarkan hasil analisis dan penyusunan model ekonometrika perdagangan dan investasi

2.1 Ruang Lingkup

Sesuai dengan latar belakang, masalah dan tujuan, cakupan kajian ini adalah :

- Pengumpulan literatur tentang pemodelan ekonometrik untuk perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan investasi Indonesia yang pernah dilakukan;
- Penentuan variabel yang diduga mempengaruhi ekspor, impor dan investasi ;
- Penyusunan *data series* dalam format excel yang mencakup data dasar dan variabel yang digunakan dalam penyusunan model ekonometrik. *Data series* ini harus tersusun secara rapih dan terintegrasi, sehingga mudah untuk dianalisa dan diperbaharui (*update*);
- Pendugaan model ekonometrika simultan untuk:
- Bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dari sisi permintaan dan sisi penawaran, yang terdiri dari:
 - Ekspor total
 - Ekspor migas
 - Ekspor nonmigas, terdiri dari: pertanian, pertambangan, dan manufaktur
 - Impor: konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal
- Bidang investasi, yang terdiri dari:
 - investasi domestik
 - investasi asing
- Pengujian/validasi model;
- Perhitungan elastisitas variabel yang mempengaruhi ekspor, impor, dan investasi;
- Simulasi dengan berbagai skenario untuk: proyeksi ekspor (migas dan nonmigas), impor (konsumsi, bahan baku/

- penolong, dan barang modal), dan investasi (migas dan nonmigas);
- Perjalanan ke daerah dalam rangka pengayaan informasi mengenai kinerja ekspor, impor dan investasi di beberapa daerah di Indonesia
- Analisis dengan menggunakan model ekonometrik perdagangan investasi yang mencakup:
- Analisa kinerja ekspor, impor dan investasi selama ini, beserta faktor faktor yang mempengaruhinya
- Proyeksi kinerja ekspor, impor dan investasi untuk beberapa tahun ke depan dengan menggunakan model yang telah di bangun
- Diskusi dengan beberapa narasumber terutama untuk data analisis dan perumusan kebijakan
- Penyusunan rekomendasi kebijakan perdagangan dan investasi
- Pelatihan untuk staf Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, sebagai sarana untuk *transfer of knowledge* penyusunan model ekonometrik perdagangan dan investasi. Pelatihan ini mencakup:
 - Dasar-dasar penyusunan model ekonometrika;
 - Proses penyusunan model ekonometrika perdagangan dan investasi;
 - Simulasi dan proyeksi;
 - Penyerahan *data series* dan aplikasi lainnya yang digunakan selama penyusunan model;
 - Penyusunan laporan.

2.2 Keluaran

Sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tersebut di atas maka keluaran dari kajian ini adalah:

- Tersedianya data *series* dalam format excel yang digunakan untuk penyusunan model ekonometrik perdagangan dan investasi, yang mudah untuk di *update*;
- Tersedianya data sekunder yang diperlukan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif;
- Tersedianya model ekonometrika simultan untuk ekspor, impor, dan investasi; yang mencakup sisi penawaran dan sisi permintaan. Model ini harus dapat digunakan untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor, impor, dan investasi, serta dapat digunakan untuk proyeksi jangka pendek dan menengah;
- Tersedianya hasil simulasi proyeksi ekspor, impor, dan investasi dalam beberapa skenario;
- Tersedianya hasil analisis kinerja sektor perdagangan luar negeri (ekspor migas, non migas, dan impor) dan investasi dengan menggunakan model makro ekonometrik perdagangan investasi;
- Tersedianya beberapa hasil analisis mengenai faktor faktor yang mempengaruhi perdagangan luar negeri (ekspor migas, non migas, impor) dan investasi selama ini;
- Tersedianya beberapa hasil simulasi untuk memperkirakan dampak perubahan beberapa variabel eksogen terhadap kinerja perdagangan luar negeri dan investasi Indonesia;
- Tersusunnya beberapa skenario proyeksi pertumbuhan ekspor, impor dan investasi;
- Tersusunnya rekomendasi kebijakan perdagangan luar negeri dan investasi Indonesia ke depan;
- Tersedianya laporan penyusunan model ekonometrik dan analisisnya, serta buku petunjuk (*manual*) yang menjelaskan deskripsi dan cara penggunaan model yang telah dibangun.

3. METODOLOGI

3.1 Kerangka Analisis

Tinjauan teoritis yang dilakukan oleh Krugman dan Obstfeld (2000) dan Salvatore 1996 menunjukkan bahwa ekspor suatu barang dipengaruhi oleh sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dari sisi permintaan ekspor barang dari suatu negara ke negara lain dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil dan pendapatan dunia. Sedangkan dari sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, tingkat harga domestik, nilai tukar riil, kapasitas produksi yang *diproxy* melalui investasi, impor bahan baku dan kebijakan deregulasi. Sementara Kotler dan Armstrong (1996) menyatakan bahwa ekspor dipengaruhi oleh faktor pendapatan negara tujuan ekspor dan jumlah penduduk negara tujuan. Analisis lain yang dilakukan oleh Lindert (1993) menunjukkan bahwa kunci terjadinya perdagangan internasional (ekspor dan impor) adalah teori keunggulan komparatif. Prinsip teori ini bahwa suatu negara dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatan riilnya melalui spesialisasi produksi komoditi yang memiliki produktivitas tinggi. Negara-negara akan mengutamakan untuk memproduksi komoditi yang paling produktif. Prinsip keunggulan komparatif menunjukkan bahwa spesialisasi akan menguntungkan semua negara meskipun ada negara yang secara mutlak lebih efisien dalam memproduksi semua barang dibandingkan negara lainnya. Jika negara-negara itu mau melakukan spesialisasi produk di mana mereka mendapat keunggulan komparatif (atau efisiensi relatif lebih tinggi), maka perdagangan antar negara akan menguntungkan bagi semuanya. Karena itu mengingat kondisi produktif di tiap negara sangat berbeda, negara-negara tersebut sangat menyadari bahwa akan lebih menguntungkan jika melakukan spesialisasi dalam produksi suatu jenis barang tertentu (Lindert, 1993).

Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 1994). Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi itu akan memperbesar permintaan atas barang-barang dan jasa. Maka

keuntungan yang dicapai oleh sektor usaha dapat mencapai targetnya, dengan demikian pada akhirnya akan mendorong dilakukan investasi-investasi baru pada sektor usaha. Dengan demikian, apabila nilai pendapatan nasional semakin bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula. Dan sebaliknya semakin rendah nilai pendapatan nasional, maka nilai permintaannya akan semakin rendah pula.

Pengembangan yang dilakukan para ekonom Neo Klasik pada teori Keynes terlihat pada formulasi yang dikembangkannya pada model akselerator investasi. Dijelaskan bahwa laju investasi adalah sebanding dengan perubahan output dalam perekonomian. Pembahasan mengenai bagaimana suatu model investasi dikembangkan, yaitu pada model investasi Neo Klasik dapat disimpulkan dalam persamaan-persamaan dibawah ini :

$$I = \lambda (K - K_0) \quad (2.5)$$

Keterangan :

I = investasi netto

$K - K_0$ = perubahan nilai stok modal

λ = multiplier (rata-rata penyesuaian) stok modal

Penyempurnaan terhadap persamaan di atas, yaitu menentukan suatu tingkat investasi yang diinginkan dengan memasukkan formulasi fungsi produksi Cobb-Douglas ke dalamnya ($K = \gamma.Y/r.c$, dimana γ = bagian modal dalam total pendapatannya dan $r.c$ = biaya / bunga sewa modal). Maka selanjutnya diperoleh fungsi investasi neto yang diinginkan dengan menyesuaikan nilai pajak yang dibebankan. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$I = \lambda (\gamma.Y/r.c - K_0) \quad (2.6)$$

Keterangan :

I = investasi neto

Y = pendapatan nasional

λ = multiplier pertambahan modal; asumsi multiplier / pelipat pertambahan modal adalah sempurna ($\lambda = 1$)

K_0 = stok modal pada periode sebelumnya/periode terakhir

γ = multiplier modal dalam total pendapatan nasional

$r.c$ = biaya / bunga sewa modal

3.2 Metode Pelaksanaan Kajian

Kajian ini menggunakan model ekonometrika yang dilengkapi dengan metode analisis kualitatif terhadap kebijakan perdagangan dan investasi. Model ekonometrika yang dikembangkan merupakan model sistem persamaan simultan yang terdiri dari blok persamaan ekspor, blok persamaan impor dan blok persamaan investasi. Blok persamaan ekspor terdiri dari empat persamaan struktural dan satu persamaan identitas, yaitu persamaan struktural ekspor pertanian, ekspor manufaktur, ekspor migas dan persamaan ekspor pertambangan dan lainnya. Sementara persamaan identitasnya merupakan persamaan total ekspor yang merupakan penjumlahan dari ekspor pertanian, manufaktur, migas dan pertambangan dan lainnya. Sementara untuk blok impor terdiri dari tiga persamaan struktural yaitu persamaan impor barang modal, impor bahan baku dan impor barang konsumsi serta satu persamaan identitas. Untuk blok persamaan investasi terdiri dari persamaan perilaku investasi dalam negeri (PMDN) dan persamaan perilaku investasi asing (PMA) serta satu persamaan identitas investasi total.

Berdasarkan kajian empiris dan teoritis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, serta dengan menimbang ketersediaan data, maka model untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, impor dan investasi di Indonesia digambarkan dengan *flow chart* sebagaimana digambarkan pada Gambar 3.1 pada halaman berikut. Model ini memang tidak seratus persen sesuai dengan teori, karena keterbatasan data, sehingga model dikembangkan dengan pertimbangan praktis ketersediaan data yang telah ada.

Berdasarkan pola hubungan yang digambarkan dalam Gambar 3.1 di halaman berikut dan dengan menggunakan model *double log* (agar dari model langsung dapat memperoleh nilai elastisitasnya), maka model perdagangan dan investasi dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut :

BLOK PERSAMAAN EKSPOR

$$\begin{aligned} \text{LOG}(X_AGR) = & C(100) + C(101)*\text{LOG}(GDP_AGR(-1)) + C(102)*\text{LOG}(X_AGR(-1)) + C(103)*\text{LOG}(INV_TOT) \\ & + C(104)*\text{LOG}(GDP_CHN) + C(105)*D_CR98 + C(106)*D_CR09 + C(107)*\text{LOG}(RER) + \\ & C(108)*\text{LOG}(RER)*D_CR98 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}(X_IND) = & C(200) + C(201)*\text{LOG}(GDP_MFG) + C(202)*\text{LOG}(GDP_US) + C(203)*\text{LOG}(GDP_JP) \\ & + C(204)*\text{LOG}(GDP_CHN) + C(205)*\text{LOG}(M_RAW) + C(206)*\text{LOG}(INV_TOT(-1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}(X_MIG) = & C(300) + C(301)*\text{LOG}(GDP_US) + C(302)*\text{LOG}(GDP_JP) + C(303)*\text{LOG}(GDP_CHN) \\ & + C(304)*\text{LOG}(X_MIG(-1)) + C(305)*\text{LOG}(INV_TOT) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG}(X_OTH) = & C(400) + C(401)*\text{LOG}(GDP_US) + C(402)*\text{LOG}(GDP_JP) + C(403)*\text{LOG}(GDP_CHN) + \\ & C(404)*\text{LOG}(X_OTH(-1)) + C(405)*\text{LOG}(GDP_MQ) \end{aligned}$$

$$X_TOT=C(10)*X_AGR+C(20)*X_IND+ C(30)*X_MIG+C(40)*X_OTH$$

BLOK PERSAMAAN IMPOR

$$\text{LOG}(M_CAP)=C(500)+C(501)*\text{LOG}(X_TOT)+C(502)*\text{LOG}(ER)+C(503)*\text{LOG}(INV_TOT)+C(504)*\text{LOG}(M_CAP(-1))+$$

$$\text{LOG}(M_RAW)=C(600)+C(601)*\text{LOG}(X_IND)+C(602)*\text{LOG}(ER)+C(603)*\text{LOG}(M_RAW(-1))+C(604)*\text{LOG}(M_RAW(-2))$$

$$\text{LOG}(M_CONS)=C(700)+C(701)*\text{LOG}(GDP_TOT)+C(702)*\text{LOG}(ER)+C(703)*\text{LOG}(M_CONS(-1))+C(704)*M_CONS(-2)$$

$$M_TOT=C(50)*M_CAP+C(60)*M_RAW+C(70)*M_CONS$$

BLOK INVESTASI

$$\text{LOG}(INV_DOM)=C(1)+C(2)*\text{LOG}(R_INV_COM)+C(3)*\text{LOG}(ER)+C(4)*\text{LOG}(X_TOT)+C(5)*\text{LOG}(INV_DOM(-1))+C(6)*D_CR98+C(7)*D_CR98*\text{LOG}(R_INV_COM)$$

$$\text{LOG}(INV_PMA)=C(21)+C(22)*\text{LOG}(ER)+C(23)*\text{LOG}(X_TOT)+C(24)*\text{LOG}(INV_PMA(-1))+C(25)*D_CR98+C(26)*\text{LOG}(R_INV_COM)+C(27)*\text{LOG}(R_INV_COM)*D_CR98$$

$$INV_TOT=C(31)*INV_DOM+C(32)*INV_PMA$$

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa model yang dirumuskan di atas terdiri dari tiga blok persamaan modal yaitu blok persamaan ekspor, blok persamaan impor dan blok persamaan investasi. Keterkaitan antara ketiga blok model di atas dapat dilihat pada Gambar 3.1, di mana ekspor total dapat mempengaruhi investasi total dan investasi total juga dapat mempengaruhi ekspor. Kemudian, keterkaitan antara impor dengan investasi juga dapat dijelaskan bahwa setiap meningkatnya investasi, maka akan diperlukan tambahan barang-barang modal. Barang modal tersebut harus diimpor, karena belum mampu diproduksi di dalam negeri. Akibatnya impor akan meningkat. Keterkaitan ekspor dengan impor juga dapat dijelaskan bahwa peningkatan permintaan ekspor industri, diperlukan tingkat produksi lebih banyak dan itu artinya diperlukan bahan baku lebih banyak. Sebagian bahan baku tersebut masih harus diimpor, sehingga peningkatan ekspor juga akan berakibat meningkatkan impor bahan baku.

Untuk persamaan ekspor pertanian (X_AGR) dalam kajian ini diduga dipengaruhi oleh kinerja sektor pertanian Indonesia sendiri yang dicerminkan oleh (GDP sektor pertanian, ekspor komoditas pertanian periode sebelumnya dan juga kinerja investasi sektor pertanian). Variabel-variabel ini mencerminkan sisi *supply* dari pasar ekspor komoditas pertanian Indonesia. Sementara sisi *demand* (permintaan) yang diduga berpengaruh terhadap ekspor komoditas pertanian adalah GDP China yang merupakan negara mitra dagang penting Indonesia dan sekaligus sebagai *proxy* kondisi perekonomian dunia. Selain itu, dari sisi permintaan yang akan berpengaruh terhadap ekspor adalah harga yang dalam kajian ini dicerminkan oleh nilai tukar. Di samping itu untuk menangkap dinamika krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008-2009, dimasukkan juga variabel *dummy* krisis 1998 (d_cr98) dan krisis 2009 (d_cr09) ke dalam persamaan ekspor komoditas pertanian (X_AGR).

Untuk persamaan ekspor industri manufaktur, variabel yang diduga mempengaruhinya adalah GDP manufaktur (GDP_MFG) dan investasi total sebelumnya ($INV_TOT(-1)$) sebagai *proxy* sisi supply yang mencerminkan kinerja sektor industri Indonesia. Selain itu, dari sisi permintaan yang diduga berpengaruh terhadap ekspor manufaktur adalah GDP Amerika (GDP_US), GDP China (GDP_CHN) dan GDP Jepang (GDP_Jp), di mana ketiga variabel tersebut merupakan cerminan kondisi perekonomian global. Jika GDP ketiga negara tersebut meningkat maka ekspor manufaktur Indonesia juga akan meningkat. Variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap ekspor manufaktur adalah impor bahan baku. Jika impor bahan baku meningkat, kinerja sektor industri meningkat (karena bahan baku akan diproses untuk produksi), yang pada gilirannya ekspor manufaktur juga akan meningkat.

Untuk ekspor migas, dari sisi demand variabel yang diduga mempengaruhinya adalah GDP USA, GDP China dan GDP Jepang. Sementara sisi *supply* yang diduga berpengaruh terhadap ekspor migas adalah kinerja sektor migas dan tingkat investasi. Sementara untuk ekspor pertambangan dan lainnya, variabel yang diduga berpengaruh adalah GDP USA, GDP China dan GDP Jepang (sisi *demand*) dan kinerja sektor pertambangan (GDP_MQ) dan ekspor pertambangan sebelumnya.

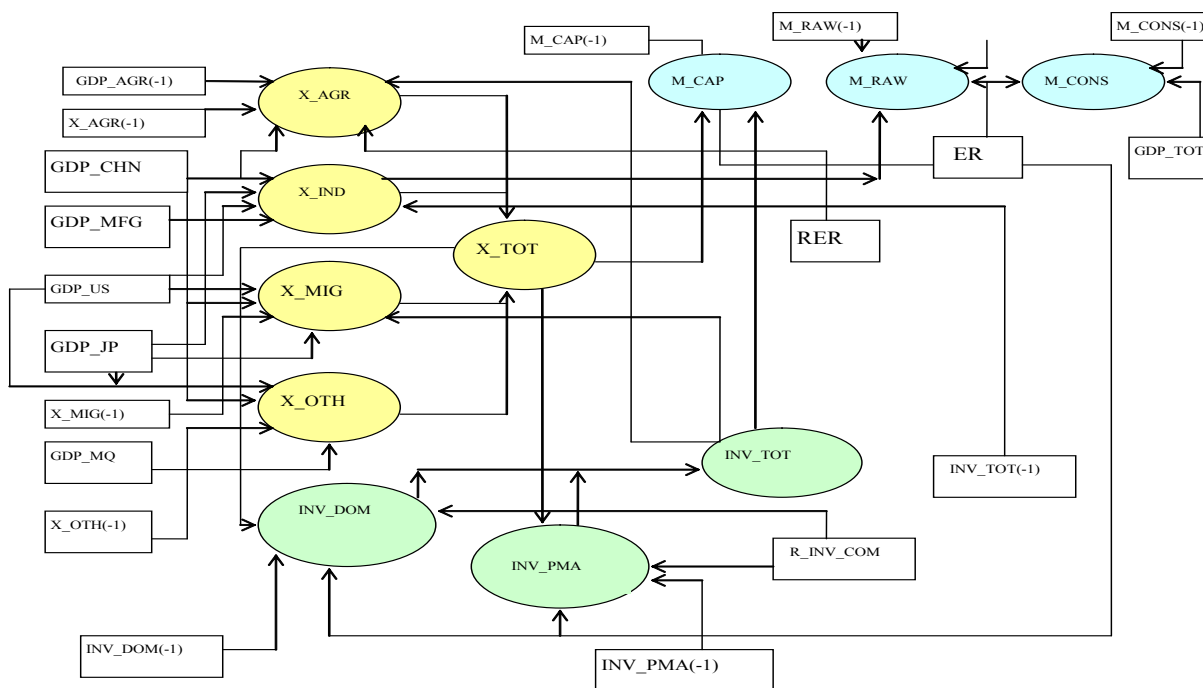
Sementara itu, untuk blok persamaan impor terdiri dari persamaan impor barang modal, bahan baku dan barang konsumsi. Variabel yang diduga berpengaruh positif terhadap impor barang modal (M_CAP) adalah ekspor total (X_Tot), Investasi Total, Nilai Tukar dan Impor Kapital sebelumnya. Meningkatnya ekspor total dan investasi total berarti membutuhkan barang modal lebih banyak sehingga impor modal akan meningkat. Sementara untuk nilai tukar diduga akan berpengaruh negatif. Semakin terdepresiasi nilai rupiah (ER meningkat), maka harga barang modal dari luar negeri akan terasa mahal dan impor modal akan turun.

Sementara untuk impor bahan baku (M_Raw) yang diduga berpengaruh positif adalah ekspor industri. Manakala permintaan ekspor industri meningkat, maka akan dibutuhkan bahan baku yang lebih banyak dan sebagian besar bahan baku tersebut belum bisa dipenuhi di dalam negeri sehingga harus diimpor. Maka impor bahan baku akan meningkat. Di samping itu, impor bahan baku juga dipengaruhi oleh nilai tukar (ER). Jika nilai tukar terdepresiasi, maka harga bahan baku dari luar negeri akan mahal, sehingga impor bahan baku menurun.

Untuk impor barang konsumsi (M_CONS), variabel yang diduga berpengaruh adalah pendapatan masyarakat Indonesia yang dicerminkan oleh peningkatan GDP. Jika GDP naik, maka pendapatan Indonesia meningkat dan permintaan akan barang impor akan meningkat pula, sehingga impor barang konsumsi akan meningkat. Nilai tukar diduga akan berpengaruh negatif terhadap impor barang konsumsi, karena jika ER terdepresiasi, maka sejatinya harga barang impor meningkat, sehingga impor barang konsumsi diduga akan menurun.

Secara konseptual, faktor yang berpengaruh terhadap investasi adalah suku bunga. Beberapa penelitian menemukan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta kemandirian dan politik juga sangat berpengaruh terhadap investasi. Tetapi karena faktor-faktor ini sulit untuk diukur, maka dalam kajian ini variabel yang diduga berpengaruh terhadap investasi adalah variabel suku bunga (R_INV_COM), Nilai Tukar, Ekspor, dan Investasi sebelumnya. Jika ekspor suatu negara meningkat, maka ini memberikan sinyal kepada investor bahwa berinvestasi akan sangat menguntungkan, apalagi jika investasinya dilakukan untuk orientasi memproduksi komoditas ekspor. Karena harapan keuntungan inilah maka investasi akan meningkat. Di samping itu, investasi mendatang sangat ditentukan oleh investasi saat ini. Jika investasi saat ini meningkat, ini juga memberikan sinyal harapan bagi investor bahwa perekonomian dalam kondisi membaik, sehingga investasi di kemudian hari akan terus meningkat. Fenomena inilah yang sering terjadi di mana, jika ekonomi dalam kondisi membaik sehingga memberikan sinyal positif bagi investor, sehingga perekonomian akan terus dalam kondisi ekspansi dan terus tumbuh yang didorong oleh ekspektasi positif para investor tersebut.

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Hubungan Ekspor, Impor dan Investasi beserta Variabel-Variabel yang Mempengaruhinya



3.3 Data yang Digunakan

Untuk kebutuhan estimasi model, menggunakan data dari Tahun 1990 hingga tahun 2009 dengan frekuensi data triwulanan. Data tahun 2010 hingga triwulan ke dua akan digunakan untuk *fitting/validasi* hasil prediksi model. Sebagian besar data bersumber dari BPS, CEIC database dan berbagai sumber lainnya. Variabel dan deskripsinya beserta sumber datanya diberikan pada Tabel Lampiran 1. Sementara datanya diberikan pada Tabel Lampiran 2.

4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Estimasi dan Validasi Model

Dengan menggunakan metode 2SLS dan dengan bantuan *software* Eviews 6.0 diperoleh hasil estimasi model sebagaimana tertera dalam Tabel Lampiran 3. Validasi model tersebut dengan menggunakan kriteria statistik dan ekonomi menunjukkan bahwa hasil estimasi model yang diperoleh cukup baik untuk digunakan sebagai analisis perilaku ekspor, impor dan investasi.

Tabel 5.1. berikut menyajikan ringkasan kriteria statistik hasil estimasi model. Dari Tabel 5.1. tersebut terlihat bahwa model memiliki R-square yang sangat baik. Persamaan yang memiliki R-square terendah 70% dan ada persamaan yang memiliki R-square cukup besar yaitu 97%. Hasil DW-statistik menunjukkan bahwa persoalan autokorelasi tidak terlalu serius mengganggu hasil estimasi model karena hanya dua persamaan yang memiliki DW-stat yang agak jauh dari nilai DW=2. Kendati ada dua persamaan yang memiliki nilai DW-stat demikian, tetapi karena jumlah observasi yang digunakan cukup banyak (dari tahun 1990-2009 data triwulanan), maka nilai DW tersebut tidak menunjukkan adanya gangguan autokorelasi.

Tabel 5.1. Nilai R-Square dan Durbin Watson Statistik Hasil Estimasi Model

Blok	No	Nama Persamaan	Jenis Persamaan	R-squared	DW
Ekspor	1	Persamaan Ekspor Pertanian (X_agr)	Struktural	76%	2,08
	2	Persamaan Ekspor Industri (X_ind)	Struktural	97%	1,14
	3	Persamaan Ekspor Migas (X_mig)	Struktural	87%	1,22
	4	Persamaan Ekspor Lainnya (X_oth)	Struktural	94%	1,85
	5	Persamaan Identitas (X_TOT)	Identitas		
Impor	1	Persamaan Impor Kapital (M_CAP)	Struktural	94%	1,87
	2	Persamaan Impor Bahan Baku (M_RAW)	Struktural	96%	1,70
	3	Persamaan Impor Barang Konsumsi (M_CONS)	Struktural	89%	1,71
	4	Persamaan Identitas Impor (M_TOT)	Identitas		
Investasi	1	Persamaan Investasi Domestik (INV_DOM)	Struktural	81%	2,01
	2	Persamaan Investasi Asing (PMA)	Struktural	70%	2,07
	3	Persamaan Identitas Investasi (INV_TOT)	Identitas		

4.2 Interpretasi Model

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa karena berdasarkan kriteria ekonomi dan statistik hasil estimasi model dapat digunakan untuk menganalisis perilaku ekspor, impor dan investasi, maka pada sub bab ini akan diuraikan interpretasi model. Dengan mengacu pada Tabel Lampiran 3 (Hasil Estimasi), maka dapat dibahas hal-hal berikut:

4.2.1 Ekspor Komoditas Pertanian

Dari hasil estimasi model ekspor komoditi pertanian terlihat bahwa ekspor komoditas pertanian indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi kinerja sektor pertanian itu sendiri. Makin baik kinerja sektor pertanian, maka makin besar pula ekspor komoditas pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh yang positif dan signifikan variabel GDP sektor pertanian (GDP_AGR) dan kinerja ekspor sebelumnya (X_AGR(-1)). Dari sisi *demand*, faktor yang berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian adalah kondisi perekonomian dunia. Makin membaik kondisi perekonomian dunia, maka makin meningkat pula ekspor komoditas pertanian. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh GDP China (sebagai *proxy* kondisi perekonomian dunia) terhadap ekspor komoditas pertanian (Lihat Tabel Lampiran 3). Hal ini juga menunjukkan bahwa perekonomian China sangat membutuhkan komoditas pertanian dari Indonesia. Oleh karena itu, adanya FTA ASEAN- CHINA merupakan momentum penting untuk meningkatkan ekspor pertanian sebesar-besarnya, karena saat ini pertumbuhan ekonomi China meningkat relatif tinggi. Tahun 2011 dan 2012 perekonomian China diprediksi tumbuh di atas 9% hingga 10%. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan ekspor komoditas pertanian dan mengambil manfaat dari FTA ASEAN China, maka Indonesia ekspor komoditas pertanian ke China harus terus didorong.

Berdasarkan hasil analisis di atas, terlihat bahwa pasar ekspor komoditas pertanian dari sisi permintaan tidak banyak persoalan, karena perekonomian China dan dunia pada umumnya akan membaik. Peluang ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil estimasi model terlihat bahwa oleh karena dari sisi penawaran kinerja sektor pertanian sangat menentukan eksportnya, maka untuk meningkatkan ekspor di masa mendatang tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan kinerja sektor pertanian. Investasi di sektor pertanian, khususnya perkebunan dan perikanan harus terus didorong. Regulasi yang distortif di sektor pertanian harus diubah. Lebih dari itu, kinerja sektor pertanian juga bisa didorong dengan memberikan kredit pertanian dengan bunga rendah. Hanya sayang, sektor pertanian ini sangat peka dengan iklim dan cuaca, sehingga sedikit saja ada anomali iklim dan cuaca, kinerja sektor ini akan menurun. Oleh karena itu, manajemen budidaya dengan basis informasi iklim dan cuaca juga sangat diperlukan.

4.2.2. Ekspor Manufaktur

Dari hasil estimasi model menunjukkan bahwa ekspor komoditas industri manufaktur dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kondisi perekonomian dunia (dengan *proxy* GDP USA, GDP China dan GDP Jepang). Itulah mengapa dalam kondisi krisis global tahun 2008-2009, ekspor manufaktur turun secara signifikan. Di samping itu, dari sisi *supply* yang mempengaruhi ekspor manufaktur adalah kinerja sektor manufaktur itu sendiri. Hal ini terlihat dari pengaruh variabel investasi satu periode sebelumnya dan impor bahan mentah (Lihat Tabel Lampiran 3). Jika investasi dan impor bahan mentah meningkat, maka ekspor industri pengolahan juga akan meningkat.

Selain itu, hasil estimasi model ini menunjukkan bahwa ekspor manufaktur bisa ditingkatkan dengan mendorong iklim investasi dan memudahkan impor bahan baku. Oleh karena itulah, wacana kebijakan pembebasan bea masuk bahan baku impor perlu diimplementasikan dengan segera. Di samping itu pembenahan iklim investasi dengan memperbaiki infrastruktur serta perlu dilakukan review terhadap regulasi-regulasi yang menghambat baik di tingkat daerah kabupaten kota maupun tingkat nasional.

4.2.3. Ekspor Migas

Hasil estimasi model menunjukkan bahwa ekspor migas Indonesia dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian dunia (GDP USA, GDP China dan GDP Jepang sebagai *proxy*, lihat Tabel Lampiran 3). Hal ini wajar mengingat pada umumnya migas merupakan sumber energi bagi proses produksi, sehingga jika perekonomian menurun, permintaan dunia terhadap migas akan menurun juga. Demikian pula sebaliknya jika perekonomian dunia sedang *booming*, permintaan dunia akan migas juga akan meningkat.

Variabel lain yang juga berpengaruh positif terhadap ekspor migas adalah dari sisi supply dalam negeri. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa ekspor migas sangat ditentukan oleh kinerja sektor migas domestik yang ditunjukkan oleh besarnya investasi di sektor migas dan ekspor migas sebelumnya (Lihat Tabel Lampiran 3). Akhir-akhir ini ekspor migas memang menurun dan ini diduga lebih disebabkan oleh belum maksimalnya kinerja sektor migas. Iklim investasi sektor migas masih terhambat berbagai regulasi. Sifat investasi migas yang membutuhkan dana besar (untuk *sunk cost*) dan butuh tahapan yang relatif panjang mulai dari eksplorasi sampai dengan menghasilkan produk migas juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa kinerja sektor migas dalam negeri masih terpuruk.

4.2.4. Ekspor Sektor Pertambangan dan Lainnya

Berdasarkan hasil estimasi model sebagai tertera dalam Tabel Lampiran 3, terlihat bahwa variabel yang berpengaruh terhadap ekspor sektor pertambangan dan lainnya adalah kondisi perekonomian dunia. Dari sisi *demand*, nilai ekspor Indonesia sangat bergantung kepada kondisi perekonomian dunia, karena barang tambang seperti batubara, timah, nikel, dan lain-lain memang merupakan bahan penting bagi dunia. Oleh karena itu, ketika ekonomi dunia mengalami kontraksi, maka ekspor sektor pertambangan ini akan menurun. Demikian pula sebaliknya ketika perekonomian mengalami ekspansi, maka ekspor sektor pertambangan ini akan meningkat.

Variabel lainnya yang berpengaruh cukup signifikan terhadap ekspor pertambangan adalah kinerja sektor pertambangan itu sendiri. Untuk memacu kinerja sektor ini diperlukan kemudahan dalam investasi sektor pertambangan. Oleh karena itu, sektor pertambangan adalah sektor yang tidak bisa diperbaharui, karena suatu saat cadangan tambang di suatu lokasi akan habis, maka perlu dilakukan eksplorasi untuk memperoleh cadangan barang tambang baru, sehingga ekspor pertambangan bisa terus bertumbuh.

4.2.5. Impor Barang Modal, Impor Bahan Baku dan Impor Barang Konsumsi

Berdasarkan hasil estimasi model (Lihat Tabel Lampiran 3), impor barang modal dipengaruhi secara signifikan oleh ekspor total. Hal ini disebabkan karena impor barang modal diperlukan dalam rangka untuk proses produksi memenuhi ekspor. Di samping ekspor, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap impor barang modal adalah nilai tukar atau *exchange rate* (ER). Ketika nilai tukar melemah, harga barang modal yang diimpor akan terasa mahal, sehingga impornya menurun. Itulah mengapa ketika krisis tahun 1998, impor barang modal ini turun cukup besar karena nilai tukar rupiah sangat lemah.

Variabel impor barang modal sebelumnya juga berpengaruh terhadap impor barang modal saat ini. Hal ini dapat dijelaskan bahwa impor barang modal sebelumnya merupakan rujukan para investor bahwa kondisi perekonomian saat ini dan pada masa mendatang dalam kondisi baik sehingga investor tergerak untuk melakukan investasi yang pada gilirannya impor barang modal meningkat karena setiap investasi memerlukan impor barang modal. Sementara itu, untuk impor bahan baku/mentah dipengaruhi secara signifikan oleh ekspor industri. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meningkatnya permintaan ekspor industri membutuhkan bahan baku/mentah lebih banyak dan untuk itu diperlukan impor bahan mentah/baku. Variabel lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap impor bahan baku adalah nilai tukar.

Akan halnya dengan impor barang konsumsi, hasil estimasi model menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap impor barang konsumsi adalah kondisi perekonomian domestik (GDP Total) yang mencerminkan daya beli. Manakala GDP meningkat, berarti daya beli naik. Ketika daya beli naik, maka permintaan barang impor juga meningkat, sehingga impor barang konsumsi meningkat. Berbeda dengan impor barang modal dan bahan baku, nilai tukar tidak signifikan mempengaruhi impor barang konsumsi. Hal ini diduga karena harga barang impor sudah tidak berbeda dengan harga komoditas dalam negeri. Bahkan dalam beberapa kasus, jika barang konsumsi tersebut berasal dari China, harga barang impor relatif lebih murah. Inilah kiranya, mengapa harga barang impor yang dikonsumsi, harganya tidak bergantung lagi dengan pergerakan nilai tukar.

4.2.6 Investasi : PMDN dan PMA

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa investasi yang dianalisis dalam kajian ini adalah realisasi investasi yang datanya bersumber dari BKPM yang dibagi menjadi PMDN dan PMA. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMDN (investasi domestik) adalah tingkat suku bunga. Hal ini sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk meningkatkan investasi domestik adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Penurunan tingkat suku bunga juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

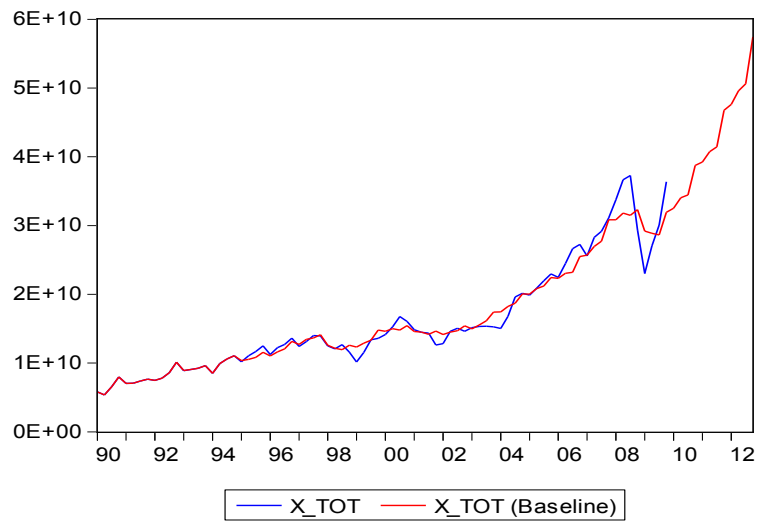
Variabel lain yang berpengaruh terhadap PMDN adalah nilai tukar. Makin fluktuatif nilai tukar, maka akan menyulitkan investor. Oleh karena itu, menstabilkan nilai tukar akan mampu menarik investor, karena kestabilan nilai tukar merupakan ukuran kepastian bagi investor domestik. Di samping itu, variabel ekspor total juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

meningkatnya PMDN. Hal ini karena ekspor merupakan rujukan investor domestik dalam melihat prospek investasi di masa mendatang. Jika ekspor meningkat, investor memandang sebagai sinyal positif untuk berinvestasi. Sementara itu, untuk PMA (investasi asing), hasil estimasi model menunjukkan bahwa nilai tukar dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan. Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa kestabilan nilai tukar dan suku bunga merupakan hal yang penting bagi investor asing. Variabel ekspor total juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA. Dalam hal ini ekspor total merupakan sinyal bagi investor asing. Ketika kinerja ekspor membaik, minat investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia juga meningkat.

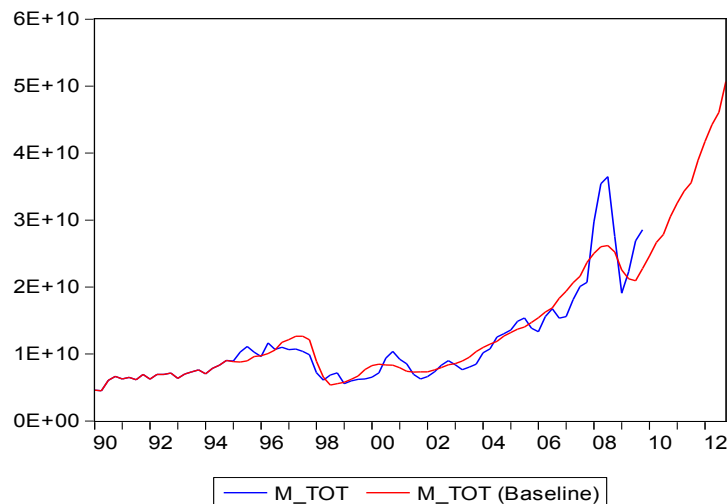
4.3 Daya Prediksi Model dan Hasil Proyeksinya

Berdasarkan nilai *R-square* hasil estimasi model sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1 bahwa *R-square* terendah dari sistem persamaan simultan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 70% yang dimiliki oleh persamaan investasi asing (INV_PMA) dan persamaan yang memiliki *R-square* cukup besar yaitu 97% adalah persamaan ekspor manufaktur (X_IND). Nilai *R-square* tersebut menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi ke depan yang cukup baik. Hasil perbandingan antara nilai aktual (data historis) dan nilai prediksi model juga menunjukkan bahwa daya prediksi model cukup baik digunakan untuk memproyeksi nilai ekspor, impor dan investasi (Lihat Gambar 5.1, Gambar 5.2 dan Gambar 5.3).

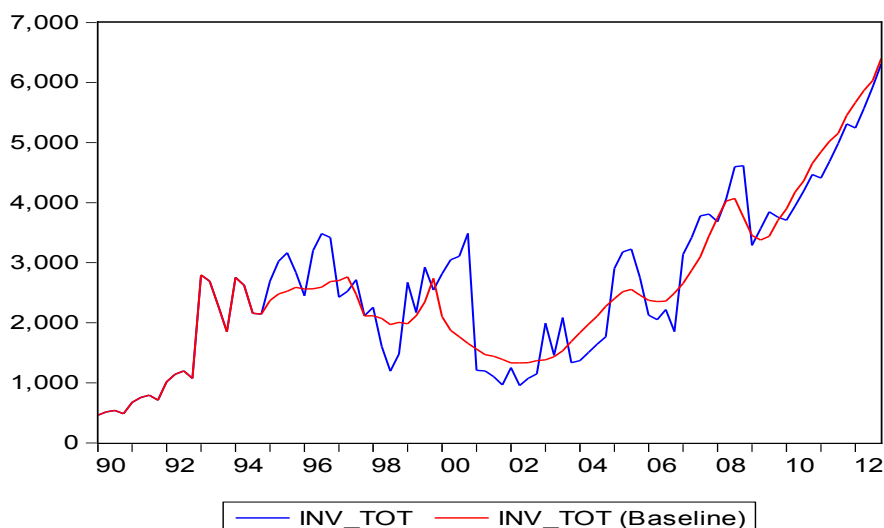
Gambar 5.1. Perbandingan Nilai Aktual dan Hasil Prediksi Data Ekspor



Gambar 5.2. Perbandingan Nilai Aktual dan Prediksi Data Impor



Gambar 5.3. Perbandingan Nilai Aktual dan Prediksi Data Investasi



Selanjutnya hasil estimasi model perdagangan dan investasi tersebut digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan nilai ekspor, impor dan investasi sampai dengan tahun 2012 secara triwulanan. Perlu disampaikan di sini bahwa untuk tahun 2010 masih dilakukan proyeksi, karena data yang digunakan untuk model hanya sampai tahun 2009 triwulan keempat. Hal ini juga dimaksudkan untuk memvalidasi hasil proyeksi model dengan data aktual tahun 2010. Asumsi yang digunakan untuk melakukan proyeksi disajikan pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2. Asumsi yang Digunakan untuk Proyeksi

Keterangan	2010	2011	2012	Keterangan
PDB Total	5	5,8	6,2	Asumsi Bappenas
Investasi riil dalam PMTD	6,4	6,4	6,4	Olahan rata2 year on year
GDP China	9,1	9,1	9,1	Olahan rata2 year on year
GDP Jepang	1,6	1,6	1,6	Olahan rata2 year on year
GDP USA	2,5	2,5	2,5	Olahan rata2 year on year
PDB Industri	5,9	5,9	5,9	Olahan rata2 year on year
PDB Penggalian dan Pertambangan	1,03	1,03	1,03	Olahan rata2 year on year
Nilai Tukar	9.250	9.300	9.300	Asumsi Bappenas
Bunga Investasi	12,72	12,6	12,6	Suku bunga terakhir
Exchange Rate Riil	9.000	9.000	9.000	Suku bunga terakhir
GDP Pertanian	2,3	2,3	2,3	Olahan rata2 year on year

Dengan asumsi tersebut diperoleh hasil proyeksi pertumbuhan ekspor, impor dan investasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.3, Tabel 5.4 dan Tabel 5.5. Perlu dijelaskan sebelumnya bahwa proyeksi pertumbuhan yang disajikan pada tabel-tabel tersebut diperoleh dari proyeksi nilai-nilai nominal (bukan nilai riil) terhadap variabel-variabel yang diproyeksi tersebut. Oleh karena itulah nilai proyeksi pertumbuhannya terlihat cukup besar karena sejatinya nilai tersebut adalah volume dikalikan dengan harga. Sehingga, bisa jadi ekspor meningkat bukan karena volumenya, tetapi dengan volume tetap, tetapi harga meningkat, maka nilai ekspor bisa meningkat. Namun karena kebutuhan dalam kajian ini dan karena dalam kebutuhan sehari-hari nilai proyeksi ekspor yang diinginkan oleh Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional adalah ekspor nominal, maka penyajian hasil proyeksi dalam nilai nominal tidak bisa dihindarkan.

Berdasarkan proyeksi dari model diperoleh bahwa tahun 2010, pertumbuhan ekspor nominal akan bisa mencapai 21%, tahun 2011 juga akan sekitar 21% dan tahun 2012 pertumbuhan ekspor total akan mencapai 22,8%. Pertumbuhan ekspor yang besar tersebut akan banyak disumbangkan oleh pertumbuhan ekspor pertambangan dan barang lainnya. Sementara itu, untuk impor, pertumbuhan nominal tahun 2010, 2011 dan 2012 diprediksi sebesar 30%, 21% dan sekitar 21%. Pertumbuhan impor tahun 2010 yang cukup besar tersebut, karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2009, impor turun cukup jauh. Ketika perekonomian pada tahun 2010 membaik, pertumbuhan nominal impor diperkirakan melonjak cukup besar. Untuk pertumbuhan investasi dilihat dari nilai nominal PMDN dan PMA, investasi nominal tahun 2010, 2011 dan 2012 diprediksi tumbuh masing-masing sebesar 25,6%, 17,2% dan 17,3%. Berdasarkan hasil tersebut, diperkirakan sampai tahun 2010 hingga tahun 2011 perekonomian Indonesia mengalami ekspansi yang didorong oleh pertumbuhan ekspor dan investasi. Dengan dorongan sumber pertumbuhan dari ekspor dan investasi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia makin berkualitas.

Tabel 5.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekspor (%)				
	Pertanian	Manufaktur	Migas	Pertambangan dan Lainnya	Ekspor Total
2010Q1	25,6	10,9	-3,0	30,3	11,4
2010Q2	29,1	17,3	2,9	37,7	18,0
2010Q3	29,3	18,7	7,1	41,3	20,4
2010Q4	28,3	18,4	10,0	42,9	21,4
2011Q1	16,2	17,2	11,5	42,9	20,7
2011Q2	12,7	15,2	11,9	43,5	19,6
2011Q3	11,6	15,5	12,3	44,8	20,2
2011Q4	11,3	15,1	12,5	45,9	20,7
2012Q1	11,2	15,2	12,6	47,0	21,3
2012Q2	11,1	15,2	12,7	47,7	21,7
2012Q3	11,2	15,4	12,7	48,4	22,1
2012Q4	11,3	15,2	12,8	48,9	22,8

Tabel 5.4. Proyeksi Pertumbuhan Impor (%)

Tahun	Pertumbuhan Impor (%)			
	Barang Modal	Bahan Baku	Barang Konsumsi	Total
2010Q1	9,42	9,29	9,56	9,33
2010Q2	21,36	28,59	9,83	25,51
2010Q3	30,06	36,74	10,28	30,98
2010Q4	35,97	36,33	10,23	30,28
2011Q1	39,10	32,39	10,81	27,01
2011Q2	39,99	27,39	11,82	22,95
2011Q3	41,64	25,42	12,21	21,35
2011Q4	43,12	24,73	11,67	20,75
2012Q1	44,72	24,85	11,26	20,62
2012Q2	46,14	25,07	11,78	20,75
2012Q3	47,48	25,34	12,20	20,81
2012Q4	48,93	25,39	11,75	20,62

Tabel 5.5. Proyeksi Pertumbuhan Investasi (%)

Tahun	Pertumbuhan Investasi (%)		
	PMDN	PMA	Ivestasi Total
2010Q1	16,4	11,9	12,8
2010Q2	26,4	22,9	23,6
2010Q3	27,9	26,5	26,8
2010Q4	25,4	25,7	25,6
2011Q1	22,5	24,9	24,4
2011Q2	18,1	20,8	20,2
2011Q3	16,4	18,6	18,2
2011Q4	15,5	17,6	17,2
2012Q1	15,4	17,3	16,9
2012Q2	15,3	17,3	16,9
2012Q3	15,5	17,4	17,0
2012Q4	15,7	17,8	17,3

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Ekspor, impor dan investasi mempunyai kaitan yang erat satu dengan lainnya. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif dan saling terkait antara perdagangan luar negeri dan kebijakan investasi.
- Eskpor komoditas pertanian, manufaktur, migas dan pertambangan sangat ditentukan oleh kinerja sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, untuk mendorong ekspor perlu dilakukan pendekatan dengan mendorong kinerja masing-masing sektor. Untuk mendorong kinerja komoditas ekspor tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas dan daya saing. Agar produktivitas dan daya saing meningkat, diperlukan kebijakan yang tidak distortif dalam perdagangan, perbaikan infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi baik di tingkat pusat maupun daerah.
- Kondisi perekonomian global sangat berpengaruh terhadap ekspor total, terutama dengan negara mitra dagang yang rawan dengan krisis ekonomi. Agar ekspor lebih stabil diperlukan kebijakan untuk mengubah orientasi ekspor dari Eropa dan USA ke China (komoditi pertanian), India dan Timur Tengah. Namun sebelum ini dilakukan perlu ada penelitian lebih lanjut komoditas apa yang harus diekspor ke India dan Timur Tengah tersebut.
- Kestabilan nilai tukar sangat diperlukan untuk mendorong investasi dan ekspor.
- Penurunan tingkat suku bunga diperlukan agar investasi PMA meningkat.
- Kemudahan impor barang modal dan bahan baku akan meningkatkan nilai ekspor dan investasi.

5.2 Rekomendasi Kebijakan

- Penurunan atau pembebasan bea masuk impor barang modal dan bahan baku merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mendorong nilai ekspor dan investasi.
- Perlu dibuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik (aturan/regulasi yang menumbuhkan ekspektasi positif) seperti kebijakan tentang penyediaan dan perbaikan infrastruktur (jalan, pelabuhan, listrik, dan gas dan kemudahan investasi, kelembagaan) untuk merangsang investor meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspor dan volume perdagangan

5.3. Saran untuk Penyempurnaan Kajian

- Model yang dibangun ini masih perlu terus dikembangkan dengan berbagai pengembangan dan perbaikan. Pengembangan dan perbaikan dapat dilakukan untuk menyempurnakan dan memperkaya analisis model yang dikembangkan dalam kajian ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan model ini adalah :
- Agar model ini dapat menganalisis perdagangan Indonesia ke beberapa pasar regional, maka model ini perlu dikembangkan dengan menambah variabel pasar ekspor menurut kelompok negara ASEAN, negara-negara Pasifik dan lainnya. Potensi *demand* di kelompok negara tersebut dapat didekati dengan memasukkan variabel GDP dari kelompok negara-negara tersebut ke dalam model, termasuk GDP Singapura.
- Menambahkan beberapa variabel kebijakan yang mempengaruhi sisi *supply* seperti, seperti variabel kebijakan tentang infrastruktur dan bea masuk.
- Memperluas blok model dengan memasukkan variabel *supply side* sebagai endogen variabel, misal seperti kinerja sektor pertanian dan industri serta migas dijadikan sebagai endogen variabel.
- Terus meng-*update* data yang ada dan terus mengevaluasi akurasi prediksi model.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2009. Perdagangan dan Investasi di Indonesia: Sebuah Catatan tentang Daya Saing dan Tantangan Ke Depan. Jakarta, Kemitraan dan Bappenas.
- Anggraini, Dewi. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Kopi Indonesia Dari Amerika Serikat. Tesis. Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Enders, W. 2004. *Applied Econometric Timeseries*. New York, John Willey & Sons
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*, 4th edition, New York. McGraw-Hill, Inc.
- Ichimura, S and Matsumoto, Y. 1994. *Econometric Models of Asian-Pacific Countries*. New York, Springer-Verlag
- Judge, George, et. al. *Introduction to the Theory and Practice of Econometrics*. 1988. Second Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- Kesumajaya, I Wayan Wita . 2008. Faktor yang Mempengaruhi Impor Bahan Baku Indonesia. BULETIN STUDI EKONOMI Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar
- Mankiw, N. Gregory. 2003. Teori Makroekonomi. Edisi Kelima (Terjemahan). Jakarta, Erlangga.
- Rachmansyah, Djoko Waluyo Yanuar. 2004. *Analisis Impor Bahan Baku Indonesia Pada Sektor Perindustrian Berdasar Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Tesis. Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Romer, David. 2001. *Advanced Macroeconomics*. Second Edition. New York. McGraw-Hill, Inc.
- Salim, Isa. 2006. Analisis Faktor-Faktor Ekonomi Makro Yang Mempengaruhi Investasi Pada Sektor Pertanian di Indonesia Periode Tahun 1984-2004. Skripsi. Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2000. Makroekonomi Modern. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Thomas, R.L. (RT1) .1997. *Modern Econometrics : an Introduction*. Addison-Wesley. Harlow.
- Verbeek, Marno (MV). 2000. *A Guide to : Modern Econometrics*. John Wiley and Sons, Ltd.

ANALISIS KORELASI ANTARA *TERMS AND CONDITIONS* PINJAMAN, BIAYA PINJAMAN DAN *RULES OF ORIGIN* DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI BILATERAL
email: kennedy@bappenas.go.id

ABSTRAK

Dalam kerjasama pembangunan, khususnya dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri, selama ini terdapat permasalahan belum optimalnya penggunaan skema pinjaman dan penerapan aturan pengadaan barang/jasa dan masih ada yang bersifat mengikat (*tied loan*). Sementara itu, berbagai kesepakatan internasional merekomendasikan penyaluran pinjaman yang sifatnya *untied*.

Kajian ini bertujuan untuk melakukan telaah atas *terms and conditions*, biaya pinjaman dan *rules of origin* dalam pengadaan barang/jasa negara-negara pemberi pinjaman dan pemerintah Indonesia dan hasilnya untuk mendapatkan peta serta profil dari masing-masing negara PPHLN bilateral. Sampel dari penelitian ini adalah negara-negara pemberi pinjaman luar negeri yang tergabung dalam keanggotaan DAC-OECD dan Non DAC-OECD yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pinjaman terhadap Indonesia.

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat penyaluran *tied loan* dari negara-negara PPLHn bilateral kepada Indonesia. Kajian ini juga menghasilkan temuan bahwa pinjaman luar negeri dengan status *tied*, umumnya memiliki komponen biaya yang lebih murah dibanding *untied loan*. Di samping itu dalam pinjaman luar negeri yang sifatnya *tied*, masih terdapat peluang memaksimalkan penggunaan *local content* karena beberapa negara PPLN menetapkan batas minimum ataupun maksimum dalam penggunaan *local content*.

1. LATAR BELAKANG

Keandalan sistem pengadaan barang/jasa adalah salah satu dari 12 (dua belas) Indikator Kemajuan *Paris Declaration* (2005) tentang Keefektifan Bantuan (*Paris Declaration on Aid Effectiveness*). *Paris Declaration*—yang ditandatangani para menteri negara-negara maju dan berkembang bersama para kepala lembaga pembangunan multilateral dan bilateral—merupakan capaian maju dalam kerjasama pembangunan untuk mewujudkan keefektifan pemanfaatan pinjaman/hibah luar negeri. *Paris Declaration* meletakkan lima prinsip utama dalam mewujudkan keefektifan pinjaman/hibah luar negeri, yaitu: “kepemilikan” (*ownership*), “penyesuaian” (*alignment*), “harmonisasi” (*harmonization*), “pengelolaan yang berorientasi hasil” (*managing for result*), dan “pertanggungjawaban timbal balik” (*mutual accountability*). Selain itu, *Paris Declaration* menyaratkan 56 komitmen kemitraan dan 12 Indikator Kemajuan dan kesepakatan untuk memonitor dan menilai tingkat kemajuan negara/lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) dan negara penerima Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan target pencapaian sampai tahun 2010.

Salah satu aspek penting dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri adalah pengadaan barang/jasa. Melalui pengadaan barang/jasa ini ditentukan jenis dan banyaknya barang/jasa yang diperlukan, dan perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut. Makin besar komponen barang/jasa yang dapat disediakan oleh perusahaan dalam negeri dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, makin besar manfaat kerjasama tersebut untuk menunjang pembangunan Indonesia. Seiring lahirnya komitmen bersama antara Pemerintah Indonesia dan 26 (dua puluh enam) negara/lembaga PPHLN (Mitra Pembangunan) yang tertuang dalam dokumen Jakarta Commitment 12 Januari 2009 di Jakarta, negara-negara PPHLN diharapkan dapat mengadopsi aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga diharapkan secara progresif menyesuaikan sistem pengadaan barang/jasa sesuai dengan praktik-praktik internasional (*international best practises*). Dengan dilakukannya penyesuaian pada sistem pengadaan barang/jasa, diharapkan biaya transaksi dapat diturunkan yang pada kelanjutannya akan meningkatkan keefektifan bantuan.

Disamping itu, Pemerintah melalui Jakarta Commitment telah melakukan reformasi sistem pengadaan barang/jasa nasional dan melakukan redefinisi pemanfaatan ODA yakni tidak hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan melainkan juga

sebagai sarana transfer of knowledge dan sarana peningkatan kapasitas sumber daya dan sistem nasional. Jakarta Commitment sendiri merupakan implementasi atau penerjemahan dari Paris Declaration pada level nasional.

2. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai dari kajian ini adalah:

- (1) Melakukan telaah atas terms and conditions, biaya pinjaman dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa negara-negara pemberi pinjaman dan Pemerintah Indonesia dan hasilnya untuk mendapatkan peta serta profil dari masing-masing negara PPHLN bilateral;
- (2) Melakukan analisis korelasi antara terms and conditions pinjaman, biaya pinjaman, dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa sehingga akan diperoleh gambaran komprehensif dari "profil" pinjaman negara-negara PPHLN;
- (3) Menyusun rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan tujuan tersebut, output yang diharapkan dari kajian ini adalah: (1) rekomendasi berdasarkan peta atau data terms and conditions, biaya pinjaman dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa pihak donor dan Pemerintah Indonesia, serta analisis korelasi antara terms and conditions pinjaman, biaya pinjaman, dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa. Hasil rekomendasi akan dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terutama menyangkut pendanaan luar negeri bilateral Pemerintah Indonesia; (2) Rencana-Tindak dalam rangka penggunaan sistem pengadaan barang/jasa nasional dan penyesuaian yang optimal antara terms and conditions, biaya pinjaman, dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa pihak donor dan Pemerintah Indonesia dalam kerangka Paris Declaration dan Perpres No. 54 tahun 2010. Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Kementerian PPN/Bappenas
 - Dihasilkannya peta data dan informasi mengenai terms and conditions, biaya pinjaman, dan rule of origin dalam pengadaan barang/jasa.
 - Sebagai bahan evaluasi dalam kerjasama bilateral untuk pembangunan dengan PPHLN bilateral.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Sebagai pelaksanaan amanat Paris Declaration dan Perpres No. 54 tahun 2010.
 - Sebagai bahan rekomendasi peningkatan kapasitas sistem nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pemberi Pinjaman Luar Negeri Bilateral
 - Diperoleh bahan rujukan dalam rangka peningkatan penyaluran pinjaman tidak mengikat.
 - Mendorong pencapaian target Paris Declaration dalam penggunaan sistem nasional pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. METODOLOGI

Metode kajian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif akan menampilkan hubungan statistik antarvariabel. Secara kualitatif akan menjelaskan korelasi antara terms and conditions, biaya pinjaman, dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa. Sampel penelitian diperoleh dari Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral untuk aspek terms and conditions, biaya pinjaman dan rules of origin dalam pengadaan barang/jasa dari negara-negara pemberi pinjaman luar negeri. Pengambilan sampel dilakukan dalam periode awal penulisan kajian (Maret- Juni). Unit analisis adalah negara-negara pemberi pinjaman luar negeri yang tergabung dalam keanggotaan DAC-OECD dan Non DAC-OECD dan memiliki kontribusi signifikan besarnya pinjaman terhadap Indonesia, antara lain: Denmark, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Spanyol, dan China.

3.1 Kerangka Analisis



3.2 Data

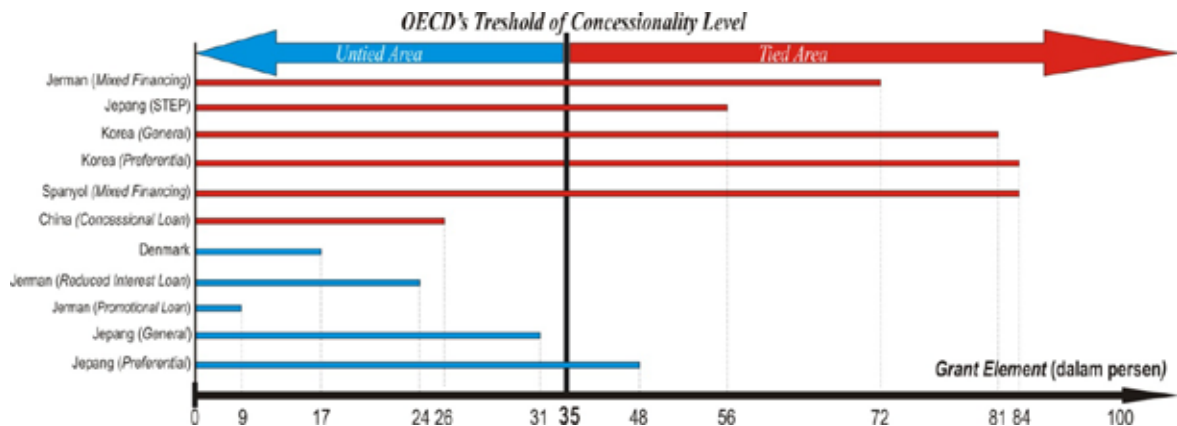
- Data primer diperoleh melalui dokumen/naskah perjanjian pinjaman luar negeri dan dokumen ketentuan pengadaan barang/jasa negara pemberi pinjaman.
- Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan kepustakaan peraturan perundangan yang terkait pengelolaan pinjaman luar negeri baik peraturan perundangan domestik maupun negara-negara PPHLN bilateral, dokumen kesepakatan internasional.
- Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif akan menampilkan hubungan statistik antarvariabel yang berkaitan dengan *terms and conditions* pinjaman/hibah luar negeri. Secara kualitatif akan menjelaskan analisis teoritik yang berkaitan dengan *terms and conditions*, biaya pinjaman, dan *rules of origin* dalam pengadaan barang/jasa.

4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan identifikasi terhadap *terms and conditions* pinjaman dari masing-masing negara PPHLN, maka terlihat bahwa tingkat bunga tied loan lebih murah dibanding untied loan. Batas bawah dari tingkat bunga untied loan lebih tinggi 0,55% dibanding tied loan. Kemudian untuk grace period, tied loan memiliki periode yang lebih panjang dibanding untied loan. Kondisi yang sama juga terjadi pada repayment period. Kemudian untuk biaya lain-lain dalam pemanfaatan pinjaman luar negeri, tied loan lebih murah dibanding untied loan.

Selama ini penyaluran pinjaman luar negeri (khususnya oleh negara-negara anggota OECD) harus mengikuti rekomendasi OECD yang menyatakan bahwa pinjaman luar negeri dengan concessionality level kurang dari 35% harus bersifat untied. Namun dalam prakteknya, negara-negara PPHLN tidak secara ketat mengikuti ketentuan di atas. Dengan menggunakan presentase grant element sebagai indikator concessionality level, terlihat bahwa negara-negara PPHLN juga menyalurkan pinjaman untied dengan concessionality level di atas 35%. Misalkan Denmark yang menyalurkan pinjaman untied dengan grant element hingga 43%. Jepang bahkan lebih tinggi lagi, dengan grant element mencapai 48% untuk skema Preferential Loan.

Gambar 1. Concessionality Level Pinjaman Luar Negeri Indonesia



Catatan: grant element berdasarkan perhitungan tim penulis dengan asumsi face value pinjaman senilai ekuivalen USD 50 juta. Grant element dihitung menggunakan World Bank concessionality calculator.

Dari data di atas, terlihat bahwa selama ini di kalangan negara-negara PPLN belum menerapkan indikator yang baku dan ketat terhadap ketentuan pinjaman tied/untied/partially untied. Dengan demikian, masih terdapat ruang negosiasi antara Pemerintah RI dengan pihak PPLN untuk memperbesar penyaluran pinjaman yang sifatnya untied, termasuk penyaluran untied loan dengan concessionality level di atas 35%.

Selama ini hanya OECD yang menetapkan batasan yang baku dalam menentukan ketentuan persentase suatu pinjaman boleh bersifat untied. Sayangnya Pemerintah RI belum mengatur dan menetapkan definisi maupun batasan resmi suatu pinjaman dikatakan tied/untied/partially untied.

Di samping itu, di kalangan negara-negara PPLN selama ini juga belum memiliki standar yang baku yang berlaku umum dalam menentukan batasan lender content maupun local content dalam setiap penyaluran pinjaman luar negeri yang sifatnya tied.

Kemudian untuk beberapa skema pinjaman yang statusnya tied, kita bisa melihat lebih jauh seberapa besar local content yang bisa diakomodir. Dari tabel di atas, terlihat juga bahwa tidak ada ketentuan yang baku yang berlaku umum dalam menentukan batasan antara grant element dengan lender content dalam pinjaman luar negeri. Misalkan Jepang dalam menyalurkan pinjaman, hanya membatasi lender content sebesar minimal 30% untuk Skema STEP.

Adapun China yang bukan anggota OECD menyalurkan pinjaman tied-nya (skema Concessional Loan) dengan grant element sebesar 25%, atau 10% lebih rendah dari batas minimum yang telah ditentukan oleh OECD.

Dari data concessionality level pinjaman luar negeri Indonesia, terlihat bahwa selama ini di kalangan negara-negara PPHLN belum menerapkan indikator yang baku dan ketat terhadap ketentuan pinjaman tied/untied/partially untied. Dengan demikian, masih terdapat ruang negosiasi antara Pemerintah RI dengan pihak PPHLN untuk memperbesar penyaluran pinjaman yang sifatnya untied, termasuk penyaluran untied loan dengan concessionality level di atas 35%.

Tabel 1 Korelasi antar-variabel grant element
Variabel dependen: Grant Element

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
I	-6.839452	2.230809	-3.065907	0.0070
FEE	-10.21049	16.11116	-0.633753	0.5347
RP	4.843609	2.882355	1.680435	0.1112
GP	8.895822	3.406270	2.611602	0.0182

R-Squared: 0.7670;

Regresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dilakukan terhadap variabel-variabel endogen seperti tingkat bunga pinjaman, biaya pinjaman, repayment period, dan grace period. Dari hasil estimasi di atas, terdapat setidaknya dua variabel endogen yang berpengaruh signifikan terhadap grant element pada taraf $\alpha=5\%$ yakni bunga pinjaman dan grace period. Tingkat bunga berpengaruh secara negatif terhadap grant element, yakni ketika suku bunga naik, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan persentase grant element. Grace period dan repayment periode berpengaruh positif, namun pengaruh grace period terhadap grant element jauh lebih signifikan dibanding repayment period. Korelasi yang sama juga terjadi antara biaya-biaya pinjaman dengan grant element namun biaya pinjaman tersebut tidak signifikan pengaruhnya terhadap grant element.

Berdasarkan identifikasi terhadap terms and conditions pinjaman dari masing-masing negara PPHLN, maka berikut disajikan peta syarat dan ketentuan pinjaman menurut kategori tied dan untied.

Tabel 2 Perbandingan Karakteristik Tied dan Untied Loan

Items	Untied Loan	Tied Loan
Tingkat suku bunga	0,00 – 2,72	0,10 – 2,50% *
Grace period	3 – 10 tahun	5 – 10 tahun
Repayment period	12 – 40 tahun	10 – 40 tahun
Commitment fee	0,00 – 0,25%	0,00 – 0,25%
Biaya lain-lain (% terhadap nilai pinjaman)	0,00 – 0,75%	0,00 – 0,50%
Coverage ratio	50 – 100%	50 – 100%
Grant Element	9 – 48%	25 – 85%

*Tidak termasuk skema Preferential Export Buyer's Credit (China).

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di dalam kajian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Menurut Survei Monitoring Pelaksanaan Paris Declaration 2008, sampai tahun 2008 penyaluran untied aid (bantuan tidak mengikat) dari negara-negara anggota DAC-OECD kepada Indonesia telah mencapai 73% dari total bantuan yang mereka salurkan untuk Indonesia. Nilai nominal yang dilaporkan sebagai untied aid adalah sebesar USD 1.376 juta, sedangkan nilai total bantuan bilateral adalah sebesar USD 1.879 juta. Sehingga, masih terdapat penyaluran tied loan dari negara-negara anggota DAC-OECD kepada Indonesia.
- Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia belum memiliki: (i) definisi dan standar indikator untuk tied/untied loan yang disepakati dengan negara/lembaga PPHLN; dan (ii) standar penentuan batasan lender content maupun local content.
- Analisis terhadap grant element menghasilkan penjelasan sebagai berikut: (a) Tied loan memiliki grant element tinggi (25-85%) dibanding untied loan (9-48%); (b) Suku bunga adalah variabel dependen dengan tingkat signifikansi yang paling besar dalam mempengaruhi persentase grant element.
- Secara umum, terdapat korelasi antara terms and conditions pinjaman dengan tying status. Pinjaman luar negeri dengan status tied, umumnya memiliki komponen biaya yang lebih murah dibanding untied loan dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Untied loan memiliki tingkat bunga lebih tinggi (0% – 2,72%) dibanding tied loan (0,10% - 2,50%); (b) Biaya-biaya lain (management fee/up front fee/administrative fee) dalam untied loan lebih tinggi (0% - 0,75%) dibanding tied loan (0% - 0,5%); (c) Grace period dalam untied loan lebih singkat (3 – 10 tahun) dibanding tied loan (5 – 10 tahun).

5. Dalam pinjaman luar negeri yang sifatnya tied, masih terdapat peluang memaksimalkan penggunaan local content karena setiap negara PPHLN menetapkan batasan yang berbeda dalam penggunaan local content,.
6. Pinjaman luar negeri yang menerapkan suku bunga mengambang bebas (floating rate) seperti Kredit Ekspor yang umumnya memiliki skema pinjaman Mixed Financing, sehingga akan terdapat risiko tingkat suku bunga jika terjadi fluktuasi suku bunga.
7. Biaya pinjaman sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Hasil analisis yang menggunakan metode Pearson Correlation, menunjukkan bahwa risiko biaya pinjaman dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah dan komposisi mata uang. Oleh sebab itu, posisi pinjaman luar negeri pemerintah dan beban pembayaran cicilan pokok serta bunganya akan meningkat jika Rupiah mengalami depresiasi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dihasilkkan dari kajian ini maka dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat daftar prioritas donor dengan indikator jumlah tied loan yang semakin menurun; denganmemprioritaskan pemanfaatan pinjaman luar negeri yang sifatnya untied.
2. Pemerintah perlu melaksanakan dialog bilateral secara reguler terutama untuk mengurangi penyaluran tied loan yang menimbulkan peningkatan transaction costs dan melakukan negosiasi agar pinjaman luar negeri dengan concessional level di bawah 35% bersifat untied.
3. Pemerintah perlu terus mendorong penggunaan local content (barang/jasa dalam negeri) dalam pengadaan barang/ jasa untuk kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri.
4. Pemerintah perlu meningkatkan upaya negosiasi dan dialog bilateral dengan pihak PPHLN untuk: (a) Memaksimalkan local content untuk pinjaman yang pengadaan barang/jasanya menggunakan metode international competitive bidding (ICB); (b) Memaksimalkan penggunaan local content hingga 100% untuk pinjaman tied yang memiliki concessional level di atas 35% dengan pertimbangan efisiensi pemanfaatan pinjaman; (c) meningkatkan penggunaan local content untuk tied loan untuk pinjaman yang menerapkan batas maksimum/minimum dari penggunaan local content.

TARGET	INDIKATOR UTAMA	KEBIJAKAN	RENCANA TINDAK
<i>Loan is untied</i>	<i>Terms and conditions</i> pinjaman luar negeri bersifat <i>untied</i> .	Memprioritaskan pemanfaatan pinjaman luar negeri yang sifatnya <i>untied</i> .	Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan pihak PPHLN agar pinjaman luar negeri dengan <i>concessional level</i> di bawah 35% bersifat <i>untied</i> .
Meningkatnya Penggunaan <i>Local Content</i> (barang/jasa dalam negeri) dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri.	Pihak PPHLN meningkatkan penggunaan <i>local content</i> .	Negosiasi dengan pihak PPHLN untuk memaksimalkan penggunaan <i>local content</i> .	Memaksimalkan <i>local content</i> untuk pinjaman yang pengadaan barang/jasanya menggunakan metode <i>international competitive bidding</i> (ICB). Untuk pinjaman <i>tied</i> dengan <i>grant element</i> di atas 35% agar memaksimalkan penggunaan <i>local content</i> hingga 100% dengan pertimbangan efisiensi pemanfaatan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Cambridge International Model United Nations. 2007. "Tied Aid, A Guide for Delegates".
- Chatterjee, Santanu dan Stephen J. Turnovsky. "Tied Versus Untied Foreign Aid: Consequences for a Growing Economy", paper prepared for Department of Economics University of Washington.
- Clay, Edward J., Matthew Geddes, Luisa Natali dan Dirk Willem te Velde. 2008. "The Developmental Effectiveness of Untied Aid: Evaluation of the Implementation of The Paris Declaration and of The 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to The LDCs". The Journal of Development Studies.
- Jepma, C. J. 1991. "The tying of aid". Paris: OECD.
- Josepa, M., dan Miquel-Florensa. 2007. "Aid Effectiveness: A comparison of Tied and Untied Aid", paper prepared for York University.
- OECD. Tanpa Tahun. "Good Procurement Practices for Official Development Assistance". Paris.
- OECD DAC. 1987. "DAC Guiding Principles for Associated Financing and Tied and Partially Untied Official Development Assistance". Paris.
- ———. 1991. "The Arrangement on guidelines for officially supported export credits (Helsinki Arrangement)". Paris: OECD.
- ————. 2001. "DAC Recommendation on Untying Official Development Assistance to the Least Developed Countries". Paris: Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development. Paris.
- ————. 2006. "DAC Recommendation on untying Official Development Assistance to the least developed countries. Amended". Paris.
- ————. 2006. "DAC in Dates The History of OECD's Development Assistance Committee". Paris.
- ————. 2008. "Survey on Monitoring the Paris Declaration: Making Aid More Effective by 2010". Paris: OECD.
- ————. 2008. "Implementing the 2001 DAC Recommendation on untying Official Development Assistance to the Least Developed countries and Heavily Indebted Poor Countries". Paris.
- ————. 2008. "The Export Credit Arrangement 1978-2008". Paris.
- ————. 2010. "Arrangement on Officially Supported Export Credits: January 2010 Revision". Paris.
- ————. 2009. "Implementation of The 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to The LDCS 2009 Review". Paris.
- World Bank. 2001. "Indonesia Country Procurement Assesment Report: Reforming the Public Procurement System". World Bank Press Release, March 2001.
- World Bank. 2004. "Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits". World Bank Press Release, May 2004.

Peraturan :

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 & Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Sumber Data :

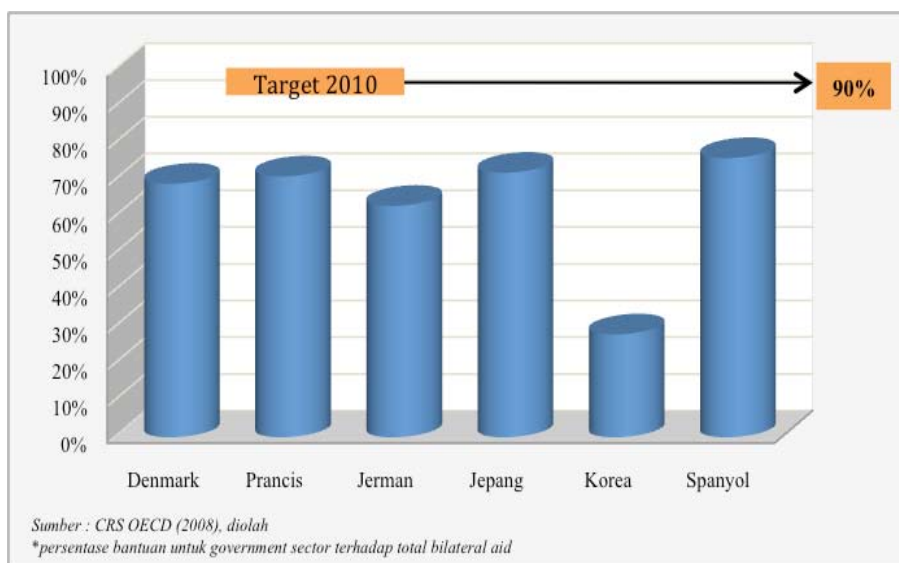
1. Bappenas
2. OECD statistic, www.stats.oecd.org
3. Departemen Keuangan

1.1 Paris Declaration

Paris Declaration menyatakan bahwa penyaluran pinjaman/hibah luar negeri harus menggunakan sistem pengadaan barang/jasa negara penerima PHLN. Sistem tersebut harus mengikuti praktik-praktik yang baik (*good practices*) yang diterima secara luas, dan mempunyai program reformasi untuk mencapai target.

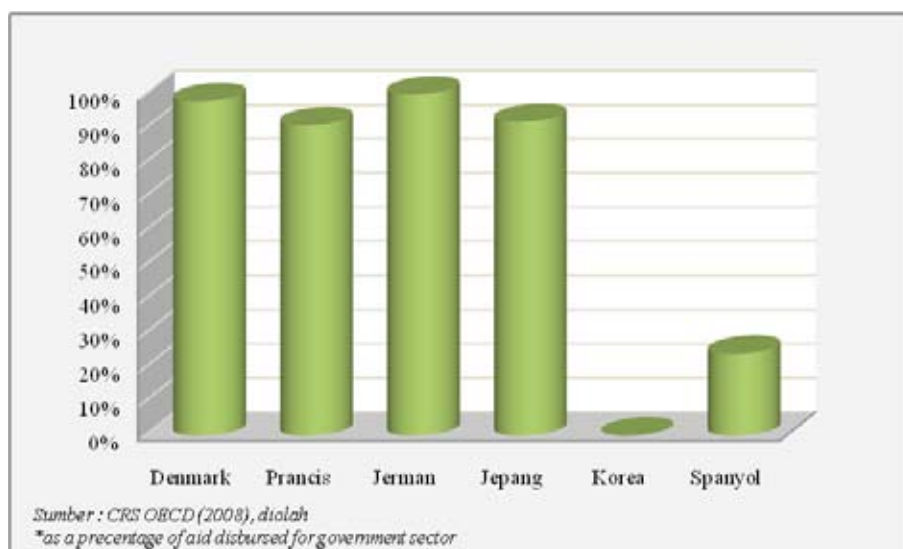
Dalam laporan Monitoring Implementasi *Paris Declaration* tahun 2008 untuk Indonesia, OECD melaporkan bahwa penyaluran pinjaman/hibah yang telah menggunakan sistem nasional pengadaan barang/jasa baru mencapai 56% dari total pinjaman/hibah yang disalurkan ke sektor pemerintahan (*government sector*). OECD sendiri menetapkan target 90% dari penyaluran pinjaman/hibah luar negeri dari setiap negara PPHLN harus menggunakan *national procurement system*. Gambar 1.1 menunjukkan capaian beberapa negara PPHLN dalam penggunaan *national procurement system*. Dari negara-negara yang menjadi sampel kajian ini, semuanya belum mencapai target yang ditetapkan OECD dalam hal penggunaan *national procurement system*.

Gambar 1.1 Capaian dan Target Penggunaan Procurement System (Indikator 5b)*



Paris Declaration menghasilkan rekomendasi bagi negara-negara PPHLN untuk meningkatkan penyaluran *untied loan*, seperti yang tertuang dalam Indikator 8. Penyaluran *untied loan* secara umum akan meningkatkan keefektifan bantuan dengan mengurangi biaya-biaya transaksi bagi negara mitra, meningkatkan kepemilikan negara penerima PHLN, serta meningkatkan penyesuaian prosedur dan mekanisme pemanfaatan pinjaman luar negeri.

Gambar 1.2 Rasio Penyaluran Untied Aid (Indikator 8)*



Jakarta Commitment

Jakarta Commitment adalah upaya pemerintah untuk memperkuat kepemilikan negara atas pembangunan, termasuk di dalamnya memperkuat kemampuan dan penggunaan sistem-sistem pemerintahan yang lebih kokoh. Upaya yang akan dikembangkan Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kemampuan dan penggunaan sistem pengadaan barang/jasa nasional, sebagai berikut:

- Pemerintah akan merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan kapasitas melalui rencana sektor dan strategi tematisnya dan negara-negara PPHLN akan mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran itu.
- Negara-negara PPHLN akan menyelaraskan diri secara lebih menyeluruh dengan program-program dan sistem Pemerintah Indonesia.
- Pemerintah Indonesia akan menetapkan suatu mekanisme di tingkat nasional untuk menentukan dan meninjau seberapa efektif kontribusi Pemerintah dan negara-negara PPHLN dalam pengembangan kapasitas.

Accra Agenda for Action (AAA)

Sejak adanya kesepakatan Paris Declaration pada tahun 2005, anggota-anggota DAC-OECD telah membuat Indikator Kemajuan dalam penggunaan untied aid. Sejumlah negara-negara PPHLN telah sepenuhnya menggunakan untied aid dalam penyaluran bantuan luar negeri mereka, dan mendorong pihak lain untuk melakukannya. Dalam hal ini, Accra Agenda for Action akan mempercepat pemanfaatan untied aid tersebut melalui pelaksanaan rekomendasi sebagai berikut:

- Anggota DAC-OECD akan memperluas cakupan penggunaan untied aid sesuai dengan Rekomendasi DAC tahun 2001.
- Negara-negara PPHLN akan lebih menggunakan untied aid dalam penyaluran bantuan luar negeri sampai batas maksimum.

Lampiran 2

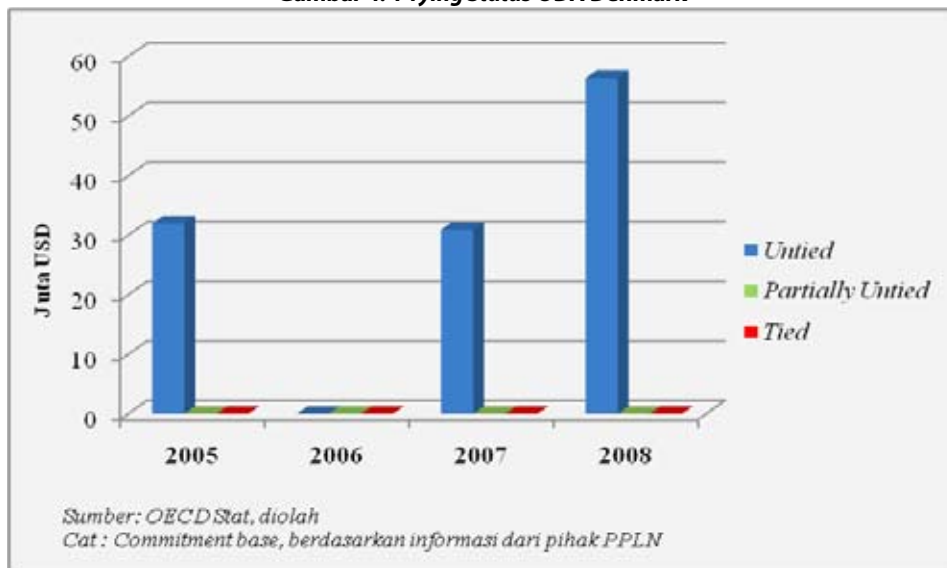
Profil Terms And Conditions Negara-Negara PPHLN



DENMARK

Hingga tahun 2008, nilai pinjaman bilateral Pemerintah Denmark tetap didominasi *untied loan* dengan nilai USD 1.343 juta atau sekitar 98,5% dari total komitmen pinjaman bilateral Pemerintah Denmark. Untuk tahun 2006, tidak ada data ODA loan karena Denmark pada tahun tersebut memprioritaskan penyaluran bantuan luar negerinya dalam bentuk *Grants* dan *Grant-Like Contributions*, demikian juga pada tahun 2009.

Gambar 4. 1 Tying Status ODA Denmark



Tabel 4. 1 Syarat dan Ketentuan Untied Loan Denmark

No.	Item	Keterangan
1.	Currency	Euro
2.	Tingkat bunga (%)	0.00
3.	Repayment period (tahun)	35
4.	Grace period (tahun)	10
5.	Biaya komitmen (%)	0,25
6.	Other fees (%)	Management fee: 0,38%
7.	Coverage ratio (%)	60% of contract value
8.	Besaran Lenders content/Local content	Limited for local and third country

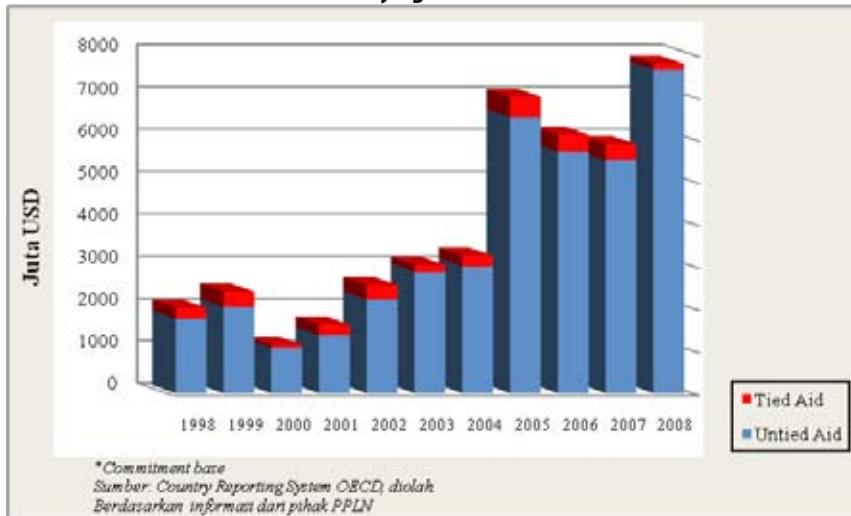
Sumber: General Conditions for Loan Agreement and for the Provision and Administration of Interest Subsidy under the Mixed Credit Programme for Developing Countries (August, 2007).



JERMAN

Profil untied loan Pemerintah Jerman dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, antara 2000-2009, rata-rata rasio untied loan terhadap total pinjaman bilateral adalah sebesar 92,1%. Sampai tahun 2009, nilai rasio untied loan adalah sebesar 99,2%.

Gambar 4. 2 Tying Status ODA Jerman



Tabel 4. 2 Syarat dan Ketentuan Untied Loan Jerman

No.	Items	Skema	
		Reduced Interest Loan	Promotional Loans
1	Currency	Denominasi dalam Euro	
2	Tingkat bunga (%)	2,72	6 months Euribor + Margin
3	Repayment period (tahun)	15	12
4	Grace Periods (tahun)	5	3
5	Biaya komitmen (%)	0,25	0,25
6	Up Front Fee / Administrative Fee/ Management Fee (%)	0,00	0,75
7	Coverage Ratio (of total cost)	100%	100%

Tabel 4. 3 Syarat dan Ketentuan *Tied Loan* Jerman

No.	Items	Pinjaman Lunak*	Mixed Financing	
			Komponen Pinjaman Lunak	Komponen Kredit Ekspor
1	Currency	Denominasi dalam Euro		
2	Tingkat bunga (%)	0,75	2,00	6 months Euribor + Margin
3	Repayment Period (tahun)	40	30	10
4	Grace Period (tahun)	10	10	5
5	Biaya komitmen (%)	0	0,25	0,25
6	Up Front Fee/ Administrative Fee/ Management Fee (%)	0	0,50	0,50
7	Besaran <i>Lenders Content</i> atau <i>Local Content</i>	Local content: s.d 15% Lender content: s.d 85%		
8	Metode pemilihan penyedia barang/ jasa	Limited tender di antara anggota Uni Eropa		

Catatan:

- Coverage Ratio adalah porsi kreditor dalam pembiayaan proyek

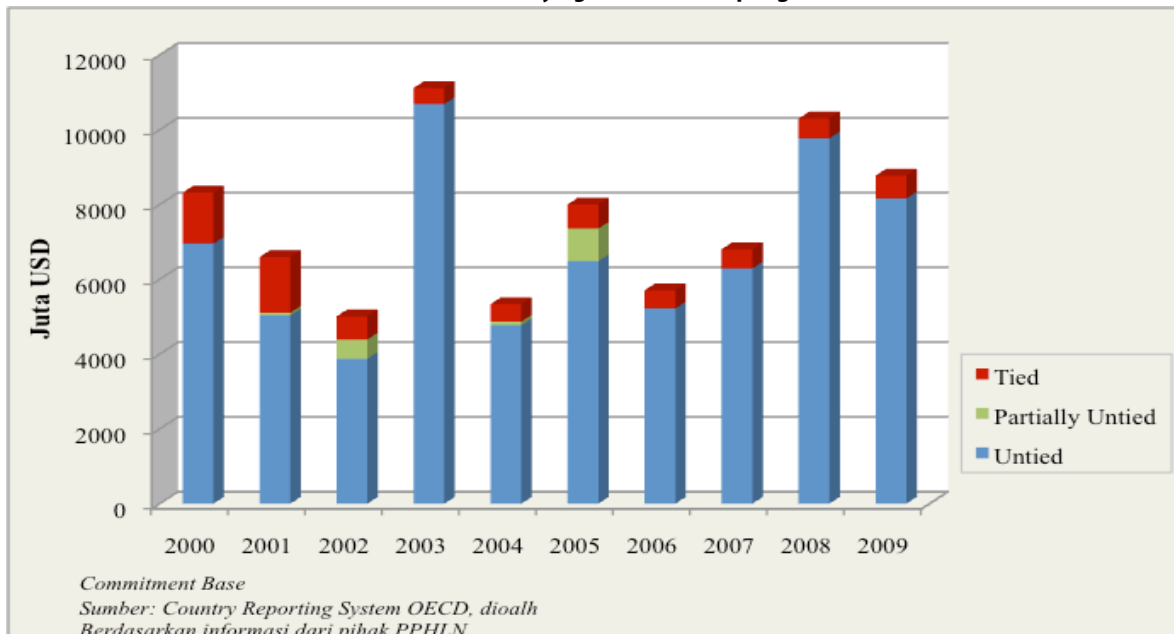
*Penyaluran pinjaman lunak untuk Indonesia hanya sampai tahun 2009.



JEPANG

Dalam sepuluh tahun terakhir, rasio *untied loan* terhadap total pinjaman bilateral Pemerintah Jepang mengalami fluktuasi. Namun rata-rata tahunan untuk porsi *untied loan* Pemerintah Jepang tergolong tinggi, yakni 87,55%. Sampai tahun 2009, nilai *untied loan* Pemerintah Jepang adalah sebesar USD 8.161 Juta atau senilai 92,99% dari total pinjaman bilateral Pemerintah Jepang pada tahun 2009.

Gambar 4. 3 Tying Status ODA Jepang



Tabel 4. 4 Syarat dan Ketentuan *Untied Loan* Jepang

No.	Items	Skema	
		General	Preferential
1	<i>Currency</i>	Denominasi dalam Yen	
2	Tingkat bunga (untuk kegiatan konstruksi, <i>civil works</i> , dan <i>procurement</i>)	1,40%	0,65%
3	Tingkat bunga (untuk jasa konsultasi)	0,01%	
4	<i>Repayment period</i> (Tahun)	25	40
5	<i>Grace Period</i> (Tahun)	7	10
6	Biaya komitmen (%)	0,10	0,20
7	<i>Coverage Ratio</i> (%)	75	75
8	Metode lelang	<i>International Competitive Bidding</i>	

Tabel 4. 5 Syarat dan Ketentuan *Tied Loan* Jepang (Skema STEP)

No.	Items	Keterangan
1	Mata uang	Denominasi dalam Yen
2	Tingkat bunga per tahun (untuk kegiatan konstruksi, <i>civil works</i> , dan <i>procurement</i>)	0,20%
3	Tingkat bunga (untuk jasa konsultasi)	0,01%
4	<i>Repayment period</i> (Tahun)	40
5	<i>Grace Period</i> (Tahun)	10
6	Biaya komitmen (%)	0,00
7	<i>Other fees</i> (%)	0,00
8	<i>Coverage Ratio</i> (%)	75,00
9	Besaran <i>Lenders Content</i> atau <i>Local Content</i>	<i>Japannese content</i> minimal 30%

Catatan:

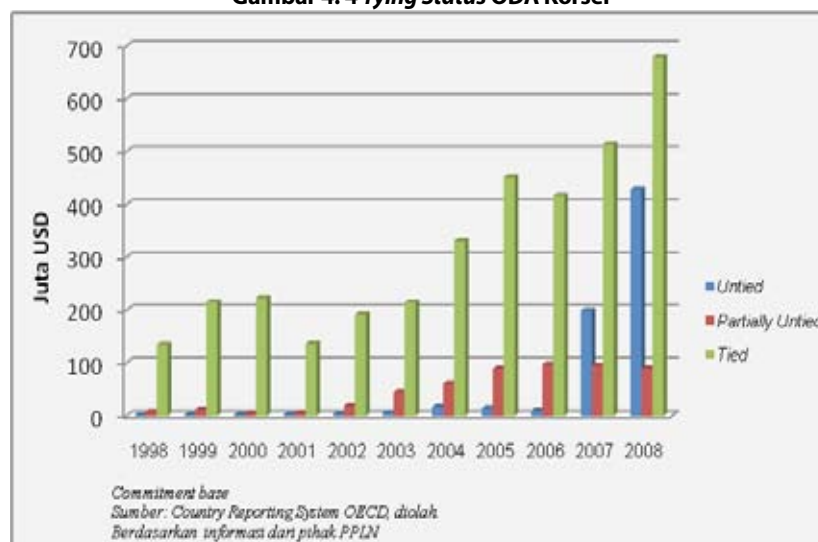
- *Coverage Ratio* adalah porsi kreditor dalam pembiayaan proyek
- Sumber: *Terms and Conditions of Yen Loan (effective from 1 April 2010)*



KOREA SELATAN

Sampai dengan tahun 2008, nilai *untied loan* dari Pemerintah Korea Selatan sebesar USD 428, 84 juta. Nilai tersebut setara dengan 35,8% dari total komitmen pinjaman bilateral Pemerintah Korea Selatan pada tahun yang sama.

Gambar 4. 4 *Tying Status* ODA Korsel



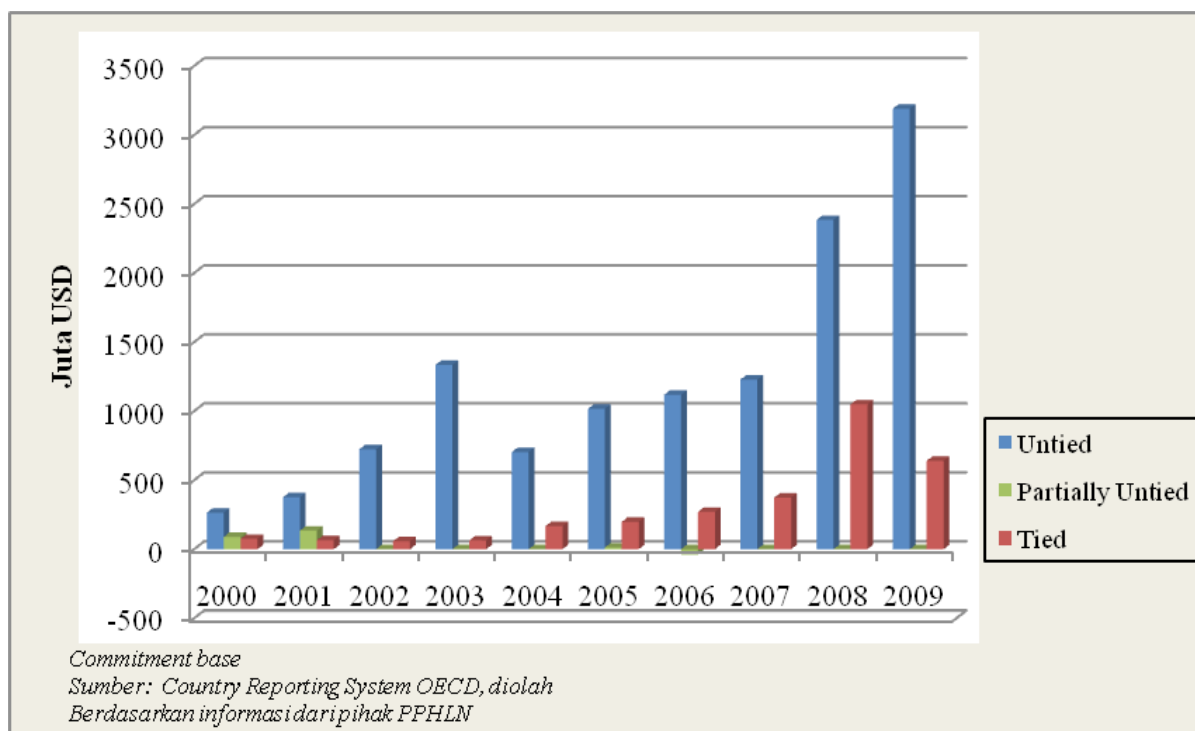
Tabel 4. 6 Syarat dan Ketentuan *Tied Loan* Korsel

No.	Items	Skema	
		General	Preferential
1	Mata uang	Denominasi dalam Won, ekivalen dengan jumlah tertentu dalam USD	
2	Tingkat Bunga per tahun (%)	0,15	0,10
3	<i>Repayment Period</i> (Tahun)	35	40
4	<i>Grace Period</i> (Tahun)	10	10
5	Biaya Komitmen (%)	0	0
6	<i>Up Front Fee/ Administrative Fee/ Management Fee</i> (%)	0,10	0
7	Besaran <i>Lenders Content</i> atau <i>Local Content</i>	- Konstruksi: <i>local content</i> s.d 50%	
		- Pengadaan barang: <i>local content</i> s.d 30%	
		- <i>Third country content</i> : s.d 10%	



PRANCIS

Gambar 4. 5 *Tying Status* ODA Prancis



Jumlah *untied loan* yang dilaporkan oleh Pemerintah Prancis untuk tahun 2009 adalah sebesar USD 3.190,64 juta¹. Pinjaman Pemerintah Prancis ke Indonesia selama ini lebih banyak berupa *untied loan*.

1 OECD DAC, Country Reporting System.

Tabel 4. 7 Syarat dan Ketentuan *Untied Loan* Prancis

No.	Items	Keterangan
1	Mata uang	Euro
2	Tingkat bunga per tahun (%)	0.25+ Euribor
3	<i>Repayment Period</i> (Tahun)	15
4	<i>Grace Period</i> (Tahun)	5
5	Biaya komitmen (%)	0,00
6	<i>Up Front Fee/ Administrative Fee/ Management Fee</i> (%)	0,00
7	<i>Coverage Ratio</i> (%)	50
8	Metode lelang	<i>International competitive bidding</i>

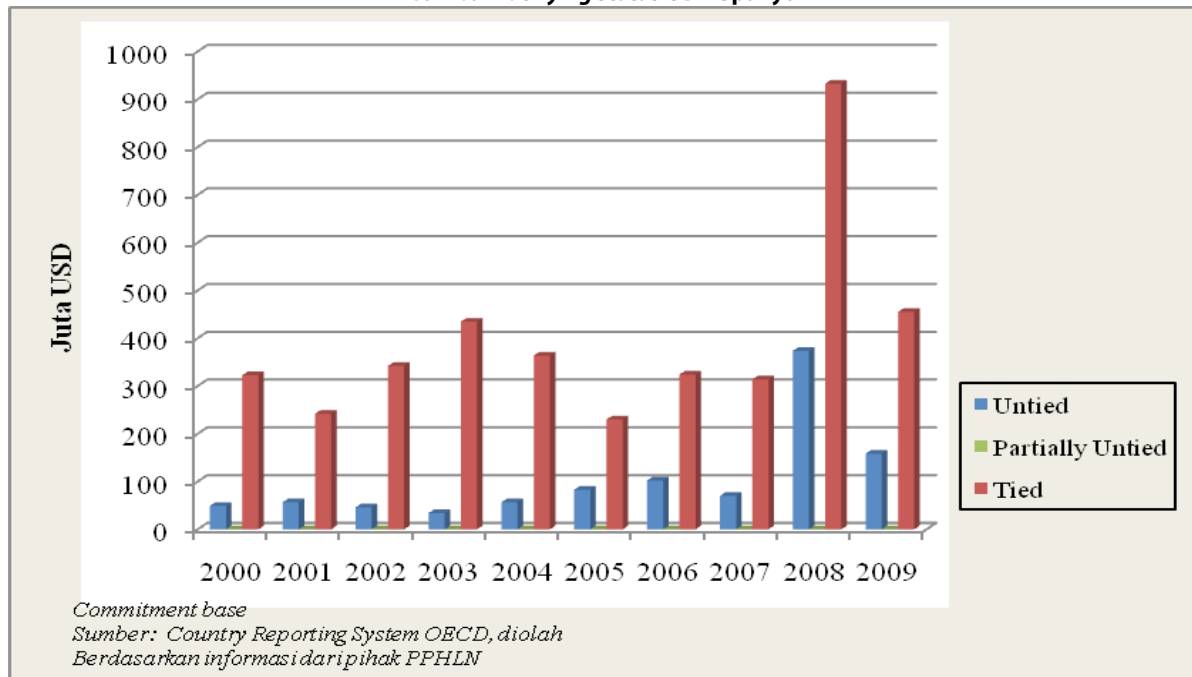
Catatan:

Coverage Ratio adalah porsi kreditor dalam pembiayaan proyek



SPANYOL

Gambar 4. 6 *Tying Status* ODA Spanyol



Menurut data historis dari *Country Reporting System* OECD, komitmen pinjaman bilateral yang dilaporkan oleh Pemerintah Spanyol didominasi oleh *tied loan*. Meskipun secara umum memiliki kecenderungan positif, namun nilai *untied loan* Pemerintah Spanyol dalam sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap rasio *untied loan* terhadap total pinjaman bilateral Pemerintah Spanyol (lihat Gambar 3.15). Sampai tahun 2008, nilai *untied loan* Pemerintah Spanyol sebesar USD 158,40 juta atau sebesar 25,8% dari total pinjaman bilateral.

Tabel 4. 8 Syarat dan Ketentuan Tied Loan Spanyol

No.	Items	Skema	
		Concessional loan	Kredit Ekspor
1	Mata uang	Euro	
2	Tingkat bunga (%)	0,15	1.75%+Euribor
3	Repayment period (Tahun)*	30	7
4	Grace Period (Tahun)	15	0
5	Biaya komitmen (%)	0	1
6	Up Front Fee/ Administrative Fee/ Management Fee (%)	0	0
7	Coverage Ratio (%)	100	50
8	Besaran Lenders Content atau Local Content	local content: s.d. 15%	
		Spanish content: s.d.70% Third country: s.d 15%	

Catatan: Coverage Ratio adalah porsi kreditor dalam pembiayaan proyek

Tabel 4. 9 Syarat dan Ketentuan Tied Loan China

No.	Item	Skema	
		Preferential Export Buyer's Credit	Concessional Loan
1.	Mata uang	Denominasi dalam USD	Denominasi dalam Ren-mimbi Yen
2.	Tingkat bunga per tahun (%)	3	2,50
3.	Repayment Period	15	15
4.	Grace period (tahun)	< 7	5
5.	Biaya komitmen (%)	0	0
6.	Other fees (%)	Management fee: 0,20%	0,00%
7.	Coverage ratio (%)	85-90	100
8.	Besaran Lenders/Local Content	Chinese content minimal 50% Local content: s.d 50%	

Catatan: - Coverage Ratio adalah porsi kreditor dalam pembiayaan proyek

B. Analisis Terms And Conditions, Rules OF Origins, Dan Biaya Pinjaman Dalam Pengadaan Barang/Jasa

1. Perhitungan Grant Element dan Concessionality Level dalam Pinjaman Luar Negeri

Besarnya grant element tersebut ditentukan beberapa variabel antara lain: masa pembayaran (repayment period), grace period, biaya-biaya yang ada (commitment fee, management fee, services charge, up front fee), tingkat bunga, frekuensi pembayaran tiap tahunnya, serta tipe pembayaran, apakah annuity, equal principal payment, ataukah lump sum.

Untuk menentukan grant element dalam setiap skema pinjaman, ada beberapa variabel yang harus dimasukkan, antara lain:

M = Maturity

G = Grace period

A = jumlah pembayaran pinjaman per tahun

INT = Interval between the commitment date and the first repayment date minus the interval between two successive repayment = $G - 1/A$

DR = durasi pembayaran = $M - INT$

I = Discount rate (10% = 0,1)

R1 = tingkat bunga dalam kurun grace period

R2 = tingkat bunga dalam kurun waktu pembayaran

D = Discount rate per periode = $(1+i)^{INT} - 1$

NR = Jumlah total pembayaran

C1 = $(1+i)^{INT}$

C2 = $(1+i)^{DR}$

GE = Grant element

Formula umum yang digunakan dalam menentukan Grant Element adalah sebagai berikut:

$$GE = 100 (1 - ZG - ZM - ZX)$$

Dimana;

$$ZG = R1 \times \frac{1 - \frac{1}{C1}}{A \times D}$$

$$ZM = \left(\frac{1}{NR}\right) \times \left(\frac{1}{C1}\right) \times \frac{1}{A \times D}$$

$$ZX = \left(\frac{R2}{A \times NR}\right) \times \left(\frac{1}{C1}\right) \times \frac{\left(\frac{1}{C2}\right) - 1 + D \times NR}{D \times D}$$

Formulasi di atas dapat disederhanakan jika tingkat bunga setiap periode adalah sama: $R1=R2=R$

$$\left[1 - \frac{R/A}{D}\right] \times \left[\frac{1}{(A \times M - A \times INT)D} \left[\frac{1}{(1+D)^{AXINT}} - \frac{1}{(1+D)^{AXM}} \right]\right]$$

Formula dalam tanda kurung yang pertama adalah selisih antara tingkat bunga dengan discount rate. Sedangkan formula dalam tanda kurung kedua adalah keadaan pembayaran utang (repayment).

Kemudian untuk menentukan nilai grant element dalam anuitas pembayaran pinjaman luar negeri dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$GE = 100 \times (1 - ZG - ZX)$$

Dimana,

$$ZG = R1 \times \frac{\left(1 - \frac{1}{C1}\right)}{A \times D}$$

$$ZM = 1 / \left(\left(1 + \frac{R2}{A}\right)^{NR} - 1 \right) + 1$$

$$ZX = \left(\frac{R2}{A}\right) \times ZM \times \left(\frac{1}{C1}\right) \times \left(\frac{1 - \frac{1}{C1}}{D}\right)$$

Adapun untuk menentukan grant element dalam skema pembayaran lump sum (pokok dan bunga) adalah sebagai berikut:

$$GE = 100 \times (1 - (1 + R2 \times G) / (1 + I)^M)$$

PENYUSUNAN PEDOMAN PEMENUHAN KRITERIA KESIAPAN (*READINESS CRITERIA*) PINJAMAN LUAR NEGERI

DIREKTORAT PENDANAAN LUAR NEGERI MULTILATERAL
email: dewobjp@bappenas.go.id

ABSTRAK

Dalam menangani masalah penyerapan danapada kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri, diperlukan peningkatan kualitas terhadap pemenuhan Kriteria Kesiapan yang terdapat pada PP No. 2 Tahun 2006 melalui penyusunan Draft SOP (*Standard Operational Procedure*).

Beberapa metode yang dilakukan dalam kajian adalah dengan mengeksplorasi faktor-faktor penting dalam pemenuhan Kriteria Kesiapan, yakni dari Dokumen Kriteria Kesiapan Kegiatan, penyebaran kuesioner (*Project Management Unit*, tenaga ahli baik di K/L dan donor) serta melalui diskusi (*Focus Group Discussion*). Dari ketiga sumber tersebut kemudian diperoleh irisan melalui Teknik Triangulasi. Selain itu, dalam kajian juga dilakukan analisis statistik deskriptif terhadap hasil kuesioner, untuk menghasilkan gambaran umum mengenai kondisi eksisting Kriteria Kesiapan.

Dari hasil analisis triangulasi, diperoleh bahan rumusan penyusunan SOP yakni: 1) Kriteria kinerja monitoring dan evaluasi berupa logical framework; 2) Kriteria dana pendamping adalah berupa Dokumen RKA-KL (Kementerian/ Lembaga), Dokumen RKAP (BUMN), dan Dokumen RKA-SKPD (daerah); 3) Kriteria ketersediaan tanah yang meliputi dokumen rencana pengadaan tanah, yakni LARAP (*Land Acqutition and Resettlement Action Plan*); 4) Draft final pengelolaan proyek berupa dokumen pengelolaan manual yang bersifat administrasi atau operasional; 5) Pernyataan kontribusi dari pemerintah daerah, yakni berupa surat pernyataan berkontribusi dalam dana pendamping.

Dari hasil kesimpulan, kriteria kesiapan yang sulit dipenuhi berturut-turut adalah Pernyataan Kontribusi Daerah, Ketersediaan Tanah dan Dana Pendamping. Kemudian untuk rekomendasi yang diusulkan adalah: 1) Monitoring dan evaluasi didesain untuk menunjukkan proses pencapaian target secara per tahun; 2) Kriteria Dana Pendamping untuk tahun pertama ditunjukkan melalui Dokumen RKA-KL, RKAP, Dokumen Pagu Definitif; 3) Kriteria PMU/ PIU ditunjukkan melalui SK yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4) Kriteria pengadaan tanah berupa Dokumen LARAP disertai sertifikat tanah, atau bukti-bukti pengeluaran pembebasan tanah; 5) Surat pernyataan kontribusi dari pemerintah daerah ditunjukkan melalui surat pernyataan dari Pemda terkait yang dilampiri RAPBD; 6) Kriteria Draft Final Pengelolaan Proyek berupa dokumen yang bersifat operasional atau administrasi.

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan bantuan luar negeri tersebut memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien. Karena ketidaktepatan pengelolaan justru akan menghambat upaya percepatan pembangunan dan kerugian bagi Bangsa Indonesia sendiri, salah satunya adalah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek atau program. Dari forum CPPR (*Country Portfolio Performance Review*), diperoleh hasil bahwa penyebab keterlambatan implementasi proyek yang otomatis mengakibatkan keterlambatan penyerapan dana adalah belum adanya pedoman untuk mengidentifikasi kesiapan calon pelaksana proyek dalam menerima pinjaman atau ketika akan mempersiapkan pelaksanaan proyek. Pedoman dalam memenuhi tahap persiapan proyek diperjelas dalam PP No.2 Tahun 2006, Penjelasan Pasal 14 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Kemudian, pedoman tersebut tertuang dalam beberapa kriteria kesiapan (*readiness criteria*) yakni: (1) Indikator Kinerja Monitoring dan Evaluasi Proyek; (2) Dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan; (3) Rencana pengadaan tanah; (4) Pembentukan PMU & PIU; (5) Draft final pengelolaan kegiatan proyek; (6) Pernyataan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana pendamping. Namun, adanya kriteria kesiapan itu saja belum cukup untuk pemenuhan kriteria kesiapan proyek-proyek dengan pinjaman dari luar negeri. Sehingga, dari temuan tersebut membuat Bappenas menilai penting untuk menindaklanjuti dengan mengadakan kajian untuk penyusunan standar umum dalam melengkapi kriteria kesiapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Peraturan Menneg PPN Nomor : PER.05/M.PPN/06/2006 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang akan Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, PP No.1/ M.PPN/ 03/2007 Tentang

Mekanisme dan Prosedur Proses Penyiapan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, MoU CPPR tahun 2002. Kajian ini dimaksudkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kegiatan, serta memberi rekomendasi untuk melengkapi dokumen kriteria kesiapan.

II. TUJUAN

Menyusun standart umum, *Standard Operating Procedure (SOP)*, pada tiap-tiap kriteria kesiapan dalam menerima pinjaman luar negeri (*readiness criteria*) dalam meningkatkan koordinasi, ketepatan waktu dan akuntabilitas antara pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dalam negeri.

III. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan kajian ini adalah teridentifikasinya indikator pada masing-masing Kriteria Kesiapan pada PP No.2 Tahun 2006, bagian Penjelasan Pasal 14.

IV. LINGKUP KAJIAN

Lingkup kajian penyusunan *Standart Operating of Procedure (SOP)* adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji kriteria kesiapan dari beberapa studi kasus proyek PHLN dari Dokumen Kriteria Kesiapan.
2. Menggali faktor-faktor penting dalam pemenuhan kriteria kesiapan.
3. Menganalisis data-data yang terkumpul.
4. Menyimpulkan dan merekomendasikan *Standard Operational of Procedure (SOP)*.

V. METODOLOGI

5.1 Pendekatan Penelitian dalam Kajian

Pendekatan kajian menggunakan pendekatan positivisme yang memiliki kebenaran teori empiri untuk berpikir spesifik, teramati, terukur dan dapat dieliminasi. Pendekatan tersebut menghasilkan kebenaran umum, karena menggunakan teori-teori yang didasarkan pada kegiatan yang sudah terjadi serta dokumentasi resmi mengenai pemenuhan kriteria kesiapan proyek PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri). Namun, dalam kajian ini hanya mengkaji tentang kesiapan proyek yang didanai pinjaman luar negeri. Sebagai langkah awal dalam kajian adalah dengan menggali informasi-informasi penting mengenai pedoman dan standart dalam pemenuhan kriteria kesiapan. Penggalan informasi tersebut dicapai melalui telaah dan review yang kemudian hasilnya diperoleh melalui analisis komparasi yang dijelaskan secara deskriptive. Penggalan informasi yang dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, khususnya pada kriteria kesiapan yang terdapat pada bagian penjelasan pasal 14 yakni:

1. Kriteria kinerja indikator monitoring dan evaluasi
2. Kriteria dana pendamping
3. Kriteria PMU/ PIU
4. Draft final pengelolaan proyek
5. Rencana pengadaan tanah dan/ *resettlement* telah ada
6. Pernyataan dari Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam dana pendamping (bila diperlukan).

Melalui batasan keenam kriteria diatas kemudian dilakukan eksplorasi informasi untuk mencari pedoman atau standart dan alur dalam pemenuhan kriteria kesiapan. Kemudian melalui pendekatan komparasi, penggalan informasi untuk penyusunan SOP kriteria kesiapan juga dengan memperhatikan Peraturan Menneg PPN Nomor : PER.05/M.PPN/06/2006 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang akan Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, PP No.1/ M.PPN/ 03/2007 Tentang Mekanisme dan Prosedur Proses Penyiapan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai Dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

5.2 Jenis Penelitian dalam Kajian

Jenis penelitian dalam kajian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode komparatif yakni suatu penelitian yang bersifat membandingkan dengan sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda, dengan model penelitian studi kasus (*case study*) dan eksplorasi pendapat para ahli. Melalui penelitian komparatif, beberapa hal yang diharapkan adalah tercapainya faktor-faktor, pedoman-pedoman, standart-standart dan masukan penting dalam penyusunan standar kesiapan pelaksanaan proyek yang dicapai melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Menggali informasi pedoman dan prosedur dan *lesson learned* studi kasus di lapangan.
2. Mengeksplorasi pendapat dan masukan para responden.
3. Mengkaji pedoman-pedoman terkait dengan *readiness criteria*.

Pengumpulan data diatas termasuk kegiatan evaluasi, yakni pada tahap pertama diawali dengan menelaah studi kasus yang telah terjadi di lapangan. Melalui evaluasi tersebut diharapkan pedoman dan standart dalam pemenuhan kriteria kesiapan dapat teridentifikasi dan dapat digunakan sebagai batasan untuk menggali informasi-informasi dari responden dan hasil

diskusi. Sehingga, melalui beberapa sumber tersebut diharapkan dapat menemukan rumusan-rumusan dalam penyusunan SOP kriteria kesiapan.

5.3 Penentuan Pemilihan Sampel Studi Kasus

Pelaksanaan penelitian bahkan kajian selalu berhadapan dengan obyek atau sampel yang akan diteliti baik berupa manusia, benda, peristiwa maupun gejala yang terjadi, karena hal tersebut merupakan variabel penting dalam memecahkan masalah atau menunjang keberhasilan kajian. Pemilihan sampel dapat diambil melalui berbagai cara karena harus menyesuaikan dengan ketepatan sasaran kajian, mengandung banyak informasi yang masih berlaku dan aktual serta dapat dipercaya. Dalam kegiatan kajian ini, terdapat dua tipe sampel yang akan dipakai, yakni studi kasus proyek yang didanai pinjaman luar negeri dan responden yang menjadi stakeholder atau pelaku yang mempunyai kepentingan dalam pemenuhan kriteria kesiapan proyek dengan pinjaman luar negeri. Penjelasan metode pengambilan sampel dijelaskan melalui sub-subbab sebagai berikut:

5.3.1 Metode Pemilihan Studi Kasus Proyek-Proyek PHLN

Metode pemilihan studi kasus proyek-proyek PHLN didapat melalui batasan atau kriteria-kriteria yang telah disetujui untuk menyeleksi proyek-proyek yang dapat dijadikan sebagai obyek studi. Batasan-batasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penilaian kualitatif dari Kasubdit Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral**
Pemilihan proyek menurut penilaian kualitatif dari Kasubdit merupakan sarana dalam pemilihan, mengingat Kasubdit merupakan stakeholder yang cukup berpengalaman untuk menilai proyek yang pantas dijadikan studi kasus dalam kegiatan kajian penyusunan SOP.
2. **Tingkat kompleksitas proyek**
Tingkat kompleksitas proyek menjadi penilaian untuk pemilihan studi kasus untuk mencari faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek. Tingkat kompleksitas yang diambil cukup beragam baik pada proyek yang gagal maupun berhasil dalam persiapan dan pelaksanaannya.
3. **Terdiri dari beragam stakeholder**
Ragam stakeholder menjadi penilaian dalam pemilihan studi kasus supaya tidak hanya mendapatkan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek dari single agency namun juga dari multiple agency.

Dari batasan-batasan tersebut, diperoleh sampel studi kasus untuk telaah kriteria kesiapan, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sampel Proyek-Proyek PHLN

Lembaga Donor	Sampel	Sumber Data
World Bank	PAMSIMAS	Dokument POM (<i>Project Operational Management</i>) PAMSIMAS
	FEATI	Pedoman Pengelolaan Program FEATI
	BERMUTU	Dokumen <i>Readiness Criteria</i> BERMUTU
Asian Development Bank	INVEST	Dokume <i>Readiness Criteria</i> INVEST
	STAR	Dokumen <i>Readiness Criteria</i> STAR
	ICWRMIP	Laporan kompilasi <i>Readiness Criteria</i> ICWRMIP dan Dokumen <i>Readiness Criteria</i> ICWRMIP
	<i>Java-Bali Distribution Performance Project</i>	Dokumen <i>Readiness Criteria</i> <i>Java Bali Distribution Performance Project</i>
Islamic Development Bank	Belawan-Sibolga Fishing Ports Project	Surat Laporan Pemenuhan <i>Readiness Criteria</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2010

5.3.2 Metode Pemilihan Responden

Telah dijelaskan bahwa pengambilan sampel selain berasal dari survey sekunder, juga terdapat sampel yang diperoleh melalui survey primer melalui metode penyebaran kuesioner. Hal yang paling penting dalam penyebaran kuesioner adalah ketepatan pendistribusian kuesioner supaya sampai pada obyek atau responden yang tepat sehingga tujuan kuesioner dapat tercapai. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis ketepatan pemilihan responden adalah melalui Analisis Stakeholder. Analisis stakeholders merupakan alat yang penting untuk memahami konteks sosial dan institusional dari suatu program, proyek ataupun kebijaksanaan. Alat ini dapat menyediakan informasi awal dan mendasar mengenai:

1. Siapa yang akan terkena dampak dari suatu program (dampak positif maupun negatif);
2. Siapa yang dapat mempengaruhi program tersebut (positif maupun negatif);

3. Individu atau kelompok mana yang perlu dilibatkan dalam program tersebut, dan
4. Bagaimana caranya, serta kapasitas siapa yang perlu dibangun.

Analisis stakeholder dalam kajian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berpengaruh dan berperan dalam pemenuhan kriteria kesiapan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan dalam pendistribusian kuesioner, khususnya pada penentuan responden. Perumusan stakeholders dalam kajian ini dapat dijelaskan dalam matriks pemetaan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matriks Analisis Stakeholder

Stakeholder Groups	Interest (s) Memunyai hubungan dengan program	Effect Dampak dari ketertarikan dan hubungan dari kolom interest - 0 +	Kepentingan Stakeholder Dalam Kesuksesan Program U=Unknown 1=Tidak Penting 2=Sedikit Berkepentingan 3=Netral 4=Sangat Penting 5=Pihak yang Sangat Penting dan Berpengaruh	Degree of Influence of Stakeholder U=Unknown 1=Tidak Penting 2=Sedikit Berkepentingan 3=Netral 4=Mempengaruhi Secara Signifikan 5=Sangat Berpengaruh dan Menentukan
<i>Executing Agency</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggung jawab kegiatan/ usulan kegiatan PHLN 	+	5	4
Project Management Unit (PMU/CPMU)	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kerja operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program • Melaksanakan administrasi, keuangan dan penyelenggaraan program. • Pelaksana koordinasi dengan instansi vertical dan horizontal. 	+	5	4
Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi dan menilai kinerja persiapan dan pelaksanaan kegiatan • Menilai kelayakan tahap persiapan kegiatan untuk tercantum dalam DRP/PHLN • Penyusun rencana usulan kegiatan PHLN dalam <i>Blue-Book</i> dan <i>Green Book</i> 	+	4	5
Task Team Leader (Pemberi pinjaman)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memeriksa kelengkapan dan kesiapan proposal kegiatan serta pemenuhan <i>readiness criteria</i> untuk tahap persetujuan kegiatan. 	+	4	5
Biro Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan perencanaan umum Departemen Pekerjaan Umum. 4. Pengintegrasian rencana tahunan dan antar departemen/lembaga. 5. Penyiapan bahan penyusunan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian sasaran pembangunan 	+	5	4

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari matriks analisis stakeholder diatas, kemudian dirumuskan kembali menurut kepentingannya berdasarkan kesuksesan program dan tingkat pengaruh responden dalam program. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian disusun pengelompokkan stakeholder sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengelompokkan Stakeholder Dalam Eksplorasi Standart Kriteria Kesiapan

Kepentingan Stakeholder Dalam Kesuksesan Program "Pihak yang Sangat Penting dan Berpengaruh"	Degree of Influence of Stakeholder "Mempengaruhi Secara Signifikan"	Kepentingan Stakeholder Dalam Kesuksesan Program "Sangat Penting"	Degree of Influence of Stakeholder "Sangat Berpengaruh dan Menentukan"	Kelompok Stakeholder/ Responden
Executing Agency, PMU dan Biro Perencanaan				Kelompok Pelaku , yakni penyusun atau personil yang memenuhi kriteria kesiapan
		Bappenas dan TTL dari Lembaga Donor		Kelompok Expert , yakni badan atau instansi yang menilai dan menentukan kelayakan usulan proyek untuk dibiayai dari pinjaman luar negeri

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Setelah melalui diskusi internal mengenai penentuan responden berdasarkan hasil analisis stakeholder, maka dipilih responden yang turun langsung untuk menangani pemenuhan kriteria kesiapan, sehingga rincian responden adalah para PMU proyek PHLN, Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga, Bappenas pada lingkup Deputi Pendanaan dan Deputi Setoral serta Task Team Leader dari lembaga donor.

5.4 Metode dan Teknik Analisis

Kajian penyusunan SOP termasuk jenis penelitian deskriptif, metode kerja yang diperlukan dalam penelitian ini lebih menekankan pada kegiatan pengekplorasi pendapat para pakar dan studi literatur. Adapun beberapa metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

FGD, Konsinyering dan Rapat

Rapat dan Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan dengan mengundang institusi-institusi yang terkait dengan kegiatan kajian. Melalui diskusi tersebut, diharapkan akan mendapatkan informasi baru terkait dengan kriteria kesiapan proyek PHLN dan kesepakatan mengenai standart dan prosedur dalam menyempurnakan tahap persiapan proyek untuk menuju pada tahap negoisasi.

- **Kuesioner**

Penyebaran kuesioner merupakan metode yang dipergunakan pada saat tahapan mengeksplorasi pendapat responden, sehingga diharapkan mampu memperoleh informasi yang penting. Alat yang digunakan adalah berupa kuesioner/ daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para pakar/ tenaga ahli yang telah dipilih dan mampu menjawab keseluruhan daftar pertanyaan. Metode ini dipergunakan untuk mengeksplorasi pendapat para ahli dalam mencari standart dan prosedur yang tepat dalam penyempurnaan tahap persiapan proyek menuju pada tahap negoisasi.

- **Telaah Tinjauan pustaka Dokumen Kriteria Kesiapan Proyek PHLN**

Data-data sekunder yang diperoleh diambil dari referensi buku dan dokumen-dokumen pemenuhan tahap persiapan proyek PHLN yang memiliki relevansi dengan pembahasan penyusunan standar umum penyusunan kriteria kesiapan.

5.4.1 Teknik Analisis

Teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam kajian ini dapat dijelaskan pada **Tabel 3.4** berikut ini:

Tabel 3.4 Teknik Analisis Kajian

No	Tahapan	Teknik Pengolah-an Data	Data Input	Obyek Sasaran	Output
1	Eksplorasi literatur	Teknik komparasi	Dokumen-dokumen terkait dengan pemenuhan kriteria kesiapan proyek PHLN, dan dokumen peraturan perundangan.	Resume mengenai pedoman dan standart dalam menyiapkan tahap persiapan proyek menuju proses negosiasi	Pedoman, indikator-indikator/ standart pemenuhan kriteria kesiapan proyek PHLN
2	Eksplorasi pendapat para pakar (jajak pendapat dan informasi)	Pemetaan stakeholder	Usulan mengenai stakeholder yang terkait dengan kajian	Stakeholder ahli yang terkait dengan kajian	Daftar nama-nama PMU proyek dan para pakar sebagai responden dalam kuesioner mengenai <i>readiness criteria</i>
		Teknik komparasi	Indikator-indikator/ standart pemenuhan <i>readiness criteria</i> menurut literatur dan studi kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil telaah literatur dan studi kasus • Daftar nama PMU dan para pakar 	Kuesioner
		Statistik deskriptif (<i>Microsoft excel</i>)	Hasil kuesioner	Gambaran statistik hasil kuesioner	Gambaran umum indikator dan standart kriteria kesiapan proyek PHLN
		Teknik komparasi	Gambaran umum indikator dan standart <i>readiness criteria</i> dan studi literatur/ studi kasus	Para stakeholder dalam kegiatan FGD, konsinyering dan rapat internal	Informasi standart/ indikator dan permasalahan di lapangan, opini dan saran para pakar dalam pemenuhan <i>readiness criteria</i>
3	Merumuskan faktor-faktor kesiapan proyek pada tahap negoisasi yang menjadi kesepakatan para pakar	Triangulasi	Indikator/ standart, pedoman, opini dan saran hasil dari tahapan <i>brainstorming</i>	Hasil triangulasi	Rumusan dalam menyusun SOP
4	Menyusun dan merumuskan SOP	Teknik komparasi	Hasil diskusi konsinyering dan FGD	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan dalam menyusun SOP • Hasil kesepakatan antara seluruh stakeholder 	RekomendasiSOP

Sumber: Hasil Analisis, 2010

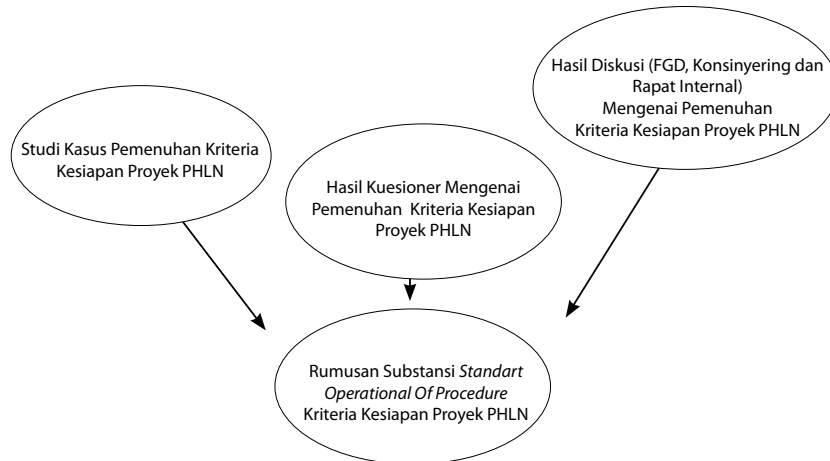
Teknik analisis diatas merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai kinerja yang paling efektif dan efisien dalam kajian.

5.4.2 Analisis Perumusan Substansi *Standard Operational Of Procedure (SOP)* Kriteria Kesiapan Proyek Yang Didanai Dengan Pinjaman Luar Negeri

Pemenuhan SOP pada kesiapan proyek selama ini didasarkan pada berbagai peraturan perundangan, bahkan peraturan pemberi donor sendiri. Dari pemahaman berbagai sudut pandang tersebut belum diketemukan standart yang pasti untuk mengidentifikasi indikator yang sesuai dalam pemenuhan *readiness criteria*. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan persepsi yang diakui kebenarannya oleh seluruh stakeholder pelaku. Maka dari itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk dapat menggabungkan berbagai sudut pandang dari stakeholder, peraturan perundangan dan studi kasus di lapangan tanpa mengabaikan sudut pandang lain yang juga penting. Untuk mengatasi hal tersebut, kajian ini menggunakan metode triangulasi untuk mencapai kesimpulan yang disepakati mengenai standart SOP yang majemuk tersebut. Dengan melakukan triangulasi, tingkat pembenaran suatu pemahaman akan dibandingkan dan dilakukan pengecekan mengenai tingkat kepercayaan suatu informasi yang didapat. Dalam pengecekan keabsahan mengenai pemahaman standart SOP, diperlukan pengecekan melalui metode yang berbeda dan data dari berbagai sumber lain baik melalui isi dokumen, hasil wawancara dan kuesioner, pendapat

pakar maupun pendapat orang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari bahaya subyektifitas dari penyusun kajian. Adapun kerangka pikir dari analisis triangulasi dalam merumuskan substansi SOP diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Analisis Triangulasi

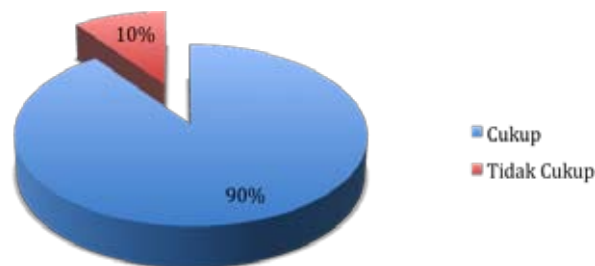


Sumber: Hasil Analisis, 2010

VI. HASIL ANALISIS

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan diperoleh rumusan-rumusan yang dipergunakan dalam penyusunan SOP Kriteria Kesiapan. Dari hasil survey, diperoleh gambaran mengenai kondisi eksisting kriteria kesiapan yang digambarkan dalam **Gambar 4.1** sebagai berikut:

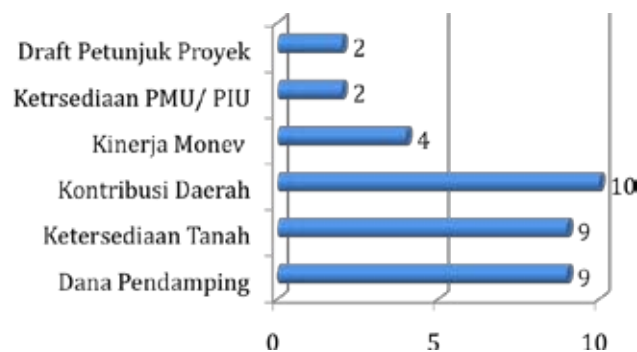
Gambar 4.1 Tingkat Kecukupan Butir Kriteria Kesiapan Pada PP 2/ 2006 Menurut Responden



Sumber: Hasil Analisis, 2010

Berdasarkan hasil kuesioner, diperoleh informasi bahwa kecukupan butir kriteria kesiapan yang terdapat pada PP No.2 Tahun 2006 adalah 90% responden berpendapat cukup untuk mempersiapkan tahap persiapan kegiatan. Namun, sebesar 10% responden berpendapat bahwa butir kriteria kesiapan yang ada saat ini belum cukup untuk membantu pengusul kegiatan dalam mempersiapkan tahap persiapan kegiatan, hal tersebut dikarenakan sulitnya mendefinisikan kedalaman tiap-tiap kriteria, misalkan belum didefinisikannya indikator monitoring dan evaluasi yakni berupa data dasar. Kemudian mengenai tingkat kesulitan pemenuhannya, dijelaskan pada **Gambar 4.2** sebagai berikut:

Gambar 4.2 Kriteria Kesiapan yang Sulit Dalam Pemenuhannya Berdasarkan Pendapat Responden



Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari Gambar 4.2 diperoleh informasi bahwa kriteria yang dianggap paling sulit pemenuhannya oleh para responden adalah pernyataan kontribusi dari daerah, kemudian berturut-turut ketersediaan tanah dan dana pendamping.

Telah dijelaskan pada Bab Metodologi, bahwa untuk memperoleh rumusan penyusun SOP, digunakan analisis triangulasi untuk memperoleh informasi dari studi literatur, kuesioner dan diskusi. Hasil analisis triangulasi sebagai bahan rumusan SOP kriteria kesiapan PHLN dijabarkan sebagai berikut:

1. Kriteria Indikator Monitoring dan Evaluasi
Hasil analisis mengenai kriteria monitoring dan evaluasi, yakni data dasar adalah berupa kerangka *Logical Framework* yang terdiri dari masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*results*), dan dampak (*impacts*). Dalam pemenuhannya, indikator monitoring dan evaluasi merupakan tanggung jawab dari *Project Management Unit* yang telah dibentuk untuk mengelola kegiatan.
2. Kriteria Dana Pendamping
Hasil analisis untuk kriteria dana pendamping untuk tahun pertama pelaksanaan kegiatan telah dialokasikan, yakni melalui Dokumen RKA-KL untuk usulan proyek dari Kementerian/ Lembaga. Kemudian untuk BUMN adalah Dokumen RKAP. Adapun substansi format yang perlu tercantum dalam dokumen dana pendamping adalah mengenai: 1) Komponen kegiatan yang akan dibiayai; 2) Volume per tahun; dan 3) Kolom yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang berasal dari pemerintah sendiri serta dari donor. Dalam pemenuhannya, kriteria dana pendamping merupakan tanggung jawab dari *Executing Agency* dari pengusul kegiatan.
3. Kriteria PMU/ PIU
Hasil analisis untuk kriteria PMU/ PIU adalah telah dibentuk dan telah ada personalianya melalui: 1) SK yang telah disahkan oleh pejabat setingkat Eselon I; 2) SK Direksi untuk BUMN. Kemudian isi substansi yang mencakup dari SK penunjukkan PMU/ PIU adalah: 1) Bagian SK terdiri dari landasan peraturan dan hukum serta isi keputusan; 2) Ketentuan tentang tugas dan kewajiban serta koordinasi Tim dengan Intansi Pusat dan Daerah; 3) Nama-nama Pejabat/Direktur/Manager Proyek, Steering Committee dan Tim Teknis Proyek; 4) Bagan tipikal struktur organisasi ada di lampiran surat; 5) Penanda tangan oleh pejabat terkait dengan kegiatan. Kemudian untuk penanggung jawabnya pemenuhan kriteria tersebut adalah *Executing Agency*.
4. Ketersediaan Tanah
Hasil analisis untuk kriteria ketersediaan tanah adalah adanya dokumen yang menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah, misalkan: 1) Dokumen LARAP (*Land Acquisition and Resettlement Action Plan*); atau 2) Surat Pernyataan Tidak Memerlukan Lahan jika telah tersedia lahan. Kemudian untuk penanggung jawab dari pemenuhan kriteria tersebut adalah *Executing Agency* dari pengusul kegiatan dan/ atau Pemerintah Daerah.
5. Draft Final Pengelolaan Proyek
Hasil analisis mengenai draft final pengelolaan proyek adalah berupa dokumen yang berisi tentang pengelolaan yang bersifat operasional atau administrasi manual, misalkan *Project Administration Project* (PAM) atau *Project Operational Project* (POM). Adapun outline yang perlu dicakup dalam draft final pengelolaan proyek adalah sebagai berikut:
 - I. Gambaran proyek
 - 1.1 tujuan
 - 1.2 lingkup proyek
 - 1.3 komponen proyek
 - 1.4 penentuan lokasi proyek
 - II. Gambaran dan struktur organisasi
 - 2.1 struktur organisasi dari tingkat bawah sampai pusat
 - 2.2 tugas dan fungsi pemangku kepentingan
 - III. Rencana tindak anti korupsi;
 - IV. Rencana penjadwalan
 - 4.1 implementasi seluruh perencanaan program
 - 4.2 penjabaran seluruh perencanaan program
 - V. Rencana anggaran
 - 5.1 jadwal penyusunan dokumen RKA-KL / anggaran
 - 5.2 tata cara penelaahan dan pengesahan DIPa
 - 5.3 tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan
 - 5.4 mengestimasi pengeluaran proyek dan pembiayaan rencana
 - 5.5 prosedur pembiayaan, masalah fund channeling
 - VI. Pengadaan barang dan jasa
 - 6.1 rencana pengadaan
 - 6.2 prosedur pengadaan
 - 6.3 pengadaan konsultan
 - 6.4 partisipasi masyarakat
 - 6.5 pengadaan barang
 - VII. Rencana Operasional Kegiatan
 - 7.1 sasaran dan tujuan
 - 7.2 pedoman pelaksanaan program utama

- 7.3 mekanisme pencairan dana
- VIII. Kegiatan monitoring dan evaluasi
 - 8.1 Sistem monitoring dan pelaporan internal
 - 8.2 Pencegahan dan penilaian dalam monitoring
 - 8.3 Pelaksanaan independent monitoring and evaluation project
 - 8.4 Evaluasi dampak proyek
- IX. Rencana tindak penanganan keluhan
 - 9.1 Organisasi
 - 9.2 Tujuan, tugas, manfaat
 - 9.3 Alat penanganan keluhan

Kemudian untuk penanggung jawab dari pemenuhan draft final pengelolaan proyek adalah *Project Management Unit* (PMU) yang bertugas untuk mengelola kegiatan.

6. Pernyataan Kontribusi dari Pemda dalam dana pendamping
 Hasil analisis mengenai kriteria pernyataan kontribusi dari pemda berupa dana pendamping adalah berupa: 1) Surat Pernyataan dari pemerintah daerah terkait; atau 2) Nota kesepakatan antara Pemda dan Executing Agency pengusul kegiatan. Mengenai format atau substansi dari surat pernyataan pemda berisi: 1) Komitmen dari daerah untuk bersedia dalam menganggarkan dana pendamping; 2) Ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Kemudian untuk pemenuhan kriteria tersebut, yang bertanggung jawab adalah *Executing Agency* dan Pemda (Kepala Daerah dan Ketua DPRD).

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan iterasi hasil analisis melalui FGD, diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan draft SOP yang dijelaskan sebagai berikut:

7.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan rangkaian analisis diperoleh kesimpulan mengenai Kriteria Kesiapan yakni:

1. Kriteria Kesiapan dalam PP No. 2/ 2006 telah diacu oleh setiap pengusul kegiatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tahap persiapan kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman asing.
2. Jumlah butir Kriteria kesiapan yang ada saat ini dipandang telah mencukupi sebagai alat untuk meningkatkan kesiapan proyek.
3. Beberapa butir kriteria kesiapan sulit dipenuhi (pernyataan kontribusi dari pemerintah daerah dalam dana pendamping, ketersediaan tanah, dana pendamping dan kinerja monitoring dan evaluasi) sehingga diperlukan panduan lebih lanjut.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil iterasi terhadap hasil analisis triangulasi, diperoleh rekomendasi sebagai rumusan usulan pada draft SOP yakni sebagai berikut:

1. Kriteria Kinerja Monitoring dan Evaluasi perlu mengarah pada target pembangunan, misalkan target pada RPJMN/ RPJMN, MDGs dan sebagainya. Selain ringkasan desain, masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact), indikator sebaiknya juga mencakup target proyek dan pengumpulan data. Kemudian format kriteria adalah menggunakan kerangka *logical framework* yang mencakup *performance indicators* per tahun.
2. Kriteria Dana Pendamping telah dianggarkan pada tahun pertama proyek yakni maksimal melalui RKA-KL untuk kegiatan usulan Kementerian/ Lembaga dan RKAP untuk BUMN untuk usulan kegiatan yang telah mendapatkan *loan*, sedangkan jika belum mendapatkan *loan* dapat menggunakan pagu indikatif. Sedangkan untuk kegiatan usulan dari pemerintah daerah, indikatornya adalah Dokumen APBD yang mencantumkan anggaran dana pendamping kegiatan.
3. Kriteria PMU/ PIU Kriteria PMU/ PIU telah dibentuk dan telah ada personalianya melalui: 1) SK yang telah disahkan oleh pejabat setingkat Eselon I; sedangkan 2) SK Direksi untuk BUMN.
4. Draft Final Pengelolaan Proyek, yakni berupa dokumen administrasi dan operasional secara manual, misalkan PAM atau POM.
5. Ketersediaan tanah untuk proyek pada tahun pertama sudah harus tersedia dan telah dibebaskan. Indikatornya adalah berupa dokumen rencana pengadaan tanah, misalkan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) yang disertai sertifikat lahan yang telah dibebaskan atau bukti-bukti besaran pengeluaran pembebasan tanah jika masih dalam proses sertifikasi tanah.
6. Pernyataan Kontribusi dari daerah berupa dana pendamping adalah berupa surat pernyataan kesediaan dari Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam penganggaran dana pendamping dan dilampiri RAPBD yang mencantumkan penganggaran dana pendamping untuk usulan kegiatan.

ISTILAH - ISTILAH

1. BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Donor/ <i>Development Partner</i>	=	PPLN adalah Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau dalam kajian ini disebut pemberi pinjaman.
3. Draft final pengelolaan proyek		Draft final pengelolaan proyek merupakan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan dan mengelola proyek baik dalam pengelolaan maupun pengadministrasian.
4. Executing Agency	=	Pejabat dari K/L/ BUMN/ pengusul kegiatan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan dan terpenuhinya Kriteria Kesiapan Kegiatan.
5. Kegiatan	=	Atau proyek, yakni bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
6. Kriteria Kesiapan Proyek	=	<i>Readiness criteria</i> , adalah enam butir Kriteria Kesiapan yang terdapat pada PP No. 2 Tahun 2006, Pasal 14.
7. Lembaga	=	Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang selanjutnya disebut Lembaga, adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
8. Pemerintah Daerah	=	Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dan Ketua DPRD sebagai

		penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
9. Panitia Pembebasan Lahan	=	Unit kerja yang dibentuk untuk menyelesaikan kegiatan pembebasan lahan, proses ganti rugi, sampai dengan proses sertifikasi tanah.
10. PIU	=	<i>Project Implementation Unit</i> yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek dalam menjalankan rencana operasional proyek.
11. PMU	=	<i>Project Management Unit</i> yang bertanggung jawab terhadap manajemen pelaksanaan harian proyek guna menjaga kualitas pelaksanaan proyek yang bersangkutan.
12. RKA-KL	=	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yakni dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13. RKAP	=	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yakni pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan perusahaan.
14. RKA-SKPD	=	Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni dokumen yang berisi rincian anggaran pemerintah daerah.
15. Tim Persiapan Proyek	=	Tim yang bertugas untuk menyiapkan kegiatan pada tahap awal. Tim Persiapan Proyek dibentuk karena belum tersusun unit pengelola proyek/ PMU/ PIU.
16. Stakeholder	=	Adalah tenaha ahli yang mempunyai pengaruh dan peran dalam pemenuhan Kriteria Kesiapan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Dokumen (Literatur)

- CPPR, 2000 & 2002. *Indonesia: Country Portfolio Performance Review*.
- Ditrenbang, 2007. *Laporan Kegiatan: Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria)*. Jakarta: Bappenas.
- Guidelines ADB, 2010

- POM Pamsimas, 2007. *Pedoman Umum Pelaksanaan: Third Water Supply and Sanitation for Low-Income Communities*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Status Kesiapan *Credit Signing* PAMSIMAS, 2006. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum .
- PMM FEATI, 2007. *Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian: Pedoman Pengelolaan Program, Buku 1: Organisasi dan Pengelolaan Kegiatan*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- PMM FEATI, 2007. *Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian: Pedoman Pengelolaan Program, Buku 2 : Pengelolaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- PMM FEATI, 2007. *Program Pemberdayaan Petani Melalui Teknologi dan Informasi Pertanian: Pedoman Pengelolaan Program, Buku 3 : Pengelolaan Keuangan*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- POM BERMUTU, 2007. *Readiness Filter Document: Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- RRP INVEST, 2007. *Project Readiness Document*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- PAM STAR, 2004. *Indonesia Support to State Audit Reform Project*. Jakarta: Asian Development Bank & Bappenas.
- Laporan Pemenuhan Kriteria Kesiapan Proyek Menurut Executing dan Implementing Agency, 2008. Jakarta: Bappenas.
- PAM ICWRMIP, 2009. *Republic of Indonesia: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*. Asian Development Bank.
- Rianse, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta.
- RCDAP, 2001. *Bujagali Project Hidropower Facility Resettlement and Community Development Action Plan*. Uganda: Development Consultants Internasional & Kenya: African Development and Economic Consultants
- Resettlement Plan, 2008. *Rencana Permukiman Kembali: Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- RRP Java-Bali Distribution, 2009. *Proposed Loan Republic of Indonesia: Java Bali Electricity Distribution Performance Improvement Program*. ADB.

2. Perundangan

- Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. KEP.178/K/07/2000 Tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan.
- Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Nomor 001 Tahun 2007 Tentang Mekanisme Dan Prosedur Di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Proses Penyiapan, Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dan/ Atau Hibah Luar Negeri.
- PP No. 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
- PP No. 54 tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah.
- PMK No. 53 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari PLN.
- UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- UU No.1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

ANALISA LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI

DIREKTORAT PERENCANAAN MAKRO
email: bpri@bappenas.go.id

ABSTRAK

Meskipun Indonesia termasuk salah satu negara yang dapat dikatakan *survive* terhadap krisis ekonomi global tahun 2008/2009, namun dampak negatif dari krisis global tersebut tetap perlu dicermati. Kebijakan dan program untuk penangkal krisis dikeluarkan pemerintah secara berkesinambungan pada tahun 2009, baik dalam kerangka kebijakan fiskal, moneter maupun program khusus yang dikeluarkan pemerintah. Kajian ini menganalisis bagaimana dampak kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan pemerintah terhadap besaran-besaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi; inflasi, pengangguran dan kemiskinan; dan apa seharusnya langkah-langkah konkrit pemerintah (terutama terkait dengan kebijakan sektoral dan juga langsung mendorong sektor riil) untuk terwujudnya pemulihan ekonomi.

Metodologi yang digunakan berupa model persamaan simultan dan regresi berganda. Persamaan simultan digunakan untuk mengadopsi saling pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sementara regresi berganda digunakan untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhi pengangguran dan kemiskinan secara parsial.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi, sehingga mampu memulihkan perekonomian makro. Kenaikan suku bunga *BI Rate* dan pelonggaran kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan yang mempunyai peranan yang sangat penting pada tahun 2009. Karena kedua kebijakan itu Indonesia mampu mengatasi krisis ekonomi global, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58 persen. Namun, kebijakan Penanggulangan Krisis Ekonomi, yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, PNPB Mandiri, dan Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap tingkat inflasi.

1. LATAR BELAKANG

Seperti negara-negara lainnya, Indonesia juga menghadapi ujian yang cukup berat akibat krisis ekonomi global. Walaupun Indonesia termasuk kedalam negara-negara yang dapat dikatakan *survive* terhadap krisis ekonomi global tahun 2008/2009, namun risiko gejolak ekonomi makro diperkirakan akan masih berlangsung, mengingat tingginya ketidakpastian ekonomi dunia dan cenderung tingginya harga minyak dunia hingga beberapa waktu ke depan.

Dampak pertama dari krisis ekonomi dunia yang dihadapi Indonesia pada waktu itu adalah terjadinya penurunan ekspor dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara di dunia, namun perekonomian Indonesia tetap menghadapi kondisi yang tidak ringan, sebagai dampak dari krisis keuangan global. Hal ini disebabkan gejolak ekonomi internasional masih sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor riil di Indonesia. Dampak pada sektor riil ini, yang terutama dipicu oleh sempat menurun drastisnya kinerja ekspor Indonesia, telah bermuara pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan munculnya ketidakpastian investasi di sektor produksi riil.

Berbagai program dan jurus penangkal krisis dikeluarkan pemerintah secara berkesinambungan ketika menghadapi krisis pada tahun 2009. Dalam perspektif makro, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Kebijakan di bidang moneter antara lain difokuskan untuk melindungi nilai tukar rupiah, dan oleh karena itu kebijakan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia terlihat sangat hati-hati menjelang akhir tahun 2008, yang implikasinya tidak menjadi insentif bagi pertumbuhan sektor riil. Sementara itu di bidang fiskal, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mengurangi beban ekonomi akibat dampak krisis keuangan global. Cara yang dipilih mengikuti rumus Keynes, yaitu *countercyclical policy*, atau kebijakan counter siklus yang berarti ketika perekonomian sedang melambat maka perlu ada pengeluaran yang dilakukan pemerintah berupa stimulus fiskal.

Dari sisi kebijakan moneter, kebijakan ekspansif BI dengan menurunkan suku bunga belum diikuti oleh bank-bank nasional. Dari sisi permintaan, pengusaha masih enggan untuk meminjam dana ke bank dikarenakan ekspektasi bisnis yang belum membaik, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sementara dari sisi kebijakan fiskal, sampai saat ini pengucuran dana stimulus belum dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama terkait dengan belum efisiennya institusi pemerintah.

Berdasar fakta dan pemikiran di atas, dibutuhkan sebuah kajian lebih mendalam mengenai langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi. Bagaimanakah dampak kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan pemerintah terhadap besaran

besaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi; inflasi, pengangguran dan kemiskinan? Apa seharusnya langkah-langkah konkrit pemerintah (terutama terkait dengan kebijakan sektoral dan juga langsung mendorong sektor riil) untuk terwujudnya pemulihan ekonomi? Analisis tersebut dirasa penting dalam rangka penyusunan kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pengambilan kebijakan makroekonomi Indonesia di waktu yang akan datang.

2. TUJUAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah percepatan pemulihan ekonomi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh kebijakan pemerintah (fiskal, moneter dan sektoral) terhadap terhadap besaran besaran ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi; inflasi, pengangguran dan kemiskinan)
2. Menganalisa langkah langkah konkrit yang dilakukan pemerintah terkait dengan sektor riil dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi.

3. METODOLOGI

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian digunakan model persamaan simultan dan regresi berganda. Persamaan simultan digunakan untuk mengadopsi saling pengaruh antara variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sementara regresi berganda digunakan untuk melihat variabel-variabel yang mempengaruhi pengangguran dan kemiskinan secara parsial.

Persamaan simultan digunakan karena memiliki keunggulan yaitu mampu untuk melihat dampak secara serentak berbagai variabel pada saat bersamaan. Dalam model persamaan simultan dampak yang dapat dilihat merupakan dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak total. Keunggulan lain adalah persamaan simultan dibentuk berdasarkan teori. Artinya bahwa hubungan antar variabel yang ada dalam persamaan simultan merupakan perilaku struktural antar variabel ekonomi yang diteliti.

Adapun persamaan simultan yang digunakan untuk memodelkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah:

$$GDPR_t = \beta_0 + \beta_1 CPI_t + \beta_2 CONS_t + \beta_3 BN_t + \beta_4 INV_t + \beta_5 XPR_t + \beta_6 IMP_t + \beta_7 M2_t + \beta_8 M1_t + \beta_9 LR_t + \beta_{10} DR_t + \beta_{11} SBI_t + \beta_{12} DPOLICY$$

..... (1)

$$CPI_t = \beta_0 + \beta_1 GDPR_t + \beta_2 BN_t + \beta_3 PPAJAK_t + \beta_4 M2_t + \beta_5 M1_t + \beta_6 LR_t + \beta_7 DR_t + \beta_8 SBI_t + \beta_9 DPOLICY$$

..... (2)

Dimana:

- GDPR_t : produk domestik bruto riil pada triwulan t;
- CPI_t : indeks harga konsumen (inflasi) pada triwulan t;
- CONS_t : pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan ke-t;
- INV_t : investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto) pada triwulan t;
- BN_t : belanja negara dalam APBN pada triwulan ke-t;
- PPAJAK_t : penerimaan pajak pada triwulan ke-t;
- EXPR_t : ekspor barang dan jasa pada triwulan ke-t;
- IMP_t : impor barang dan jasa pada triwulan ke-t;
- M2_t : jumlah uang besar dalam arti luas pada triwulan ke-t;
- M1_t : jumlah uang beredar dalam arti sempit / *money supply* pada triwulan ke-t;
- LR_t : suku bunga kredit
- DR_t : suku bunga deposito;
- SBI_t : suku bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk jangka waktu satu bulan;
- DPOLICY_t : variabel *dummy* untuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi

Sedangkan persamaan regresi berganda yang digunakan untuk memodelkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran adalah:

$$poverty_t = \beta_0 + \beta_1 poverty_{t-1} + \beta_2 growth_t + \beta_3 inf\ lasi_t + \beta_4 inf\ lasi_{t-1} \dots \dots \dots (3)$$

$$unemp_t = \beta_0 + \beta_1 unemp_{t-1} + \beta_2 inf\ lasi_t + \beta_4 inf\ lasi_{t-1} \dots \dots \dots (4)$$

Dimana:

- Poverty = persentase tingkat pengangguran (%)
- Growth = pertumbuhan ekonomi (%)

Inflasi = tingkat inflasi (%)
 Unemp = tingkat pengangguran (%)
 t = tahun berjalan
 t-1 = tahun sebelumnya

3.1. Tahap-Tahap Perolehan Model Estimasi

Pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi persamaan struktural pada persamaan simultan terdiri dari dua metode, yaitu metode persamaan tunggal (*limited information method*) dan metode sistem (*full information method*). Dalam metode persamaan tunggal, estimasi terhadap setiap persamaan struktural dilakukan secara individu dengan memperhitungkan setiap pembatasan yang ditempatkan, tanpa memperhatikan pembatasan atas persamaan lainnya. Sebaliknya, dengan metode sistem (*full information method*) seluruh persamaan struktural diestimasi secara bersamaan dengan memasukkan unsur pembatasan pada persamaan tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan metode sistem, dimana seluruh persamaan struktural diestimasi secara bersamaan.

Sementara itu, penyelesaian sebuah persamaan simultan juga berkaitan dengan masalah identifikasi yang berbeda. Karena dalam penelitian ini persamaan strukturalnya teridentifikasi berlebihan (*over identified*), maka untuk memperoleh nilai parameter persamaan akan digunakan metode *Two Stages Least Squares* (2SLS / Metode Kuadrat Terkecil Dua Tahap). Adapun tahap-tahap estimasi model dilakukan sebagai berikut:

Melakukan uji *unit-root* pada semua variabel yang digunakan, yaitu pada Produk Domestik Bruto Riil (lnGDPR), inflasi (lnCPI), jumlah uang beredar (lnM1 dan lnM2), pengeluaran pemerintah (lnBN), penerimaan pajak (lnPPAJAK), tingkat suku bunga deposito (Dr), tingkat suku bunga pinjaman (LR), tingkat investasi (lnINV), tingkat konsumsi (lnCONS), tingkat ekspor (lnEXPR), dan tingkat impor (lnIMP).

Dengan menggunakan variabel-variabel yang sudah stasioner, dibangun model-model tunggal untuk masing-masing persamaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan metode *Two-Stage Least Squares*, dengan memasukkan *predetermine variables* sebagai *instrument variables*. Model-model tunggal ini dimaksudkan untuk memperoleh dugaan persamaan yang dapat digunakan dalam sistem simultan yang sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan *serial correlation*. Selain itu juga ditujukan untuk memperoleh dugaan parameter variabel-variabel *predetermine*, guna memperoleh dugaan *error* yang akan digunakan dalam uji hubungan simultan kedua persamaan.

3.2. Data dan Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS, BI dan instansi terkait lainnya. Data yang digunakan merupakan data berkala (*series*) periode 1978-2009. Variabel yang dipakai adalah Produk Domestik Bruto (GDPR) harga konstan 2000 menurut penggunaan, Indeks Harga Konsumen (CPI), nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (IDRUSD), nilai ekspor (EXPR), nilai impor (IMP), jumlah uang beredar dalam arti luas (M2), jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1), tingkat bunga kredit (LR), tingkat bunga deposito (DR), tingkat bunga SBI, Belanja Negara (BN), penerimaan pajak (PPAJAK), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

Pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari model pertumbuhan ekonomi di bawah ini, yang merupakan bagian dari sistem simultan yang dihasilkan. Model tersebut adalah :

$$\begin{aligned}
 D(\text{Log (GDPR)}_t) &= 0.0758^{***} - 0.7111 D(\text{Log (CPI)}_t)^{**} + 0.4168 D(\text{Log (CONS)}_t)^{***} \\
 &\quad (2.3917) \quad (-2.2784) \quad (7.3356) \\
 &+ 0.1269 D(\text{Log (INV)}_t)^{***} + 1.2906 D(\text{Log (BN/CPI)}_t)^{**} \\
 &\quad (4.1177) \quad (2.2049) \\
 &+ 0.1512 D(\text{Log (EXPR)}_t)^{***} - 0.1161 D(\text{Log (IMP)}_t)^{***} \\
 &\quad (3.7224) \quad (-2.6417) \\
 &- 0.2444 D(\text{Log ((M2}_t - \text{M1}_t)/\text{CPI}_t))^{**} - 0.0058 (\text{LR}_t - \text{DR}_t)^* \\
 &\quad (-2.2943) \quad (-1.9040) \\
 &- 0.0012 \text{SBI}_t - 0.0133 \text{DPOLICY} \\
 &\quad (-1.3119) \quad (-1.0369)
 \end{aligned}
 \dots\dots\dots(5)$$

R-squared = 0.4144; Adjusted R-squared = 0.3533; DW- statistik = 2.1212;
 *) = signifikan pada $\alpha = 10\%$; **) = signifikan pada $\alpha = 5\%$;
 ***) = signifikan pada $\alpha = 1\%$;

dimana GDPR_t adalah produk domestik bruto riil pada triwulan t ; CPI_t adalah indeks harga konsumen (inflasi) pada triwulan t ; CONS_t adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan $ke-t$; INV_t adalah investasi fisik ((Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto) pada triwulan $ke-t$; BN_t adalah belanja negara dalam APBN; EXPR_t adalah ekspor barang dan jasa pada triwulan $ke-t$; IMP_t adalah impor barang dan jasa pada triwulan $ke-t$; $(\text{M2}_t - \text{M1}_t)/\text{CPI}_t$ adalah jumlah uang kuasi dalam nilai riil (jumlah uang besar dalam arti besar dikurangi jumlah uang beredar dalam arti sempit / *money supply*); LR_t dan DR_t masing-masing adalah suku bunga kredit dan suku bunga deposito; SBI_t adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk jangka

waktu satu bulan; DPOLICY_t adalah variabel dummy untuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi; dan dalam tanda kurung adalah t-statistik dari variabel-variabel bebas.

Sementara pengaruh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi dapat dilihat dari model inflasi di bawah ini, yang merupakan bagian dari sistem simultan yang dihasilkan. Model tersebut adalah :

$$\begin{aligned}
 D(\text{Log } CPI_t) = & 0.0427^{***} - 0.1787 D(\text{Log}(GDPR_t)^{***}) + 0.0551 D(\text{Log } (BN_t/CPI_t)^{***}) \\
 & (2.7137) \quad (-2.7436) \quad (4.4528) \\
 & - 1.7593 D(\text{Log } (PPAJAK_t/CPI_t)^{***}) - 0.1975 (\text{Log } ((M2_t - M1_t)/CPI_t)^{***}) \\
 & (-4.0835) \quad (-4.2517) \\
 & - 0.0033 (LR_t - DR_t)^{**} - 0.0002 SBI_t - 0.002 DPOLICY_t \\
 & (-2.1705) \quad (-0.4930) \quad (-0.2506)
 \end{aligned}$$

.....(6)

R-squared = 0.5622; Adjusted R-squared = 0.5313; DW- statistik = 1.8959;

*) = signifikan pada $\alpha = 10\%$; **) = signifikan pada $\alpha = 5\%$;

***) = signifikan pada $\alpha = 1\%$;

dimana CPI_t adalah indeks harga konsumen (inflasi) pada triwulan t ; $GDPR_t$ adalah produk domestik bruto riil pada triwulan t ; BN_t/CPI_t adalah belanja negara dalam APBN secara riil; $PPAJAK_t$ adalah penerimaan pajak pada triwulan ke- t ; $(M2_t - M1_t)/CPI_t$ adalah jumlah uang kuasi dalam nilai riil (jumlah uang besar dalam arti besar dikurangi jumlah uang beredar dalam arti sempit / *money supply*); LR_t dan DR_t masing-masing adalah suku bunga kredit dan suku bunga deposito; SBI_t adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk jangka waktu satu bulan; $DPOLICY_t$ adalah variabel dummy untuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi; dan dalam tanda kurung adalah t-statistik dari variabel-variabel bebas.

4.1 Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari model pertumbuhan ekonomi di atas dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja negara (BN), berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanda positif pada koefisien belanja negara (BN) pada persamaan pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan bahwa dengan semakin besar belanja negara (BN) akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (GDPR) secara ceteris paribus. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi mengenai Aggregate Demand ($Y = C + I + G + X - M$), yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah (G) akan menambah pendapatan (produksi) nasional, dimana dalam hal ini pengeluarannya (G) diwakilkan oleh belanja negara (BN).

Dengan demikian penelitian ini bisa membuktikan bahwa kebijakan fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi, sehingga akan mampu memulihkan perekonomian makro. Kondisi ini bisa menjelaskan mengapa pada tahun 2009, perekonomian Indonesia bisa tumbuh positif bersama-sama China dan India. Stimulus fiskal yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2009, yang tercermin dari pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar 15,67 persen, memegang peranan penting dan mempunyai efek multiplier yang cukup besar pada perekonomian Indonesia ketika itu, yaitu saat terjadi krisis ekonomi global.

4.2 Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien kebijakan moneter yang tidak saja signifikan pada model pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan arah koefisien yang sesuai dengan teori ekonomi yang mendasarinya. Dalam penelitian ini kebijakan moneter diwakili oleh dua variabel penting, yaitu Uang Kuasi ($M2 - M1$) dan Spread Suku Bunga ($LR - DR$).

Tanda negatif pada koefisien Uang Kuasi ($M2 - M1$) menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (GDPR) nasional. Artinya semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh sektor perbankan, maka akan semakin menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Seperti diketahui, sejak diberlakukannya Undang Undang Perbankan tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi bisa secara langsung mempengaruhi perekonomian nasional melalui instrumen jumlah uang beredar ($M1$), namun lebih melalui tingkat suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), atau dewasa ini melalui *BI rate*. Sebagai *benchmark*, tingkat suku bunga *BI Rate* ini menjadi patokan bagi sektor perbankan untuk menentukan tingkat suku bunga yang akan diberlakukan, baik untuk suku bunga deposito maupun suku bunga kredit. Dan dengan semakin tingginya tingkat suku bunga kredit, maka akan semakin rendah tingkat investasi, yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, uang kuasi ($M2 - M1$) merupakan perbedaan antara jumlah uang beredar dalam arti luas (likuiditas perekonomian) dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit (*money supply*). Menurut teori moneter, jumlah uang kuasi sendiri bersifat mengurangi jumlah uang beredar dalam arti sempit. Sehingga dalam hubungan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan semakin besar jumlah uang kuasi, maka *money supply* akan semakin kecil, yang berarti menunjukkan adanya hubungan positif antara *money supply* dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dengan semakin besar *money supply*, maka akan semakin besar pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam hal pengaruh *spread* suku bunga ($LR - DR$) yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa dengan semakin besar perbedaan antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito, maka akan

semakin menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, perbedaan suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito di Indonesia sangat besar dibandingkan yang berlangsung pada negara-negara lain, yaitu berkisar antara 4,5%-6%. Kondisi inilah yang menjadi persoalan penting dalam perekonomian nasional. Dengan sifat perbankan nasional yang lebih *profit oriented* sejak krisis moneter tahun 1997/98 menjadikan tingkat suku bunga kredit tidak lagi elastis terhadap penurunan suku bunga SBI dan *BI-rate*, dan menjadikannya juga tidak berjalan searah dengan tingkat suku bunga simpanan. Oleh karena itulah dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa tingkat suku bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.3 Pengaruh Kebijakan Penanggulangan Krisis Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Selain melihat dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi, penelitian ini juga ingin melihat dampak kebijakan sektoral yang ditujukan untuk menggulangi krisis ekonomi. Seperti diketahui, ketika menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008/2009, pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk program yang ditujukan tidak saja untuk melindungi perekonomian nasional dari kepurukan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat miskin agar tingkat konsumsi masyarakat tidak menurun secara drastis akibat menurunnya tingkat daya beli.

Program-program yang diluncurkan pemerintah terkait dengan krisis ekonomi ini tidak saja dalam bentuk paket stimulus fiskal yang mencapai sekitar Rp 73,3 triliun, tetapi juga terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan yang terdiri dari Program Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Raskin ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditujukan untuk membantu mengurangi beban hidup rumah tangga miskin yang mengalami kenaikan harga akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Sementara itu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat, dimana program ini sangat strategis dan fundamental, karena merupakan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, dari mulai tahap perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) berdasarkan ketentuan dan persyaratan tertentu. PKH ini diperuntukkan bagi keluarga yang di dalamnya terdapat ibu yang sedang hamil, memiliki balita, dan memiliki anak usia sekolah 6 – 15 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil dari sistem simultan, diperoleh gambaran bahwa kebijakan penanggulangan krisis (DPOLICY) secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi. Pemberian Raskin masih belum optimal, terutama dilihat dari target penerima manfaat (PM). Untuk itu jika ingin dilanjutkan, arah kebijakan pemberian Raskin hendaknya diprioritaskan pada perbaikan sistem distribusi dan akurasi data.

Permasalahan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sejak diluncurkan adalah adanya *mistargeting* yang diperparah dengan sosialisasi yang tidak memadai, khususnya tentang kriteria target dan tujuan program. Kebijakan ini juga memiliki banyak celah yang dapat diselewengkan oleh birokrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Dan secara mekanisme pun, sulit untuk bekerja secara efektif dan efisien, karena di lapangan terbukti menimbulkan konflik horisontal sesama masyarakat penerima dan bukan penerima dan konflik vertikal antara masyarakat dan aparat birokrasi.

Sementara itu, setelah lebih dari 3 tahun diluncurkan, pemahaman tentang PNPM-Mandiri masih sangat kurang, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kualitas sosialisai yang kurang baik menyebabkan di tingkat yang paling rendah, yaitu rakyat, pemahaman PNPM ini hanya sebatas sebagai proyek bagi bagi uang, dan bukan sebagai proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan kendala utama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pada permasalahan manajemen internal di tubuh Departemen Sosial (Depsos), yang berimbas ke lapangan. Program yang mulai efektif sejak semester kedua tahun 2007 ini, ternyata masih kurang terpublikasi dengan baik.

4.4 Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Tingkat Inflasi

Dari hasil sistem simultan di atas dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal, baik pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja negara (BN), maupun penerimaan pajak (PPAJAK) berpengaruh secara signifikan terhadap laju inflasi.

Hubungan positif antara belanja negara (BN/CPI) dengan tingkat inflasi (CPI) pada model yang dihasilkan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi belanja negara maka akan semakin tinggi tingkat inflasi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pengeluaran konsumsi pemerintah melalui belanja negara akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1), yang tentunya akan memberi tekanan pada tingkat harga dalam negeri (inflasi).

Sebaliknya, hubungan negatif antara penerimaan perpajakan (PPAJAK) dengan tingkat inflasi (CPI) menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya penerimaan pajak akan menurunkan tingkat inflasi. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak bersifat kontraksi (mengurangi) pada jumlah uang yang beredar (M1), sehingga variabel ini akan mengurangi tekanan inflasi dalam negeri.

4.5 Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Inflasi

Dari model simultan yang diperoleh dapat dilihat bahwa kebijakan moneter, yang ditunjukkan oleh variabel uang kuasi $((M2-M1)/CPI)$ dan *spread* suku bunga $(LR_t - DR_t)$ berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi.

Hubungan negatif antara uang kuasi $((M2-M1)/CPI)$ dengan tingkat inflasi pada model yang dihasilkan menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya jumlah uang kuasi (deposito, giro, dan tabungan), maka akan semakin rendah tingkat inflasi. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah uang kuasi sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga simpanan yang

ditawarkan oleh sektor perbankan. Dan melalui variabel suku bunga inilah Bank Indonesia seringkali menjalankan kebijakan uang ketat jika ingin menekan tingkat inflasi, atau menjaga stabilitas moneter secara keseluruhan. Karena dengan semakin tinggi suku bunga simpanan, maka semakin tinggi jumlah uang kuasi pada sektor perbankan, karena tingginya minat menabung pada masyarakat. Karena hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah uang beredar di masyarakat (*money supply / M1*), yang tentunya akan menurunkan tekanan inflasi.

Oleh karena itu, meskipun variabel SBI tidak terbukti berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat inflasi, namun sesungguhnya tingkat suku bunga SBI ini berpengaruh melalui jumlah uang kuasi. Kenaikan suku bunga SBI tidak saja akan meningkatkan suku bunga simpanan yang menaikkan jumlah uang kuasi, tetapi juga memberikan persepsi kepada masyarakat mengenai tingkat inflasi.

Melalui variabel suku bunga SBI atau *BI Rate* pemerintah juga seringkali berhasil menstabilkan kondisi moneter dalam negeri. Karena dengan menaikkan tingkat suku bunga SBI, pemerintah seringkali berhasil mencegah larinya modal ke luar negeri, sehingga gejolak nilai tukar rupiah dapat dihindari dan tekanan inflasi dapat dikurangi. Oleh sebab itu, di bulan Oktober 2008 pemerintah justru menaikkan tingkat suku bunga SBI, di saat sebagian besar negara-negara di dunia menurunkan tingkat suku bunganya. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas moneter dalam negeri dan untuk menjaga agar suku bunga riil tetap menarik bagi para pemilik dana (terutama investor domestik), termasuk untuk mengantisipasi kelangkaan likuiditas dunia.

Kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga *BI Rate* sebesar 25 basis poin menjadi 9,5 persen pada Oktober 2008 telah berseberangan dengan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dalam hal ini pemerintah justru memberlakukan kebijakan uang ketat dalam menghadapi krisis ekonomi global, yang nampaknya terkait dengan beberapa hal, antara lain:

Berdasarkan banyak penelitian, sensitivitas terjadinya *capital flight* di Indonesia akibat perubahan suku bunga riil merupakan yang terbesar dibandingkan sensitivitas yang terjadi di negara-negara lain, termasuk negara-negara Asia lainnya.

Karena krisis global yang sedang berlangsung masih merupakan krisis keuangan, maka *shock* dalam bidang moneter ini harus diantisipasi dengan kebijakan moneter juga, yaitu mengamankan gejolak moneter secara *ad hoc*. Oleh karena itu kenaikan suku bunga ini dapat dibenarkan untuk tindakan darurat, sedangkan untuk jangka menengah kenaikan suku bunga akan kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara mengamankan gejolak moneter adalah menjaga secara *all out* sektor perbankan nasional. Kekeringan likuiditas yang terjadi di kalangan perbankan nasional pada saat itu -- seiring dengan krisis finansial global -- merupakan ancaman serius, jika hal tersebut juga diikuti oleh penarikan likuiditas secara besar-besaran dari sektor perbankan. Hal ini antara lain bisa diantisipasi dengan memberikan suku bunga riil yang cukup tinggi, untuk menahan keberadaan dana di sektor perbankan. Alasan ini juga yang menyebabkan dikeluarkannya dua Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) pada 13 Oktober 2008, yang ditujukan untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global dan menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan nasional. Perpu yang antara lain menaikkan jaminan deposito oleh pemerintah dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar, ternyata mampu menenangkan pelaku pasar dan masyarakat.

Menjaga stabilitas rupiah merupakan suatu keharusan, tidak saja berkaitan dengan ancaman *imported inflation* yang bisa ditimbulkan jika rupiah merosot tajam terhadap dollar AS, tetapi juga terhadap kegiatan sektor riil secara keseluruhan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa instabilitas nilai tukar merupakan ancaman nyata bagi tingginya angka inflasi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu memang sepatutnya pemerintah menstabilkan fluktuasi nilai tukar rupiah, agar tidak sampai terlepas kendali sehingga menimbulkan kepanikan.

Kenaikan suku bunga *BI Rate* sebesar 50 basis poin pada saat itu diperkirakan tidak akan terlalu mengancam investasi dalam negeri. Pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 33,6 persen pada akhir semester I 2008 merupakan pertumbuhan yang cukup moderat. Sehingga dengan ketatnya likuiditas global pada waktu itu, pertumbuhan yang berlebihan pada kredit perbankan dikhawatirkan akan menjadi bumerang jika terjadi gejolak pada sektor perbankan. Jadi, kenaikan suku bunga *BI Rate* menjadi 9,5 persen, memang lebih ditujukan untuk menjaga tingkat suku bunga riil dalam negeri.

Kenaikan suku bunga dalam negeri juga diperlukan untuk menjaga cadangan devisa di Bank Indonesia agar tidak semakin tergerus akibat intervensi valuta asing. Cadangan devisa yang pada akhir Juli 2008 masih sebesar US\$ 60,563 miliar (atau sekitar lima bulan impor), pada akhir September 2008 sudah turun menjadi sekitar US\$ 57,108 miliar. Peningkatan kembali cadangan devisa pada waktu itu dianggap tidak akan mudah, seiring dengan akan melemahnya kinerja ekspor Indonesia akibat krisis ekonomi Amerika Serikat dan Eropa. Padahal menjaga cadangan devisa juga merupakan suatu keharusan, demi menjaga kredibilitas perekonomian Indonesia di mata para pemilik modal. Sebagai salah satu indikator dari fundamental perekonomian, jumlah cadangan devisa yang cukup merupakan cerminan dari daya tahan perekonomian setiap negara.

Begitu juga dengan *spread* suku bunga (LR-DR) yang berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin besar perbedaan antara suku bunga kredit dengan suku bunga deposito, maka akan semakin menurunkan tingkat inflasi. Hal ini disebabkan karena dengan semakin tingginya *spread* suku bunga berarti semakin tinggi tingkat suku bunga kredit relatif terhadap suku bunga simpanan. Dan dengan semakin tingginya tingkat suku bunga kredit, maka semakin sedikit ekspansi kredit ke masyarakat, yang tentunya tidak berpotensi mendorong pertumbuhan jumlah uang beredar (*M1*). Akibatnya tidak ada tekanan inflasi terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri, yang berarti bisa menurunkan tingkat inflasi.

4.6 Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan

Masalah makro ekonomi yang dihadapi suatu negara tidak terkecuali Indonesia antara lain adalah Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. Secara teori keempat masalah makro ekonomi tersebut bisa saling berhubungan. Di Indonesia hubungan bivariate dua variabel dari variabel-variabel di atas secara statistik tidak seluruhnya dinyatakan signifikan, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut

Correlations

INFLASI	Pearson Correlation	1	-.841**	.041	.270
	Sig. (2-tailed)		.000	.841	.182
	N	26	26	26	26
GROWTH	Pearson Correlation	-.841**	1	-.127	-.451*
	Sig. (2-tailed)	.000		.537	.021
	N	26	26	26	26
UNEMPL	Pearson Correlation	.041	-.127	1	.104
	Sig. (2-tailed)	.841	.537		.613
	N	26	26	26	26
POVERTY	Pearson Correlation	.270	-.451*	.104	1
	Sig. (2-tailed)	.182	.021	.613	
	N	26	26	26	26

**.

*.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan inflasi yang signifikan secara statistik dengan $\alpha = 1$ persen. Hubungan keduanya relatif cukup tinggi yaitu -0,841. Artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka besarnya inflasi akan menurun. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan, dengan hubungan sebesar -0,451 dengan $\alpha = 5$ persen. Artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan menurun. Selanjutnya secara statistik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dinyatakan tidak signifikan. Hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut hanya -0,127. Karena hubungan keduanya relatif kecil, maka secara statistik dinyatakan tidak signifikan.

Hubungan *bivariate* antara inflasi dengan pengangguran maupun inflasi dengan kemiskinan, secara statistik dianggap tidak signifikan. Demikian juga hubungan *bivariate* antara pengangguran dengan kemiskinan secara statistik dinyatakan tidak signifikan karena hubungan yang ada relatif kecil (lihat tabel diatas).

Tabel berikut adalah menggambarkan pengaruh variabel kebijakan moneter seperti uang beredar dan tingkat bunga, maupun pengaruh kebijakan fiskal terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Secara statistik, pengaruh langsung kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dinyatakan tidak signifikan. Kondisi ini wajar karena pengaruh kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal sebenarnya masing-masing ditujukan langsung kepada sektor moneter dan sektor riil. Sedangkan pengaruh kedua kebijakan ekonomi makro lebih bersifat tidak langsung. Seperti diketahui bahwa baik kemiskinan maupun pengangguran yang terjadi disuatu negara bersifat dampak jangka panjang. Artinya dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap kemiskinan maupun pengangguran baru terlihat di dalam jangka panjang.

Dependent Variable: POVERTY

Method: Least Squares

Date: 12/17/10 Time: 09:00

Sample (adjusted): 1984 2008

Included observations: 25 after adjustments

POVERTY=C(1)+C(2)*POVERTY(-1)+C(3)*GROWTH+C(5)*INFLASI
+C(6)*INFLASI(-1)+C(7)*DM1+C(8)*LR+C(9)*G+C(10)*DTAX

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	18.96412	10.03154	1.890449	0.0770
C(2)	0.540623	0.151107	3.577753	0.0025
C(3)	-0.904488	0.287417	-3.146954	0.0062
C(5)	-0.154892	0.082385	-1.880091	0.0784
C(6)	-0.134722	0.040126	-3.357485	0.0040
C(7)	1.02E-05	2.45E-05	0.414905	0.6837
C(8)	-0.015253	0.239778	-0.063613	0.9501
C(9)	-3.35E-05	3.93E-05	-0.851897	0.4068
C(10)	2.01E-05	2.49E-05	0.808086	0.4309
R-squared	0.814089	Mean dependent var		17.89260
Adjusted R-squared	0.721134	S.D. dependent var		3.853610
S.E. of regression	2.035007	Akaike info criterion		4.532588
Sum squared resid	66.26003	Schwarz criterion		4.971383
Log likelihood	-47.65735	Durbin-Watson stat		2.030954

Dependent Variable: UNEMP
 Method: Least Squares
 Date: 12/17/10 Time: 08:44
 Sample (adjusted): 1984 2008
 Included observations: 25 after adjustments
 UNEMP=C(1)+C(2)*UNEMP(-1)+C(3)*GROWTH(-1)+C(5)*INFLASI
 +C(6)*INFLASI(-1)+C(7)*DM1+C(8)*LR+C(9)*D(G)+C(10)*DTAX

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	3.910217	2.402685	1.627436	0.1232
C(2)	0.834310	0.162458	5.135541	0.0001
C(3)	-0.001733	0.098160	-0.017659	0.9861
C(5)	0.082389	0.033740	2.441877	0.0266
C(6)	0.033573	0.030138	1.113992	0.2817
C(7)	1.51E-06	1.68E-05	0.090076	0.9293
C(8)	-0.194981	0.104838	-1.859836	0.0814
C(9)	8.22E-05	7.01E-05	1.173160	0.2579
C(10)	-2.07E-05	1.22E-05	-1.695415	0.1094
R-squared	0.926190	Mean dependent var		5.607200
Adjusted R-squared	0.889285	S.D. dependent var		3.065205
S.E. of regression	1.019911	Akaike info criterion		3.151020
Sum squared resid	16.64349	Schwarz criterion		3.589816
Log likelihood	-30.38776	Durbin-Watson stat		2.648459

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari kajian yang dilaksanakan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja negara (BN), berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan positif pada kedua variabel menunjukkan bahwa dengan semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah pada tahun 2009 berhasil melindungi perekonomian nasional pada tahun tersebut.

Kebijakan moneter juga berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa dengan semakin besar *money supply*, maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan fiskal, baik pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja negara, maupun penerimaan pajak, berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi. Hubungan positif antara belanja negara dengan tingkat inflasi menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi belanja negara maka akan semakin tinggi tingkat inflasi. Sebaliknya semakin tinggi penerimaan pajak akan menurunkan tingkat inflasi.

Kebijakan moneter juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Hubungan negatif antara uang kuasi dengan tingkat inflasi menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya jumlah uang kuasi (yang berarti semakin tingginya tingkat suku bunga simpanan), akan semakin menurunkan tingkat inflasi.

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi, sehingga mampu memulihkan perekonomian makro pada tahun 2010. Kenaikan suku bunga *BI Rate* dan pelonggaran kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan yang mempunyai peranan yang sangat penting pada tahun 2009. Karena kedua kebijakan itu Indonesia mampu mengatasi krisis ekonomi global, sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58 persen.

Kebijakan Penanggulangan Krisis Ekonomi, yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, PNPB Mandiri, dan Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap tingkat inflasi.

Secara statistik, pengaruh langsung kebijakan moneter dan kebijakan fiskal juga tidak signifikan, baik terhadap tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dipaparkan, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan sebagai berikut:

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan stimulus fiskal nampaknya cukup efektif. Namun hal tersebut harus disertai oleh pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan guna menghindari kebocoran-kebocoran.

Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi diperlukan dukungan stimulus fiskal yang berarti untuk perbaikan infrastruktur. Selain itu juga perlu dukungan berupa pemberian subsidi pada suku bunga kredit, agar suku bunga investasi bisa berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena Bank Indonesia tidak lagi berperan sebagai "*Agent of Development*", sehingga tidak lagi mempunyai wewenang untuk menyalurkan kredit murah, atau memaksa bank-bank pelaksana menurunkan tingkat suku bunga kredit.

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berarti, peningkatan anggaran belanja negara hendaknya diutamakan untuk meningkatkan peranan sektor riil dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu belanja pada Kementerian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sektor riil selanjutnya ditingkatkan secara signifikan. Hal ini terutama diberlakukan pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian yang berperan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas tersebut. Sebagai pembandingan, pada RAPBN 2010 belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui kedua kementerian ini masing-masing hanya sekitar Rp 7,95 triliun dan Rp 1,66 triliun, atau masing-masing hanya 2,43% dan 0,5% dari total belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 327,6 triliun. Sementara itu anggaran belanja pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia masing-masing tercatat mencapai Rp 40,69 triliun dan Rp 25,83 triliun, atau masing-masing sebesar 12,42% dan 7,9%.

Karena kebijakan moneter melalui suku bunga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka direkomendasikan agar pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan efektif yang dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit.

Selain itu hendaknya juga diberlakukan maksimum "*interest margin*" (perbedaan antara suku bunga kredit dengan suku bunga simpanan) pada bank-bank pelaksana, mengingat *interest margin* pada bank-bank di Indonesia sangat tinggi, yaitu sekitar 4,5% - 6%. Sementara *interest margin* bank-bank luar negeri hanya berkisar di sekitar 2% - 3%.

Untuk menjaga stabilitas moneter, khususnya untuk mengendalikan laju inflasi, kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga *BI Rate* terbukti cukup efektif. Namun, jika pangkal utama kenaikan inflasi lebih disebabkan karena kelangkaan *stock* barang, maka hal tersebut bukanlah permasalahan di sektor moneter. Kondisi ini harus diatasi dengan peningkatan ketersediaan *stock* melalui peningkatan produksi dan perbaikan jalur distribusi. Dan karena saat ini kenaikan inflasi juga disebabkan oleh masalah logistik, maka persoalan infrastruktur harus menjadi perhatian utama pemerintah dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gulo, Angandrowa. "Analisis Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Greene, William H. "Econometric Analysis". Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2000.
- Judge, George G; Hill, R. Carter; Griffiths, William E.; L. tkepohl, Helmut dan Lee, Tsoung-Chao. "Introduction to The Theory and Practice of Econometrics". Second Edition.
- Judge, George G; Hill, R. Carter; Griffiths, William E.; L. tkepohl, Helmut dan Lee, Tsoung-Chao. "The Theory and Practice of Econometrics". Second Edition, Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics.
- Kukk, Kalle. "Fiscal Policy Effects on Economic Growth: Short Run vs Long Run". *Working Paper No.167*, Department of Economics, Tallinn University of Technology 101 Kopli, 11712 Tallinn, Estonia.
- Levy, Mickey D. "Don't Mix Monetary and Fiscal Policy: Why Return to an Old, Flawed Framework?". *Cato Journal*, Vol. 21, No. 2, Cato Institute, 2001.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Usman, Hardius. "Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan". Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- Obstfeld, Maurice; Shambaugh, Jay C.; dan Taylor, Alan M. "The Trilemma in History: Tradeoffs among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility". *Institute of Business and Economic Research*, Center for International and Development Economics Research, University of California, Berkeley, Mei 2004.
- Pindyck, Robert. S dan Rubinfeld, Daniel L. "Econometric Models and Economic Forecasts". Third Edition, Mcgraw-Hill International Editions.
- Rahman, Erna Zetha. "Pemilihan Rezim Nilai Tukar Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perekonomian. Studi Kasus Di Indonesia: 1978 - 2006". Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok, 2008.
- Scarth, William H. "Advanced Macroeconomics". 2nd ed. Harcourt Jovanovich: New York, 1995.
- Suharjo, Budi. "Meramal dengan Analisis Deret Waktu (Time Series Analysis)". *Advance Integrated Data Analysis*, MARS School of Marketing Research.
- Sukirno, Sadono. "Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru". PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan. "Ekonometrika Pengantar". BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, Mei 1998.
- Tim FEUI. "Indonesia Economic Outlook 2010 Bisnis; Manajemen & Keuangan". Grasindo, 2010.
- Warjiyo, Perry. "Rezim Nilai Tukar dan Implikasinya Bagi Kinerja Ekonomi". *Hand Out mata kuliah Keuangan Internasional*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Ekonomi, Depok, 2004.
- _____. "Kajian Pengembangan Model Keuangan Negara Untuk Penetapan Ruang Fiskal ". Direktorat Keuangan Negara. Bappenas, 2009.
- _____. "Kebijakan moneter". Wikipedia bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas.
- _____. Definisi/Pengertian Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal, Instrumen Serta Penjelasannya. <http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya>.
- _____. "The Use of Fiscal Policy to Stabilize the Economy". www.web-books.com/eLibrary/NC/B0/B62/060MB62.

STUDI EFEKTIFITAS KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL TAHUN 2009 TERHADAP PEREKONOMIAN

DIREKTORAT KEUANGAN NEGARA
email: leonard@bappenas.go.id

ABSTRAK

Ketika krisis global berdampak terhadap perekonomian domestik, pemerintah Indonesia mengeluarkan Paket Kebijakan Stimulus Fiskal Tahun 2009 senilai Rp73,3 triliun. Hal ini didasarkan pada turunnya kemampuan sektor swasta untuk mempertahankan pertumbuhan baik dari sisi investasi maupun ekspor. Dalam literatur, terdapat dua pendapat pro dan kontra atas kebijakan stimulus semacam ini. Pihak pro misalnya berargumen pentingnya ekspansi fiskal karena adanya beban yang harus ditanggung oleh individu ketika pendapatan mereka turun (*hardship*) saat krisis, atau keterbatasan ruang gerak kebijakan moneter seiring dengan rendahnya tingkat suku bunga. Di sisi lain, pihak kontra bersandar pada argumen rendahnya efektivitas kebijakan stimulus karena fenomena crowding out atau efek yang tidak relevan seperti dalam pandangan Ricardian Equivalence.

Studi ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh stimulus fiskal tahun 2009 terhadap perekonomian. Metode yang dipergunakan ada dua. Pertama adalah pendekatan simulasi model *Computable General Equilibrium* (CGE) dan yang kedua adalah survey lapangan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*) dan pelaksana di daerah paket stimulus. Hasil simulasi CGE menunjukkan bahwa paket stimulus mampu mendorong perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Dari pilihan instrumen yang ada, potongan Pajak Penghasilan (PPH) Orang adalah instrumen yang berdampak paling besar dan yang kedua adalah instrumen belanja infrastruktur. Secara sektoral, stimulus fiskal 2009 lebih banyak mendorong ekspansi pada sektor konstruksi, sektor listrik air dan gas, sektor pemerintahan, pertahanan, pendidikan, kesehatan dan jasa sosial lainnya serta sektor-sektor terkait pangan. Untuk tujuan serapan tenaga kerja, instrumen pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dominan dibandingkan instrumen belanja pemerintah. Dari survey ke penerima manfaat dan pelaksana di daerah didapatkan beberapa kelemahan yang mengganggu efektivitas stimulus fiskal diantaranya sosialisasi yang lemah, respon individu untuk membelanjakan benefit stimulus yang rendah, keterlambatan terbitnya DIPA stimulus yang menghambat efektivitas dari sisi ketepatan momentum dalam menghadapi dampak krisis.

Adapun saran kebijakan dari hasil dan kesimpulan studi ini adalah (1) Kebijakan stimulus fiskal melalui pemotongan PPH Orang Pribadi merupakan instrumen yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun demikian perlu dicermati dalam implementasinya karena efektivitasnya sangat tergantung kecenderungan individu untuk memanfaatkan benefit ini. (2) Kebijakan stimulus fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur memang berperan penting dalam menciptakan serapan tenaga kerja. Namun terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan efektivitas tujuan ini. Pertama agar efektif dari sisi sasaran, perencanaan yang melibatkan daerah secara memadai sebaiknya dilaksanakan. Kedua, agar efektif dalam hal ketepatan waktu, perlu perbaikan atas hambatan administratif, koordinasi pusat-daerah dan kapasitas sumber daya manusia.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan resesi ekonomi global yang puncaknya terjadi 2008 silam, sulit bagi suatu negara untuk mengharapkan kontribusi dari sektor investasi atau ekspor. Runtuhnya pasar keuangan dunia menyebabkan para pelaku ekonomi mengurangi investasi yang dilakukan. Sementara itu, penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan berkurangnya kemampuan tiap Negara untuk melakukan impor sehingga pasar ekspor mengecil.

Turunnya kontribusi ekspor dan investasi mendorong peran pengeluaran pemerintah dalam menopang perekonomian melalui kebijakan fiskal. Kebijakan inilah yang diambil oleh banyak negara, yakni berupa pemberian stimulus fiskal, terutama untuk mendorong gerak sektor riil. Dipilihnya pemberian stimulus fiskal juga mempertimbangkan terbatasnya ruang gerak kebijakan moneter dalam mengatasi krisis ekonomi global, seiring dengan rendahnya tingkat suku bunga, terutama di negara maju.

Dalam tataran teori masih terjadi perdebatan mengenai pengaruh stimulus fiskal terhadap perekonomian, terutama ketika terjadi ancaman resesi ekonomi seperti saat ini. Ada yang pro dan kontra. Salah satu argument kontranya antara lain

terkait dengan teori *Ricardian Equivalence*¹ ataupun kekhawatiran akan adanya *Crowding Out Effect*. Di sisi lain, argumen pro stimulus fiskal juga masih terjadi perdebatan, terutama terkait dengan bentuk stimulus fiskal yang akan diberikan. Bentuk stimulus fiskal manakah yang lebih baik, apakah bentuk insentif pajak atau berupa bentuk pengeluaran (*spending*), misalkan untuk pembangunan infrastruktur.

Tabel 1. Paket Stimulus Fiskal

Program	Alokasi
Dalam UU APBN 2009 (A + B)	56.300,0
A. Penghematan pembayaran Pajak	43.000,0
1. Penurunan tarif PPh OP (35% --> 30%) dan perluasan lapisan tarif	13.500,0
2. Peningkatan PTKP menjadi RP 15,8 juta	11.000,0
3. Penurunan tarif PPh Badan (30% --> 28%) dan perusahaan masuk bursa --> tarif 5% lebih rendah	18.000,0
B. Subsidi Pajak-BM/DTP kepada Dunia Usaha/RTS	13.300,0
1. PPN Minyak Goreng	800,0
2. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)	200,0
3. Bea Masuk Bahan Baku dan Barang Modal	2.500,0
4. PPN Eksplorasi Migas	2.500,0
5. PPh Panas Bumi	800,0
6. PPh Pasal 21	6.500,0
Tambahan	16.959,3
C. Subsidi Non Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan pada Dunia Usaha/Lapangan Kerja	16.959,3
1. Penurunan Harga Solar Rp 300/liter	2.779,9
2. Diskon Tarif Listrik untuk Industri	1.377,9
3. PNPM	601,5
4. Tambahan Stimulus	12.200,0
a. Subsidi Bunga untuk Perusahaan Air Bersih	15,0
b. Subsidi Obat Generik	350,0
c. Revitalisasi dan Rehab Gudang Komoditi Primer	120,0
d. Belanja Stimulus Infrastruktur	11.215,0
e. PMN untuk Jamkrindo dan Askrindo (KUR)	500,0
Jumlah Stimulus (A + B + C)	73.259,3

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 disebutkan bahwa paket kebijakan stimulus pada tahun tersebut ditujukan untuk (a) memelihara dan/atau meningkatkan daya beli masyarakat untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 4,0 persen; (b) menjaga daya tahan perusahaan/sector usaha menghadapi krisis global; serta (c) meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat karya. Bentuk alokasinya mencakup penghematan pembayaran pajak, subsidi pajak, subsidi non-pajak, belanja negara dan pembiayaan ke dunia usaha. Tabel 1 menyajikan rincian alokasi dan besaran paket stimulus fiskal tahun 2009.

Bertolak dari paparan di atas, kajian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh stimulus fiskal terhadap perekonomian, terutama dikaitkan dengan tujuan pemberian stimulus fiskal. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas stimulus fiskal yang diberikan. Harapannya, ke depan pemerintah dapat lebih tepat dan akurat dalam penyusunan kebijakan fiskal, terutama dalam hal pemberian stimulus fiskal.

II. TUJUAN KAJIAN

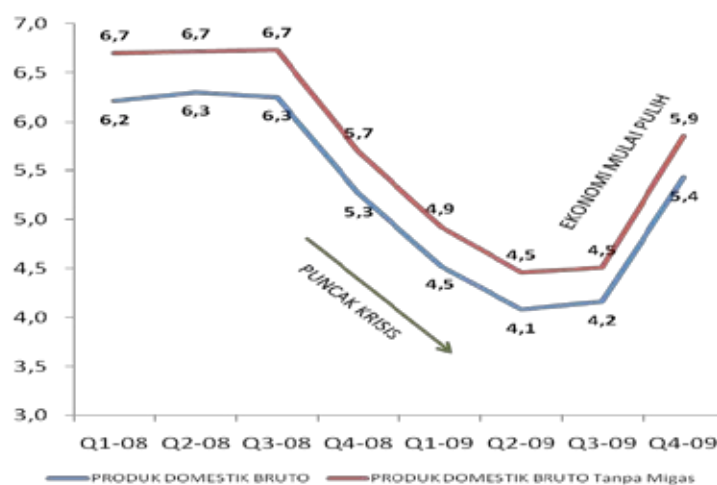
Secara garis besar, kajian ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai salah satu *shareholders* dalam perencanaan kebijakan keuangan negara. Sedangkan secara khusus kajian ini ditujukan untuk:

1. Mengkaji pengaruh stimulus fiskal dalam krisis ekonomi global, terutama dampaknya terhadap indikator-indikator makroekonomi, serta terhadap distribusi pendapatan dan dampak sektoralnya, terutama dalam mencapai tujuan pemberian stimulus fiskal.
2. Menjadi bahan masukan dan koridor kebijakan dalam proses perencanaan kebijakan pemerintah terutama terkait dengan kebijakan fiskal.
3. Menjadi bahan analisis dan rekomendasi untuk memilih kebijakan stimulus fiskal yang tepat dan akurat dalam menghadapi permasalahan ekonomi ke depan.

1 *Ricardian equivalence* menyatakan bahwa peningkatan defisit anggaran, yang kemudian dibiayai oleh utang ataupun peningkatan pajak, tidak akan mengubah tingkat permintaan di perekonomian. Hal ini disebabkan konsumen secara rasional akan menyesuaikan tingkat permintaannya sepanjang waktu.

II. KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2009

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)



Sumber: BPS

Indonesia adalah satu dari tiga negara, selain China dan India, yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi positif sepanjang tahun 2009. Walau begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami penurunan cukup besar di tahun 2009. Gambar 1 menunjukkan bagaimana pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tiap kuartalnya. Puncak krisis terjadi pada kuartal kedua tahun 2009, dimana pertumbuhan ekonominya tercatat hanya 4,1 persen. Setelah itu pertumbuhan ekonomi meningkat, hingga 5,4 persen di kuartal keempat tahun 2009. Sepanjang tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5 persen.

Secara umum, dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi melalui dua saluran, yakni saluran perdagangan dan keuangan. Saluran perdagangan terutama dikarenakan terjadinya pelemahan permintaan ekspor dan penurunan harga komoditas. Dampak yang dialami Indonesia melalui saluran ini cukup besar. Di kuartal akhir tahun 2008, pertumbuhan ekspor Indonesia turun menjadi 2 persen dari sebelumnya 10,3 persen di kuartal ketiga tahun 2008. Penurunan tajam terjadi sepanjang tahun 2009, dimana pertumbuhan ekspor tahun 2009 menurun hingga 15,0 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Hal yang sama juga terjadi pada impor, yang menurun sebesar 25,0 persen di tahun 2009, bila dibandingkan dengan tahun 2008.

Faktor utama yang menjadi penyebab penurunan yang tajam pada sektor perdagangan Indonesia berasal dari karakteristik ekspor. Karakteristik yang dimaksud ada dua, yakni struktur dan tujuan ekspor. Struktur ekspor Indonesia sangat bergantung pada komoditas primer dan kurang terdiversifikasi. Dengan kondisi tersebut, ketika terjadi penurunan harga komoditas internasional, tentu ekspor Indonesia akan terpukul. Selain itu, faktor terkait struktur yang menjadi penghambat adalah tingginya kandungan impor pada komoditas ekspor. Karakteristik kedua terkait dengan tujuan ekspor. Selama ini negara tujuan utama ekspor Indonesia cenderung terkonsentrasi pada sejumlah negara, dimana lebih dari separuh pangsa ekspor tertuju pada keempat sampai lima negara saja.

Saluran kedua krisis ekonomi global ke perekonomian Indonesia adalah melalui saluran keuangan. Dampak langsungnya dapat dilihat pada kinerja sektor keuangan Indonesia selama krisis terjadi. IHSG anjlok hingga 50 persen pada Januari 2009, dibandingkan dengan Januari 2008. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari capital outow kembali ke negara-negara maju. Kondisi yang sama juga terjadi pada nilai tukar Rupiah. Sepanjang krisis, nilai tukar Rupiah beruktuasi dan menurun hingga mencapai Rp12.150 per US dolar pada November 2008. Kinerja sektor keuangan Indonesia mulai pulih pada kuartal kedua tahun 2009, seiring dengan kepercayaan investor yang mulai pulih. Hasilnya, pada akhir tahun 2009, IHSG mencapai 2.534, meningkat pesat dibandingkan IHSG pada akhir tahun 2008, yang sebesar 1.355. Sementara itu, nilai tukar juga menguat hingga Rp9.425 per US dolar pada akhir tahun 2009.

Dampak dari saluran keuangan juga dapat dilihat pada kinerja investasi yang masuk ke dalam negeri. Investasi diperkirakan melambat hingga sebesar 7,5 persen sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Penurunan investasi terutama disebabkan oleh capital outow akibat fenomena ight to quality yang terjadi sepanjang krisis. Akibatnya, neraca pembayaran mengalami penurunan seiring dengan peningkatan de_sit, baik pada transaksi berjalan dan neraca transaksi modal dan finansial.

III. METODE

Terkait dengan tujuan penelitian dalam studi ini, dikembangkan 2 pendekatan, yaitu pengembangan dan pemanfaatan model komputasi keseimbangan umum (model CGE) dan juga survei persepsi ke penerima manfaat. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan secara ringkas mengenai kedua pendekatan tersebut.

3.1. Computable General Equilibrium (Cge)

Model CGE dari sebuah perekonomian nasional merupakan sistem persamaan yang mencerminkan perilaku semua

pelaku ekonomi, yaitu perilaku konsumen dan produsen, serta kondisi kliring pasar (market-clearing condition) dari barang dan jasa dalam perekonomian tersebut. Sistem persamaan ini biasanya dibagi dalam 5 (lima) blok persamaan. Blok-blok tersebut adalah:

1. Blok Produksi: Persamaan-persamaan dalam blok ini mencerminkan struktur kegiatan produksi dan perilaku produsen.
2. Blok Konsumsi: Blok ini terdiri dari persamaan-persamaan yang mencerminkan perilaku rumah tangga dan institusi lainnya.
3. Blok Ekspor-Impor: Blok ini menggambarkan keputusan negara/daerah untuk mengekspor atau mengimpor barang dan jasa.
4. Blok Investasi: Persamaan-persamaan dalam blok ini mensimulasikan keputusan untuk melakukan investasi dalam perekonomian dan permintaan akan barang dan jasa yang dipergunakan dalam pembentukan modal baru.
5. Blok Market-Clearing: Persamaan-persamaan dalam blok ini menentukan kondisi keseimbangan untuk tenaga kerja, barang dan jasa dalam perekonomian. Neraca pembayaran nasional juga termasuk dalam blok ini.

Penyusunan model CGE dalam kajian ini bertumpu pada data yang dikenal dengan Tabel Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) atau dikenal dengan *Social Accounting Matrix* (SAM). Penggunaan sumber data ini sangat penting mengingat SNSE atau SAM merupakan salah satu sistem pendataan dan juga alat analisis penting yang dikembangkan untuk mengamati dan menganalisa apakah sebuah kebijakan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuat distribusi pendapatan semakin merata di suatu negara. Secara sederhana SNSE adalah sebuah neraca ekonomi masukan ganda tradisional berbentuk matriks partisi yang mencatat segala transaksi ekonomi antara agen, terutama sekali antara sektor-sektor di dalam blok produksi, sektor-sektor di dalam blok institusi (termasuk di dalamnya rumah tangga), dan sektor-sektor di dalam blok faktor produksi, di suatu perekonomian (Pyatt dan Round, 1979; Hartono dan Resosudarmo, 1998).

Selain itu, SNSE merupakan suatu sistem pendataan yang baik karena: (1) SNSE merangkul seluruh kegiatan transaksi ekonomi yang terjadi di suatu perekonomian untuk sebuah kurun waktu tertentu, dengan demikian SNSE dapat dengan mudah memberikan gambaran umum mengenai perekonomian suatu wilayah; dan (2) SNSE memotret struktur sosial-ekonomi di suatu perekonomian, dengan demikian SNSE di antaranya dapat memberikan gambaran tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan di perekonomian tersebut.

Disamping itu juga SNSE merupakan alat analisa yang penting karena: (1) analisa dengan menggunakan SNSE dapat menunjukkan dengan baik dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, dengan demikian dapat diketahui dampak dari suatu kebijakan ekonomi terhadap masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan; dan (2) analisa dengan SNSE relatif sederhana, dengan demikian penerapannya dapat dilakukan dengan mudah di berbagai negara².

3.2. Survei Persepsi Penerima Manfaat

Selain menggunakan analisis model CGE, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan survey lapangan untuk mengkonfirmasi beberapa hasil simulasi di dalamnya. Kegiatan survey lapangan ini melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu individu, perusahaan dan pelaksana stimulus fiskal di daerah. Diharapkan dari tiga pemangku kepentingan ini didapatkan gambaran pelaksanaan stimulus fiskal dan dampaknya yang dirasakan oleh masing-masing jenis responden. Secara ringkas, desain survey meliputi obyek responden yang terlibat, jenis instrumen stimulus fiskal yang menjadi target survey dan tujuan dilaksanakannya stimulus fiskal disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Desain Survey

Tipe	Instrumen	Individu	Perusahaan	Pelaksana
Perpajakan	Penurunan tarif PPh Orang	√		
	Penurunan tarif PPh Badan		√	
	Peningkatan PTKP	√		
	PPN DTP		√	
	BM DTP		√	
Non-pajak	Penurunan Harga Solar		√	
	Diskon Tarif Listrik		√	
	Belanja Negara (Infrastruktur)			√

Dalam pelaksanaannya diperlukan instrumen survei yang berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden berupa pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan tertutup. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam survey lapangan mencakup jawaban kualitatif dan jawaban kuantitatif. Beberapa aspek pertanyaan mengenai efektivitas pencapaian sasaran pelaksanaan stimulus fiskal maupun faktor-faktor yang dianggap menjadi kendala lebih banyak yang bersifat persepsi. Dalam literatur, salah satu teknik analisis kuantitatif dari jawaban atas persepsi adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

- 2 Sebuah SNSE dapat juga dibuat untuk lingkup perekonomian yang lebih kecil dari negara, misalnya untuk tingkat propinsi, kabupaten, dan bahkan kota. Sebaliknya, sebuah SNSE dapat juga dibuat untuk lingkup yang lebih besar dari negara, misalnya tingkat continental atau bahkan sebuah SNSE dunia.

Secara sederhana, *Analytic Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompok, dan mengaturnya kedalam suatu hirarki yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode AHP dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan prioritas sebuah permasalahan atau kebijakan. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan yang telah dibuat (Saaty, 1993).

Dengan kata lain, AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang menggunakan persepsi manusia yang dianggap ahli (orang yang mengerti permasalahan yang diajukan atau orang yang mempunyai kepentingan terhadap isu atau permasalahan yang diajukan) sebagai input utamanya. Kelebihan model AHP dibandingkan model pengambilan keputusan lainnya terletak pada kemampuan memecahkan masalah yang multiobjectives dan multicriterias. Dalam konteks hambatan stimulus fiskal, AHP menjadi salah satu instrumen penggali persepsi dari narasumber yang dianggap ahli yang reliable dalam mengidentifikasi jenis atau kategori dari masalah yang dianggap dominan menghambat efektifitas pencapaian stimulus fiskal. Hal ini dilakukan dengan cara menggali persepsi tingkat kepentingan masalah yang diduga sebagai faktor penghambat dari para ahli dalam hal ini pemangku kepentingan dari kegiatan stimulus fiskal di daerah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian mencakup tiga hal pokok, yaitu melakukan kajian model ekonomi untuk menganalisis dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap kinerja perekonomian dan efektivitasnya, merumuskan instrumen kebijakan stimulus fiskal yang tepat bagi peningkatan kinerja perekonomian, dan merumuskan bahan masukan dan rekomendasi kebijakan bagi perencanaan kebijakan pemerintah dan pilihan kebijakan fiskal untuk mengantisipasi permasalahan ekonomi ke depan.

Berdasarkan dua pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis dampak ekonomi stimulus fiskal 2009 dengan menggunakan model CGE dan juga analisis menggunakan survey lapangan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Besarnya alokasi anggaran, sasaran dan instrumen kebijakan yang digunakan akan menentukan besarnya dampak ekonomi stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan stimulus fiskal secara tepat baik dari sisi besarnya anggaran, sasaran maupun instrumen yang digunakan, agar stimulus fiskal yang dijalankan dapat memberikan dampak maksimal dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
- Paket stimulus fiskal secara agregat mampu meningkatkan kinerja perekonomian khususnya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga. Di samping itu, stimulus fiskal juga menimbulkan dampak terhadap kenaikan harga-harga secara umum.
- Kebijakan stimulus fiskal baik berdasarkan pagu maupun realisasi anggaran memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga yang relatif sama dan lebih didominasi oleh kebijakan stimulus fiskal melalui pemotongan PPh orang pribadi dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur. Namun demikian perlu diketahui bahwa dua kebijakan fiskal tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa kenaikan harga-harga secara umum.
- Kebijakan pemotongan PPh Orang Pribadi merupakan instrumen kebijakan yang paling besar memberikan dampak ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat dimaklumi mengingat alokasi anggaran stimulus fiskal melalui pemotongan PPh Orang Pribadi merupakan alokasi yang paling besar (sekitar 42% dari total anggaran stimulus fiskal). Sementara itu, kebijakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur merupakan instrumen stimulus yang memberikan dampak ekonomi terbesar kedua.
- Instrumen fiskal melalui pemotongan PPN dan subsidi memberikan dampak terhadap perekonomian yang relatif bernilai sama meskipun kedua kebijakan tersebut dampak terhadap perekonomiannya lebih rendah jika dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan oleh instrumen fiskal melalui pemotongan PPh Orang Pribadi dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur.
- Penggunaan tarif impor sebagai instrumen stimulus fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja maupun pendapatan rumah tangga. Di sisi lain, instrumen ini menyebabkan terjadinya penurunan harga-harga secara umum.
- Kebijakan stimulus fiskal lebih mendorong terjadinya ekspansi pada sektor konstruksi; listrik, air dan gas; pemerintahan, pertahanan, pendidikan, kesehatan dan jasa sosial lainnya; serta sektor-sektor yang terkait dengan pangan (seperti sektor pertanian, peternakan, dan restoran).
- Terkait dengan tujuan stimulus fiskal, berdasarkan hasil analisis model CGE dapat dikemukakan beberapa hasil sebagai berikut: (i) stimulus fiskal melalui instrumen pemotongan PPh Orang Pribadi dan PPN memberikan dampak positif yang sejalan dengan tujuan pertama yaitu memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat; (ii) stimulus fiskal melalui instrumen pemotongan pajak badan, pemotongan PPN, dan pemberian subsidi memberikan dampak positif yang sejalan dengan tujuan kedua yaitu menjaga daya tahan perusahaan/ sektor usaha; dan (iii) stimulus fiskal melalui instrumen pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur memberikan dampak positif yang sejalan dengan tujuan ketiga yaitu meningkatkan daya serap tenaga kerja.
- Terkait dengan hasil simulasi mengenai pilihan instrumen stimulus fiskal dapat dikemukakan beberapa hal berikut: (i) Instrumen pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur merupakan instrumen yang paling besar mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian diikuti oleh instrumen fiskal melalui pemotongan PPN. Sedangkan instrumen pemotongan PPN merupakan instrumen stimulus fiskal yang memberikan dampak paling besar dalam

hal peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, kemudian diikuti oleh instrumen fiskal melalui pengeluaran pemerintah. Lebih jauh, stimulus fiskal melalui pemotongan PPN memberikan dampak terhadap perekonomian berupa penurunan harga-harga secara umum; (ii) Di sisi lain, pemotongan PPN merupakan instrumen stimulus fiskal dari sisi pajak yang memberikan dampak paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian diikuti oleh instrumen fiskal melalui pemotongan PPh Orang Pribadi. Sedangkan instrumen fiskal dari sisi pajak yang memberikan dampak paling besar pada kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga adalah pemotongan PPN, kemudian diikuti oleh instrumen fiskal melalui pemberian subsidi. Namun demikian, terdapat instrumen fiskal dari sisi pajak (berupa penurunan tarif impor) yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga; (iii) Stimulus fiskal secara umum akan mendorong sektor produksi untuk ekspansi kecuali jika dilakukan melalui penurunan tarif impor. Hal ini disebabkan karena stimulus fiskal melalui penurunan tarif impor akan mendorong peningkatan permintaan komoditas impor yang pada faktanya akan menekan permintaan komoditas domestik dan menyebabkan terjadinya realokasi sumber daya ke sektor-sektor yang berekspansi. Namun demikian, instrumen penurunan tarif impor di satu sisi mampu mendorong sektor-sektor berbasis industri untuk ekspansi. Hal tersebut merupakan dampak dari penurunan biaya produksi bagi sektor-sektor yang menggunakan input dari komoditas impor; dan (iv) Permintaan tenaga kerja sektoral juga akan mengalami peningkatan, sejalan dengan dorongan ekspansi yang diberikan stimulus fiskal. Sementara itu, sejalan dengan dampak kontraktif yang dihasilkan melalui kebijakan penurunan tarif impor, permintaan tenaga kerja pada beberapa sektor produksi mengalami penurunan dan terealokasikan kepada sektor-sektor yang mengalami ekspansi.

- Survey kepada individu penerima manfaat menunjukkan indikasi lemahnya efektifitas karena persoalan sosialisasi yang lemah. Dalam hal ini banyak penerima manfaat yang tidak menyadari/mengetahui kebijakan ini sehingga tidak terjadi efek spending atau MPC aktual yang cukup rendah.
- Survey kepada responden perusahaan menunjukkan preferensi dan penilaian efektivitas yang lebih tinggi untuk jenis kebijakan non-perpajakan, dalam hal ini yang berbentuk subsidi dan pengurangan biaya produksi.
- Salah satu perhatian dalam literatur mengenai hambatan efektivitas program stimulus adalah masalah ketepatan waktu. Dalam konteks ini, survey di lapangan membuktikan bahwa jenis hambatan ini memang disadari ada di lingkup kendala administratif, koordinasi pusat-daerah dan di beberapa tempat terkait kualitas sumber daya manusia pelaksana. Efektivitas yang rendah dalam kenyataan sebenarnya dalam perekonomian terlihat dari survey di lapangan.
- Dalam kaitan dengan tujuan pemberian stimulus fiskal, hasil survey memberikan hasil evaluasi sebagai berikut. Menurut persepsi individu maupun perusahaan, tujuan meningkatkan daya beli masyarakat belum tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya proporsi responden yang menyatakan merasakan kenaikan pendapatan. Sedangkan dari sisi efektivitas serapan tenaga kerja, dari persepsi pelaksana di daerah didapatkan masalah berupa lemahnya sisi perencanaan. Dimana perencanaan stimulus fiskal tahun 2009 sama sekali tidak melibatkan Bappeda yang seharusnya mengkoordinasikan kegiatan atau program di wilayahnya yang bisa jadi menentukan ketepatan sasaran, termasuk serapan tenaga kerja.

4.2 Saran Kebijakan

Adapun saran kebijakan dari hasil dan kesimpulan studi ini adalah:

- Kebijakan stimulus fiskal melalui pemotongan PPh Orang Pribadi merupakan instrumen yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun demikian perlu dicermati dalam implementasinya karena efektivitasnya sangat tergantung kecenderungan individu untuk memanfaatkan benefit ini. Kebijakan ini akan menjadi kurang efektif apabila tingkat kecenderungan konsumsi rendah, misalnya akibat lemahnya sosialisasi.
- Kebijakan stimulus fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur memang berperan penting dalam menciptakan serapan tenaga kerja. Namun terdapat dua hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan efektivitas tujuan ini. Pertama agar efektif dari sisi sasaran, perencanaan yang melibatkan daerah secara memadai sebaiknya dilaksanakan. Kedua, agar efektif dalam hal ketepatan waktu, perlu perbaikan atas hambatan administratif, koordinasi pusat-daerah dan kapasitas sumber daya manusia.
- Terkait dengan pilihan instrumen stimulus fiskal, pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut sebagai alternatif kebijakan, yaitu:
 - Instrumen fiskal melalui pemotongan PPN lebih efektif digunakan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga.
 - Instrumen fiskal melalui pengeluaran pemerintah untuk investasi infrastruktur lebih efektif digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - Kebijakan melalui pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pemotongan PPN pada industri yang tepat diperkirakan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga.
 - Kebijakan melalui pemotongan PPh Orang Pribadi yang tepat dan efektif kemudian diikuti dengan kebijakan pemotongan PPN pada industri yang tepat lebih efektif dan mampu untuk memelihara dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Kebijakan melalui pemotongan PPN kemudian diikuti dengan kebijakan pemberian subsidi pada industri yang tepat lebih efektif dan mampu untuk menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha (vi). kebijakan melalui pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur kemudian diikuti dengan kebijakan pemotongan PPN pada industri yang tepat lebih efektif dan mampu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. "Kebijakan Fiskal Dan Efektivitas Stimulus Fiskal Di Indonesia: Aplikasi Model Makro-Modifi Dan CGE-Indorani". *Jurnal Ekonomi Indonesia* No.1, Juni 2005.
- Alesina, Alberto F. dan Silvia Ardagna. 2009. "Large Changes in Fiscal Policy: Taxes Versus Spending," NBER Working Papers 15438, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Anh, Nguyen Ngoc, Nguyen Duc Nhat, dan Nguyen Thang. 2010. "Current Global Crisis, Fiscal Stimulus Package and Implication for Vietnam". Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, *Public Policy Review*, vol.6, no. 4, pp.769-790, April 2010.
- Aschauer D. A. 1989. Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics* No. 23: 177-200.
- Badan Pusat Statistik. 2005. "Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 2005". Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia. 2009. *Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014*, Edisi Januari 2009.
- Bappenas. 2000. "Program Pembangunan Nasional 2000-2009". Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. 2005. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009". Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Blanchard, Olivier dan Roberto Perotti. 2002. "An Empirical Characterization Of The Dynamic Effects Of Changes In Government Spending And Taxes On Output," *The Quarterly Journal of Economics*, MIT Press, vol. 117(4), pages 1329-1368, November.
- Blinder, Alan S. 1981. "Temporary Income Taxes and Consumer Spending," *The Journal of Political Economy* 89(1), 26-53.
- Dalgaard, Thomas, Christophe André, and Pete Richardson. 2001. "Standard Shocks in the OECD Interlink Model," OECD Economics Department Working Paper No. 306 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development).
- Ecologic Institute. 2009. *Economic Stimulus in Europe – Accelerating Progress towards Sustainable Development?*, ESDN Meeting, Prague June 2009.
- Elmendorf, Douglas W. dan David Reifschneider. "Short-run Effects of Fiscal Policy with Forward-looking Financial Markets." *National Tax Journal*, Vol. 55, No. 3, September 2002
- European Commission. 2009. *Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences, and Responses*.
- Feldstein, Martin S. "Rethinking The Role of Fiscal Policy." NBER Working Paper No. 14684, January 2009
- Furman, Jason. "Options for Fiscal Stimulus." Testimony Before the U.S. Senate Committee on Finance, January 2008
- Gravelle, Jane G. "Tax Cuts and Economic Stimulus: How Effective Are the Alternatives?". Congressional Research Service, April 2002.
- Jitsuchon, Somchai. 2010. "Fiscal Policy in Issues in Thailand after the Current Economic Crisis". Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, *Public Policy Review*, vol.6, no. 4, pp.741-768, April 2010.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2000 – 2009. "Nota Keuangan dan APBN Tahun 2000– 2009". Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2009. "Mengatasi Dampak Krisis Global Melalui Program Stimulus Fiskal APBN 2009". Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Ilzetzki, Ethan, Enrique G. Mendoza, and Carlos A. Vegh. "How Big are Fiscal Multipliers." *Centre for Economic Policy Research – Policy Insight* No. 39, October 2009
- International Monetary Fund. 2009. "World Economic Outlook 2009". International Monetary Fund Report.
- _____. "World Economic Outlook 2010". International Monetary Fund Report.
- Mankiw, N. Gregory. "The Savers-Spenders Theory of Fiscal Policy." *The American Economic Review*, Vol. 90, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Twelfth Annual Meeting of the American Economic Association, pp. 120-125, May 2000.
- Manning, Chris. 2009. *Globalisation and Labour Markets in Boom and Crisis: The Case of Vietnam*. Australian National University, Department of Economics, Working Paper No. 2009-17.
- Mountford, Andrew dan Harald Uhlig. 2002. "What are the Effects of Fiscal Policy Shocks?," CEPR Discussion Papers 3338, C.E.P.R. Discussion Papers.
- Newbold, Paul. (2003). *Statistics for Business and Economics*. 3rd ed. New Jersey: Prentice Hall,.
- Shapiro, M.D. dan Slemord, J.B. 2009, "Did the 2008 Tax Rebates Stimulate Spending?" *American Economic Review*, 99(2)374-379.
- Sadoulet, E., and Janvry, A. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis*. London: John Hopkins University Press.
- United States Council of Economic Advisers. 2009. *The Economic Impact Of The American Recovery And Reinvestment Act Of 2009*.
- Varian, Hal R. 1992. *Microeconomic Analysis* (3rd ed). New York. Norton, W Company.
- World Bank. 2007. *Study of Indonesian Public Spending: The New Opportunity*. Public Spending Study 2007, World Bank.
- _____. 2010. "Global Economic Prospect 2010". World Bank

ALTERNATIF MEKANISME KOORDINASI PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

DIREKTORAT SUMBER DAYA ENERGI, MINERAL DAN PERDAGANGAN
email: dit.esdmp@bappenas.go.id

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk memetakan semua permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan energi terbarukan terutama pada sisi permasalahan lunak (soft problem) yang terkait dengan kebuntuan koordinasi. Selanjutnya dengan pemahaman permasalahan yang komprehensif, dapat dirumuskan alternatif koordinasi yang menjadi pedoman mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengembangan energi terbarukan.

Kajian ini dilaksanakan melalui instrumen utama survey opini dengan beberapa instrumen pendukung seperti survei lapangan langsung dan diskusi dengan stakeholder terkait, brainstorming melalui Focus Group Discussion (FGD), dan penelaahan atas hasil survei melalui keterlibatan Tenaga Ahli Energi, Ekonomi dan Pertanian, serta nara sumber di bidang energi terbarukan. Analisis kajian didukung dengan uji statistik Chi Square. Beberapa permasalahan yang mengemuka dari hasil survey opini direview dan dikelompokkan menjadi dua kategori besar yaitu aspek pendanaan dan aspek kelembagaan yang dipecah lagi menjadi kategori Harga, Insentif-Pajak, Investasi, Sosialisasi, tupoksi (K/L), Substansi regulasi/program-perijinan, Otonomi daerah dan Kebijakan penunjang untuk mendapatkan inti permasalahan yang menjadi fokus penyempurnaan Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan

Berdasarkan hasil survey opini, terungkap adanya persamaan pandangan dari responden pemerintah dan swasta atas aspek regulasi sebagai penghambat pengembangan energi terbarukan sementara untuk aspek koordinasi terdapat perbedaan pandangan di mana pemerintah tidak memandang aspek koordinasi sebagai penghambat. Dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa memang proses koordinasi sudah berjalan melalui berbagai sarana dan forum koordinasi yang diinisiasi pemerintah namun mekanisme koordinasi yang ada kurang efektif sehingga hasil proses koordinasi kurang dirasakan oleh pihak swasta sebagai pelaksana di lapangan. Perbedaan ini disebabkan oleh aspek regulasi dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam mekanisme penyusunan regulasi dan mekanisme koordinasi. Dua inti permasalahannya yaitu substansi regulasi-perijinan dan mekanisme koordinasi terkait tupoksi K/L di pusat yang perlu disempurnakan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

1. LATAR BELAKANG

Konsumsi minyak bumi dalam negeri setiap tahunnya mengalami kenaikan rata-rata 3,48% per tahun, sedangkan produksi minyak nasional mengalami penurunan terus menerus. Dari tahun 1990 sampai tahun 2009 rata-rata penurunan produksi minyak bumi mencapai 2,16 % per tahun. Pada tahun 2004 mulai terjadi defisit suplai sebanyak 2,253 juta barel antara jumlah produksi dan konsumsi yang semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya sampai mencapai 37,44 juta barel pada tahun 2009. *Gap* atau kesenjangan ini ditutup dengan pembelian minyak mentah dan BBM impor dan hal ini menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh APBN semakin besar.

Penyediaan energi nasional yang saat ini masih bertumpu pada energi fosil terutama minyak bumi harus segera diimbangi dengan penyediaan energi terbarukan. Hal ini dikarenakan sumber energi fosil akan mengalami penurunan produksi secara terus menerus disebabkan sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, dan juga dari sisi harga sangat fluktuatif cenderung meningkat, sehingga memberatkan beban APBN karena semakin besarnya subsidi yang akan ditanggung oleh pemerintah. Indonesia sebenarnya masih memiliki sumber daya energi terbarukan yang cukup banyak terutama energi non minyak dan gas bumi seperti panas bumi, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga air.

Pemerintah sampai saat ini sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan energi terbarukan termasuk di antaranya membentuk beberapa tim koordinasi seperti Timnas Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), Tim Koordinasi Percepatan 10.000 MW dan tim lainnya. Namun demikian sampai saat ini tim-tim ini belum dapat mendorong pengembangan energi terbarukan sampai tahap yang optimal. Dengan memperhatikan fakta tersebut mekanisme koordinasi menjadi salah satu faktor penentu agar pengembangan energi terbarukan, baik di tingkat regulator (pemerintah dan pemerintah daerah), maupun dengan pihak pengusaha energi terbarukan.

II. TUJUAN DAN LINGKUP PEMBAHASAN

2.1. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk memetakan semua permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan energi terbarukan terutama pada sisi permasalahan lunaknya (*soft problem*) yang terkait dengan kebuntuan koordinasi. Selanjutnya dengan pemahaman permasalahan yang komprehensif, dapat dirumuskan alternatif koordinasi yang menjadi pedoman mekanisme koordinasi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengembangan energi terbarukan. Sasaran yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah sebuah rekomendasi alternatif koordinasi yang dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan strategis berkaitan dengan Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan secara menyeluruh dan dapat menjadi instrumen bagi perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan energi terbarukan serta *stakeholders* terkait.

2.2. Lingkup Pembahasan

Kajian ini menitikberatkan pada pembahasan inti semua permasalahan terkait koordinasi pengembangan energi terbarukan. Secara lengkap, ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

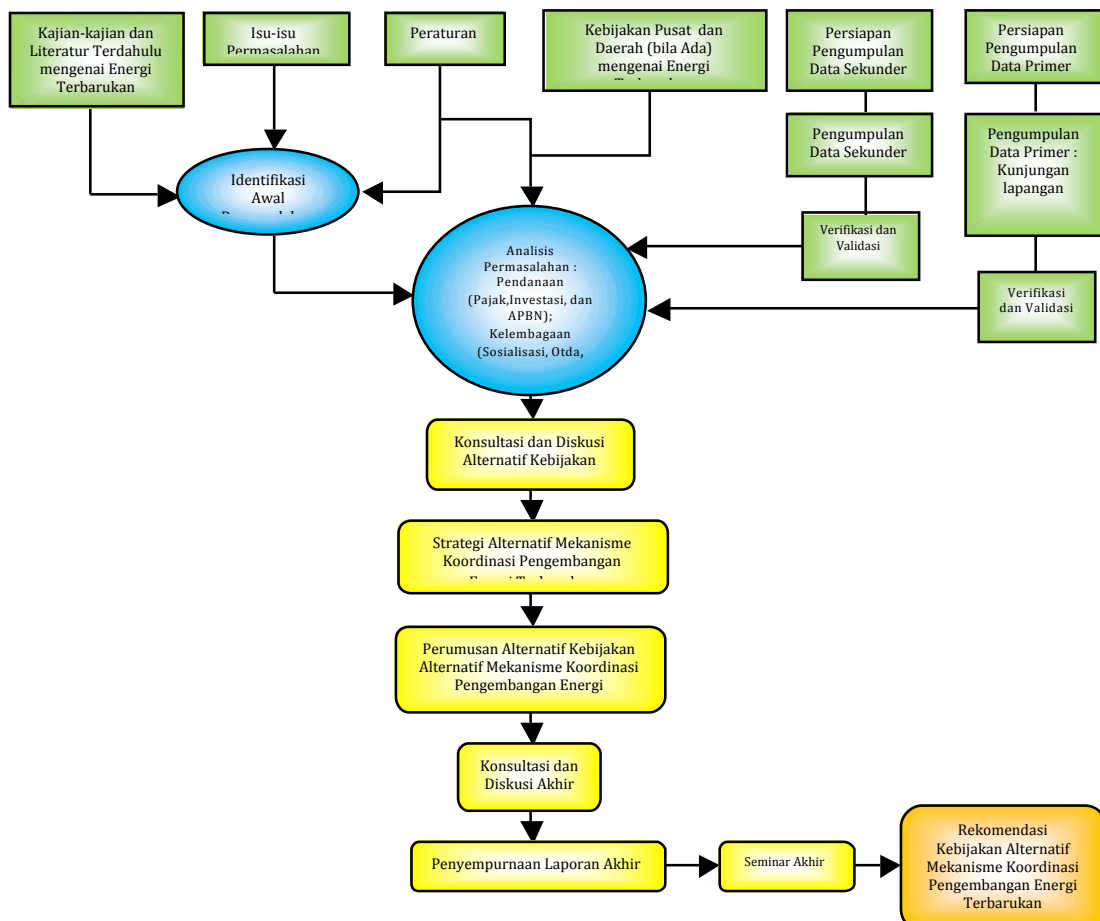
- Inventarisasi dan evaluasi peraturan dan ketentuan berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan energi energi terbarukan.
- Identifikasi masalah-masalah yang ada dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya dalam hal mekanisme koordinasi yang menyebabkan kurang optimalnya pengembangan energi terbarukan.
- Analisis kajian akademis sebagai landasan penyusunan pedoman pengembangan energi terbarukan.
- Perumusan alternatif mekanisme koordinasi guna pengembangan energi terbarukan.

III. METODOLOGI

3.1. Metode Pelaksanaan Kajian

Kajian ini dilaksanakan melalui instrumen utama pengisian oleh beberapa stakeholder energi terbarukan, yang didukung dengan beberapa instrumen penyelidikan seperti (i) survei lapangan langsung ke lokasi pengembangan energi terbarukan sekaligus melakukan diskusi dengan Pemda, serta pelaku usaha energi terbarukan; (iii) brainstorming melalui Focus Group Discussion (FGD); (iv) Penelaahan atas hasil survei melalui keterlibatan Tenaga Ahli Energi, Ekonomi dan Pertanian, serta nara sumber dibidang energi terbarukan. Gambar berikut memperlihatkan bagan alir (*flow chart*) pelaksanaan kajian Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan.

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Kajian Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan

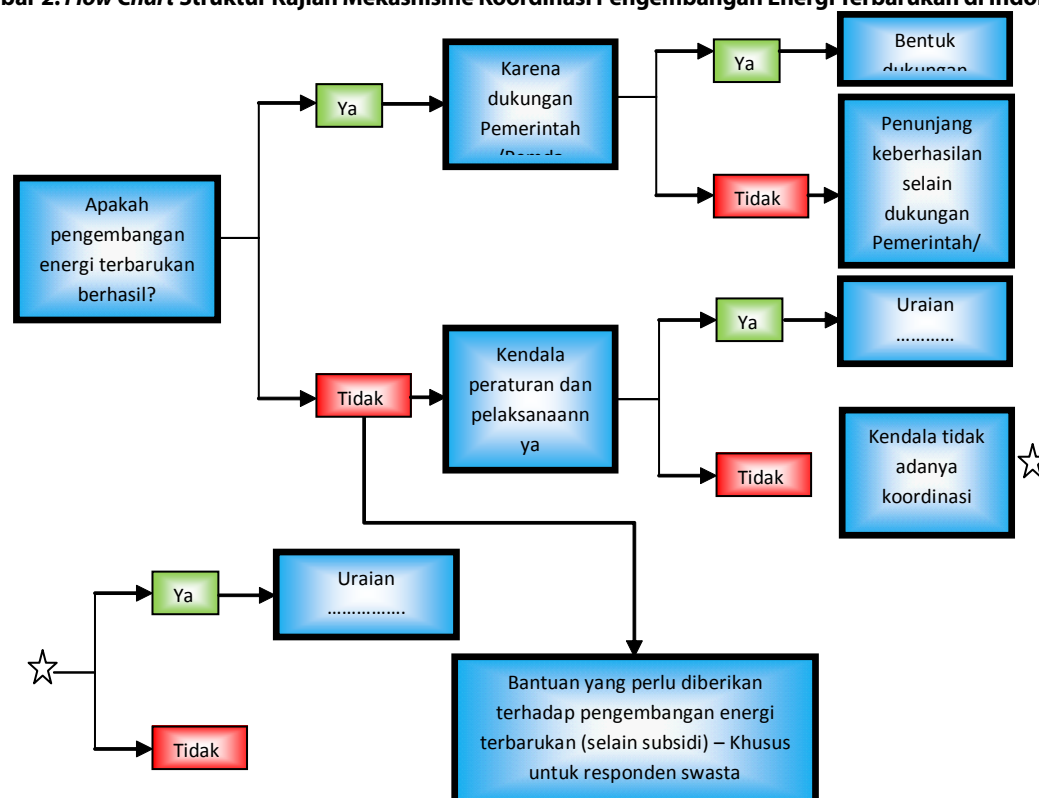


Stakeholder yang menjadi target dari survei opini melalui adalah (i) Kementerian/Lembaga atau K/L (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Asosiasi pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang banyak terlibat dalam program pengembangan energi terbarukan.

Struktur

Struktur dibentuk sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuannya sebagai sumber informasi utama pada kajian ini. Pada ini selain kendala koordinasi, kendala regulasi dicoba digali sedemikian rupa. Ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa selain kendala koordinasi, kendala regulasi seringkali menjadi faktor penghambat pembangunan di Indonesia. Informasi hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi gambaran pengaruh dari kendala koordinasi dan kendala regulasi terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Berikut flow chart mengenai struktur untuk responden pemerintah dan responden swasta.

Gambar 2. Flow Chart Struktur Kajian Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia



3.2. Uji Statistik

Untuk pengujian statistik, pengambilan data dilakukan secara random. Pengelompokan kategori faktor adalah diskret (*discrete*), karena tidak ada informasi bagaimana responden memberikan jawabannya, sehingga hanya dapat disimpulkan bahwa pengelompokan tersebut adalah *ordinal* dan distribusinya mendekati normal. *Chi-square* atau χ^2 menunjukkan bagaimana menguji hubungan antara dua kelompok atau pengaruh dua buah faktor nominal, dan mengukur kuatnya hubungan antar faktor yang satu dengan vektor nominal lainnya. Jika tidak ada hubungan antara dua faktor itu maka dikatakan dua faktor itu saling bebas atau independent secara statistik. Prinsip χ^2 adalah membandingkan nilai yang diobservasi pada setiap kategori dengan nilai yang diharapkan (*expected*) dari keempat sel matrik 2×2 , dalam hal ini apakah ada perbedaan antara faktor sebagai pemerintah dengan faktor sebagai swasta dalam jawaban mereka. Artinya probabilitas beda subjek yang diobservasi karena alasan kebetulan adalah kurang dari 5% apa bila tidak ada beda, jadi hipotesis *null* ditolak dan kesimpulannya jawaban responden betul.

4. HASIL KAJIAN

4.1. Hasil Survey

Sebanyak 61 responden mengisi lembar kuesioner survey opini (*perception survey*). Responden tersebut terdiri dari 37 responden (60%) yang mewakili instansi pemerintah dan 24 responden (40%) dari pihak swasta, yakni lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Pelaku Usaha. Tabel 1 (a) memperlihatkan hasil survey opini total, baik responden Pemerintah maupun swasta. Secara umum, sebagian besar responden, yakni 58 dari 61 responden (95,08 %), berpendapat bahwa program pengembangan energi terbarukan (Program) di Indonesia masih belum berhasil atau belum memuaskan. Sebanyak 2 dari 3 responden yang menyatakan bahwa program pengembangan energi terbarukan berhasil menyebutkan bahwa keberhasilan itu telah ditunjang oleh adanya peraturan dan perundangan yang memadai. Sedangkan 38 dari 58 responden yang menyatakan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak berhasil, berpendapat bahwa ketidakberhasilan itu justru disebabkan oleh

ketidakjelasan peraturan dalam menunjang pelaksanaan program. Sementara itu sebanyak 36 dari 58 responden yang menyatakan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak berhasil, berpendapat bahwa ketidakberhasilan itu justru disebabkan oleh ketidakjelasan koordinasi pelaksanaan program.

Tabel 1. (a) Hasil Survey Opini Pengembangan Energi Terbarukan (Total)

Jawaban	Apakah pengembangan energi terbarukan berhasil?	Apakah keberhasilan ditunjang oleh peraturan, perundangan yang memadai?	Apabila belum berhasil, apakah kendala utama dari ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya?	Apakah salah satu kendala adalah tidak adanya koordinasi antar instansi?
Ya	3	2	38	36
Tidak	58	1	20	22
Total	61	3	58	55

Tabel 1 (b) memperlihatkan hasil survey opini dengan responden instansi pemerintah. Sebagian besar, yakni 34 dari 37 responden atau 92%, menyatakan bahwa program pengembangan energi terbarukan tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu terutama disebabkan oleh ketidakjelasan dalam peraturan pelaksanaan program. Sedangkan koordinasi antar instansi bukan merupakan penyebab tidak berhasilnya program pengembangan energi terbarukan. 19 dari 34 responden atau 56%, menyatakan bahwa koordinasi antar instansi bukan merupakan kendala dalam pelaksanaan program pengembangan energi terbarukan.

Tabel 1 (b) Hasil Survey Opini Pengembangan Energi Terbarukan Responden Pemerintah

Pertanyaan	Apakah pengembangan energi terbarukan berhasil?	Apakah keberhasilan ditunjang oleh peraturan, perundangan yang memadai?	Apabila belum berhasil, apakah kendala utama dari ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya?	Apakah salah satu kendala adalah tidak adanya koordinasi antar instansi?
Ya	3	2	22	15
Tidak	34	1	12	19
Total	37	3	34	34

Tabel 1 (c) memperlihatkan hasil survey opini dengan responden instansi swasta, yakni LSM dan pelaku usaha. Semua responden (24) menyatakan bahwa program pengembangan energi terbarukan tidak berhasil. Ketidakberhasilan itu disebabkan oleh ketidakjelasan dalam peraturan pelaksanaan program serta koordinasi antar instansi yang kurang baik atau tidak menunjang. 16 dari 24 responden (67%) menyatakan bahwa ketidakberhasilan program pengembangan energi terbarukan disebabkan oleh tidak jelasnya peraturan penunjang dalam pelaksanaannya, dan 21 dari 24 responden (88%) menyampaikan bahwa ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena koordinasi antar instansi yang kurang baik.

Tabel 1 (c) Hasil Survey Opini Pengembangan Energi Terbarukan Responden LSM/Pelaku Usaha

Pertanyaan	Apakah pengembangan energi terbarukan berhasil?	Apakah keberhasilan ditunjang oleh peraturan, perundangan yang memadai?	Apabila belum berhasil, apakah kendala utama dari ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya?	Apakah salah satu kendala adalah tidak adanya koordinasi antar instansi?
Ya	0	0	16	21
Tidak	24	0	8	3
Total	24	0	24	24

1.2. Analisis Hasil Survey

Pengujian statistik untuk hasil kuesioner yang diperoleh digunakan test Chi-square (χ^2), tehnik ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan nyata antara frekwensi yang diobservasi dengan frekwensi yang diharapkan dari dua kelompok responden, yakni Pemerintah dan Swasta, dengan dua jenis jawaban pertanyaan ya atau tidak, sehingga diperoleh suatu matrik 2x2. Pengujian statistik ini hanya dilakukan untuk:

- Pertanyaan "Apakah Pengembangan Energi Terbarukan Sudah Cukup Berhasil di Indonesia?"
- Pertanyaan "Apakah yang menghambat pengembangan energi terbarukan berasal dari ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya?" atau secara singkat "Apakah kendalanya peraturan?"
- Pertanyaan "Apakah hal yang menghambat pengembangan energi terbarukan adalah tidak adanya koordinasi antar instansi yang melaksanakan atau apabila ada tetapi pelaksanaan koordinasi kurang berjalan dengan baik?" atau secara singkat "Apakah kendalanya koordinasi?"

Hasil perhitungan statistik, seperti terlihat dalam Tabel 2 (a), (b), dan (c) menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :

- Untuk pertanyaan "Apakah pengembangan energi terbarukan berhasil", besar nilai χ^2 yang didapat adalah 2,046598 yang $< 3,84$ (χ^2 probabilitas 5%). Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada perbedaan nyata secara statistik antara kedua kelompok responden baik pemerintah maupun swasta selaku pelaku ekonomi atas pertanyaan "Apakah energi terbarukan berhasil", kedua kelompok responden ini memberikan jawaban yang sama bahwa pengembangan energi terbarukan memang belum berhasil. Hal ini terbukti dari masih kecilnya pangsa energi terbarukan dibanding energi fosil/takterbarukan yang tersedia dan dikonsumsi di masyarakat.
- Untuk pertanyaan "Apakah kendalanya peraturan", besar nilai χ^2 yang didapat adalah 0,023942 yang $< 3,84$ (χ^2 probabilitas 5%). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa kedua pihak menyadari bahwa peraturan telah menjadi kendala mengingat banyaknya instansi yang mengeluarkan peraturan baik instansi pusat maupun daerah yang harus dilewati oleh pihak swasta selaku pelaku ekonomi untuk dapat memperoleh perizinan, bahkan peraturan tersebut menjadi tumpang tindih tanpa memberikan solusi yang pasti.
- Untuk pertanyaan "Apakah kendalanya koordinasi", besar nilai χ^2 yang didapat adalah 9,48184 yang $> 3,84$ (χ^2 probabilitas 5%). Untuk pertanyaan "Apakah kendalanya koordinasi?", diperoleh nilai $\chi^2 > 3,84$ Karena nilai χ^2 lebih besar dari nilai tabel berarti menolak H_0 atau menerima H_1 . Dari χ^2 yang didapat, dapat diambil kesimpulan adanya perbedaan nyata secara statistik antara kedua kelompok responden baik pemerintah maupun swasta selaku pelaku ekonomi atas pertanyaan "Apakah kendalanya koordinasi?" Kedua kelompok ini memberikan jawaban yang berbeda secara nyata dimana Pemerintah tidak terlalu menganggap permasalahan koordinasi ini sebagai suatu permasalahan penghambat pengembangan energi terbarukan sementara responden swasta sebaliknya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa selama ini proses koordinasi di pemerintahan memang sudah berjalan dengan berbagai sarana dan forum koordinasi namun keefektifan mekanisme koordinasi yang dilakukan pemerintah dirasakan masih kurang dan hasil proses koordinasi itu sendiri kurang dirasakan langsung oleh pihak swasta yang umumnya aktif dalam implementasi di lapangan. Jadi intinya ini menunjukkan bahwa koordinasi pemerintah belum efisien dan efektif untuk mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan energi terbarukan.

Selanjutnya berbagai permasalahan ini dikelompokkan menjadi dua kategori besar yaitu aspek pendanaan dan aspek kelembagaan yang dipecah lagi menjadi kategori Harga, Insentif-Pajak, Investasi, Sosialisasi, Tupoksi (K/L), Substansi regulasi/program-perijinan, Otonomi daerah dan Kebijakan penunjang untuk mendapatkan inti permasalahan yang menjadi fokus penyempurnaan Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan.

Tabel 2 (a) Hasil Uji Statistik Chi Square Dari Data Hasil Kajian – Pertanyaan: "Apakah Pengembangan Energi Terbarukan Sudah Cukup Berhasil di Indonesia?"

Pertanyaan: "Apakah Pengembangan Energi Terbarukan Sudah Cukup Berhasil di Indonesia?"	Perhitungan statistik uji								
	Observed Frequency (f_o)			Estimated Frequency (f_e)			χ^2		
	Responden		Total Responden	Responden		Total Responden			
	Pemerintah	Swasta		Pemerintah	Swasta				
(f_o^p)	(f_o^s)		(f_e^p)	(f_e^s)					
"Ya"	3	0	3	1,820	1,180	3	0,76562	1,18033	2,04660
"Tidak"	34	24	58	35,180	22,820	58	0,03960	0,06105	
TOTAL	37	24	61	37	24	61	Nilai tabel chi-squared (probabilitas 5% = 3,84)		

Tabel 2 (b) Hasil Uji Statistik Chi Square Dari Data Hasil Kajian – Pertanyaan: “Apakah yang menghambat pengembangan energi terbarukan berasal dari ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya?”

Pertanyaan: "Apakah yang menghambat pengembangan energi terbarukan berasal dari ketidakjelasan peraturan dalam pelaksanaannya?"							Perhitungan statistik uji		
Jawaban	Observed Frequency (f_o)			Estimated Frequency (f_e)			$(f_e^p - f_o^p)^2 / f_e^p$	$(f_e^s - f_o^s)^2 / f_e^s$	χ^2
	Responden		Total Responden	Responden		Total Responden			
	Pemerintah (f_o^p)	Swasta (f_o^s)		Pemerintah (f_e^p)	Swasta (f_e^s)				
"Ya"	22	16	38	22,276	15,724	38	0,003416249	0,004839685	0,023942
"Tidak"	12	8	20	11,724	8,276	20	0,006490872	0,009195402	
TOTAL	34	24	58	34	24	58	Nilai tabel chi-squared (probabilitas 5% = 3,84)		

Tabel 2 (c) Hasil Uji Statistik Chi Square Dari Data Hasil Kajian – Pertanyaan: “Apakah hal yang menghambat pengembangan energi terbarukan adalah tidak adanya koordinasi antar instansi yang melaksanakan atau apabila ada tetapi pelaksanaan koordinasi kurang berjalan dengan baik?”

Pertanyaan: "Apakah hal yang menghambat pengembangan energi terbarukan adalah tidak adanya koordinasi antar instansi yang melaksanakan atau apabila ada tetapi pelaksanaan koordinasi kurang berjalan dengan baik?"							Perhitungan statistik uji		
Jawaban	Observed Frequency (f_o)			Estimated Frequency (f_e)			$(f_e^p - f_o^p)^2 / f_e^p$	$(f_e^s - f_o^s)^2 / f_e^s$	χ^2
	Responden		Total Responden	Responden		Total Responden			
	Pemerintah (f_o^p)	Swasta (f_o^s)		Pemerintah (f_e^p)	Swasta (f_e^s)				
"Ya"	15	21	36	21,1034483	14,8966	36	0,000507099	2,500718391	9,48184
"Tidak"	19	3	22	12,8965517	9,10345	22	2,888530334	4,092084639	
TOTAL	34	24	58	34	24	58	Nilai tabel chi-squared (probabilitas 5% = 3,84)		

4.3. Regulasi Sebagai Faktor Penentu Proses Koordinasi

Proses koordinasi seringkali menjadi rumit dan bahkan tidak efektif dengan carut marutnya peraturan yang ada. Regulasi yang ada dirasakan masih belum mengantisipasi dinamika perkembangan energi terbarukan yang ada. Sampai saat ini pun, belum ada regulasi (Peraturan Pemerintah) yang secara khusus mengatur energi terbarukan secara komprehensif sebagaimana diamanatkan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 22 dan 30.

Selain kurangnya perangkat regulasi pada pengembangan energi terbarukan, permasalahan regulasi menjadi lebih kompleks dengan kurangnya dukungan regulasi sektor lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian regulasi bahkan cenderung tidak harmonis dan menghambat pengembangan energi terbarukan. Berbagai contoh kasus dan pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa mulai dari awal pengembangan, aspek regulasi pada beberapa kasus dapat menjadi faktor penentu proses koordinasi.

Survey opini yang dilakukan pada kajian ini menunjukkan bahwa baik responden pemerintah maupun swasta sama-sama memiliki pandangan bahwa regulasi menjadi penghambat pengembangan energi terbarukan. Sementara untuk aspek koordinasi, responden pemerintah lebih cenderung tidak memandang sebagai suatu permasalahan sebaliknya pihak swasta justru memandang sebagai permasalahan serius. Perbedaan cara pandang terhadap kendala koordinasi ini mengindikasikan tersumbatnya koordinasi pengembangan energi terbarukan sehingga proses koordinasi yang banyak diinisiasi/dilaksanakan pemerintah dan dinilai baik oleh pemerintah sendiri kurang dirasakan hasilnya oleh pihak swasta yang banyak terlibat secara aktif dalam implementasi di lapangan. Salah satu penyebab tersumbatnya koordinasi pengembangan energi terbarukan adalah belum memadai perangkat regulasi mengenai energi terbarukan dan tidak harmonisan antar regulasi serta kurangnya mengakomodasi partisipasi masyarakat (pengembang) dalam mekanisme penyusunan regulasi maupun mekanisme

koordinasi.

Berdasarkan hasil survey setelah melalui kategorisasi (Tabel 3), aspek regulasi yang perlu banyak pembenahan mulai dari paling prioritas adalah: Substansi peraturan dan perijinan; Pengaturan tupoksi K/L yang tidak sesuai; Kebijakan penunjang; Pengaturan insentif pajak yang diberikan pemerintah; Sosialisasi dan informasi yang kurang mengenai peraturan EBT; Pengaturan birokrasi dan otonomi daerah dan peraturan daerah; Pengaturan harga jual listrik energi terbarukan; Pengaturan sumber pendanaan APBN, APBD dan ketersediaan dana pinjaman jangka panjang di dalam negeri untuk pengembangan EBT.

Melihat banyaknya permasalahan regulasi yang dihadapi, penyempurnaan yang direkomendasikan fokus pada substansi regulasi dan perijinan. Hal ini selain berdasarkan hasil survey, aspek ini juga seringkali menjadi sumber dan akar permasalahan regulasi lainnya.

Tabel 3. Rekapitulasi Permasalahan Regulasi dalam Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Jumlah Isu	Kelompok Isu	Harga Listrik PPA	Insentif Pajak	Kendala Investasi	Sosialisasi dan Informasi	Tupoksi (K/L)	Substansi Perijinan	Otonomi Daerah	Kebijakan Penunjang
56	Kendala Regulasi	4	6	4	5	10	14	5	8
Persentase		7,14	10,71	7,14	8,93	17,86	25	8,93	14,29

4.3.1. Substansi Regulasi dan Perijinan sebagai Permasalahan Utama Regulasi

UUD 45 pasal 33 sering di salah tafsirkan sehingga penjabarannya dalam undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan sering menjadi kaku dan sulit diimplementasikan bahkan terkesan sering bertentangan satu sama lain, contoh klasik adalah UU kehutanan, UU pertambangan, UU lingkungan hidup dan UU tata ruang serta UU Otonomi daerah sering tidak sejalan sehingga banyak kegiatan investasi di bidang ekonomi yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat dilaksanakan. Hasil diskusi dengan beberapa stakeholder energi terbarukan pada kunjungan lapangan menunjukkan bahwa mereka sering merasa kebingungan dengan banyaknya substansi UU yang tidak sinkron antara satu sama lainnya.

Sebagai contoh, kegiatan investasi pada pengembangan panas bumi sulit memperoleh alokasi lahan karena UU Kehutanan No. 41/99 memberi batasan dan persyaratan yang ketat untuk kegiatan panas bumi di kawasan kehutanan. Bahkan untuk kawasan konservasi, semua kegiatan tidak diijinkan sama sekali. Selain itu perijinan kehutanan ini sudah diberlakukan ketika eksplorasi dimulai.

Contoh kedua adalah mengenai masalah pengaturan harga panas bumi pada UU panas bumi. UU panas bumi tidak mengatur secara konkrit tentang keterlibatan PLN sebagai satu-satunya *offtaker* ketenagalistrikan nasional saat ini. Keputusan harga jual listrik dihasilkan melalui mekanisme lelang yang diadakan oleh Pemda dan diikuti oleh pengembang tanpa mengikutsertakan PLN. Oleh karena itu sangat wajar bila PLN melakukan negosiasi kembali untuk penentuan harga jual listriknya dan kadangkala negosiasinya berjalan sangat alot mengingat tingkat resiko kegagalan panas bumi yang sangat tinggi. Hal ini dilakukan sebagai dasar penentuan harga ketika ada audit dari BPKP setelah harga ditetapkan.

Bila melihat contoh-contoh di atas, perlu kiranya ditelaah mengenai proses penyusunan regulasi itu sendiri. Berdasarkan studi *"Energy Policy Review of Indonesia"* yang dilakukan International Energy Agency, diungkapkan partisipasi publik dalam penyusunan dan penyiapan regulasi sangat terbatas. Dalam proses pengujian RUU, memang ada proses konsultasi terbuka ke masyarakat. Namun demikian, informasi yang tersedia sangat terbatas dan organisasi atau individu yang diundang sangat sedikit.

Sebagai contoh pada proses UU No 20 tahun 2002 tentang Kelistrikan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, IIEE mengungkapkan pada prinsipnya semua data dan informasi sudah tersedia di Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE, sekarang Ditjen Ketenagalistrikan). Namun demikian, tidak ada prosedur yang jelas bagi masyarakat untuk mendapatkan data tersebut. Hal ini menjadi kerugian besar dengan berkurangnya ide-ide perbaikan RUU, kepentingan publik kurang terakomodasi, dan kurangnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap draft UU.

4.4. Alternatif Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan

Permasalahan koordinasi saat ini menjadi isu sentral dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang terkait selain sektor energi baik langsung maupun tidak langsung.

Survey opini menunjukkan adanya "gap" koordinasi antara instansi pemerintahan sebagai regulator dengan pihak swasta yang bertindak sebagai *implementator/executor* di lapangan. Selain karena aspek regulasi yang kurang seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan hasil survey opini (Tabel 4) juga disebabkan oleh : Proses koordinasi terkait tupoksi K/L yang kurang efektif; Proses sosialisasi dan informasi energi terbarukan; Koordinasi penentuan harga jual listrik energi terbarukan; Proses koordinasi dengan otonomi daerah; Kebijakan penunjang; UU peraturan yang mencakup proses pengurusan perijinan; Koordinasi dalam pemberian insentif pajak; Koordinasi alokasi pendanaan APBN, APBD.

Tingginya persentase kendala koordinasi yang terkait tupoksi K/L di pemerintah pusat (40,63%) sangat mengejutkan karena hampir separuh energi, waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh investor energi terbarukan akan terkuras dalam penyelesaian masalah birokrasi di Kementerian/Lembaga Pemerintahan (K/L). Oleh karena itu pembahasan penyempurnaan proses koordinasi perlu difokuskan pada aspek tupoksi K/L.

Tabel 4. Rekapitulasi Permasalahan Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Jumlah Isu	Kelompok Isu	Harga Listrik PPA	Insentif Pajak	Kendala Investasi	Sosialisasi dan Informasi	Tupoksi (K/L)	UU, Peraturan dan Perijinan	Otonomi Daerah	Kebijakan Penunjang
32	Kendala Koordinasi	3	1	1	6	13	2	3	3
Persentase total		9,38	3,13	3,13	18,75	40,63	6,25	9,38	9,38

4.4.1. Mekanisme Tupoksi Instansi Pusat sebagai Permasalahan Utama Koordinasi

Saat ini birokrasi pemerintah pusat menjadi semakin gemuk namun minim fungsi dan power, sehingga kurang berorientasi kepada hasil kerja yang akibatnya sering terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi suatu K/L tersebut dengan K/L lainnya. Pada akhirnya proses koordinasi baik di dalam K/L maupun antar K/L tidak berjalan dengan baik. Seharusnya dengan adanya kebijakan otonomi daerah, instansi pusat menjadi lebih ramping karena menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah. Pembentukan beberapa institusi baru dan tidak adanya kebijakan yang secara spesifik mengenai energi terbarukan yang disertai kurangnya komitmen pemerintah yang jelas menyebabkan pengembangan energi terbarukan. Pengembangan energi terbarukan yang ada responsif dan terstruktur dengan baik serta cenderung reaktif dan sporadis kondisi eksternal.

Persoalan koordinasi menjadi lebih rumit dengan adanya overlap dan ketidakjelasan pembagian wewenang koordinasi dan pengambilan keputusan di antara K/L instansi pusat. Dalam proses koordinasi energi terbarukan, tidak disertai dengan kejelasan instansi mana yang memimpin. International Energy Agency dalam studinya yang berjudul "Energy Policy Review of Indonesia" pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa pada sistem koordinasi di instansi pusat yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator, terdapat ketidakjelasan kemampuan Kementerian Koordinator dalam menyelesaikan konflik antar sektor tanpa intervensi Presiden sehingga Kementerian Koordinator ini cenderung kurang berpengaruh pada konflik kebijakan.

4.5. Pemberian Fasilitas Untuk Pengembangan Energi Terbarukan

Selain pembenahan aspek regulasi dan koordinasi di atas, beberapa fasilitas perlu diberikan kepada pengembang/pengusaha energi terbarukan untuk menunjang proses koordinasi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Berdasarkan hasil survey kunjungan lapangan, pemberian fasilitas harga jual energi sangat diharapkan oleh pengembang energi terbarukan. Hal ini dipertegas oleh hasil pada responden swasta (Tabel 5) dimana fasilitas harga menjadi yang paling banyak dikemukakan, disusul dengan pemberian fasilitas kebijakan penunjang, investasi, sosialisasi – informasi dan UU – perijinan, usulan pemberian fasilitas terkait Tupoksi (K/L), pemberian insentif pajak. Hal ini sangat wajar mengingat masalah harga akan menentukan strategi pemasaran dan keekonomian suatu proyek itu sendiri.

Tabel 5. Rekapitulasi Usulan Fasilitas Yang Diperlukan Pengembang Energi Terbarukan di Indonesia

Jumlah Usulan	Jenis Usulan Fasilitas / Bantuan	Harga Listrik PPA	Insentif Pajak	Investasi	Sosialisasi dan Informasi	Tupoksi (K/L)	UU, Peraturan dan Perijinan	Otonomi Daerah	Kebijakan Penunjang
33	Usulan Fasilitas	7	2	5	5	3	5	0	6
Persentase total		21,2	6	15,2	15,2	9	15,2	0	18,2

4.5.1. Pemberian Fasilitas Harga dan Feed in Tariff

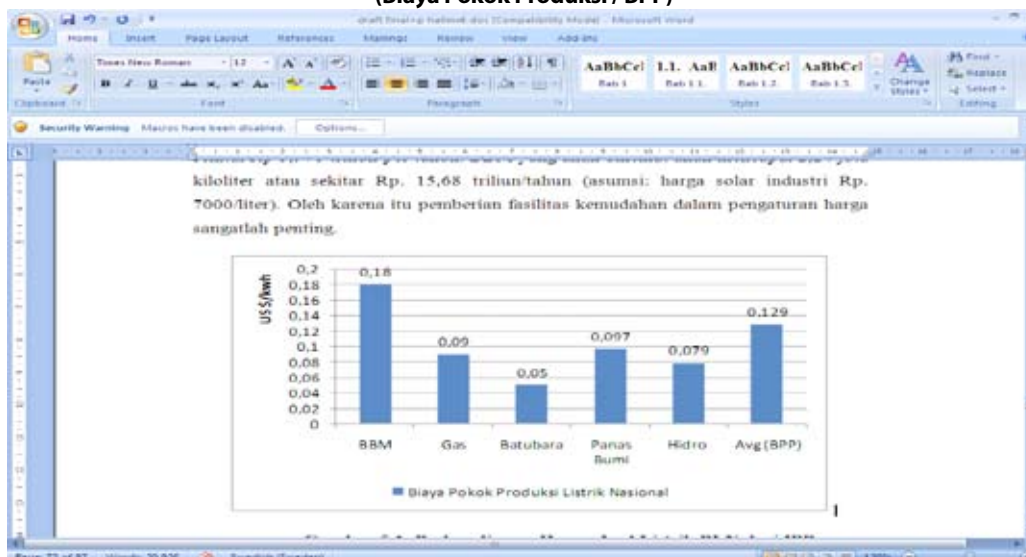
Usulan pemberian fasilitas dalam aspek harga umumnya mengenai pengalihan subsidi dari energi fosil ke energi terbarukan, wacana penerapan *Feed in Tariff* (FiT), dan pengaturan harga jual energi terbarukan ke harga keekonomiannya. FiT yang kerap dikenal sebagai tarif energi terbarukan adalah suatu mekanisme kebijakan yang dirancang untuk mendorong penerapan sumber-sumber energi terbarukan dengan mempercepat arah kesetaraan dengan harga jaringan (*grid parity*). Secara umum FiT mencakup tiga bagian. Pertama, menjamin akses ke jaringan (*grid access*). Kedua, kontrak jangka panjang untuk memproduksi listrik. Ketiga, harga penjualan yang secara metodologi berdasarkan biaya pembangkitan energi terbarukan dan kecenderungan menuju setara dengan harga jaringan. FiT mewajibkan perusahaan jaringan listrik nasional maupun daerah untuk membeli listrik energi terbarukan.

Harga berdasarkan biaya pembangkitan (*cost-based prices*) itu memungkinkan beragam proyek terbarukan dibangun dan memungkinkan investor untuk meraih imbal hasil yang memadai dalam investasi energi terbarukannya. Sebagai hasilnya harga jual listrik bisa berbeda-beda berdasarkan sumber energi pembangkitan, tempat instalasi, ukuran proyek dan kadang sumber energi. Prinsip ini sebenarnya telah diterapkan secara terbatas untuk skala kecil dan menengah pada Peraturan Menteri No. 31 tahun 2009. Melihat beberapa pengaruh positif dari Permen tersebut terhadap perkembangan PLTMH yang umumnya berskala kecil maka pemberlakuan mekanisme FiT untuk energi terbarukan skala besar perlu dijadikan opsi fasilitas yang perlu diberikan kepada pengembang energi terbarukan dan dikaji secara seksama dalam skema pelaksanaannya.

Masalah harga ini sering menjadi permasalahan yang serius walaupun secara kenyataan berdasarkan situasi saat ini

beberapa jenis energi terbarukan memiliki biaya pembangkitan listrik yang lebih murah dari biaya pembangkitan listrik BBM. Berdasarkan RUPTL PLN (Master Plan) 2009 – 2018 dalam presentasi The Boston Consulting Group mengenai *Indonesian Economic Development Corridors II: Geothermal Development Support in Indonesia*, harga PPA PLN dari IPP (biaya produksi) yang menggunakan panas bumi dan tenaga air lebih rendah dari harga PPA PLN dari IPP (biaya produksi) yang menggunakan BBM dan juga lebih rendah dari Biaya Pokok Produksi rata-rata PLN dengan margin 8% sebesar US\$ 12,9 sen. Dengan mempertimbangkan hal di atas, adalah sangat tidak logis jika Pemerintah tidak memberikan fasilitas kemudahan pada harga energi terbarukan ini. Gambar 3 memperlihatkan perbandingan biaya produksi listrik antara pembangkit BBM dan energi terbarukan.

**Gambar 3. Perbandingan Harga Jual Listrik PLN dari IPP
(Biaya Pokok Produksi / BPP)**



Sumber : RUPTL 2010-2019 dalam presentasi The Boston Consulting Group, 2010

Pemberian subsidi untuk beberapa jenis energi terbarukan perlu diterapkan dengan kombinasi mekanisme *Feed in Tariff* (FIT). Subsidi yang diusulkan diberikan untuk beberapa jenis energi terbarukan yang masih memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada biaya produksi dari minyak seperti BBN, energi surya dan energi arus. Dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara yang ada, pemberian subsidi dilakukan secara selektif dengan melihat potensi sumber daya dan biaya investasinya. Untuk panas bumi dan tenaga air dimana biaya pembangkitan listriknya lebih rendah dari biaya pembangkitan listrik dari BBM, opsi fasilitas pengaturan harga yang diusulkan adalah penerapan *Feed in Tariff* (FIT) murni tanpa subsidi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Progres pengembangan energi terbarukan sampai saat ini belum mencapai level yang diharapkan. Sampai saat ini banyak regulasi yang telah dikeluarkan bahkan sampai level inpres dan perpres mengenai energi terbarukan, namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami hambatan baik dari aspek regulasi maupun mekanisme koordinasi. Hal ini dipertegas melalui hasil survey persepsi dimana mayoritas stakeholder energi terbarukan baik pemerintah dan swasta berpendapat bahwa program pengembangan energi terbarukan belum berhasil. Pihak pemerintah sebagai regulator lebih menilai ketidakberhasilan ini karena kendala regulasi bukan kendala koordinasi. Sebaliknya pihak swasta sebagai pengembang yang aktif di lapangan menilai ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena kendala regulasi dan juga kendala koordinasi. Hal ini tampak dari panjangnya jalur birokrasi yang harus dilalui di K/L, sehingga apa yang dijanjikan pemerintah untuk mempercepat pengurusan izin dan pemberian insentif pajak tidak terbukti baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perbedaan cara pandang ini mengindikasikan adanya ketidakefektifan Alternatif Mekanisme Koordinasi Pengembangan Energi Terbarukan sehingga proses koordinasi yang banyak diinisiasi/dilaksanakan pemerintah kurang dirasakan hasilnya oleh pihak swasta yang banyak terlibat secara aktif dalam implementasi lapangan. Salah satu penyebab tersumbatnya koordinasi pengembangan energi terbarukan adalah belum memadai perangkat regulasi mengenai energi terbarukan dan ketidakharmonisan antar regulasi serta kurangnya mengakomodasi partisipasi masyarakat (pengembang) dalam mekanisme penyusunan regulasi maupun mekanisme koordinasi.

Permasalahan yang muncul dalam pengembangan energi terbarukan saat ini sangat kompleks sehingga perlu diuraikan menjadi lebih sederhana untuk menemukan inti permasalahan. Berdasarkan hasil survey yang kemudian direview, inti permasalahan pada regulasi adalah aspek substansi dan perijinan. Sementara inti permasalahan pada koordinasi adalah aspek yang berkaitan Tupoksi K/L pusat.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan inti permasalahan yang telah dikemukakan pada kesimpulan diatas beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan koordinasi :

A. Penyempurnaan Substansi Regulasi dan Perijinan Energi Terbarukan

1. Pembentukan tim monitoring sinkronisasi dan perbaikan materi regulasi energi terbarukan yang terkait panas bumi, kehutanan, agraria dan tata ruang.
2. Perbaikan proses penyusunan regulasi yang ada dengan mengedepankan keterlibatan sektor lain dan masyarakat.
3. Penetapan batasan waktu perijinan dan kemudahan perijinan untuk memberi kepastian usaha.

B. Penyempurnaan Koordinasi Terkait Tupoksi Instansi K/L (Pusat)

- 1) Revitalisasi peran Kemenko dan Bappenas.
Revitalisasi yang dilakukan adalah memperjelas pembagian kewenangan dan tanggung jawab koordinasi. Sebagai koordinator umum Kemenko Perekonomian perlu diberi tool wewenang lebih dalam penyelesaian konflik dalam batasan tertentu sebelum permasalahan ini masuk ke Presiden. Dalam mekanismenya, hal ini mungkin perlu payung hukum yang jelas. Dibawah Kemenko Perekonomian ini proses koordinasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pendanaan dan Monev dengan kejelasan siapa yang memimpin (koordinatornya). Pada proses perencanaan dan monev, Bappenas dapat menjadi leader/koordinator utama. Melihat situasi dan proses yang ada, perlu adanya revitalisasi proses perencanaan termasuk kegiatan Musrenbangnas sebagai salah satu sarana sinkronisasi perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan antara pusat dan daerah maupun antar sektor di pusat itu sendiri sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar sektor.
- 2) Koordinator pengembangan energi terbarukan.
Penanggung jawab pelaksanaan pengembangan energi terbarukan berada di KESDM yang telah memiliki unit kerja baru Ditjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi. Selanjutnya pada pelaksanaannya dapat dibagi menjadi sub koordinator yang dibagi berdasar jenis energinya dan dipimpin oleh K/L yang memiliki kedekatan program sebagai faktor penentu keberhasilannya. Sebagai contoh, untuk panas bumi diusulkan dipimpin oleh KESDM, untuk BBN oleh Kementerian Pertanian, dan sebagainya.
- 3) Penyempurnaan birokrasi di K/L pusat.

C. Pemberian fasilitas untuk pengembang energi terbarukan sebagai dukungan Pemerintah.

Fasilitas yang sangat diprioritaskan dan diperlukan untuk memecahkan solusi saat ini adalah mengenai pengaturan harga. Mekanisme subsidi dan Feed in Tariff perlu dipertimbangkan penerapannya dengan terlebih dahulu dilakukan uji skema pelaksanaannya. FIT akan mewajibkan perusahaan jaringan listrik nasional maupun daerah untuk membeli listrik energi terbarukan dengan harga berdasarkan biaya pembangkitan (*cost-based prices*) itu memungkinkan beragam proyek terbarukan dibangun dan memungkinkan investor untuk meraih imbal hasil yang memadai dalam investasi energi terbarukannya. Mekanisme FIT untuk energi terbarukan skala besar perlu dijadikan opsi fasilitas yang perlu diberikan kepada pengembang energi terbarukan sebagaimana efek FIT untuk skala kecil yang telah dilakukan (Permen ESDM No 31 tahun 2009). Selain FIT, subsidi diusulkan diberikan untuk beberapa jenis energi terbarukan yang masih memiliki biaya produksi lebih tinggi daripada biaya produksi dari minyak seperti BBN, energi surya dan energi arus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani-Knapp, Retnowati. 2006. Soeharto - The Life and Legacy of Indonesia's Second President. Marshall Cavendish Editions, Singapura
- Dinas Peternakan Jawa Timur. 2010. Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Biogas Di Jawa Timur. Bahan Presentasi (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Surabaya, 26 Agustus 2010)
- Ditjen Migas, KESDM. 2010. Asumsi Makro Sub Sektor Migas Volume BBM, BBN, Dan LPG. Bahan Presentasi. Jakarta.
- Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian. 2010. Peluang Pemanfaatan Biogas Pada Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit Untuk Mendukung Kebijakan DME. Bahan Presentasi (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Surabaya, 26 Agustus 2010)
- Hasbullah, Jousairi. 2006. Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. MR-United Press. Jakarta.
- International Energy Agency (IEA). 2008. Energy Policy Review of Indonesia. IEA Publications. Paris.
- Ikbal. 2010. Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Biogas. Bahan Presentasi (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Surabaya, 26 Agustus 2010). Balai Teknologi Lingkungan, BPPT
- Junus, M. 2010. Analisis Ekonomi, Penerapan Teknologi Gas Bio Dari Limbah Ternak Untuk Mendukung Desa Mandiri Energi. Bahan Presentasi (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Surabaya, 26 Agustus 2010). Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
- Kementerian ESDM. 2010. Pedoman Dan Pola Tetap Pengembangan Industri Kepanasbumian Nasional (Draft). Bahan Presentasi (dapat diunduh di www.energiterbarukan.net). Jakarta
- Malone, T. W., & Crowston K. 1990. What is coordination theory and how can it help design cooperative work systems?. (Tatar, Deborah, Ed.). Proceedings of the Third Conference on Computer-supported Cooperative Work (CSCW). 357-370.

Luthan, Fauzi. 2010. Kebijakan Pengembangan Biogas Untuk Mendukung Ketersediaan Energy Alternative Di Pedesaan. Bahan Presentasi (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Surabaya, 26 Agustus 2010). Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia.

Osborne, D & Plastrik, P. 1997. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts

Pattijalal, Dino. 2008. *Harus Bisa! Seni Memimpin ala SBY*. Red & White Publishing. Jakarta

PLN (Persero). 2010. Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2010-2019. Jakarta

Puslitbang Peternakan, Balitbang Pertanian, Kementerian Pertanian. 2010. Kontribusi Litbang Peternakan Pada Desa Mandiri Energi. Bahan Presentasi (disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Surabaya, 26 Agustus 2010)

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Sekretaris Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Instruksi Presdiden. No 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain. Sekretaris Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi. Sekretaris Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2009 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik. Sekretaris Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sekretaris Kabinet. Jakarta.

Sumiarso, Luluk. 2010. Panas Bumi Pada Kawasan Hutan. Bahan Presentasi. Ditjen EBTKE, KESDM. Jakarta

The Boston Consulting Group. 2010. *Indonesia Economic Development Corridors II (WA5a : Geothermal Development Support in Indonesia)*. Bahan Presentasi. Jakarta

Tim Pengembangan EBTKE KESDM. 2010. *Blueprint Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Konsep rev. 3/ 3 Juni 2010)*. Bahan Presentasi (dapat diunduh di www.energiterbarukan.net). Jakarta

imidap.mikrohidro.net

www.detikfinance.com

www.detiknews.com

www.indobiofuel.com

www.majalahtambang.com

www.migas.esdm.go.id

PENYUSUNAN INDEKS EFEKTIVITAS TRANSPORTASI PERINTIS UNTUK Mendukung Pengembangan Wilayah

DIREKTORAT TRANSPORTASI
email: azainudin@bappenas.go.id

ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu sektor infrastruktur yang berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya, sebagai katalisator untuk mengakselerasi tumbuhnya sektor-sektor perekonomian lainnya di suatu wilayah. Pemerintah pusat ataupun daerah, dengan segala keterbatasan yang ada, telah melakukan berbagai upaya untuk membuka akses beberapa wilayah yang terisolir, terpencil, dan perbatasan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi perintis. Pembukaan akses dimaksudkan sebagai stimulus, selanjutnya peranan masyarakat dan swasta lah untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kapasitas transportasi guna melancarkan aktivitas ekonomi wilayah. Hal yang mengemuka pada penyediaan transportasi perintis tersebut adalah sejauh mana telah memenuhi kebutuhan masyarakat, peran serta masyarakat serta efisiensi dan efektivitas dari transportasi perintis tersebut.

Berdasarkan penilaian *common indicator* di setiap moda angkutan perintis pada tahun 2008, dapat diketahui bahwa nilai CI moda angkutan penyeberangan memiliki nilai tertinggi (67.535) dibandingkan moda angkutan perintis lainnya, yaitu 28.859, 31.3735, dan 18.517 berturut-turut, untuk jalan, laut, dan udara. Nilai ini, secara umum, memberikan gambaran kinerja yang baik dalam konteks penilaian umum yang melibatkan aspek anggaran, jumlah trayek atau armada serta permintaan perjalanan (penumpang dan barang). Mengacu pada aspek keperintisan dan karakteristik wilayah Indonesia yang membutuhkan subsidi, yang merupakan wilayah kepulauan, maka angkutan perintis penyeberangan menunjukkan kinerja yang paling baik atau sesuai dengan karakteristik wilayah yang dilayaninya (relatif dibandingkan moda angkutan perintis lainnya).

Nilai indeks efisiensi pada masing-masing moda angkutan perintis secara umum cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan nilai indeks efektifitas, pada moda angkutan jalan tingkat efektifitas keperintisan cenderung mengalami penurunan dari 34.217 (2000) menjadi 24.681 pada tahun 2008. Pada moda penyeberangan indeks efektifitas (dari permintaan perjalanan penumpang) juga mengalami penurunan dari 5.963 (2000) menjadi 7.373 pada tahun 2009.

Indeks efektifitas dan efisiensi dengan analisis ICOR menunjukkan nilai ICOR yang lebih dari satu untuk sektor transportasi (23,95 pada tahun 2009). Nilai ICOR perintis darat dari tahun ke tahun menunjukkan nilai ICOR yang semakin besar (5,96 (2005) menjadi 40,17 (2009)). Demikian juga terjadi pada perintis udara (15,62 (2005) menjadi 27,61 (2009)), sedangkan transportasi perintis laut malah semakin mengecil dan minus nilai ICORnya (4,96 (2005) menjadi -0,46 (2009)). Ini berarti bahwa investasi di transportasi perintis bisa dikatakan tidak efisien karena hanya memberikan NTB (nilai tambah bruto) kurang dari satu. Namun demikian, transportasi perintis masih memberikan NTB bagi perekonomian walaupun nilainya kurang dari satu. Oleh karena itu, hal ini menjadi bukti bahwa transportasi perintis secara keseluruhan masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan subsidi. Jika nilai ICOR sudah berada diantara nol dan satu, maka transportasi perintis tersebut dapat dilepas dan dikembangkan menjadi transportasi komersil.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang berbasis kepulauan yang terkoneksi satu sama lain oleh lautan dan selat. Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa antar pulau yang satu dengan pulau yang lain memiliki keberagaman atau variasi yang

berbeda satu sama lain, seperti berbeda dari sisi luasan kepulauan, densitas dan jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, pendapatan daerah, infrastruktur, dan sebagainya. Jika dipotret dalam intern per pulaunya itu sendiri, ada wilayah provinsi, kabupaten/kota, sampai wilayah yang paling terkecil adalah Rukun Tetangga (RT). Tentunya, masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda pula, baik dari sisi sosial, ekonomi, demografi, geografis, sumber daya alam, infrastruktur, fasilitas publik, dan sebagainya.

Hal yang paling penting adalah mobilisasi manusia dari satu tempat ke tempat lainnya tidak dapat dibatasi oleh selat ataupun lautan. Adanya aktivitas distribusi barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya mampu menginduksi aktivitas ekonomi di wilayah itu sendiri. Bahkan, aktivitas ekonomi pun berlanjut tidak hanya untuk wilayah itu sendiri melainkan jika terjadi eksese demand dan supply, otomatis interaksipun melibatkan satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik antar desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, ataupun dengan negara lain.

Distribusi barang dan jasa, yang menimbulkan dampak ekonomi terhadap suatu wilayah, tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien jika infrastruktur transportasinya tidak memadai. Transportasi merupakan salah satu sektor infrastruktur yang berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kata lain, sektor transportasi adalah sebagai katalisator untuk mengakselerasi tumbuhnya sektor-sektor perekonomian lainnya di suatu wilayah.

Sektor transportasi yang mencakup prasarana dan sarana angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai dan danau, angkutan laut, serta angkutan udara merupakan salah satu komponen pokok kegiatan ekonomi suatu bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi ditujukan untuk lebih meningkatkan pelayanan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau, serta untuk mewujudkan sistem transportasi nasional yang terpadu secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah serta sektor sektor lainnya. Namun demikian, dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, pembangunan sektor transportasi masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain: (1) terjadinya penurunan kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada akibat masih terbatasnya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal jasa pelayanan prasarana dan sarana transportasi; (2) belum optimalnya dukungan infrastruktur dalam peningkatan daya saing sektor riil dan daya saing jasa transportasi yang mandiri; (3) belum optimumnya peran serta masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi; (4) masih terbatasnya aksesibilitas pelayanan transportasi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan pengembangan wilayah perbatasan, serta memberikan dukungan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah, (5) masih rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan yang terpencil, terisolir dan perbatasan, (6) belum efisiennya biaya transportasi dalam komponen biaya produksi maupun biaya distribusi serta pemasaran akibat aksesibilitas yang rendah, (Bappenas, 2009).

Berdasarkan berbagai kendala yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan di sektor transportasi, yaitu (1) keterbatasan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, (2) prioritas pendanaan masih bersifat diskriminatif khususnya bagi wilayah atau sektor yang menghasilkan pendapatan yang besar, sedangkan wilayah-wilayah marginal, seperti wilayah terpencil, terisolir dan perbatasan lebih cenderung di nomerduakan, dan (3) tidak match-nya perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga pembangunan infrastruktur transportasi pun bisa terhambat.

Walaupun dengan berbagai keterbatasannya, pemerintah pusat ataupun daerah telah melakukan berbagai upaya untuk membuka akses beberapa wilayah yang dinyatakan terisolir ataupun terpencil dengan berbagai pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, angkutan darat, angkutan sungai, danau, dan pelabuhan, angkutan kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara. Pembukaan akses bagi wilayah-wilayah terisolir, terpencil, dan perbatasan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi perintis melalui pendanaan subsidi karena dana yang harus disediakan cukup besar. Tentunya, pemerintah hanya menyediakan dana stimulus saja untuk membuka akses tersebut, selanjutnya peranan masyarakat dan swasta untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kapasitas transportasi guna melancarkan aktivitas ekonomi wilayah. Yang menjadi pertanyaan adalah pembangunan sektor transportasi perintis tersebut telah sesuai dengan keinginan masyarakat? Bagaimana peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor transportasi perintis tersebut? Bagaimana efisiensi dan efektivitas dari transportasi perintis tersebut? Secara ekonomi, apakah transportasi perintis tersebut bisa memberikan "delivered price" yang optimum bagi wilayah yang terpencil, terisolasi, ataupun perbatasan? Dampak ekonomi lain apakah yang muncul dari tersedianya transportasi perintis tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan sebagai panduan untuk mengkaji "Penyusunan Indeks Efektivitas Transportasi Perintis untuk Mendukung Pengembangan Wilayah".

II. TUJUAN

Tujuan kajian ini adalah untuk mengembangkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kebijakan pelaksanaan pemberian subsidi transportasi perintis di sektor transportasi dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah. Indeks yang disusun diharapkan bisa dijadikan rumusan untuk menyusun kebijakan strategis tentang pemberian subsidi yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi penyelenggaraan pelayanan transportasi untuk masyarakat di daerah terpencil atau pelayanan transportasi bagi warga miskin (kelas ekonomi).

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kajian meliputi:

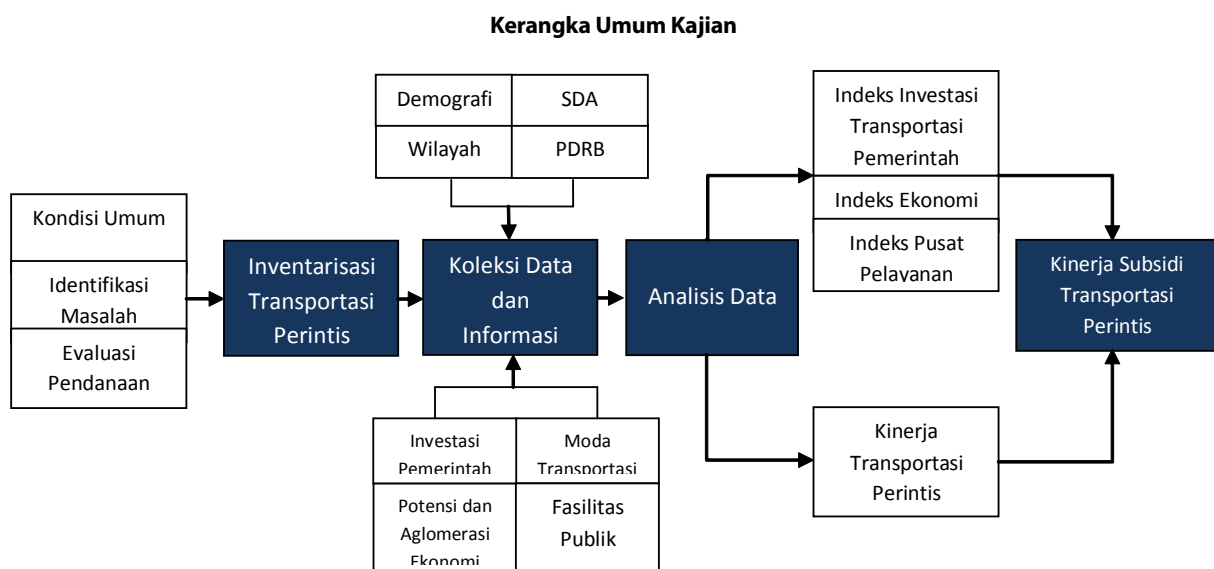
1. Identifikasi permasalahan pelaksanaan pemberian subsidi operasi transportasi perintis;
2. inventarisasi dan analisa kebijakan pemberian subsidi operasi transportasi perintis bagi pengembangan suatu wilayah/daerah;
3. Mengevaluasi tingkat ketersediaan dan pemenuhan subsidi perintis yang telah dilaksanakan, terutama apa yang telah direncanakan itu dapat direalisasikan dan berkesinambungan pelayanannya serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau sasaran pelayanan tersebut (target groupnya);
4. Analisis kelayakan indikator efektivitas melalui perumusan indeks Pemberian Subsidi Operasi Transportasi Perintis yang dikaitkan dengan indikator lainnya;
5. Analisis estimasi kebutuhan program penanganan dan besaran dana yang diperlukan beserta alternatif rencana mobilisasi pendanaannya Pemberian Subsidi Operasi Transportasi Perintis dan Pemberian Dana PSO;
6. Rekomendasi penilaian efektivitas Pemberian Subsidi Operasi Transportasi Perintis dan Pemberian Dana PSO bagi suatu pengembangan wilayah/daerah.

IV. KERANGKA ANALISIS

Pada dasarnya sektor transportasi dapat berfungsi sebagai akselelator dalam mendukung pertumbuhan wilayah, pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan penumpang, serta sebagai alat pemersatu bangsa. Secara khusus, peranan dari sektor transportasi ini sebagai fungsi perangsang bagi tumbuh kembangnya sub sektor-sub sektor perekonomian lainnya. Di samping itu, fungsi lainnya adalah sektor transportasi bisa membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi dan terpencil. Dengan dibukanya akses diharapkan adanya stimulus aktivitas ekonomi di wilayah terpencil dan terisolasi tersebut.

Dalam konteks ekonomi secara luas, tujuan pembangunan sektor transportasi di wilayah terpencil atau terisolasi antara lain berorientasi pada aspek-aspek (a) mendorong pemerataan pembangunan, (b) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, (c) melayani kebutuhan masyarakat luas dengan harga terjangkau, (d) untuk melancarkan mobilitas distribusi barang dan jasa, dan (e) mendorong pertumbuhan sub sektor-sub sektor ekonomi nasional. Dengan demikian pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, andal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau, terutama melancarkan jaringan transportasi antara desa-kota atau daerah produksi-pemasaran.

Dalam konteks penyusunan indeks efektivitas transportasi perintis di suatu wilayah, tidak hanya melihat satu indeks saja untuk menentukan kelayakan transportasi perintis di suatu wilayah melainkan ada indikator lain yang juga berperan besar dalam penentuan transportasi perintis. Adapun kerangka umum kajian ini seperti pada **Gambar 1**. Kerangka umum ini dijadikan patokan dalam penyusunan metodologi penelitian dan penulisan laporan.



V. METODE KAJIAN

5.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam menyusun kajian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan data dan metode analisis yang dibutuhkan;
2. Pengumpulan data sekunder dan sumber-sumber literatur lainnya;

3. Pengolahan data;
4. Melakukan analisis terhadap hasil pengolahan data;
5. Penentuan indeks transportasi perintis

6.

5.2 Lokasi Kajian

Lokasi kajian adalah level nasional, namun ada beberapa lokasi provinsi yang akan dijadikan sampel untuk melihat hasil pembangunan transportasi perintis. Lokasi sampel yang dipilih adalah yang bermoda perintis yang lengkap. Maksudnya lengkap di sini adalah moda transportasi perintisnya meliputi darat, laut, dan udara. Di samping itu, indikator lainnya yang diukur adalah pendapatan perkapita wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Hasil pemilihan lokasi menunjukkan Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai lokasi kajian. Dasar pertimbangannya adalah:

1. Terendah dalam Pendapatan perkapita
2. Tertinggi dalam kemiskinan
3. Tertinggi dalam pengangguran
4. Moda transportasi perintis terlengkap dibandingkan dengan provinsi lainnya

5.

Kinerja Transportasi Perintis

KONSEP DASAR PENILAIAN

Pada prinsipnya, pemeriksaan kinerja transportasi perintis pada studi ini difokuskan pada penilaian terhadap *common indicator* serta indikator kinerja efisiensi dan efektifitas. Penilaian *common indicator* (CI) ini bertujuan untuk melihat secara keseluruhan mengenai kinerja masing-masing moda angkutan perintis di masing-masing wilayah. *Common indicator* (CI) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$CI = (0.33 \times input) + (0.33 \times output) + (0.33 \times outcome)$$

Penilaian efisiensi dilakukan dengan memperhatikan perbandingan antara indikator output terhadap input. Sementara untuk efektifitas dilakukan dengan memperhatikan perbandingan indikator outcome terhadap output. Penilaian kinerja dilakukan untuk masing-masing jenis moda transportasi (angkutan penyeberangan, angkutan jalan, angkutan laut dan angkutan udara).

Secara rinci indikator-indikator yang digunakan pada pemeriksaan kinerja efisiensi dan efektifitas untuk masing-masing moda angkutan disampaikan pada **Tabel 1**.

Indikator Kinerja Efisiensi dan Efektifitas Transportasi Perintis

No.	Moda Transportasi	Input	Output	Outcome
1	Penyeberangan	Subsidi/tahun (Rp.)	Jumlah trayek beroperasi (buah)	volume penumpang (pnp/tahun); volume kendaraan R2 dan R4 (unit/tahun)
2	Jalan	Subsidi/tahun (Rp.)	Jumlah trayek beroperasi (buah)	volume penumpang (pnp/tahun); volume barang (ton/tahun)
3	Laut	Subsidi/tahun (Rp.)	Jumlah trayek beroperasi (buah)	volume penumpang (pnp/tahun); volume barang (ton/tahun)
4	Udara	Subsidi/tahun (Rp.)	Jumlah rute beroperasi (buah)	volume penumpang (pnp/tahun); volume barang (ton/tahun)

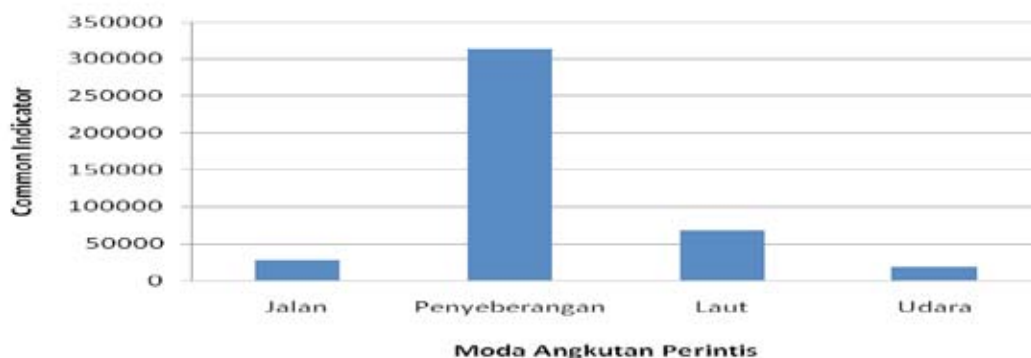
Selanjutnya penilaian kinerja dilakukan untuk masing-masing moda berbasis data tahun 2005 sampai dengan 2009. Sedangkan obyek penilaian berbasis pada ketersediaan data seperti telah disampaikan pada pembahasan mengenai kondisi obyektif.

PENILAIAN COMMON INDICATOR

Common indicator dianalisis berdasarkan pada data input berupa besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk angkutan perintis, output berupa jumlah trayek atau rute angkutan perintis yang melayani setiap wilayah terpencil di Indonesia, dan outcome berupa jumlah penumpang dan barang yang menggunakan jasa angkutan perintis.

Penilaian dilakukan untuk masing – masing moda angkutan perintis (jalan, penyeberangan, laut, dan udara) dengan menggunakan data tahun 2008 yang dijabarkan pada Gambar 2.

Gambar 2 Penilaian Common Indicator Moda Angkutan Perintis (2008)



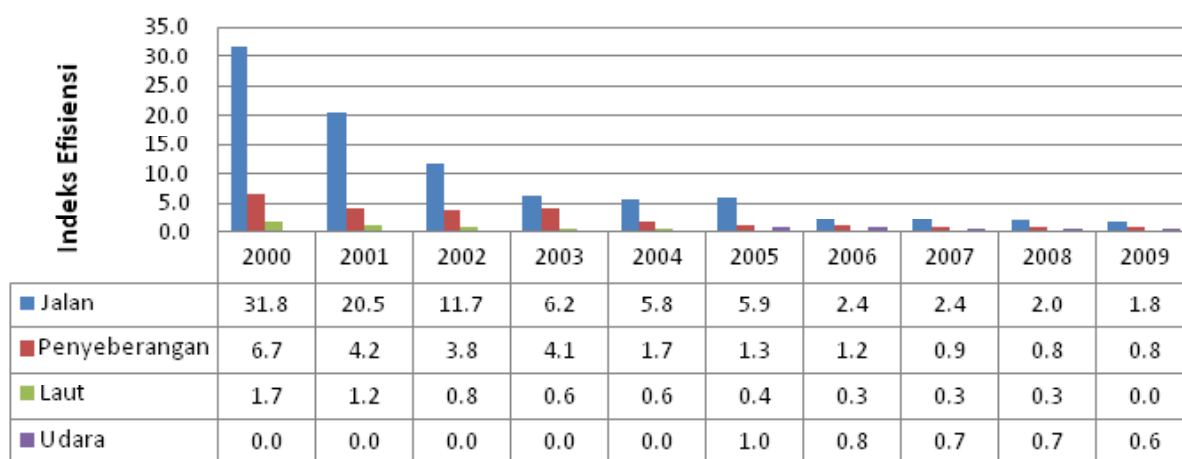
Berdasarkan penilaian *common indicator* di setiap moda angkutan perintis pada tahun 2008, dapat diketahui bahwa nilai CI moda angkutan jalan, penyeberangan, laut, dan udara berturut – turut adalah (28.859), (31.373), (67.535), dan (18.517). Dari keempat moda angkutan perintis tersebut diketahui angkutan penyeberangan perintis memiliki nilai CI yang secara signifikan paling tinggi dibandingkan moda angkutan perintis lainnya. Nilai ini, secara umum, memberikan gambaran kinerja yang baik dalam konteks penilaian umum yang melibatkan aspek anggaran, jumlah trayek atau armada serta permintaan perjalanan (penumpang dan barang).

INDEKS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

Dalam menentukan tingkat efektifitas dan efisien dari angkutan perintis yang ada di wilayah Indonesia selama 10 tahun terakhir, dilakukan berbasis data input (yang diwakili nilai subsidi), output (volume penumpang dan/atau barang), outcome (jumlah trayek dan/atau jumlah kendaraan).

Indeks efisiensi dihitung sebagai perbandingan antara jumlah trayek dengan anggaran subsidi yang memberikan gambaran besaran Rp. 1 milyar subsidi perintis yang disediakan Pemerintah terhadap jumlah trayek yang disubsidi. Semakin besar nilai indeks efisiensi menunjukkan semakin efisien subsidi keberintisan moda angkutan perintis. Hasil penilaian indeks efisiensi angkutan perintis secara nasional pada periode tahun 2000-2009 disampaikan pada **Gambar 3**.

Gambar 3 Perkembangan Nilai Indeks Efisiensi Moda Angkutan Perintis di Indonesia (2000-2009)



Gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai efisiensi pada masing – masing moda angkutan perintis secara umum cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Sebagai contoh moda angkutan jalan pada tahun 2000 memiliki nilai indeks efisiensi sebesar 31,80 dan mengalami penurunan menjadi 1,80 dalam 10 tahun ke depan (2009).

Sedangkan indikator efektifitas dihitung sebagai perbandingan volume permintaan perjalanan dengan jumlah trayek. Indeks ini memberikan gambaran besaran satuan volume permintaan perjalanan pada trayek angkutan perintis. Sama dengan indeks efisiensi, semakin tinggi nilai indeksnya, semakin besar nilai efektifitas pelayanan trayek angkutan perintis di setiap tahunnya.

Secara lengkap gambaran fluktuasi efektifitas moda angkutan jalan tersebut, disampaikan pada Tabel 2. Selanjutnya hasil

penilaian terhadap indeks efektivitas angkutan jalan perintis nasional disampaikan pada Tabel 3. Dari tabel tersebut diketahui pada moda angkutan jalan tingkat efektifitas keperintisan mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2000-2001 indeks efektifitas menurun dari 34.217 menjadi 18.600 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2004 menjadi 37.778. Namun kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 24.681 pada tahun 2008.

Tabel 1 Perkembangan Tingkat Efektifitas Moda Angkutan Jalan

No.	Tahun	Peningkatan (+)/Penurunan (-)	Persentase Rata-rata (%)
1	2000-2001	(-)	45,6
2	2001-2002	(+)	49,0
3	2002-2003	(-)	0,5
4	2003-2004	(+)	3,4
5	2004-2006	(-)	22,3
6	2006-2007	(+)	11,4
7	2007-2008	(-)	17,0

Sumber: analisis 2010

Pada moda penyeberangan indeks efektifitas (perbandingan jumlah penumpang terhadap jumlah trayek) juga mengalami fluktuasi. Secara umum, nilai indeks efektifitas diketahui 5.963 pada tahun 2000 dan menjadi 7.373 pada tahun 2009 atau dengan rata-rata perubahan sebesar 3,5 %. Sedangkan tingkat efektifitas yang mengacu pada volume barang, cenderung mengalami penurunan dari tahun 2002-2009, dengan rata-rata angka penurunan mencapai 16,2 %.

Fluktuasi nilai indeks efektifitas pada moda angkutan jalan dan penyeberangan ternyata berbeda dengan yang ditemui pada moda angkutan laut berbasis volume penumpang yang secara umum cenderung konstan. Nilai indeks efisiensi angkutan laut perintis berdasarkan angkutan penumpang cenderung tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, kecuali pada tahun 2003-2004 dimana terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga lebih dari 50 %. Sedangkan tingkat efektifitas moda laut berdasar volume barang nilainya pada tahun 2000-2009 cenderung konstan pada kisaran nilai indeks 1.000 sampai dengan 2.500.

Pada moda angkutan udara perintis, indeks efektifitas berdasarkan jumlah armada dan jumlah trayek cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005 diketahui nilai indeks efektifitas sebesar 0,33 dan terus mengalami penurunan menjadi 0,20 pada tahun 2008. Dari tahun 2008, angka indeks efektifitas tersebut kembali meningkat menjadi 0,343 pada tahun 2009.

Indeks Efektifitas Moda Angkutan Perintis di Indonesia (2000-2009)

No.	Tahun	Jalan	Penyeberangan		Laut		Udara
		(vol. pnp/ trayek)	(vol. pnp/ trayek)	(vol. kend/ trayek)	(vol. pnp/ trayek)	(vol. barang/ trayek)	(vol. armada/ trayek)
1	2000	34.217	5.963	tt	5.280	1.411	tt
2	2001	18.600	7.386	tt	6.161	1.334	tt
3	2002	36.518	12.772	15.085	5.186	2.448	tt
4	2003	36.497	12.132	14.937	5.644	2.250	tt
5	2004	37.778	14.219	19.956	11.771	2.508	tt
6	2005	27.664	14.819	9.559	4.907	1.024	0,33
7	2006	25.593	16.289	5.289	7.521	2.919	0,32
8	2007	28.872	8.851	2.513	6.227	2.685	0,27
9	2008	24.681	11.267	3.606	4.792	2.434	0,20
10	2009	tt	7.373	2.618	tt	tt	0,34

Sumber: analisis 2010

Catatan:

tt = data tidak tersedia

3. DAMPAK TRANSPORTASI PERINTIS BAGI PENGEMBANGAN WILAYAH

Kajian ini menitikberatkan efektivitas transportasi perintis terhadap pembangunan wilayah. Oleh karena itu, salah satu tolak ukur yang bisa dilakukan untuk melihat efektivitasnya adalah adanya dampak yang ditimbulkan oleh transportasi perintis terhadap pembangunan wilayah. Sebenarnya, perhitungan dampak transportasi perintis di tingkat makro sangat sulit dilakukan karena sistem transportasi terkoneksi satu sama lainnya, sehingga untuk memisahkan mana data sebagai hasil transportasi perintis dan mana hasil dari transportasi non perintis sangat sulit dibedakan karena penumpang dan barang tidak hanya menggunakan satu moda untuk melakukan pergerakan dan distribusi barang. Di samping itu, keterkoneksinya jalur komersil dan jalur perintis akan semakin sulit untuk menganalisis keefektifan dari transportasi perintis secara nasional. Akan tetapi,

ada dua pendekatan yang mungkin bisa menggambarkan peran transportasi perintis terhadap perekonomian nasional, yaitu pendekatan dampak investasi transportasi perintis dan pemanfaatan transportasi perintis oleh penumpang dan barang.

3.1 Dampak Investasi Transportasi Perintis terhadap Nilai Tambah Bruto (NTB)

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal di suatu wilayah oleh investor, baik swasta maupun pemerintah dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi wilayah. Dampak real yang ditimbulkan dengan adanya investasi suatu sektor di suatu wilayah adalah penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya sektor-sektor lain yang mendukung keberadaan sektor yang diinvestasi. Sehingga secara keseluruhan bisa meningkatkan perekonomian wilayah itu sendiri.

Bagaimana halnya dengan investasi di transportasi perintis? Sektor transportasi bertujuan untuk me-leverage/ membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi, fungsi sektor transportasi adalah mendistribusikan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya, atau membuka akses suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada transportasi perintis, dimana transportasi ini bertujuan untuk mendistribusikan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hanya saja, peran dari transportasi perintis ini adalah membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, terisolir, dan daerah perbatasan. Sehingga daerah-daerah tersebut bisa diakses ataupun mengakses dari dan ke wilayah lain.

Adapun dampak yang ditimbulkan oleh adanya transportasi perintis adalah sebagai berikut:

1. Terbukanya akses bagi daerah-daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, dan wilayah tertinggal
2. Aktivasi kegiatan ekonomi daerah-daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, dan wilayah tertinggal
3. Memperlancar distribusi barang dan jasa yang masuk dan keluar wilayah terpencil, terisolasi, perbatasan, dan wilayah tertinggal
4. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia di daerah-daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, dan wilayah tertinggal
5. Mendorong pembangunan infrastruktur lainnya, fasilitas sosial (rumah sakit, pendidikan), dan kelembagaan ekonomi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transportasi perintis memberikan dampak pengganda bagi daerah-daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, dan wilayah tertinggal agar bisa berinteraksi dengan wilayah lainnya sehingga bisa memberikan efek positif terhadap pembangunan wilayah. Guna melihat peran investasi transportasi perintis terhadap perekonomian nasional, pendekatan yang bisa dilakukan adalah pendekatan dengan menggunakan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). ICOR adalah pendekatan dampak investasi terhadap nilai tambah bruto (NTB). Jika, nilai $ICOR > 1$ atau < 0 , maka investasi yang ditanamkan adalah tidak efisien. Namun, jika nilai ICOR adalah $0 < ICOR < 1$, maka investasi yang ditanamkan berarti sangat efisien karena bisa menghasilkan NTB yang besar bagi perekonomian.

Tabel 2 Dampak Investasi Transportasi Perintis terhadap Perekonomian

Angkutan Perintis	Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Perintis Darat	5,96	10,28	13,54	17,90	40,17
Perintis Laut	4,96	3,12	(0,59)	(0,99)	(0,46)
Perintis Udara	15,62	29,21	31,23	16,08	27,61
Jumlah Perintis	25,65	30,74	12,44	10,93	23,95

Sumber: Kemenhub, 2010 dan Kemenkeu, 2010

Berdasarkan **Tabel 4** dapat dijelaskan bahwa hasil analisis ICOR menunjukkan nilai ICOR yang lebih dari satu untuk transportasi. Nilai ICOR perintis darat dari tahun ke tahun menunjukkan nilai ICOR yang semakin besar. Demikian juga terjadi pada perintis udara yang menunjukkan sedangkan transportasi perintis laut malah semakin mengecil dan minus nilai ICORnya. Ini berarti bahwa investasi di transportasi perintis bisa dikatakan tidak efisien karena hanya memberikan NTB kurang dari satu. Namun demikian, transportasi perintis masih memberikan NTB bagi perekonomian walaupun kurang dari satu rupiah. Oleh karena itu, hal ini menjadi bukti bahwa transportasi perintis secara keseluruhan masih menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan subsidi. Jika nilai ICOR sudah berada diantara nol dan satu, maka transportasi perintis tersebut bisa dilepas menjadi transportasi komersil. Namun, untuk menjustifikasi transportasi perintis itu menjadi transportasi komersil harus dilihat dari sisi mikro tidak bisa dilihat dari sisi makro. Oleh karena itu, jika nilai investasi transportasi perintis di tingkat kabupaten/kota, maka hasilnya akan terlihat bahwa transportasi perintis tersebut layak atau tidak layak untuk dijadikan transportasi komersial.

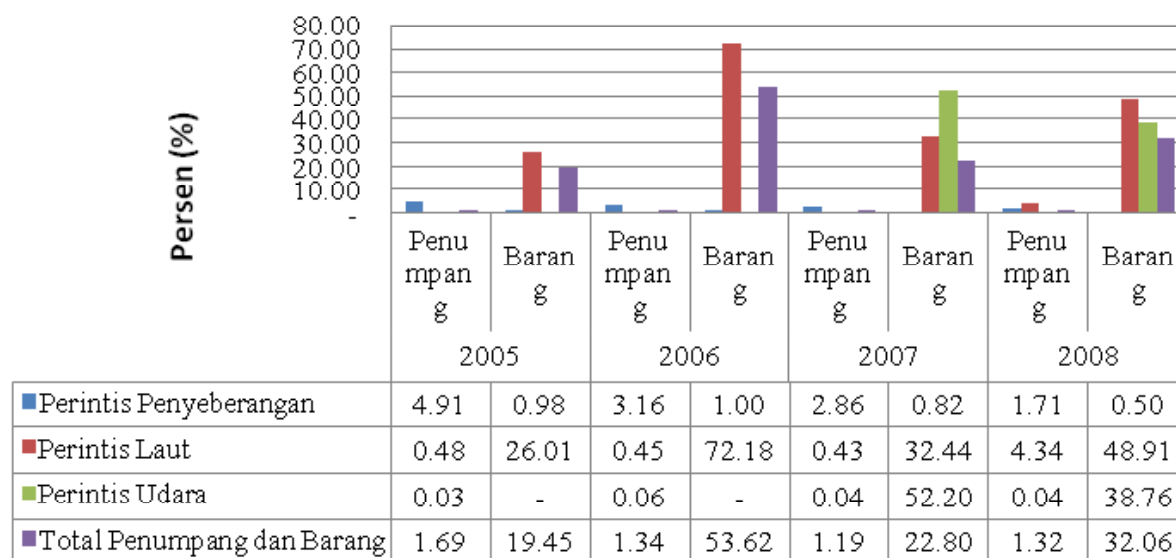
3.2 Dampak Transportasi Perintis terhadap Distribusi Penumpang dan Barang

Dampak lainnya atas peran transportasi perintis secara makro bisa dilihat dari aktivitas penggunaan transportasi perintis oleh penumpang dan barang. Jika berkata tentang transportasi perintis maka bisa diidentikkan bahwa penumpang dan barang yang memanfaatkan transportasi perintis berasal dari daerah terpencil, tertinggal, terisolir, wilayah kepulauan ataupun daerah perbatasan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Perhubungan (2009) dan BPS (2010) dapat dianalisis jumlah penumpang

dan barang yang menggunakan transportasi perintis dibandingkan dengan jumlah penumpang sektor transportasi secara keseluruhan. Hasil perhitungan jumlah penumpang dan barang yang menggunakan transportasi perintis dibandingkan dengan transportasi secara keseluruhan dapat dilihat pada **Gambar 4**.

Gambar 3 Persentase Penumpang dan Barang yang Menggunakan Transportasi Perintis dibandingkan dengan Transportasi Keseluruhan



(Sumber: BPS, 2010 dan Dephub, 2009-diolah)

Berdasarkan **Gambar 4** dapat diilustrasikan tiga transportasi perintis, yaitu penyeberangan, laut dan udara. Data menunjukkan bahwa penumpang yang menggunakan penyeberangan perintis makin menunjukkan persentase yang menurun. Kemungkinan hal ini disebabkan telah banyaknya penyeberangan perintis yang menjadi komersil di tahun-tahun 2007-2008. Data yang berbeda ditunjukkan oleh perintis laut, dimana jumlah penumpang mengalami peningkatan di tahun 2008, kemungkinan hal ini disebabkan dibukanya jalur baru perintis laut di beberapa pulau di Indonesia sehingga mampu mengkoneksikan antar pulau ke pulau lainnya. Di samping itu, perintis laut ini masih menjadi primadona untuk distribusi barang yang ditunjukkan dengan nilai persentase yang cukup tinggi untuk angkutan barang. Artinya, transportasi laut menjadi salah satu alternatif bagi penduduk yang berada di wilayah kepulauan untuk mendistribusikan hasil bumi mereka ke luar wilayah, atau sebaliknya barang-barang dari luar wilayah masuk ke wilayah kepulauan masuk melalui jalur laut ini. Terakhir, transportasi udara menjadi moda yang banyak diminati oleh penumpang lokal. Transportasi ini bisa memangkas waktu kedatangan dibandingkan dengan menggunakan moda laut atau darat jika harus menempuh perjalanan antar pulau. Walaupun dari tahun 2005-2008 jumlah penumpang tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada perintis udara, namun terjadi peningkatan pada angkutan barang yang menggunakan transportasi laut. Tahun 2005-2006, belum banyak barang yang diangkut oleh transportasi udara perintis. Namun di tahun 2007-2008, jumlah barang yang diangkut oleh transportasi ini meningkat secara signifikan. Artinya, penumpang telah berpikir masalah waktu delivery dibandingkan dengan korbanan harga yang harus dibayar oleh pedagang dengan menggunakan transportasi udara. Pedagang memang harus membayar lebih mahal sedikit jika menggunakan transportasi udara perintis dibandingkan dengan transportasi laut ataupun darat, tetapi keuntungannya adalah waktu tempuh untuk menyampaikan barang tersebut lebih singkat dibandingkan dengan laut dan darat.

4. KEPERINTISAN DALAM EKONOMI WILAYAH: STUDI KASUS PROVINSI NTT

4.1 Efektivitas Transportasi Perintis Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Studi ini bertujuan untuk melihat efektivitas transportasi perintis terhadap pembangunan wilayah, khususnya untuk pengembangan daerah terpencil, tertinggal atau terisolir. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengacu pada kriteria daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian PDT;
2. Jumlah Kabupaten tertinggal RPJM 2004-2009 ditetapkan sebanyak 199 kabupaten, namun pada RPJMN 2010-2014 jumlah kabupaten tertinggal ditetapkan sebanyak 183 kabupaten;
3. Berdasarkan penetapan 183 kabupaten tertinggal, maka jumlah kabupaten di Provinsi NTT yang ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal sebanyak 20 kabupaten atau seluruh kabupaten di NTT masuk kategori tersebut kecuali Kota Kupang;
4. Kelengkapan moda transportasi perintis yang ada di wilayah tersebut .

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang terpilih untuk dijadikan sebagai objek studi efektivitas

transportasi perintis ini. Ada empat alasan NTT terpilih daerah studi, yaitu:

1. Terendah dalam Pendapatan/kapita
2. Tertinggi dalam kemiskinan
3. Tertinggi dalam pengangguran
4. Terdapat empat moda perintis, yaitu angkutan jalan raya, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan laut

A. Penilaian Indikator Input

Indikator input yang dinilai adalah pendanaan sektor transportasi perintis. Pendanaan sektor transportasi perintis selama ini dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah pusat. Oleh karena itu, ada dua penilaian dalam penentuan indikator input ini yaitu pendanaan transportasi perintis oleh pemerintah daerah dan pusat. Bobot penilaian terbesar untuk indikator ini adalah pembiayaan transportasi perintis oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan jumlah dana pelayanan untuk angkutan jalan raya khususnya DAMRI di tahun 2004 dan 2009 masing-masing sebesar Rp. 2,08 milyar dan Rp. 4,41 milyar (Direktorat Usaha Perum DAMRI, 2010 dan PT. ASDP Indonesia Ferry, 2010). Sedangkan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) diberikan anggaran subsidi sebesar Rp. 5,75 milyar dan Rp. 7,29 milyar. Berdasarkan data tersebut, maka terjadi peningkatan anggaran untuk subsidi transportasi perintis DAMRI dan ASDP di Provinsi NTT. Hal ini memberikan nilai positif bagi pengembangan transportasi perintis di NTT dalam rangka membuka wilayah-wilayah baru sehingga pergerakan barang dan orang bisa dilakukan. Akan tetapi, anggaran yang disuntikkan ke DAMRI dan ASDP tersebut seluruhnya berasal dari dana APBN, sedangkan pemerintah daerah Provinsi NTT masih belum mampu untuk memberikan subsidi transportasi perintis.

B. Penilaian Indikator Output

Komponen yang dijadikan penilaian indikator output adalah jumlah armada angkutan perintis untuk masing-masing moda, kecuali moda udara yang diukur adalah jumlah rute pesawat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan PT. ASDP Indonesia Ferry, informasi jumlah armada dan rute pesawat udara sebagai berikut:

Tabel 5 Perbandingan Jumlah Armada Perintis dan Non-Perintis di Provinsi NTT

No	Jenis Angkutan	Jumlah Armada (unit) atau Rute Pesawat Udara			
		Non Perintis	Perintis	Total	% perintis
1.	Angkutan Kendaraan Umum	493	45*	538	8,4
2.	Angkutan ASDP	7	3	10	30
3.	Angkutan Laut	3**	3	6	50
4.	Angkutan Udara (Rute) ***	24	2	26	7,7

Sumber: Dishub Provinsi NTT, 2010 dan PT. ASDP Indonesia Ferry, 2010

*) Damri Perintis

**) Angkutan Laut antar Provinsi yang berlabuh di Provinsi NTT

***) Rute Penerbangan

Berdasarkan **Tabel 5** diperlihatkan perbandingan jumlah armada perintis dan non perintis di Provinsi NTT. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kendaraan umum di darat lebih cenderung didominasi oleh angkutan komersial, sedangkan angkutan perintisnya hanyalah berupa Bis DAMRI yang melayani 28 trayek dari empat stasiun, yaitu stasiun Ende, Waingapu, Kupang, dan Kefamenanu yang dilayani oleh 45 bis.

Angkutan ASDP merupakan angkutan yang terpenting di NTT karena angkutan ini menghubungkan antar pulau sehingga bisa memperlancar arus distribusi orang dan barang. Jumlah kapal yang melayani angkutan ASDP terdapat 10 kapal. Ke – 10 kapal tersebut 9 diantaranya dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry dan 1 kapal dikelola oleh swasta PD. Flombamor. Dari 9 kapal yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry, 3 kapal diantaranya digunakan untuk melayani jalur perintis.

Adapun jalur perintis tersebut, yaitu:

1. Kupang - Ende
2. Waingapu - Aimere
3. Waingapu - Sabu
4. Waingapu - Ende
5. Teluk Gurita - Kalabahi
6. Larantuka - Waiwerang
7. Waimerau - Lewoleba
8. Lewoleba - Baranusa
9. Kalabahi - Baranusa

Sehingga persentase kapal yang melayani jalur perintis tersebut sebanyak 30% dari keseluruhan kapal yang melayani jalur yang ada di NTT. Sebenarnya, sudah terjadi peningkatan status jalur yang tadinya terdapat banyak jalur perintis, namun dengan seiringnya perkembangan perekonomian wilayah, maka jalur-jalur perintis pun berubah status menjadi jalur komersial. Artinya, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi untuk PT. ASDP.

Angkutan laut merupakan salah satu angkutan yang terpenting juga di NTT krn mampu menghubungkan jarak yang jauh

dibandingkan dengan ASDP. Fungsi angkutan laut di NTT adalah untuk melancarkan arus distribusi barang dan orang. Tidak hanya itu, angkutan laut dimanfaatkan oleh penduduk NTT untuk mendistribusikan pula ternak antar pulau di NTT ataupun ke luar NTT. Ternak yang didistribusikan terutama ternak sapi yang menjadi salah satu komoditas ternak unggulan di NTT.

Jumlah kapal laut yang melayani lalulintas laut sebanyak 6 kapal, yaitu 3 untuk jalur perintis dan 3 untuk jalur komersial. Kapal laut perintis yang melayani rute perintis laut adalah KM Nembrala, KM Nanglada, dan KM Berguna. Sedangkan 3 jalur komersial yang merupakan jalur terkoneksi antar beberapa pulau di Indonesia dilayani oleh PT. Peln dengan mengeluarkan tiga armada, yaitu KM Bukit Sigantung, KM Sirimau, dan KM Awu.

Moda lainnya yang memfasilitasi barang dan orang untuk melakukan pergerakan adalah dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh yang relatif singkat dibandingkan pelayaran laut dan ASDP adalah moda udara. Di NTT, terdapat 14 bandar udara yang melayani rute penerbangan antar pulau di NTT ataupun ke luar NTT. Ke empat belas bandar udara tersebut melayani 17 rute penerbangan diantaranya 4 rute melayani rute penerbangan antar provinsi dan sisanya melayani rute penerbangan antar pulau di NTT. Dari 13 rute penerbangan antar pulau di NTT, yang masih ditetapkan statusnya sebagai jalur perintis adalah 2 rute yaitu Kupang – Sabu dan Kupang Atambua yang dilayani oleh operator Merpati Nusantara Airlines. Artinya, jalur tersebut masih diberikan subsidi oleh pemerintah.

C. Penilaian Indikator Outcome

Komponen yang menjadi faktor penilaian indikator *outcome* adalah jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar Provinsi NTT. Indikator ini dapat menunjukkan berapa banyak penumpang dan barang yang menggunakan transportasi perintis di NTT. Khusus untuk angkutan barang dapat mengindikasikan bahwa berapa besar sumber daya yang masuk dan keluar dari NTT. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Provinsi NTT dan produk yang datang dari luar NTT termasuk produk impor.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh khususnya dari BPS Provinsi NTT menunjukkan data seperti pada **Tabel 6**. Pada tabel tersebut dapat memberikan gambaran jumlah penumpang dan barang yang keluar dan masuk ke Provinsi NTT. Data yang dapat dihimpun dan dianalisis hanya pada tiga moda angkutan perintis yaitu angkutan ASDP, angkutan laut, dan angkutan udara, sedangkan angkutan perintis darat khususnya DAMRI tidak ada data yang bisa dianalisis.

Tabel 6 Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang yang Masuk dan Keluar Provinsi NTT

Angkutan Penumpang	Satuan	2005		2009	
		datang	berangkat	datang	berangkat
Perkembangan Jumlah Penumpang pada Bus Perintis	Orang	tad	tad	tad	tad
Perkembangan Jumlah Penumpang di Penyeberangan ASDP perintis	Orang	1.419.089	866.693	151.309	158.033
Perkembangan Jumlah di Kapal Laut Perintis	Orang	1.630.393	1.516.454	336.531	359.701
Perkembangan Jumlah di Angkutan Udara Perintis	Orang	33.496	32.099	47.626	49.928
Angkutan Barang		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
Perkembangan Jumlah Barang pada Bus Perintis	Ton	tad	tad	tad	tad
Perkembangan Jumlah Barang di Penyeberangan ASDP perintis	000 Ton	689	714	507	610
Perkembangan Jumlah Barang di Kapal Laut Perintis	000 Ton	1.846	1.898	1.986	1.778
Perkembangan Jumlah ternak (sapi) diangkut kapal laut	ekor	233.448	177.310	38.025	75.219
Perkembangan Jumlah Barang di Angkutan Udara Perintis	Ton	402	305	241	176

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2005 dan 2010, diolah

Keterangan: tad = tidak ada data

Secara lebih rinci, pada **Tabel 7** disampaikan volume angkutan penumpang angkutan penyeberangan di Provinsi NTT.

Tabel 7 Kondisi Eksisting dan Rencana Pengembangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Lintasan	Ketetapan	Klasifikasi	Dari	Jarak (mil)	Ke	Hirarki Peran dan Fungsi	Penyelenggara
				Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota		
A.	Beroperasi							
1	Kupang - Rote	KM.64/1989	Komersil	Kab. Kupang	40	Kab. Rote Ndao	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
2	Kupang - Seba	KM.64/1989	Komersil	Kab. Kupang	115	Kab. Rote Ndao	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
3	Kupang - Larantuka	KM.64/1989	Komersil	Kab. Kupang	120	Kab. Flores Timur	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
4	Kupang - Kalabahi	KM.64/1989	Komersil	Kab. Kupang	137	Kab. Alor	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
5	Larantuka - Lewoleba	KM.64/1989	Perintis	Kab. Flores Timur	34	Kab. Lembata	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
6	Aimere - Waingapu	KM.25/1991	Perintis	Kab. Ngada	100	Kab. Sumba Timur	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
7	Kupang - Ende	KM.49/1994	Perintis	Kab. Kupang	150	Kab. Ende	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
8	Ende - Waingapu	KM.49/1994	Perintis	Kab. Ende	100	Kab. Sumba Timur	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
9	Baranusa - Kalabahi	KM.49/1994	Perintis	Kab. Alor	36	Kab. Alor	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
10	Waingapu - Seba	KM.33/1995	Perintis	Kab. Sumba Timur	120	Kab. Rote Ndao	Dalam Kab/Kota	PT. ASDP
11	Kupang - Aimere	KM.82/1998	Komersil	Kab. Kupang	150	Kab. Ngada	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
12	Kupang - Lewoleba	KM.1/2000	Perintis	Kab. Kupang	12	Kab. Lembata	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
13	Kalabahi - Tl. Gurita	KM.1/2000	Perintis	Kab. Alor	2,5	Kab. Belu	Lintas Kab/Kota	
14	Waikelo - Sape	KM.30/1989	Perintis	Kab. Bima	50	Kab. Sumba Barat Daya	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
15	Patumbukan - Jampea	t.t	Perintis	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t
16	Jampea - Labuhan Bajo	t.t	Perintis	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t
17	Lewoleba - Baranusa	t.t	Perintis	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t
18	Tlk Gurita - Wonreli	t.t	Perintis	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t
19	Labuhan Bajo - P.Komodo	KM.64/1989		Kab. Manggarai Barat	35	Kab. Manggarai Barat	Dalam Kab/Kota	
20	Kalabahi (P.Alor) - Bakalang (P.Pantar)	KM.33/1995		Kab. Alor	18	Kab. Alor	Dalam Kab/Kota	
21	Kupang - Waingapu	KM.66/2000	Komersil	Kab. Kupang	220	Kab. Sumba Timur	Lintas Kab/Kota	PT. ASDP
22	Kupang - Sabu							
23	Kupang - Waikelo							
24	Balauring - Lewoleba	KM.13/1997	Perintis	Kab. Lembata	33	Kab. Lembata	Dalam Kab/Kota	

No	Lintasan	Ketetapan	Klasifikasi	Dari	Jarak (mil)	Ke	Hirarki Peran dan Fungsi	Penye-lenggara
				Kabupaten/ Kota		Kabupaten/ Kota		
25	Baranusa - Balauring	KM.49/1994	Perintis	Kab.Alor	26	Kab. Lembata	Lintas Kab/ Kota	
26	Kalabahi - Balauring	KM.1/2000	Perintis	Kab.Alor	62	Kab. Lembata	Lintas Kab/ Kota	
27	Larantuka - Weiwerang	KM.64/1989	Perintis	Kab. Flores Timur	18	Kab. Flores Timur	Dalam Kab/ Kota	PT. ASDP
28	Lewoleba - Weiwerang	KM.64/1989	Perintis	Kab. Lembata	16	Kab. Flores Timur	Lintas Kab/ Kota	PT. ASDP
29	Tl.Gurita - Kisar	KM.38/2005	Perintis	Kab. Belu	115	Kab. Maluku Tenggara Barat	Lintas Propinsi	
30	Larantuka - Baranusa	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	
31	Larantuka - Balauring	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	
32	pamatata - labuhan bajo	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	t.t	
33	Pamatata - Marapokot	KM.82/1998		Kab.Selayar		Kab. Ngada	Lintas Propinsi	
34	Sape - Labuhan Bajo	KM.64/1989	Komersil	Kab. Bima	75	Kab. Manggarai Barat	Lintas Kab/ Kota	
35	Larantuka - Kalabahi	KM.64/1989	Perintis		120		Lintas Kab/ Kota	
C.	Tidak Beroperasi							
1	Kupang – Naikliu	KM.49/1994	t.t	Kab. Kupang	35	Kab. Kupang	Dalam Kab/ Kota	
2	Dili – Ilwaki	KM.33/1995	t.t	Timot Leste	67	Kab. Maluku Tenggara Barat	t.t	
3	Ende (P.Flores) - Aimere (P.Flores)	KM.33/1995	t.t	Kab. Ende	75	Kab. Ngada	Lintas Kab/ Kota	
4	Dili - Maritaing (P.Alor)	KM.30/1998	t.t	Timot Leste		Kab. Alor		
5	Kalabahi – Lewoleba	t.t	Perintis	Kab. Alor	t.t	Kab. Lembata	Lintas Kab/ Kota	PT. ASDP
6	Larantuka - Kalabahi	KM.64/1989	Perintis	Kab. Flores Timur	80	Kab. Alor	Lintas Kab/ Kota	PT. ASDP
7	Atapupu – Kalabahi	KM.25/1991	t.t	Kab. Belu	68	Kab. Alor	Lintas Kab/ Kota	
8	Bakalang (P.Pantar) - Baranusa (P.Pantar)	KM.33/1995	t.t	Kab. Alor	4	Kab. Alor	Dalam Kab/ Kota	
9	Balauring - Kabir (P.Pantar)	KM.25/1991	t.t	Kab.Lembata	36	Kab. Alor	Lintas Kab/ Kota	
10	Kabir – Kalabahi	KM.25/1991	t.t	Kab. Alor	14	Kab. Alor	Dalam Kab/ Kota	
11	Kalabahi (P.Alor) - Maritaing (P.Alor)	KM.82/1998	t.t	Kab. Alor		Kab. Alor	Dalam Kab/ Kota	

Sumber: Dit.LLASDP, Ditjendat, Departemen Perhubungan (2009)

Berdasarkan data kinerja tahun 2008, lintas penyeberangan eksisting di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berjumlah 18 lintasan yang dilayani oleh 14 buah armada dengan jumlah total trip 1.886 trip yang mengangkut 247.139 penumpang 47.733

ton barang serta 28.732 buah kendaraan roda dua (R-2) dan 9.678 buah kendaraan roda empat (R-4). Jumlah ini tidak termasuk lintasan 3 lintasan lain, yaitu Patumbukan-Jampea, ampea-Labuhan Bajo dan Teluk Gurita-Wonreli (Lihat **Tabel 8**).

Tabel 8 Kinerja Outcome Angkutan Penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Lintasan	Jarak (mil)	Jumlah Armada (bh)	Waktu Tempuh (menit)	Kinerja					
					Tahun	Trip	Penumpang	Barang	R-2	R-4
1	Kupang - Rote	40	1	300	2008	425	43.223	27.310	13.686	4.011
2	Kupang - Seba	115	1	840	2008	147	35.405	361	3.455	143
3	Kupang - Larantuka	120	1	900	2008	181	40.815	8.637	2.956	1.429
4	Kupang - Kalabahi	137	1	1020	2008	182	44.218	3.159	3.349	491
5	Larantuka - Lewoleba	34	1	240	2008	124	335	-	126	190
6	Aimere - Waingapu	100	1	780	2008	92	6.306	-	499	207
7	Kupang - Ende	150	1	1140	2004	40	3.811	263	5	164
8	Ende - Waingapu	100	1	780	2008	86	4.046	-	268	52
9	Baranusa - Kalabahi	36	1	300	2008	134	5.390	-	677	78
10	Waingapu - Seba	120	1	900	2008	88	4.410	-	149	1
11	Kupang - Aimere	150	1	1440	2008	84	21.638	1.416	1.421	376
12	Kupang - Lewoleba	12	1	840	2008	127	16.657	-	1.071	169
13	Kalabahi - Tl.Gurita	2,5	1	480						
14	Waikelo - Sape	50	1	540	2008	176	20.885	6.587	1.070	2.367
15	Patumbukan - Jamea									
16	Jampea - Labuhan Bajo									
17	Lewoleba - Baranusa				2008	136	1.428	-	80	6
18	Tlk Gurita - Wonreli									

Sumber: Dit.LLASDP, Ditjendat, Departemen Perhubungan (2009)

Moda perintis lainnya yang digunakan untuk melakukan pergerakan barang dan penumpang adalah kapal laut perintis. Berdasarkan data BPS NTT menunjukkan bahwa jumlah penumpang yang menggunakan kapal laut perintis yang masuk dan keluar NTT sebanyak lebih dari 3 juta penumpang tahun 2005 dan turun di tahun 2009 hanya sebesar kurang dari 700 ribu penumpang. Alasan utama penurunan kemungkinan besar adalah faktor cuaca yang tidak mendukung untuk melintasi pelayaran laut di NTT oleh kapal-kapal besar perintis. Sedangkan jumlah barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan-pelabuhan laut di NTT kurang dari 4 juta ton. Hal yang menarik adalah di tahun 2005, jumlah barang yang dibongkar lebih rendah sedikit dibandingkan dengan yang dimuat. Artinya, produk-produk yang dihasilkan oleh NTT banyak keluar dibandingkan dengan barang yang masuk khususnya dengan menggunakan kapal laut perintis. Disamping barang dan penumpang yang diangkut oleh kapal laut perintis, kapal laut perintis pun mengangkut ternak untuk didistribusikan keluar ataupun masuk ke NTT. Jumlah ternak yang keluar NTT lebih rendah dibandingkan ternak yang masuk NTT di tahun 2005. Ini berarti ada pemasukan ternak dari luar NTT khususnya ternak sapi. Namun di tahun 2009, ternak yang keluar NTT lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk. Artinya, terjadi ekspor ternak khususnya sapi keluar wilayah NTT.

Hal yang cukup menarik diperlihatkan oleh moda perintis angkutan udara. Angkutan udara perintis yang ada di NTT melayani dua rute penerbangan saja, yaitu dari Kupang – Sabu dan Kupang Atambua yang dilayani oleh operator Merpati Nusantara Airlines. Jumlah penumpang yang diangkut di tahun 2005 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2009. Ini berarti, penduduk NTT mampu untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara. Walaupun harga tiketnya lebih tinggi dibandingkan dengan kapal laut ataupun ASDP, namun waktu yang ditempuh lebih pendek dibandingkan dengan kedua moda tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan preferensi konsumen untuk menggunakan moda udara perintis. Adapun barang yang diangkut oleh pesawat udara perintis lebih rendah dibandingkan dengan kapal laut perintis dan ASDP.

Penilaian Indikator Impact

Komponen yang dijadikan faktor untuk menganalisis indikator impact adalah tumbuhnya pusat-pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, angka partisipasi sekolah, dan peningkatan tenaga kerja. Komponen-komponen tersebut diukur karena salah satu dampak terbangunnya infrastruktur transportasi adalah munculnya pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi (diwakili oleh tumbuhnya jumlah bank). Di samping itu, dengan adanya fasilitas transportasi maka berdampak pula pada peningkatan jumlah tenaga kerja, walaupun indikator ini hanya salah satu bagian saja dalam peningkatan tenaga kerja di Provinsi NTT.

Dari faktor-faktor yang dijadikan sebagai alat analisis perhitungan indikator impact, maka secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah baik dari pusat-pusat layanan sosial dan ekonomi ataupun angka partisipasi sekolah dan tenaga kerja (**Tabel 9**). Pusat pelayanan kesehatan yang diwakili oleh jumlah puskesmas menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas dari tahun 2005-2009 sebesar 31,08%. Sedangkan pusat pelayanan pendidikan yang diukur dari jumlah sekolah dasar, SMP dan SMP yang telah dibangun menunjukkan peningkatan 19,12% dari tahun 2005. Peningkatan jumlah sekolah dibarengi dengan

peningkatan angka partisipasi sekolah, dimana meningkat sebesar 28,09% dari tahun 2005. Sedangkan jumlah perbankan yang menjadi salah satu barometer pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu tumbuh sebesar 89,55%. Ini menunjukkan bahwa minat para perbankan untuk menginvestasikan modalnya di NTT cukup besar. Indikator lainnya yang diukur adalah peningkatan tenaga kerja. Walaupun transportasi hanya bagian dari faktor peningkatan tenaga kerja, namun ikut berperan dalam peningkatan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja di NTT sebesar 10,3% dimana di dalamnya terdapat tenaga kerja yang bekerja untuk mengoperasikan layanan transportasi perintis.

Tabel 9 Dampak Sektor Perintis terhadap Pusat-pusat Pelayanan Sosial, Ekonomi, Angka Partisipasi Sekolah, dan Tenaga Kerja

Indikator Impact	Satuan	2005	2009
Perkembangan pusat layanan kesehatan (puskesmas)	Unit	222	291
Perkembangan pusat layanan pendidikan (SD, SMP, dan SMA)	Unit	5.224	6.223
Perkembangan jumlah perbankan	Unit	67	127
Jumlah angka partisipasi pendidikan	Orang	925.126	1.185.024
Jumlah tenaga kerja	Orang	1.958.885	2.160.733

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2005 dan 2010, diolah

Indikator lainnya yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat dampak transportasi terhadap perkembangan wilayah adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM). Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang merupakan gabungan antara harapan hidup, pendapatan perkapita, tingkat partisipasi sekolah, dan tingkat buta huruf di suatu wilayah. Berdasarkan data BPS Provinsi NTT menunjukkan nilai IPM dari tahun 2006 dan 2008 (**Tabel 10**). Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan IPM pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTT. Sebagai provinsi yang terdiri dari beberapa pulau, maka perkembangan nilai IPM ini bisa menjadi gambaran bahwa peran transportasi penyeberangan ataupun laut yang menghubungkan antar pulau mampu mendorong perkembangan wilayah di Provinsi NTT. Jika terdapat hambatan pelayaran, tentunya akan mengganggu kestabilan antar pulau, karena antara satu pulau dengan pulau yang lainnya saling membutuhkan terutama kebutuhan sandang dan pangan. Oleh karena itu, angkutan penyeberangan dan laut baik perintis ataupun komersil bisa mendorong percepatan pembangunan wilayah.

Tabel 10 Perkembangan Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Pembangunan Manusia	
		2006	2008
1.	Kota Kupang	74,75	76,58
2.	Kupang	63,12	65,02
3.	Sabu Raijua	-	-
4.	Rote Nado	64,26	65,29
5.	Timor Tengah Selatan	63,57	64,83
6.	Timor Tengah Utara	64,01	66,53
7.	Belu	61,71	63,41
8.	Alor	66,93	67,82
9.	Flores Timur	66,43	67,34
10.	Sikka	65,87	66,69
11.	Ende	65,05	66,14
12.	Ngada	67,33	68,56
13.	Manggarai	65,66	66,21
14.	Sumba Timur	60,02	60,80
15.	Sumba Barat	60,14	62,17
16.	Lembata	65,60	66,61
17.	Manggarai Barat	63,50	64,44
18.	Sumba Tengah	58,36	59,01
19.	Sumba Barat Daya	58,93	59,87
20.	Nagekeo	64,58	65,73
21.	Manggarai Timur	-	64,58

Sumber: BPS Provinsi NTT Tahun 2007 dan 2009, diolah

4.2 Analisis Efektivitas Transportasi Perintis di NTT

Analisis efektivitas transportasi perintis di NTT dihitung berdasarkan hasil penilaian dari masing-masing indikator input,

output, outcome, dan impact. Penilaian dari masing-masing indikator tersebut selanjutnya dihitung dengan menggunakan *Parwise Comparison* untuk melihat efektif dan tidaknya transportasi perintis di NTT. Sebelum melakukan analisis, masing-masing indikator diberikan bobot penilaian terlebih dahulu, dan yang paling terbesar adalah indikator impact karena indikator ini dapat menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh sektor transportasi perintis, walaupun hal ini bukan satu-satunya untuk melihat impact yang telah diterangkan sebelumnya. Akan tetapi pendekatan ini dapat memberikan gambaran bahwa jika transportasi diset-up maka akan membangkitkan pusat-pusat pelayanan lainnya.

Berdasarkan **Tabel 11** ditunjukkan hasil perhitungan efektivitas transportasi perintis di Nusa Tenggara Timur. Ada dua penilaian yang digunakan untuk menghitung indikator input yaitu pendanaan sektor transportasi perintis oleh pemerintah daerah dan pusat. Bobot indikator pendanaan oleh pemerintah daerah diberikan bobot lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat. Indikator output yang dinilai adalah perbandingan jumlah armada dan trayek perintis dan non perintis. Armada kendaraan umum perintis lebih rendah dibandingkan dengan armada komersial. Demikian pula, terjadi peningkatan status pada angkutan penyeberangan ASDP dari perintis ke komersial. Adanya peningkatan jumlah kapal laut perintis dan sedikitnya jumlah rute penerbangan perintis. Sedangkan indikator outcome dihitung dari peningkatan jumlah penumpang dan barang dari tahun 2005-2009. Dan terakhir penilaian indikator impact dihitung dari peningkatan jumlah pusat-pusat pelayanan sosial dan ekonomi, angka partisipasi sekolah, dan jumlah tenaga kerja.

Tabel 11 Hasil Analisis Keefektifitasan Transportasi Perintis di Provinsi NTT

Perhitungan Parwise Comparison	Bobot Aktivitas	Indeks per Kinerja	Perkembangan masing-masing aktivitas 2005-2009*	Bobot Terko-reksi	Nilai Impact
Input		0,1			0,02
Anggaran APBD	0,8		0	0,2	
Anggaran APBN	0,2		1		
Output		0,2			0,2
Jumlah Kendaraan Perintis	0,3		1	0,3	
Jumlah Kapal Penyeberangan Perintis (ASDP)	0,3		1	0,3	
Jumlah Kapal Laut Perintis	0,2		1	0,2	
Jumlah Trayek Udara Perintis	0,2		1	0,2	
Outcome		0,3			-0,22
A. Kendaraan umum perintis	0,1			0	
- Penumpang Datang			0		
- Penumpang Berangkat			0		
- Barang Bongkar			0		
- Barang Dimuat			0		
B. ASDP Perintis	0,1			-0,4	
- Penumpang Datang			-1		
- Penumpang Berangkat			-1		
- Barang Bongkar			-1		
- Barang Dimuat			-1		
C. Laut	0,4			-0,32	
- Penumpang Datang	0,1		-1	-0,1	
- Penumpang Berangkat	0,4		-1	-0,4	
- Barang Bongkar	0,1		1	0,1	
- Barang Dimuat	0,4		-1	-0,4	
D. Udara	0,4			0,0	
- Penumpang Datang	0,1		1	0,1	
- Penumpang Berangkat	0,4		1	0,4	
- Barang Bongkar	0,1		-1	-0,1	
- Barang Dimuat	0,4		-1	-0,4	
Impact		0,4			0,4
Peningkatan jmlh pelayanan kesehatan	0,20		1	0,20	

Perhitungan Parwise Comparison	Bobot Aktivitas	Indeks per Kinerja	Perkembangan masing-masing aktivitas 2005-2009*	Bobot Terkoreksi	Nilai Impact
Peningkatan jmlh pelayanan pendidikan	0,20		1	0,20	
Peningkatan jumlah perbankan	0,20		1	0,20	
Peningkatan partisipasi pendidikan	0,20		1	0,20	
Jumlah tenaga kerja	0,20		1	0,20	
Penilaian Efektivitas					0,404

Keterangan: *) jika terjadi peningkatan dari tahun 2005 – 2009 diberikan nilai 1, jika tidak terjadi peningkatan diberikan nilai 0, dan jika terjadi penurunan diberikan nilai -1.

Berdasarkan hasil penilaian kriteria-kriteria yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa untuk penilaian indikator input sebesar 0,02; indikator output sebesar 0,2; indikator outcome sebesar -0,22; dan indikator impact sebesar 0,4. Total keseluruhan sebesar 0,404 atau 40,4%. Ini berarti, transportasi perintis yang beroperasi di NTT menunjukkan nilai cukup efektif. Hal ini terbukti dengan kinerja yang ditunjukkan oleh sektor transportasi perintis ini bagi pembangunan wilayah NTT.

Sejalan dengan prioritas pembangunan di NTT tahun 2009-2013 bahwa akan ditingkatkan investasi pada sektor-sektor unggulan di NTT seperti pariwisata, perikanan dan kelautan, peternakan dan perkebunan serta peningkatan sektor transportasi. Guna men-drive sektor-sektor unggulan tersebut, maka peningkatan sektor transportasi menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk diset-up lebih awal untuk memperlancar distribusi barang dan penumpang.

KONEKSITAS TRANSPORTASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pembahasan koneksitas transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bagian ini difokuskan pada gambaran keterhubungan antar wilayah (kabupaten/kota) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti telah disampaikan pada bagian sebelumnya, bahwa angkutan penyeberangan sampai dengan saat ini merupakan moda transportasi andalan di provinsi kepulauan ini, maka pembahasan pada bagian ini juga difokuskan pada moda transportasi ini. Gambaran koneksitas terkait dengan pelayanan penyeberangan eksisting serta rencana pengembangannya disampaikan pada **Gambar 5**.

Direktoral LLASDP, Kementerian Perhubungan 2009, mengusulkan 15 lintasan penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dikembangkan pada perioda 25 tahun mendatang. Ke-15 lintas penyeberangan yang direncanakan tersebut, pada prinsipnya, merupakan hasil reduksi dari lebih kurang 30 lintas yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ke-15 lintas rencana tersebut adalah sebagai berikut:

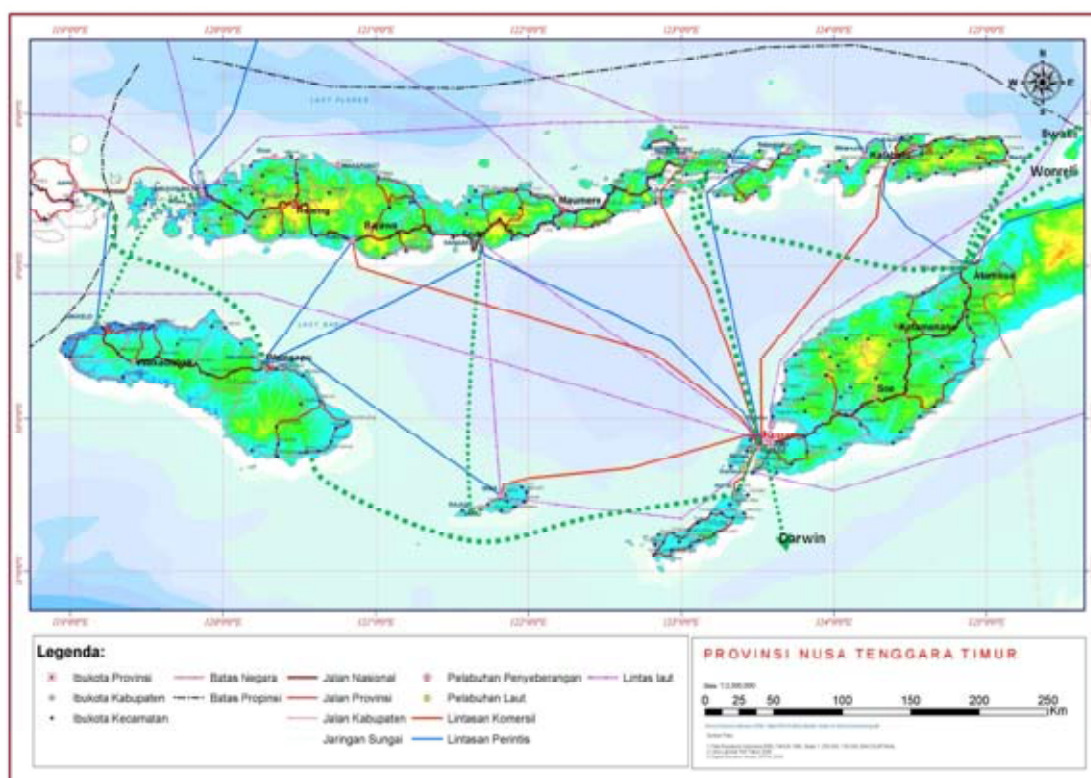
1	Kupang - Hansisi	10	Atapupu (P.Timor) - Wonreli (P.Kisar) Maluku
2	Tl.Gurita - Ilwaki	11	Ende - Raijua
3	Sabu - Raijua	12	Hansisi (P.Semau) - Pantai Baru (P.Rote)
4	Kalabahi - Ilwaki	13	Kupang - Adonara
5	Kupang - Darwin	14	Sulamu (P.Timor) - Kupang
6	Larantuka - P.Solor	15	Waikelo - Labuhan Bajo
7	Tl.Gurita - Maritaing		
8	Labuhan Bajo - P.Rinca		
9	Atapupu (P.Timor) - Ilwaki (P.Wetar)Maluku		

Terkait dengan isu konektivitas, terlihat bahwa untuk menghubungkan pulau-pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi mengidentifikasi kebutuhan sampai dengan 30 lintas penyeberangan tambahan. Namun demikian, Pemerintah Pusat (Dit. LLASDP), dengan beragam kriteria, menetapkan hanya 15 lintas penyeberangan yang masuk dalam daftar rencana rencana pengembangan LLASDP jangka panjang 25 tahun kedepan.

Dengan kata lain, keterhubungan antar pulau di Nusa Tenggara Timur menjadi sangat berat jika hanya mengandalkan moda angkutan penyeberangan. Selain harus menunggu dalam 25 tahun, juga ternyata tidak memenuhi kebutuhan secara lengkap (hanya 15 dari 30 yang dibutuhkan).

Untuk itu isu keterpaduan antar moda harus dikedepankan terkait dengan permasalahan koneksitas ini. Bagaimana lintas dan simpul penyeberangan yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan angkutan laut (maupun udara) dapat melengkapi kebutuhan koneksitas antar pulau di NTT merupakan harapan sekaligus (seharusnya) target pengembangan sistem transportasi wilayah di NTT. Dibutuhkan masterplan transportasi secara terpadu yang memiliki legalitas dan mendapat dukungan serta disepakati oleh semua stakeholders terkait.

Gambar 4 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Dit.LLASDP, Ditjendat, Departemen Perhubungan (2009)



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, SK Dirjen Hubdat No. SK.3454/AJ.204/DRJD/ 2008 tentang Trayek Perintis di Indonesia Tahun 2009.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat LLASDP, Cetak Biru Armada Penyeberangan, Laporan Akhir, Jakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat LLASDP, Cetak Biru Jaringan Layanan Penyeberangan, Laporan Akhir, Jakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat LLASDP, Cetak Biru Pelabuhan Penyeberangan, Laporan Akhir, Jakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat LLASDP, Mekanisme Dan Efektifitas Penyelenggaraan Transportasi Perintis ASDP, 2010, Materi Diskusi FGD Penyusunan Indeks Efektifitas Trasnportasi Perintis, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Lalulintas dan Angkutan Laut, Pola Penentuan Program Layanan Angkutan Laut Keperintisan Dalam Mendukung Terciptanya Konektivitas Nasional, 2010, Materi Diskusi FGD Penyusunan Indeks Efektifitas Trasnportasi Perintis, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Angkutan Udara, Mekanisme Dan Efektifitas Penyelenggaraan Transportasi Perintis ASDP, 2010, Materi Diskusi FGD Penyusunan Indeks Efektifitas Trasnportasi Perintis, Jakarta.
- Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan, Evaluasi Keberhasilan Penyelenggaraan Angkutan Perintis Periode 2005-2009, Laporan, Desember 2009.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 34 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis, Kementerian Perhubungan, Juni 2010.
- Perum Damri, Laporan Pelaksanaan Pendanaan Subsidi Operasional Bus Perintis Tahun 2000-2006.
- Kementerian Perhubungan, RPJMN Kementerian Perhubungan 2010-2014, 2010.

PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

DIREKTORAT PENGAIRAN DAN IRIGASI
email : air@bappenas.go.id

ABSTRAK

Perbedaan nilai pandang dan nilai manfaat, adanya aktor atau pemeran utama beserta peran kepentingan/kekuasaan terhadap air menyebabkan konflik pemanfaatan air. Kasus-kasus konflik pemanfaatan air sudah mulai terjadi di sebagian wilayah Pulau Jawa yaitu: (i) kasus Umbul Temanten di Kabupaten Sleman, DIY; (ii) kasus Umbul Betek di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah; (iii) kasus Umbul Cipaniis di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; (iv) kasus air irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Siman di Kabupaten Kediri, Jombang dan Malang, Jawa Timur; (v) kasus air irigasi pada DI Satan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan; (vi) kasus irigasi di Waduk Kedung Ombo yang areanya mencakup Kabupaten Sragen, Boyolali dan Grobogan, Jawa Tengah; dan (vii) kasus pembentukan Polisi Khusus Pengairan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Metodologi yang digunakan di dalam penyusunan studi ini meliputi kajian pustaka serta survei lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan melalui wawancara dan analisis deskriptif kualitatif. Pemilihan sampel lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah Jawa dan luar Jawa, sumber konflik dan keragaman pemangku kepentingan yang berkonflik.

Konflik yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut berpangkal pada perbedaan nilai pandang diantara para pemangku kepentingan. Nilai pandang yang sudah terbangun di suatu kelompok masyarakat sering berbeda dengan pandangan yang ada di pihak lain sehingga menjadi sumber konflik. Tujuan analisis konflik bagi pihak mediator adalah untuk mendapatkan gambaran jelas dinamika konflik yang terjadi sehingga dapat dipergunakan dalam menentukan strategi penyelesaiannya.

Hasil kegiatan studi ini menemukan bahwa perbedaan-perbedaan persepsi yang terjadi dapat dieliminir melalui dialog komunikasi secara kooperatif diantara pihak yang terlibat. Proses dialog akan lebih mudah terselesaikan apabila dimulai dengan adanya analisis yang komprehensif di segala aspek yang berkaitan dengan sumber konflik. Kesepakatan penyelesaian yang tercapai melalui dialog harus segera diikuti dengan sosialisasi dan pembuatan aturan terkait berdasarkan UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Lebih lanjut, agar UU No 7/2004 lebih dapat diimplementasikan maka beberapa Peraturan Pemerintah (PP) pendukung harus segera dikeluarkan, terutama PP tentang hak guna pakai dan hak guna usaha air yang terkait dengan pencegahan konflik. Selain itu PP tentang hak guna pakai dan hak guna usaha air juga perlu menyebutkan pengutamaan fungsi sosial.

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2009 beberapa ahli tentang sumber daya air telah membuat suatu daftar panjang tentang konflik sumber daya air yang terjadi di dunia (<http://www.worldwater.org/conflict/list/>). Di dalam daftar itu disebutkan bahwa konflik sumber daya air telah berlangsung sejak tahun 2500 SM (sebelum Masehi) di sebuah kerajaan kecil yang sekarang termasuk negara Irak. Sedangkan konflik terbaru dalam daftar itu terjadi di India pada tahun 2009. Dengan memahami daftar konflik sumber daya air tersebut maka dapat diketahui bahwa konflik dapat terjadi baik dalam skala nasional maupun internasional.

Di dalam daftar konflik sumber daya air tersebut, belum ada contoh kasus untuk Indonesia yang menjadi perhatian internasional. Tetapi di beberapa wilayah yang diindikasikan mempunyai potensi konflik sumberdaya air, kecenderungan timbulnya konflik semakin meningkat, yang disebabkan tiga hal yaitu: (i) terjadi peningkatannya permintaan akan air namun di sisi lain ketersediaan air justru menurun; (ii) proses perubahan tatanan sistem hukum di Indonesia akibat berlangsungnya reformasi sosial-politik yang belum selesai, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum baik pada aspek kebijakan maupun pelaksanaan; dan (iii) terjadi perubahan karakter sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang mendorong penurunan modal sosial masyarakat.

Secara sederhana konflik yang terjadi di tingkat nasional atau wilayah dapat dikategorikan menjadi beberapa tipologi, yaitu: (i) konflik antara masyarakat dengan negara; (ii) konflik antar pemerintah daerah; (iii) konflik antar masyarakat di satu wilayah dengan masyarakat di daerah lain; (iv) konflik antar pemakai termasuk juga perusahaan; dan (v) konflik antara masyarakat dengan kelompok industri. Meskipun satu konflik dapat digolongkan dalam satu macam tipologi tetapi sebetulnya pemicu konflik juga dapat bermacam-macam sebab.

Berdasarkan kajian kepustakaan, pada dasarnya konflik sumberdaya air mempunyai persoalan yang sangat luas dan rumit. Penyelesaian konflik harus dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan konteks penyebab konfliknya maupun kondisi masyarakatnya. Meskipun mempunyai karakter pemicu konflik yang sama tetapi cara penyelesaiannya dapat berbeda apabila terjadi di tempat lain. Secara empirik persoalan konflik sumber daya air muncul dan terpapar dimulai dari adanya pertentangan hak air sampai pada munculnya persaingan usaha pengelolaan dan distribusi air ke konsumen. Dikaitkan dengan era demokratisasi sekarang ini, konflik sumber daya air menjadi sangat penting karena para pihak yang terlibat dalam konflik selalu mengacu pada tafsir hukum yang berbeda. Oleh sebab itu sebelum potensi konflik itu semakin membesar maka pemerintah perlu melakukan suatu kajian tentang konflik pemanfaatan air di Indonesia, resolusi konflik serta landasan hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang terlibat konflik tersebut.

2. TUJUAN KAJIAN

Secara umum kajian ini bertujuan untuk memaparkan persoalan konflik sumber daya air dan cara penyelesaiannya. Sedangkan secara khusus kajian ini bertujuan :

1. Melakukan dokumentasi konflik sumber daya air yang pernah terjadi di Indonesia beserta cara penyelesaiannya;
2. Melakukan telaah sumber, penyebab, komponen indikator potensi dan cara pengukurannya;
3. Mendalami persoalan konflik sumberdaya air dengan melakukan kajian lapang dan melakukan analisis tentang dampak konflik, proses pencegahan dan penyelesaiannya;
4. Melakukan analisis penyiapan peraturan, pelaksana peraturan pencegah dan penanganan manajemen melalui pengelolaan konflik.

Diharapkan melalui kajian ini akan diperoleh gambaran tentang konflik sumberdaya air yang terjadi di Indonesia, cara penyelesaiannya, dan persiapan aturan hukum penyelesaian konflik sebagai salah satu upaya antisipasi. Secara lebih lanjut, gambaran konflik tersebut merupakan masukan bagi penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air untuk masa-masa mendatang.

3. METODOLOGI

3.1. KERANGKA ANALISIS

Kajian pustaka atau *desk* studi dilakukan untuk memperoleh inventarisasi konflik yang didokumentasikan secara sistematis untuk menggambarkan inti permasalahan konflik, para pihak yang terlibat, dan cara penyelesaian konflik. Selain itu juga dilakukan analisis secara empiris dengan melihat kondisi konflik, potensi konflik, dan pencegahan konflik serta penyelesaian konflik melalui upaya perkuatan aspek teknis, sosial, ekonomi, hukum dan kelembagaan. Untuk memperkaya bahasan, analisis komparasi melalui kajian pustaka dengan negara lain dapat dilakukan meski mempunyai sistem hukum berbeda.

3.2. METODE PELAKSANAAN KAJIAN

Berdasarkan kajian pustaka tentang ragam konflik sumberdaya air, dilakukan pendalaman dengan melakukan kajian lapang pada beberapa wilayah yang pernah atau sedang terjadi konflik sumber daya air sebagai sampel. Pemilihan sampel tersebut mempertimbangkan wilayah Jawa dan luar Jawa, sumber konflik dan keragaman pemangku kepentingan yang berkonflik. Wilayah Pulau Jawa seperti Jawa Barat/DKI, Jawa Tengah/DIY, Jawa Timur dan sebagian Sulawesi seperti Sulawesi Selatan merupakan wilayah intensitas dan kualitas yang tinggi antar pengguna sumber daya air. Pengumpulan data primer di wilayah kajian (sampel) dilakukan secara partisipatif dan wawancara mendalam tentang pemaknaan aturan hukum dan perundangan di beberapa tingkatan pengelolaan sumber daya air (Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat).

Beberapa kriteria penetapan sampel adalah sebagai berikut :

- i) sumber penyebab konflik;
- ii) intensitas dan kualitas konflik;
- iii) tipologi,

Sedangkan matrik lokasi kajian dan permasalahan konflik pemanfaatan air yang terjadi dipaparkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matrik Lokasi Kajian dan Permasalahan Konflik Pemanfaatan Air

Lokasi	Substansi	Masalah yang diamati	Aspek Legal
<i>Konflik pemanfaatan air untuk air minum</i>			
Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon	Konflik mata air sumber PDAM di 2 wilayah	Konflik antar Pemda dalam pemanfaatan sumber air, konflik badan pengelola Taman Nasional Gunung Ceremai (TNGC) dengan Pemerintah Daerah	MoU antara Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon tahun 2004, KepMenHut 424/2004 tentang penetapan TNGC
<i>Konflik pemanfaatan air untuk air minum dan irigasi</i>			
Provinsi DIY Konflik alokasi air di mata air	Umbul Temanten untuk air minum dan irigasi	Proporsionalitas pembagian alokasi air untuk PDAM dan irigasi, aspek sosial dampak alokasi air, dan isu privatisasi air	UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air PP No. 20/2006 tentang Irigasi, dan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Konflik pemanfaatan sumber mata air untuk kepentingan PDAM vs irigasi	Penguasaan mata air desa oleh PDAM Kabupaten Klaten tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat desa	UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air PP No. 20/2006 tentang Irigasi, dan UU No. 30/1999 tentang Arbitrase
<i>Konflik pemanfaatan air untuk petani tanaman pangan dan petani ikan</i>			
Provinsi Jawa Timur-Kabupaten Malang, Kediri dan Jombang (DI Siman)	Pengelolaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi-konflik petani tanaman dan petani ikan	Peran tokoh masyarakat, agama dan adat dalam penyelesaian konflik (petugas pengelola irigasi), dan cara penyelesaian konflik. Inspirasi perlunya kelembagaan pengawas air irigasi dan penyelesaian konflik pada daerah irigasi multiguna melalui penerapan PP No. 20/2006 tentang Irigasi	PP No. 20/2006 tentang Irigasi
Provinsi Sumatera Selatan-Kabupaten Musi Rawas (DI Satan)	Pengelolaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi-konflik petani tanaman dan petani ikan	Pemetaan konflik pemanfaatan air irigasi untuk tanaman dan budidaya ikan air deras yang intensif	PP No. 20/2006 tentang Irigasi
<i>Konflik pemanfaatan air untuk irigasi- kasus pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem dan jaringan irigasi</i>			
Provinsi Jawa Tengah- Kabupaten Grobogan	Intensitas Pengelolaan Operasi dan Pemeliharaan irigasi waduk Kedung Ombo	Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten	UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, UU No 32/2003 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
<i>Konflik pembentukan polisi khusus pengairan-studi kasus di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan</i>			
Provinsi Sulawesi Selatan – Kabupaten Sidrap	Prinsip adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan irigasi	Pembentukan Polisi khusus pengairan yang mempunyai kewenangan penyidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat	Hukum adat, Perda, dll

4. HASIL KAJIAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. TIPOLOGI DAN ANALISIS

Berdasarkan 5 (lima) tipologi konflik pemanfaatan air yaitu: 1) Konflik pemanfaatan air untuk air minum; 2) Konflik pemanfaatan air untuk air minum dan irigasi; 3) Konflik pemanfaatan air untuk petani tanaman pangan dan petani ikan; 4) Konflik pemanfaatan air untuk Irigasi-kasus pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem dan jaringan irigasi; serta 5) Konflik pembentukan polisi khusus pengairan-studi kasus di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, dipaparkan permasalahan dan faktor pemicu konflik serta analisis konflik yang terjadi termasuk arah konfliknya.

4.1.1. KONFLIK PEMANFAATAN AIR UNTUK AIR MINUM

Konflik pemanfaatan air sebagai sumber PDAM terjadi pada pemanfaatan mata air Cipaniis yang merupakan sumber air bagi PDAM Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Permasalahan dan faktor pemicu konflik dalam pemanfaatan air pada mata air Cipaniis tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan dan faktor pemicu munculnya konflik pemanfaatan air pada mata air Cipaniis.

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/pokok konflik	- Pemanfaatan sumber air di kawasan hutan pelestarian alam yang bertujuan untuk penyediaan air minum	- Adanya kompensasi pemanfaatan sumber air - Kurangnya pemahaman mengenai regulasi diantara para pemangku kepentingan - Kebijakan yang tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
2	Pokok sengketa	- Penguasaan secara fisik terhadap sumber air dalam kawasan hutan pelestarian alam	- Conflict of interest dan ego sectoral antar kelembagaan pemerintah yang dianggap menguntungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	Pihak yang terlibat	- Antar pemerintah daerah dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	- Kekosongan regulasi mengenai pemanfaatan sumber air
4	Bentuk konflik	- Konflik horisontal dan vertikal di tingkat penyelenggaraan pemerintahan: Pemkab Kuningan, Pemkot Cirebon, Taman Nasional Gunung Ceremai	- Tidak adanya kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
5	Tingkat kerumitannya	- Relatif rumit, karena terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi regulasi	

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air pada mata air Cipaniis Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dilakukan analisis konflik yang terjadi pada kasus tersebut dan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis konflik pemanfaatan mata air Cipaniis, Kab Cirebon, Jawa Barat

Profil	Penyebab	Aktor yang terlibat	Dinamika
<p>Politik berada di bawah kewenangan Pemkab Sleman</p> <p>Ekonomi bersifat sebagai komponen common pool resources (CPR), ada aspek pemanfaatan berbasis kebersamaan dan berorientasi sosial</p> <p>Sosial Budaya secara heritage sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar atas dasar asas sosial kemasyarakatan</p> <p>Wilayah yang paling berkepentingan wilayah Desa Umbulharjo</p>	<p>Struktural: perlindungan keadilan distribusi air bagi warga sekitar umbul karena Pemkab belum menerapkan regulasi resmi yang sudah ada sejak UU No. 11/1974 tentang Pengairan maupun UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air yang berkaitan dengan pengelolaan air</p> <p>Proximate: penerapan hasil Amdal yang hanya bersifat potret sementara rona wilayah setempat. Adanya tokoh lokal yang diangkat sebagai PNS Pemkab Sleman untuk dijadikan pengawas lapangan</p>	<p>PDAM (Sleman dan Kota Yogyakarta) dan swasta</p> <p>Tujuan dari pemanfaatan air Umbul Temanten adalah untuk air baku PDAM kedua wilayah pemerintahan dan lokasi wisata Kaliurang</p>	<p>Arah konflik saat ini sudah mereda dengan dibangunnya bak pembagi yang dilengkapi dengan alat ukur ke masing-masing pihak pemanfaat dan selalu dilakukan kalibrasi debit rutin yang disaksikan oleh semua pihak</p> <p>Peluang yang mungkin terjadi ke depan adalah karena hanya mengandalkan hasil AMDAL maka kekuatan hukumnya tidak ada. Kesepakatan yang sudah terjadi harus diperkuat dengan regulasi resmi dari pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan air</p>

4.1.2. KONFLIK PEMANFAATAN AIR UNTUK AIR MINUM DAN IRIGASI

Konflik pemanfaatan air untuk air minum dan irigasi dilakukan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Air Umbul Temanten yang terdiri dari Umbul Wadon dan Umbul Lanang di Kabupaten Sleman dimanfaatkan oleh PDAM Sleman, PDAM Tirtamarta Yogya sebagai sumber air minum, dan PT. Anindya Kaliurang untuk kepentingan pariwisata alam pegunungan, serta masyarakat Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan sebagai air irigasi dan keperluan lainnya. Paparan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air Umbul Temanten disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Faktor pemicu munculnya permasalahan konflik di Umbul Temanten.

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/pokok konflik	- Pengelolaan (mengatur, menetapkan dan memberi ijin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan) sumberdaya air sesuai kewenangan yang dimiliki (Pekab Sleman)	- Belum adanya regulasi daerah mengenai pengelolaan sumberdaya air - Belum berjalannya forum koordinasi pengelolaan air seperti Komisi Irigasi - Penyediaan air minum kepada masyarakat
2	Pokok sengketa	- Sengketa pemanfaatan air - Sengketa struktural. Masyarakat petani lokal wilayah Temanten (Umbul Wadon & Lanang) yang dianggap menempati struktur sosial bawah berhadapan dengan struktur masyarakat pebisnis yang berlandung pada pemerintah daerah	- Pembagian air yang belum berdasarkan pada regulasi yang ada (UU & PP) - Kekuasaan yang dimiliki oleh salah satu pihak pemangku kepentingan
3	Para pihak yang terlibat	- Masyarakat desa dengan pelaku bisnis yang berlandung pada pemerintah daerah	- Konflik terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
4	Bentuk konflik	- Konflik antar strata masyarakat Desa Umbulharjo dan wilayah Cangkringan dengan pengelola air minum Kab Sleman dan taman wisata Kaliurang - Konflik vertikal, antara petani tanaman pangan dan BUMD pengelola air minum	- Instrumen hukum: ketetapan mengenai ijin pengusahaan air.
6	Tingkat kerumitannya	- Konflik yang rumit karena menyangkut BUMD untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat	

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu munculnya konflik di Umbul Temanten Kabupaten Sleman, dilakukan analisis terhadap konflik yang terjadi dan disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Analisis konflik pemanfaatan air Umbul Temanten, Kabupten Sleman, DIY

Profil	Penyebab	Aktor yang terlibat	Dinamika
<ul style="list-style-type: none"> - Politis: berada di bawah kewenangan Pemkab Sleman - Ekonomi: bersifat sebagai komponen <i>common pool resources</i> (CPR), ada aspek pemanfaatan berbasis kebersamaan dan berorientasi sosial - Sosial-budaya: secara <i>heritage</i> sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar atas dasar asas sosial kemasyarakatan - Wilayah yang paling berkepentingan: wilayah Desa Umbulharjo 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktural: perlindungan keadilan distribusi air bagi warga sekitar umbul karena Pemkab belum menerapkan regulasi resmi yang sudah ada sejak UU No. 11/1974 tentang Pengairan maupun UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air yang berkaitan dengan pengelolaan air - Proximate: penerapan hasil Amdal yang hanya bersifat potret sementara rona wilayah setempat. Adanya tokoh lokal yang diangkat sebagai PNS Pemkab Sleman untuk dijadikan pengawas lapangan - Faktor yang memperpanjang konflik: munculnya permintaan pelanggan PDAM di wilayah Kabupaten Sleman maupun Kota Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - PDAM (Sleman dan Kota Yogyakarta) dan swasta - Tujuan dari pemanfaatan air Umbul Temanten adalah untuk air baku PDAM kedua wilayah pemerintahan dan lokasi wisata Kaliurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Arah konflik saat ini sudah mereda dengan dibangunnya bak pembagi yang dilengkapi dengan alat ukur ke masing-masing pihak pemanfaat dan selalu dilakukan kalibrasi debit rutin yang disaksikan oleh semua pihak - Peluang yang mungkin terjadi ke depan adalah karena hanya mengandalkan hasil AMDAL maka kekuatan hukumnya tidak ada. Kesepakatan yang sudah terjadi harus diperkuat dengan regulasi resmi dari pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan air

Sumber air di Umbel Betek (Umbul Lanang) di Deda Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Klaten sebagai sumber air minum dan masyarakat Desa Malangjiwan Klaten sebagai air irigasi dan keperluan lainnya. Paparan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air di Umbul Betek Kabupaten Klaten disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Permasalahan dan Faktor pemicu munculnya konflik di Umbul Betek, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/ pokok konflik	Perebutan pemanfaatan sumber air . antara pihak masyarakat desa sebagai pemangku wilayah mata air yang berlangsung secara turun-menurun dengan pemerintah kabupaten yang diwakili oleh PDAM Klaten	Persaingan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dalam pemanfaatan sumber air Kurang akses pada sumber air untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan irigasi
2	Pokok sengketa	Penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber air Umbul Betek di Desa Malangjiwan oleh PDAM Kab Klaten	Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap fungsi ekonomi sumber daya air
3	Pihak yang terlibat	PDAM Kab Klaten sebagai BUMD dengan masyarakat Desa Malangjiwan dan para petani pemanfaat air dari Umbul Betek	
4	Bentuk konflik	Konflik vertikal, yaitu pihak pemerintah daerah dengan masyarakat.	Kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan belum berjalannya forum koordinasi pengelolaan sumberdaya air seperti Komisi Irigasi
6	Tingkat kerumitannya	Timbulnya Ketidakpercayaan terhadap pengelolaan SDA oleh Pemerintah Kabupaten Klaten	

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemantauan air di Umbul Betek Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, dilakukan analisis terhadap konflik yang terjadi dan disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Analisis konflik pemanfaatan air Umbul Betek, Klaten, Jawa Tengah

Profil	Penyebab	Aktor yang terlibat	Dinamika
<p>Politik: berada di bawah kewenangan Pemkab Klaten</p> <p>Ekonomi: bersifat sebagai komponen <i>Common Pool Resources</i> (CPR), ada aspek pemanfaatan berbasis kebersamaan dan berorientasi sosial</p> <p>Sosial-budaya: secara <i>heritage</i> sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat sekitar atas dasar asas sosial kemasyarakatan</p> <p>Wilayah yang paling berkepentingan: wilayah Desa Malangjiwan</p>	<p>Struktural: kurangnya alokasi air bagi warga sekitar umbul Betek, karena Pemkab belum melakukan alokasi air secara proporsional sesuai keperluan sesuai dengan UU No 7/2004 tentang Sumber daya Air dan PP No. 20/2006 tentang Irigasi</p> <p>Proximate: pemanfaatan air umbul Betek sebagai air baku PDAM Klaten dengan dalih pemenuhan air yang higienis bagi kebutuhan rumah tangga perkotaan</p> <p>Faktor yang memperpanjang konflik: meningkatnya permintaan pasokan PDAM untuk memenuhi bertambahnya pelanggan</p>	<p>PDAM Klaten</p> <p>Tujuan dari pemanfaatan air Umbul Betek adalah untuk air baku PDAM Klaten</p>	<p>Arah konflik saat ini belum selesai karena sumber mata air Umbul Betek ditutupi oleh bangunan pengambilan dan dipagar. Masyarakat sekitar hanya diberi sebagian kecil sisa air yang keluar dari sumber. Pihak masyarakat masih berupaya menuntut hak-haknya melalui sekelompok perwakilan warga mulai dari sekitar umbul sampai 4 km ke arah hilir</p> <p>Peluang yang mungkin terjadi ke depan adalah dipertemukannya pihak PDAM dengan Dinas SDA Provinsi Jateng, Dinas SDA Kabupaten Klaten dan masyarakat pemanfaat air Umbul Betek mulai hulu sampai hilir untuk mencapai kesepakatan berbasis UU yang berlaku saat ini</p>

4.1.3. KONFLIK PEMANFAATAN AIR UNTUK PETANI TANAMAN PANGAN DAN PETANI IKAN

Pengamatan konflik pemanfaatan air untuk petani tanaman pangan dan petani ikan dilakukan di 2 (dua) wilayah yaitu: 1) Daerah Irigasi (DI) Siman di Provinsi, Jawa Timur, dan 2) DI Saten di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Konflik pemanfaatan air untuk irigasi di DI Siman yang meliputi Kabupaten Kediri, Jombang dan Malang akibat munculnya usaha budidaya ikan pada DI tersebut, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara petani pembudidaya tanaman dengan petani pembudidaya ikan. Permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air di DI Siman sebagaimana tercantum dalam Tabel 8.

Tabel 8. Permasalahan dan faktor pemicu munculnya konflik pemanfaatan air di DI Siman Kabupaten Kediri, Malang dan Jombang, Jawa Timur.

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/pokok konflik	Kebijakan pemerintah daerah tentang pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan perikanan Kebijakan otonomi daerah untuk mendorong kesejahteraan petani dan peningkatan PAD berbasis pertanian Kebijakan penerapan RTRW yang belum sesuai	Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar struktural dalam satuan kerja perangkat daerah Kurang berjalannya proses perencanaan yang lintas sektoral
2	Pokok sengketa	Perbedaan persepsi tentang tata nilai, dimana petani tanaman pangan menjunjung prinsip kebersamaan dengan aspek sosial yang tinggi dan profesi petani sebagai jalan hidup bukan sebagai sumber bisnis. Sementara petani ikan bernuansa individu, padat modal, berorientasi bisnis. Perbedaan persepsi struktural, dimana petani tanaman pangan berasal dari struktur masyarakat yang lebih tinggi strata sosial-ekonominya yang didukung oleh struktur birokrasi, namun petani ikan merupakan ekonomi padat modal sehingga didukung oleh pemodal sehingga merupakan potensi baru PAD. Perbedaan persepsi tentang tata-hubungan. Terjadi karena hubungan sosial antar generasi petani. Petani generasi muda berorientasi bisnis, dinamis melawan petani generasi tua bermodal sedikit pendidikan maupun finansial.	
3	Para pihak yang terlibat	Konflik antar petani dan dinas pemerintahan. Konflik diantara petani tanaman pangan dan ikan berimbang kepada konflik dinas pengairan dan perikanan. Konflik antar wilayah, yaitu petani wilayah hulu dan tengah dengan petani wilayah hilir.	Ego/kepentingan sektoral/ dinas dan tingkat kemampuan pemahaman dalam mengintegrasikan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi
4	Bentuk konflik	Konflik antar kelompok yaitu: kelompok petani ikan dengan petani tanaman pangan dalam satu wilayah dan kelompok hulu-tengah dengan kelompok hilir yang saling berbeda kabupaten; dan konflik antar dinas yaitu: dinas pengairan dan dinas perikanan Konflik vertikal, antara petani tanaman pangan dan dinas perikanan yang memfasilitasi cara pengambilan air petani ikan yang tidak sesuai dengan kewenangannya Konflik horisontal terjadi antara kelompok tani petani tanaman pangan dan ikan serta petani hulu-tengah dengan petani hilir DI Siman	Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan hak privilegasi bagi petani ikan Ikan menjadi komoditi superior dibanding tanaman pangan
5	Tingkat kerumitannya	Konflik yang cukup rumit karena terkait dengan pola budidaya yang berbeda, topografi yang berbeda, dan wilayah administratif yang berbeda	

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air akibat munculnya usaha budidaya ikan di DI Siman yang meliputi Kabupaten Kediri, Jombang dan Malang dilakukan analisis konflik yang terjadi atas kasus perebutan air irigasi DI Siman yang disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9. Analisis konflik pemanfaatan air irigasi DI Siman di Kabupaten Kediri, Jombang dan Malang, Jawa Timur

Profil	Penyebab	Aktor yang terlibat	Dinamika
<ul style="list-style-type: none"> - Politis: berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat - Ekonomi: bersifat sebagai komponen <i>Common Pool Resources</i> (CPR) yang lebih terfokus kepada hak guna air untuk irigasi tanaman pangan - Sosial-budaya: dimanfaatkan untuk pemenuhan air budidaya tanaman pangan karena hampir 90 % petani pemanfaat adalah berbasis tanaman pangan - Wilayah yang paling berkepentingan: wilayah hilir DI Siman (di Kab Jombang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktural: perlindungan keadilan distribusi air bagi petani tanaman pangan karena Pemkab belum mengeluarkan Perda sebagai pelaksanaan UU No. 7/2004 dan PP No. 20/2006 dan/atau Pemkab belum menerapkan kedua regulasi tersebut pada tingkat kabupaten - Proximate: pemberian ijin dari provinsi atas pemanfaatan air irigasi untuk petani ikan yang tidak berkoordinasi dengan pihak kabupaten - Faktor yang memperpanjang konflik: belum adanya kelembagaan gabungan petani tanaman dan ikan seperti yang diamanatkan dalam PP No 20/2006. Adanya penggalian bahan galian C di bantaran saluran primer yang mendorong rusaknya saluran primer DI Siman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani ikan bermodal yang didukung oleh program peningkatan gizi dan merupakan sumber baru PAD kabupaten - Tujuan dari pemanfaatan air adalah untuk meningkatkan pendapatan petani ikan tanpa dilandasi pemahaman pemanfaatan air irigasi berbasis konsep <i>Common Pool Resources</i> (CPR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Arah konflik saat ini sudah mereda dengan dibentuknya forum koordinasi DI yang didasarkan pada pemanfaatan multiguna sesuai dengan Ps. 11 PP 20/2006. Pembentukan dilakukan melalui proses mediasi yang berlangsung secara intensif selama kurun waktu hampir 2 tahun. Proses mediasi diprakarsai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas dengan cara meminta bantuan kepada pihak Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Forum Koordinasi petani tanaman dan ikan yang terbentuk sudah dilibatkan dalam kegiatan Komisi Irigasi tingkat kabupaten

Konflik perebutan pemanfaatan air untuk keperluan petani tanaman pangan dan petani ikan terjadi di DI Saten, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air pada DI Saten tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10. Permasalahan dan faktor pemicu munculnya konflik air irigasi di Di Saten Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/pokok konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan perikanan daerah - Kebijakan otonomi daerah untuk mendorong kesejahteraan petani dan peningkatan PAD berbasis pertanian - Kebijakan penerapan RTRW yang belum konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksinkronan dan kurangnya koordinasi antar struktural dalam satuan kerja perangkat daerah - Kurang berfungsinya perencanaan di daerah
2	Pokok sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan persepsi tentang tata nilai petani tanaman pangan yang bernuansa kebersamaan dengan aspek sosial yang tinggi dan persepsi petani adalah sebagai jalan hidup bukan sebagai sumber bisnis, dengan petani ikan yang bernuansa individu, padat modal, berorientasi bisnis. - Perbedaan persepsi struktural. Petani tanaman pangan berasal dari struktur masyarakat yang lebih tinggi strata sosial-ekonominya yang didukung oleh struktur birokrasi karena dianggap menguntungkan PAD dan mensejahterakan (kelompok khusus) petani - Perbedaan persepsi tentang tata-hubungan. Terjadi karena hubungan sosial antar generasi petani. Petani generasi muda berorientasi bisnis, dinamis melawan petani generasi tua bermodal sedikit pendidikan maupun finansial. 	-
3	Para pihak yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik antar petani yang memicu konflik antar dinas. Konflik diantara petani tanaman pangan dan ikan berimbas kepada konflik dinas pengairan dan perikanan. - Konflik antar wilayah, yaitu petani wilayah hulu dan tengah dengan petani wilayah hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kemampuan pemahaman dalam menginterpretasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi
4	Bentuk konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik antar kelompok atau konflik horisontal, yaitu kelompok petani ikan dengan petani tanaman pangan dalam satu wilayah dan kelompok hulu-tengah dengan kelompok hilir - Konflik vertikal, antara petani tanaman pangan dan dinas perikanan yang memfasilitasi cara pengambilan air petani ikan yang tidak sesuai kewenangannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan hak <i>privelage</i> bagi petani ikan - Ikan menjadi komoditi superior dibanding tanaman pangan
5	Tingkat kerumitannya	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik yang cukup rumit karena melibatkan antar kelompok baik yang menyangkut komoditi maupun kewilayahan, dan antara masyarakat dengan dinas, serta antar dinas yang terkait dengan komooditi yang diusahakan oleh kelompok masyarakat. 	

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air antara petani tanaman pangan dan petani ikan di Di Saten Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dilakukan analisis konflik yang terjadi atas kasus tersebut dan disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Analisis konflik pemanfaatan air irigasi DI Saten, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

Profil	Penyebab	Aktor yang terlibat	Dinamika
<ul style="list-style-type: none"> - Politik: berada di bawah kewenangan Provinsi - Ekonomi: bersifat sebagai komponen <i>Common Pool Resources</i> (CPR) yang lebih terfokus kepada hak guna air untuk irigasi tanaman pangan - Sosial-budaya: hampir seluruhnya merupakan petani tanaman pangan, sehingga sebagian besar air irigasi dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan - Terjadinya kerusakan jaringan primer dan menurunnya jatah air di bagian hilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktural: perlindungan keadilan distribusi air bagi petani tanaman pangan karena Pemkab belum menerapkan regulasi resmi UU No 7/2004 tentang Sumberdaya Air & PP No 20/2006 tentang Irigasi - Proximate: pemberian ijin dari provinsi atas pemanfaatan air bagi petani ikan yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten - Faktor yang memperpanjang konflik: belum adanya kelembagaan gabungan petani tanaman dan ikan seperti yang diamanatkan dalam PP No 20/2006 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani ikan bermodal dan sebagiannya merupakan mantan pejabat provinsi maupun kabupaten yang didukung oleh program peningkatan gizi dan sebagai sumber baru PAD kabupaten - Tujuan dari pemanfaatan air adalah untuk meningkatkan pendapatan petani ikan tanpa dilandasi pemahaman pemanfaatan air irigasi berbasis konsep <i>Common Pool Resources</i> (CPR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Arah konflik saat ini belum mereda. Belum ada inisiatif dari Pemerintah Provinsi yang telah memberikan ijin pemanfaatan air dan belum adanya inisiatif Pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan dialog dan komunikasi antar <i>stakeholder</i> yang berkepentingan.

4.1.4. KONFLIK PEMANFAATAN AIR UNTUK IRIGASI—KASUS PELAKSANAAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DAN JARINGAN IRIGASI

Konflik pemanfaatan air untuk irigasi pada daerah hulu tengah dan hilir dilakukan pada Irigasi Waduk Kedung Ombo di Provinsi Jawa Tengah.

Konflik pemanfaatan air antara petani bagian hulu, tengah dan hilir terjadi pada irigasi Waduk Kedung Ombo yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (Balai PSDA) Seluna (Sungai Serang, Lusi dan Juwana) Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan dan faktor pemicu konflik pemanfaatan air pada irigasi Waduk Kedung Ombo yang dikelola oleh Balai PSDA Seluna tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Permasalahan dan faktor pemicu munculnya konflik pada pengelolaan Irigasi Waduk Kedung Ombo oleh Balai PSDA Seluna.

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/pokok konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dekonsentrasi - Air irigasi dan sistem manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan air pada jaringan irigasi dan belum optimalnya sistem pengelolaan irigasi - Kerusakan infrastruktur pada sistem dan jaringan irigasi - Respon pemerintah pusat rendah terhadap permasalahan irigasi di daerah - Belum berjalannya forum koordinasi pengelolaan air seperti Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air (TKPSDA)
2	Pokok sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terganggunya distribusi air irigasi
3	Pihak yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> - Petani hulu, tengah dan hilir - Petani dengan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya koordinasi dalam pengelolaan sistem dan jaringan irigasi
4	Bentuk konflik	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik horisontal antar petani pemanfaat air - Konflik vertikal antara petani dan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegagalan sistem pelayanan pengelolaan irigasi dalam pemerataan distribusi air
5	Tingkat kerumitannya	<ul style="list-style-type: none"> - Cukup rumit karena terkait dengan menurunnya pasokan air dari Waduk Kedung Ombo pada musim kemarau dan belum optimalnya pelaksanaan operasi dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan komponen utama tata laksana air irigasi yang baik (<i>good water governance</i>) - Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi - Lemahnya fungsi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan air irigasi

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu konflik pemantaaran air antara petani bagian hulu, tengah dan hilir terjadi pada irigasi Waduk Kedung Ombo yang dikelola oleh Balai PSDA Seluna, dilakukan analisis konflik atas kasus tersebut yang disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Analisis konflik pemanfaatan air irigasi Kedung Ombo, Jawa Tengah

Profil	Penyebab	Aktor yang terlibat	Dinamika
<ul style="list-style-type: none"> - Politik: Pengelolaan Waduk Kedung Ombo sebagai sumber air irigasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat - Ekonomi: air irigasi bersifat sebagai komponen <i>Common Pool Resources</i> (CPR) yang lebih terfokus kepada hak guna air untuk irigasi tanaman pangan - Sosial-budaya: dimanfaatkan untuk pemenuhan air budidaya tanaman pangan mulai dari wilayah Kabupaten Purwodadi, Demak sampai Pati - Wilayah yang paling berkepentingan: wilayah hilir 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktural: Menurunnya kapasitas Waduk Kedung Ombo, dan belum optimalnya alokasi air irigasi secara proporsional, serta keterbatasan Pemerintah Pusat dalam Operasi dan Pemeliharaan sistem dan jaringan irigasi - Proximate: Adanya pengambilan air secara bebas untuk keperluan pertanian yang menggunakan pompa pada saluran primer yang secara tidak langsung memperoleh perlindungan dari Pemkab dengan alasan mensejahterakan petani - Faktor yang memperpanjang konflik: belum adanya koordinasi secara terpadu dalam pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan sistem dan jaringan irigasi dan belum intensifnya dialog dan komunikasi antar kelompok petani pada masing-masing wilayah dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Petani tanaman sepanjang aliran air irigasi Kedung Ombo dan pemkabnya - Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Arah konflik saat ini sudah mereda dengan dibentuknya perkumpulan petani pompa yang hanya diperbolehkan mengoperasikan pompa pada waktu-waktu tertentu setelah jadwal giliran sudah terpenuhi, namun sebagai akibatnya masih ada lahan-lahan yang belum terairi

4.1.5. KONFLIK PEMBENTUKAN POLISI KHUSUS PENGAIRAN–STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDRAP, PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pengamatan konflik pembentukan polisi khusus dilakukan di Kabupaten sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

Keberlanjutan tugas pengamanan pembangunan jaringan irigasi oleh pegawai cabang Dinas Pengairan Kabupaten Sidrap sebagai personel polisi satuan khusus terus dilakukan. Pada masa pasca pembangunan jaringan irigasi, pegawai Cabang Dinas Pengairan yang merupakan personel polisi satuan khusus tersebut diberi tugas melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Pemasalahan dan faktor pemicu munculnya kebutuhan dan keinginan pembentukan pembentukan kelembagaan, penunjukan petugas pengawas dan pengelola air (Polisi Khusus Pengairan) di Kab Sidrap, Sulawesi Selatan tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Permasalahan dan faktor pemicu munculnya pembentukan kelembagaan, penunjukan petugas pengawas dan pengelola air (Polisi Khusus Pengairan) di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.

No	Aspek	Uraian	Faktor
1	Bidang/pokok konflik	- Pembentukan kelembagaan polisi khusus pengairan	- Pembentukannya belum diikuti oleh landasan hukum yang kuat, meskipun secara legal dimungkinkan pembentukan polisi khusus pengairan tersebut
2	Pokok sengketa	- Tidak mempunyai kompetensi dalam penindakan pelanggaran pada jaringan irigasi	- Karena hanya dilatih dalam hal penyidikan secara singkat dan memang belum ada contoh penyidikan pada jaringan irigasi
3	Pihak yang terlibat	- Pemerintah Kabupaten (Dinas Pengairan) dan masyarakat pemanfaat air	- Inisiatif Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk membentuk polisi khusus pengairan perlu diapresiasi dan perlu untuk dikaji sebagai bahan diskusi untuk inisiasi pembentukan lembaga tersebut pada level nasional
4	Bentuk konflik	- Peran dan legitimasi lembaga	- Peran lembaga yang diperlukan oleh masyarakat namun kinerjanya masih kurang dan kurang mendapatkan dukungan lebih lanjut menimbulkan konflik tersendiri baik dalam lembaga tersebut maupun di masyarakat
5	Tingkat kerumitannya	- Cukup rumit, karena merupakan pioner/pilot project dalam pembentukan polisi khusus pengairan. - Secara nasional pembahasan diperlukannya kelembagaan yang mempunyai fungsi pengawasan dan penyidikan pada pengelolaan sumber daya air belum dilakukan. - Namun secara legal ada peluang untuk melakukan pembentukan lembaga tersebut	- Secara nasional belum ada kebijakan pembentukan polisi khusus pengairan

Berdasarkan permasalahan dan faktor pemicu pembentukan polisi khusus pengairan di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan analisis konflik dan faktor pemicu munculnya pembentukan kelembagaan tersebut. Hasil analisis konflik dan faktor pemicu disajikan secara naratif sebagai berikut:

Kegiatan dimulai dengan pembuatan surat kesepakatan kerjasama antara Dinas Pengairan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk melatih pegawai Cabang Dinas Pengairan Kab. Sidrap dalam pendidikan polisi khusus. Pegawai-pegawai yang lulus pendidikan kemudian ditempatkan pada Ranting Dinas/Pengamat Pengairan untuk menjalankan tugas kesehariannya mengawal pelaksanaan kegiatan proyek. Setelah proyek berakhir satuan polisi khusus pengairan bertugas melakukan pengawalan implementasi kegiatan O&P sehari-hari di setiap wilayah Ranting Dinas yang berada di bawah otorita Irigasi Saddang;

Melihat manfaat fungsi dan dinamika perkembangan masalah O&P sehari-hari di lapangan maka pihak Dinas Pengairan Provinsi Sulawesi Selatan meningkatkan fungsi polisi khusus pengairan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui tambahan pendidikan khusus di Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan sehari-hari keberadaan Polisi Khusus dan PPNS sangat membantu masyarakat pengguna air irigasi apabila ada permasalahan yang sudah tidak dapat diselesaikan di tingkat petani. Hal yang menjadikan belum dapat diterapkannya model polisi khusus pengairan dari Sulawesi Selatan ke daerah lain adalah belum adanya payung hukum yang jelas dalam UU No 7/2004. Pada Bab XV Pasal 93 UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air disebutkan bahwa tugas-tugas penyidikan selain dilakukan oleh aparat Polri juga dapat dilakukan oleh PPNS namun bukan oleh Polisi Khusus.

4.2. PEMBAHASAN

Sebagai tindak lanjut dari amanah konstitusi Ps. 33 UUD 1945 khususnya terkait dengan pengelolaan air maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Dengan diberlakukannya UU SDA ini, negara mengakui telah terjadi perubahan dalam pemanfaatan sumber daya air, sehingga disebutkan bahwa sumber daya air memiliki berbagai fungsi (fungsi sosial, fungsi lingkungan, dan fungsi ekonomi). Hal ini, ditunjukkan dengan diperkenalkannya hak guna air yang terdiri atas hak pakai air dan hak guna usaha air. Keduanya harus dilaksanakan dengan dilandaskan pada terciptanya kelestarian sumber daya air itu sendiri. Oleh karena dalam pelaksanaan UU SDA mengemban tiga kepentingan yang saling bersaing yang telah diantisipasi dengan melakukan pembatasan dengan ditetapkannya prioritas utama penggunaan air

bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian. Dengan demikian, negara mengakui sumber daya air sebagai bentuk *common pool resources* (CPR), menjamin untuk terlaksananya pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya air bagi seluruh pengguna.

Dalam tataran operasional, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan yang lebih rinci dan operasional. Secara substantif peraturan pemerintah sebagai operasionalisasi UU SDA seharusnya memunculkan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat banyak dengan menghindarkan terjadinya ekskluditas dari pengguna sumber daya air. Pemaknaan mengenai fungsi sumber daya air seperti pada PP No.43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, disebutkan bahwa dalam melaksanakan hak guna air memperhatikan fungsi sosial. Padahal, dalam UU SDA menyebutkan mengutamakan fungsi sosial. Bahkan PP yang diperlukan untuk mengatur lebih lanjut undang-undang tersebut belum cukup, tercatat baru 4 PP yang berhasil dibuat. PP yang sangat strategis mengingat terkait dengan kebutuhan dasar manusia yakni PP tentang Hak Guna air sangat diperlukan dan harus segera dibuat. Hal ini penting sekali sebab tanpa peraturan pelaksana maka dalam tataran implementasi UU SDA akan mengalami kendala besar. Akibatnya, Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak mempunyai landasan yang kuat dalam memutuskan kebijakan. Selain itu, UU SDA akan dimaknai sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara pragmatis sesuai dengan munculnya gejala cara berpikir yang tidak bersifat komprehensif diantara para penentu kebijakan.

Dari keterangan diatas, menunjukkan bahwa adanya reduksi pemahaman, ketidakjelasan dan kekosongan hukum dalam tataran peraturan pelaksana dapat membuat para pemangku kepentingan memaknai sumber daya air sesuai dengan kepentingannya. Selain itu, dari studi menunjukkan bahwa ternyata amat sulit bagi Pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan sosial, lingkungan dan ekonomi ketika Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari konflik-konflik yang teridentifikasi tersebut, penyelesaian konflik dilakukan dengan :

1. Mediasi, dimana yang menjadi mediator adalah pemerintah daerah sendiri dengan memanggil para pihak yang berkonflik;
2. Konsiliasi. Konsiliasi, dilakukan sebagai hasil dari mediasi dimana para pihak dalam keputusannya kemudian membentuk semacam forum yang dibentuk atas kesepakatan bersama yang nantinya akan menjadi sarana untuk komunikasi antar pemanfaat sumberdaya air, dan juga sebagai tempat untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah perebutan pemanfaatan air;
3. Negosiasi. Dimana para pihak yang berkonflik bertemu untuk saling menurunkan tuntutan serta mencari titik temu dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan hasil survei lapangan menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat lebih memilih proses penyelesaian konflik melalui cara musyawarah baik dengan mediasi maupun negosiasi dan menempatkan penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir. Hal ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh UU SDA dimana proses-proses penyelesaian konflik dilakukan di luar pengadilan meskipun dalam UU SDA terminologi yang dipakai adalah arbitrase. Walaupun dalam kerangka hukum mekanisme arbitrase merupakan terminologi yang jauh berbeda maknanya dengan yang dimaksud mediasi/konsiliasi ataupun negosiasi. Disebutkan disitu bahwa penyelesaian konflik yang terjadi dilakukan dengan arbitrase. Meskipun semangat yang diacu dalam penyelesaian konflik sudah sama yakni mengedepankan musyawarah.

Dalam kasus Umbul Temanten, walaupun proses yang dipilih dalam penyelesaian masalah telah benar tetapi dasar hukum yang dipakai bukanlah UU SDA namun menggunakan hukum lingkungan dengan AMDAL sebagai *entry point*. Dalam perspektif UU SDA, penyelesaian kasus tersebut patut disayangkan. Mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, kasus tersebut diatas merupakan proses pembelajaran dalam penyelesaian konflik sumber daya air di masa yang akan datang.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan di tujuh (7) wilayah sampel, dapat diidentifikasi bahwa penyebab konflik yang ada sebagai berikut:

1. Terjadi eksploitasi yang berlebihan oleh salah satu pihak pengguna air. Eksploitasi dalam hal ini dilakukan oleh PDAM atas nama BUMD maupun oleh salah satu pengguna air (swasta).
2. Adanya penguasaan fisik secara sepihak oleh PDAM, sehingga menutup akses sosial-budaya masyarakat untuk memanfaatkan air sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan sudah merupakan bentuk heritage;

3. Adanya kepentingan untuk Pemasukan Anggaran Daerah (PAD) dari sektor pelayanan umum air minum (PAM maupun air dalam kemasan) dan perikanan yang lebih mempunyai nilai ekonomis dibandingkan dengan sektor pertanian;
4. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam hal perencanaan program masing-masing di tingkat Kabupaten/Kota yang mengarah munculnya ego sektoral. Ego sektoral program instansi di Kabupaten/Kota makin menguat salah satunya sebagai efek negatif program pemilihan kepala daerah;
5. Kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan timbulnya kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab terutama dalam hal pendanaan untuk pemeliharaan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak.
6. Ketidapkahaman tentang tugas dan wewenang, hak dan kewajiban instansi pemerintah beserta masyarakat yang terlibat, selain menimbulkan masalah tanggung jawab juga menimbulkan perebutan sumber daya alam antar daerah. Hal ini terjadi karena bergesernya penyelenggaraan pemerintah dari sentralistik ke desentralisasi yang berakibat bergeser pula pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang tidak diikuti kesiapan dalam penyelenggaraan sumber daya air.
7. Masih terjadi kekosongan hukum yakni belum dibuatnya PP yang diminta oleh UU SDA.

Dari konflik-konflik yang teridentifikasi tersebut, penyelesaian konflik dilakukan dengan :

1. Mediasi. dimana yang menjadi mediator bisa berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah dengan memanggil para pihak yang berkonflik.
2. Konsiliasi. Konsiliasi, dilakukan sebagai hasil dari mediasi dimana para pihak yang bersengketa dalam keputusannya kemudian membentuk semacam forum atas kesepakatan bersama dan nantinya akan menjadi sarana untuk berkomunikasi antar pemanfaat sumber daya air. Forum juga berfungsi sebagai tempat untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan sengketa pemanfaatan air.
3. Negosiasi. Dimana para pihak yang berkonflik bertemu untuk saling menurunkan tuntutan serta mencari titik temu dalam menyelesaikan masalah.

5.2. Rekomendasi

1. Perlu dikeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan UU SDA.
2. Perlunya kesamaan dalam pemahaman dan pemaknaan hukum yang mengatur hak guna air.
3. Koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
4. Mengefektifkan forum komunikasi sumber daya air seperti Komisi Irigasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA).
5. Perlunya sistem pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan lebih meningkatkan peranserta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernethy, C.L. 1992. Sustainability and Growth. Dalam *Irrigated Agriculture in Southeast Asia beyond 2000*. Franz Heim dan Charles L. Abernethy, eds. IIMI-DSE. Langkawi, Malaysia. Hal. 63-73.
- Falkenmark, M. 1998. *Society's Interaction with the Water Cycle: A Conceptual Framework for a More Holistic Approach*. . Dalam *Hydrological Sciences Journal*. Zbigniew W. Kundzewicz, ed. Vol. 42 No. 4, 1997. Hal. 451-456.
- Habermas. 2009. Rasionalitas Komunikatif, *Dalam: Pengantar Teori-Teori Sosial*. Alih bahasa oleh Achmad Fedyan saifudin dari Pip Jones, *Introducing Social Theory*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Hardin, G. 1968. *The Tragedy of the Commons*. Science 162, 1243-1248.
- Hess Charlotte and E.Ostrom.2003.IDEAS, ARTIFACTS,AND FACILITIES:INFORMATION AS ACOMMON-POOL RESOURCE. [http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+111+\(WinterSpring\)+20](http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?66+Law+&+Contemp.+Probs.+111+(WinterSpring)+20).
- IBRD. 1993. *Water Resources Management. The World Bank Policy Paper*. The World Bank. Washington.D.C. Hal. 24, Box 1-2.
- KKBI. 1993. Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1993.

- Kiser, L. L. and E. Ostrom (2000): The Three Worlds of Action: a Metatheoretical Synthesis of Institutional Approaches. In: McGinnis, M. D. (ed.), *Polycentric Games and Institutions*. Ann Arbor: University of Michigan Press: 56-88.
- Koento Wibisono S. dkk., 1997., "Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan", Intan Pariwara, Klaten, p.6-7, 9, 16, 35, 79
- LOUCKS D.P. 1998. *Quantifying trends in system sustainability*. Dalam *Hydrological Sciences Journal*. Zbigniew W. Kundzewicz, ed. Vol. 42 No. 4, 1997. Hal. 513-530.
- Malik, I. 2003. *Menyeimbangkan kekuatan: Pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumberdaya alam*. Jakarta: Yayasan Kemala.
- Muhammad Iqbal .1999. (ed.1, 1951), *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Kazi Publications.
- Naisbitt, J. 2003. *High Tech High Touch*. Terjemahan Dian R. Basuki. Mizan Media Utama, Bandung. Hal. 76-90.
- Ocorandi, Michael. 1998. *An Anatomy of The Recent Anti Ethnic-Chinese Riots in Indonesia*, <http://www.huaren.org/focus/id/032598-1.html>
- Ostrom, E. 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press
- , 1999. *Crossing the Great Divide. Coproduction, Synergy & Development, Polycentric Governance and Development. Reading from the Workshop in Political Theory and Policy Analysis*, M.D. McGinnis (ed.) Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Prabowo, A., Sigit S. Arif, Eko Subekti dan Djito. 2010. *ICID Seminar 2010*
- Prabowo, A. Sigit S. Arif, Dwi Antariksa. 2009. *Konflik pemanfaatan air irigasi: Kasus pemanfaatan air irigasi untuk tanaman pangan dan perikanan DI Siman*. Laporan Akhir kegiatan penelitian kerjasama antara Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. 2009.
- Pretty, J. and Ward, H. (2001) 'Social Capital and the Environment' *World Development*, 29, 209-2
- Pusposutardjo, S. dan Susanto, S. 1992. *Perspektif Pengembangan Manajemen Sumber Air dan Irigasi untuk Bangunan Pertanian*. Penerbit Liberty, Yogyakarta. Hal. 56.
- Pusposutardjo, 2006. *Air sebagai fungsi langsung dan tak langsung kehidupan*.
- Swasono, S.Edi. 1985. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press. Hal 118
- Torras, M. and Boyce, J.K. (1998) "Income, inequality and pollution: a reassessment of the environmental Kuznets curve", *Ecological Economics* 25, 147-60
- Watt, K.E.F. 1973. *Principles of Environmental Science*. McGraw-Hill Book Company, New York. Hal. 20-26
- Zubair, A.C., F. Mustofa, R.A. Sukri, 1997. *Aktualisasi Filsafat: Upaya mengukir masa depan peradaban*. Penerbit: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

STRATEGI SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

DIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN

email: trp@bappenas.go.id

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri; (2) merumuskan sistem penyebaran informasi pada kelompok-kelompok sasaran; dan (3) merumuskan jenis informasi RPJMN 2010-2014 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan (TRP) yang penting disosialisasikan pada pihak yang berkepentingan. Metode yang digunakan di dalam kajian ini adalah: (1) studi literatur untuk mendapatkan metode sosialisasi yang telah dilaksanakan di dalam dan luar negeri; (2) wawancara terstruktur, untuk mengetahui tingkat pengetahuan objek kajian yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang TRP; (3) diskusi (*focus group discussion* (FGD)) yang dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi dan masukan dari ketiga objek sosialisasi atas rancangan strategi dan materi yang akan disosialisasikan. Kesimpulan kajian strategi sosialisasi RPJMN 2010-2014 Bidang TRP adalah sebagai berikut: (1) sebagai dokumen publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 perlu disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan terkait antara lain: pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan masyarakat; dan (2) sosialisasi RPJMN 2010-2014 perlu dilakukan secara efektif dengan memilih media dan substansi materi sosialisasi yang tepat sesuai dengan kelompok sasaran sosialisasi (pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan masyarakat). Rekomendasi kajian antara lain adalah: (1) pengembangan identitas komunikator (*identitas brand*) yang baik, matang dan konsisten untuk subyek kajian ini; (2) advokasi media adalah aspek penting yang terbukti efektif untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*); (3) pengembangan *toolkit* yang lengkap, yang berisi materi dan aplikasi diseminasi.

I. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 termasuk ke dalam informasi publik yang bersifat terbuka. Sebagai dokumen publik, RPJMN 2010-2014 harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Penyediaan informasi publik ini merupakan ekspresi dari upaya memenuhi hak atau kemerdekaan masyarakat untuk memperoleh informasi (*public right to know*). Sedangkan fungsi penyebaran informasi merupakan ekspresi dari kewajiban pemerintah dan negara untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat (*obligation to tell*). Lebih lanjut, kebijakan nasional seperti RPJMN yang mendasari kebijakan lokal juga perlu dipahami secara umum oleh masyarakat seperti target dan sasaran umum pembangunan untuk setiap masa pemerintahan Presiden yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Sebagai salah satu upaya merumuskan strategi sosialisasi RPJMN 2010-2014, khususnya Bidang TRP, maka diselenggarakanlah kegiatan Kajian Strategi Sosialisasi Kebijakan Jangka Menengah Bidang TRP.

Laporan kajian ini disusun menjadi enam bab. **Bab 1**, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran dan ruang lingkup kajian. **Bab 2** berisi teori komunikasi publik, sosialisasi dan teori perubahan sebagai dasar dilaksanakan kajian ini. Di dalam bab ini dikaji pula hasil dan konsep sosialisasi yang telah dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam bab ini diidentifikasi pula metode penelitian kualitatif yang cocok untuk diterapkan. **Bab 3**, pelaksanaan kajian yang meliputi kerangka pemikiran dan pelaksanaan kajian termasuk pelaksanaan mini wawancara dan FGD. **Bab 4** memaparkan rancangan strategi dan hasil pengujian rancangan dalam FGD. Rancangan ini kemudian difinalkan di **Bab 5** yang berisi strategi sosialisasi RPJMN 2010-2014 untuk Bidang TRP yang telah diuji di dalam FGD yang melibatkan ketiga objek sosialisasi yaitu perguruan tinggi, masyarakat dan pemerintah daerah. **Bab 6** menyimpulkan kajian dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut kajian ini.

II. TUJUAN

Tujuan kegiatan ini adalah untuk: (1) mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri; (2) merumuskan sistem penyebaran informasi pada kelompok-kelompok sasaran; dan (3) merumuskan jenis informasi RPJMN 2010-2014 Bidang TRP yang penting disosialisasikan pada pihak yang berkepentingan.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan kajian ini adalah: (1) terciptanya strategi dalam sosialisasi kebijakan jangka menengah nasional yang tepat sasaran; serta (2) untuk jangka waktu yang lebih panjang, terciptanya pemahaman mengenai muatan kebijakan jangka menengah nasional dalam pembangunan.

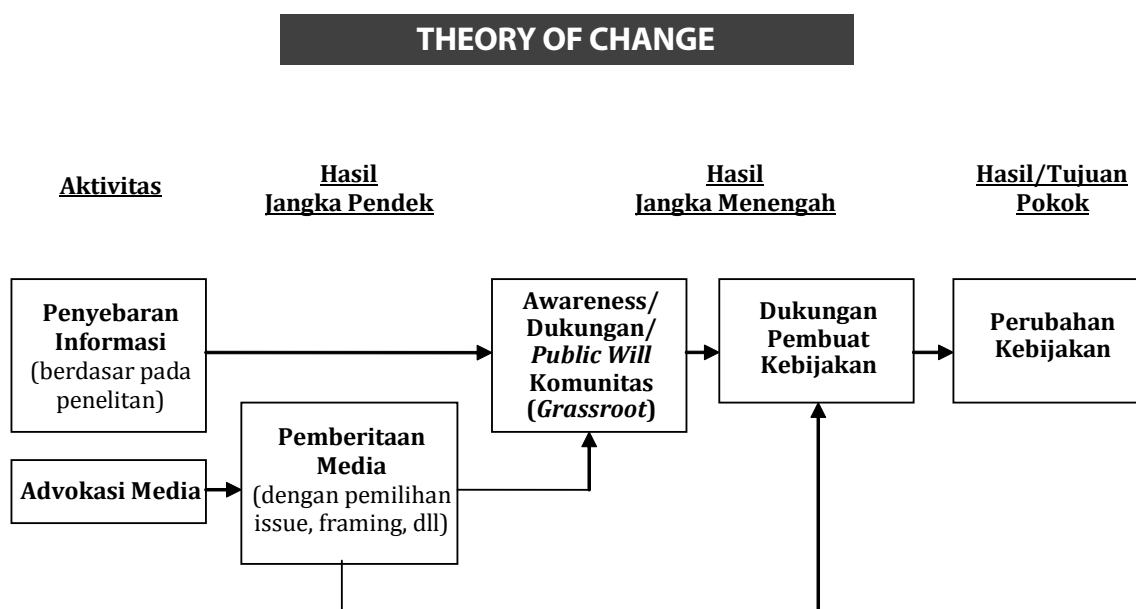
Ruang lingkup kajian meliputi perumusan strategi penyebaran informasi untuk sosialisasi RPJMN 2010-2014 Bidang TRP, termasuk di dalamnya adalah inventarisasi pelaksanaan di beberapa negara lain. Pengumpulan informasi dilaksanakan melalui wawancara terstruktur dan FGD dan rentang waktu pelaksanaan kajian dilakukan dari bulan Januari 2010 hingga Desember 2010.

III. METODOLOGI

3.1 Kerangka Teoritis

Objek ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Bahkan dalam definisinya secara khusus, disebutkan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of other individuals*) (Effendy, 1990).

Gambar 1 Theory of change untuk komunikasi publik



Adapun komunikasi massa ditujukan kepada massa melalui media massa. Dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, maka komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan sifat-sifat komponennya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: (1) komunikasi massa berlangsung satu arah; (2) komunikator pada komunikasi massa berada dalam satu lembaga yang jelas; (3) pesan pada komunikasi massa bersifat umum; (4) media komunikasi massa menimbulkan keseragaman waktu bertindak; dan (5) komunikasi massa bersifat heterogen. Agar komunikasi efektif, pesan yang merupakan salah satu faktor kunci dari komunikasi hendaknya mendapat perhatian yang cukup (Laswell, 1972).

Banyak perencana komunikasi publik sekarang menganut gagasan untuk menggunakan teori perubahan (*theory of change*) sebagai panduan untuk merancang strategi komunikasi publik. Teori Perubahan merupakan representasi dari apa yang perlu diterapkan untuk membuat perubahan tertentu terjadi. Kata 'change' atau perubahan merujuk pada tujuan pokok dari komunikasi publik, apakah itu merubah perilaku individu atau merubah kebijakan dan kehendak masyarakat (*public will*). Teori Perubahan mengidentifikasi strategi-strategi kunci yang harus digunakan, dan apa saja hasil yang harus dikeluarkan. Gambar 1 menjelaskan aplikasi Teori Perubahan dalam praktek komunikasi publik untuk mencapai tujuan perubahan perilaku individu atau perubahan kebijakan dan kehendak publik (*public will*).

Pemahaman terhadap teori-teori ilmu sosial yang berhubungan dengan komunikasi dapat membantu pemahaman dalam kegiatan penyebaran informasi melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi publik, dan teori-teori tentang perubahan. Teori-teori dan konsep-konsep dibagi berdasarkan kategori-kategori yang paling relevan, dalam hal ini perubahan perilaku dan kehendak publik (*public will*).

3.2. Metode Pelaksanaan Kajian

Metode yang digunakan di dalam kajian ini adalah:

Studi literatur untuk mendapatkan metode sosialisasi yang telah dilaksanakan di dalam dan luar negeri.

Wawancara terstruktur, untuk mengetahui tingkat pengetahuan objek kajian yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat atas materi yang akan disosialisasikan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang TRP. Tahap yang dilakukan adalah: penyusunan kuesioner, teknis penyebaran kuesioner dan pemilihan responden. Hasil wawancara terstruktur kemudian dianalisis dengan membuat daftar jawaban atas pertanyaan yang diajukan, mengelompokkan dan mereduksi data serta menarik kesimpulan pengetahuan rata-rata yang dimiliki oleh responden untuk setiap materi sosialisasi yang diajukan dalam pertanyaan.

FGD, yang dilakukan dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi dan masukan dari ketiga objek sosialisasi atas rancangan strategi dan materi yang akan disosialisasikan. Untuk mempertahankan homogenitas di antara anggota kelompok, FGD dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan objek sosialisasi: perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat. FGD dilakukan di dua lokasi, yaitu Batam dan Bandung. Lokasi FGD dipilih berdasarkan lokasi perguruan tinggi dan perbedaan karakteristik masyarakat. Bandung dipilih karena banyaknya jumlah perguruan tinggi yang ada di kota tersebut untuk menjamin terpenuhinya jumlah partisipan di kelompok perguruan tinggi. Batam dipilih karena terletak di kepulauan dan memiliki budaya yang berbeda dibandingkan dengan Bandung. Hasil FGD kemudian dianalisis dengan membuat transkripsi, mengelompokkan data menjadi data untuk perbaikan strategi dan data untuk perbaikan materi sosialisasi, kemudian membuat perbaikan atas strategi dan materi sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh ketiga objek sosialisasi.

3.3 Data

Hasil studi literatur digunakan untuk menemukan jenis sosialisasi yang berhasil. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan untuk menyusun rancangan awal strategi sosialisasi. Pengetahuan objek sosialisasi (pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat) atas materi yang akan disosialisasikan digali dalam wawancara terstruktur. Hasil wawancara terstruktur digunakan sebagai data kualitatif untuk menyusun rancangan awal strategi sosialisasi dan *toolkit* yang disusun secara spesifik untuk ketiga objek sosialisasi yang berbeda. Rancangan awal strategi sosialisasi dan *toolkit* kemudian diuji di dalam FGD dengan tiga kelompok objek sosialisasi yang diundang dalam tiga session yang berbeda.

IV. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

4.1 Wawancara terstruktur

Wawancara untuk kajian ini dilakukan untuk mengungkap sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman tiga objek sasaran sosialisasi, yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat, terhadap RPJMN dan materi-materi mengenai TRP. Perancangannya didasarkan pada pengetahuan mendasar tentang pembangunan nasional, kebijakan pembangunan, sosialisasi, kelembagaan dan organisasi, pengawasan, pengetahuan tentang sistem informasi, serta kebutuhan pelatihan. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa: (1) sebagian besar responden mengetahui istilah RPJMN dan RPJPN (90 persen), namun hanya setengahnya yang dapat menjelaskan kepanjangan dan fungsi kedua rencana tersebut; (2) Bappenas sebagai instansi yang menyusun RPJPN dan RPJMN tidak banyak dikenal oleh masyarakat, kemungkinan karena setelah otonomi daerah dilaksanakan, masyarakat lebih mengenal badan perencanaan daerah dibandingkan dengan badan perencanaan dengan lingkup nasional. Hal ini konsisten dengan hasil wawancara yang memperlihatkan bahwa hanya 30 persen dari responden yang mengetahui Prioritas RPJMN; (3) istilah tata ruang dikenali oleh seluruh responden sedangkan istilah pertanahan dikenali oleh 80 persen responden, namun hanya setengahnya yang dapat menjelaskan arti penataan ruang dan pertahanan dan hanya 30 persen dari responden yang mengetahui permasalahan di Bidang TRP; dan (4) tidak ada media yang dominan yang menjadi sumber informasi mengenai TRP. Media cetak (30 persen), media elektronik (40 persen) bukan media yang efektif untuk sosialisasi. Internet dapat dijadikan media informasi untuk Bidang TRP karena lebih dari 60 persen responden mendapatkan informasi yang mereka perlukan melalui media ini.

4.2 Focus Group Discussion

Strategi sosialisasi yang dipilih di dalam studi ini kemudian diaplikasikan ke dalam beberapa keluaran praktis yaitu berupa pengembangan sistem pemasaran sosial untuk kebutuhan sosialisasi, antara lain identitas, toolkit, perancangan pesan, skema penyebaran media-media dan lain-lain. Proses-proses pengkajian strategi sosialisasi dilakukan untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman tentang keadaan, akses dan kebutuhan terhadap informasi tentang RPJMN Bidang TRP dan identitas RPJMN secara umum di tiga objek kajian. Langkah berikutnya adalah memetakan dan menganalisis strategi-strategi sosialisasi yang telah dibuat dengan FGD terhadap tiga target di beberapa daerah. Hasil FGD terhadap tiga target (masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah daerah), memberikan beberapa masukan yang bisa diangkat sebagai strategi. Strategi baru yang berhasil dirumuskan adalah Konsep Pemanfaatan Media Tradisional dan Karakteristik Lokal.

Pemanfaatan media tradisional dalam menunjang penyebaran informasi publik dan kebijakan pemerintah masih sangat dibutuhkan terutama untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Sifat umum media tradisional yaitu mudah diterima, relevan dengan budaya yang ada, menghibur, menggunakan bahasa lokal, memiliki unsur legitimasi, fleksibel, memiliki kemampuan untuk mengulangi pesan-pesan yang dibawanya, komunikasi dua arah dan sebagainya. Pengembangan konsep ini bisa diaplikasikan dalam sebuah kolaborasi, seperti: (1) kolaborasi media tradisional dengan media massa modern; (2) kolaborasi media tradisional dengan stasiun radio. Kolaborasi antara media tradisional dengan media radio sudah lama. Media Radio dapat menyajikan media tradisional untuk kepentingan masyarakat pedesaan dan kepulauan, karena dapat menjangkau khalayak

lebih banyak, dan dapat menembus batas geografis. Program penyajian RRI pada umumnya mengalokasikan 10 persen waktu siaran untuk informasi, 30 persen untuk pendidikan, 25 persen untuk budaya, 25 persen untuk hiburan dan 15 persen untuk iklan dan acara penunjang; dan (3) kolaborasi media tradisional dengan stasiun televisi.

4.3 Strategi Sosialisasi

Strategi yang dibuat dan diujicobakan untuk sosialisasi kebijakan pembangunan jangka menengah Bidang TRP ini, antara lain adalah: (1) menciptakan identitas resmi untuk RPJMN dan untuk kegiatan sosialisasi Bidang TRP yang lebih komunikatif; (2) konsep perancangan pesan yang sederhana, jelas, dan sistematis yang disajikan lewat pesan visual dan pesan tekstual dengan tetap memperhatikan kedalaman materi-materi kebijakan pembangunan Bidang TRP yang akan disosialisasikan; (3) konsep pemasaran sosial yang mengadopsi konsep pemasaran umum dengan membuat *toolkit* untuk kebutuhan sosialisasi; (4) konsep jaringan komunikasi yaitu dengan melakukan penyebaran informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tiap daerah; (5) advokasi media, termasuk di dalamnya pengorganisasian dan mobilisasi masyarakat, dan penyertaan para pembuat kebijakan, antara lain melalui pemberitaan media, penulisan artikel-artikel dan jurnal tentang TRP; (6) menjalankan mekanisme pusat-daerah untuk kebutuhan penyebaran informasi dengan strategi tambahan melalui *workshop* regional, pelatihan, interview, dan diskusi dengan pemerintah daerah dan para perencana; (7) kerjasama dengan kalangan akademis; dan (8) pemanfaatan media tradisional dan karakteristik lokal.

Pemanfaatan media tradisional menjadi sangat penting dalam menunjang penyebaran informasi publik dan kebijakan pemerintah terutama untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Sifat umum media tradisional yaitu mudah diterima, relevan dengan budaya yang ada, menghibur, menggunakan bahasa lokal, memiliki unsur legitimasi, fleksibel, memiliki kemampuan untuk mengulangi pesan-pesan yang dibawanya, komunikasi dua arah dan sebagainya. Pengembangan konsep ini bisa diaplikasikan dalam sebuah kolaborasi, misalnya kolaborasi media tradisional dengan stasiun radio. Media Radio dapat menyajikan media tradisional untuk kepentingan masyarakat pedesaan dan kepulauan, karena dapat menjangkau khalayak lebih banyak, dan dapat menembus batas geografis. Program penyajian RRI pada umumnya mengalokasikan 10 persen waktu siaran untuk informasi, 30 persen untuk pendidikan, 25 persen untuk budaya, 25 persen untuk hiburan dan 15 persen untuk iklan dan acara penunjang.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENTASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan umum hasil kajian strategi sosialisasi RPJMN 2010-2014 Bidang TRP adalah sebagai berikut: (1) sebagai dokumen publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 perlu disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan terkait antara lain: pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan masyarakat; dan (2) sosialisasi RPJMN 2010-2014 perlu dilakukan secara efektif dengan memilih media dan substansi materi sosialisasi yang tepat sesuai dengan kelompok sasaran sosialisasi (pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah dan masyarakat).

5.1.1 Pemerintah Daerah

Media sosialisasi RPJMN 2010-2014 di kalangan Pemda masih sangat terbatas, hanya instansi yang membutuhkan RPJMN dalam melaksanakan tupoksinya (Bappeda) yang mengetahui isi RPJMN 2010-2015. Bahkan masih ada kanwil dan kantar BPN yang belum mengetahui RPJMN. Ketidaktahuan mengenai RPJMN disebabkan karena minimnya sosialisasi RPJMN kepada pemda. Untuk mengenalkan RPJMN 2010-2014 kepada pemda sampai pada level bawah sadar diperlukan sosialisasi RPJMN yang lebih intensif dan berkelanjutan yang dilakukan secara formal (melalui instansi vertikal) dan informal (*toolkit* dan media massa: koran, acara televisi dan radio serta forum informal).

Subtansi RPJMN 2010-2014 yang diperlukan pemda agar menjadi materi sosialisasi yang perlu ada dalam *toolkit* yaitu RPJMN 2010-2014 Bidang TRP dan perlu ditambah pengantar umum seperti yang telah digunakan oleh Bappenas selama ini yang memperlihatkan keterkaitan antara RPJPN dengan RPJMN, antara Buku I, II dan III. Selain itu perlu ditambahkan pula tabel prioritas nasional terkait TRP. Untuk sosialisasi di daerah, dapat ditambahkan keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD yang telah disusun oleh pemerintah masing-masing daerah.

5.1.2 Kelompok Masyarakat

Media sosialisasi RPJMN 2010-2014 untuk masyarakat perlu disesuaikan dengan budaya dan karakteristik masyarakat lokal yang sudah umum dikenal masyarakat lokal. Misalnya dengan menggunakan media yang umum dilihat oleh masyarakat setempat seperti majalah dinding di tempat umum dan tempat ibadah, pengumuman melalui tempat-tempat ibadah seperti pengeras suara masjid ataupun karikatur dengan karakter yang sudah banyak dikenal. Selain itu dapat pula dilakukan teknik sosialisasi yang mengadopsi sistem kader yang infrastrukturnya sudah tersedia sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT).

Subtansi RPJMN 2010-2014 Bidang Pertanahan yang diperlukan masyarakat agar menjadi materi sosialisasi dalam *toolkit* yaitu mengenai hak atas tanah dan prosedur sertifikasi tanah. Tambahan yang diperlukan adalah mengenai layanan pertanahan untuk UMKM, nelayan, petani (milik), peserta transmigran, dan Masyarakat Bepenghasilan Rendah (MBR). Untuk tata ruang, yang diperlukan adalah pengetahuan tentang cara berpartisipasi dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang paling utama adalah proses pengajuan pendapat dan badan pemerintah daerah mana yang harus dituju oleh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya.

5.1.3 Perguruan Tinggi

Kelompok perguruan tinggi terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok yang bidang ajarnya berkaitan langsung dengan RPJMN (planologi, geodesi, pertanian, arsitektur, studi pembangunan dan lingkungan) dan yang tidak berkaitan langsung dengan RPJMN. Untuk yang tidak berkaitan langsung, materi sosialisasi menggunakan materi yang sama dengan masyarakat. Media sosialisasi RPJMN yang efektif untuk perguruan tinggi adalah web site (khususnya perguruan tinggi di Jawa) yang bisa diakses kapan saja untuk bahan ajar perkuliahan.

Subtansi RPJMN 2010-2014 yang perlu ada di dalam *toolkit* untuk perguruan tinggi yaitu permasalahan terkini, data aktual pencapaian beserta target yang ingin dicapai dalam periode waktu rencana tersebut. Spektrum permasalahan yang dimunculkan dalam toolkit perlu diperluas misalnya untuk pertanahan tidak hanya mengenai permasalahan yang terkait dengan BPN saja, melainkan juga permasalahan yang terkait dengan perpajakan. Untuk Bidang Tata Ruang, perlu pula ditambahkan contoh integrasi antar rencana melalui musyawarah perencanaan.

Dalam kegiatan kajian strategi sosialisasi RPJMN 2010-2014, perguruan tinggi mempunyai peran sebagai inovator untuk menemukan inovasi-inovasi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan. Sebagai inovator, perguruan tinggi diperlukan untuk mempertajam masalah, fakta, target dan stimulasi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Beberapa kekurangan dan kelebihan sosialisasi RPJMN saat ini yang dapat dicatat adalah: (1) media sosialisasi RPJMN yang ada selama ini menggunakan template yang terlalu formal, kaku dan digunakan dari tahun ke tahun tidak ada inovasi (buku RPJMN dan internet); (2) materi RPJMN yang disosialisasikan pada masyarakat umum menggunakan bahasa yang sulit untuk dimengerti, sehingga kurang menarik bagi masyarakat umum untuk mengetahui RPJMN lebih jauh. Banyaknya materi RPJMN yang harus diakomodasi menyebabkan buku RPJMN yang dihasilkan sangat tebal dan jumlahnya cukup banyak sehingga masyarakat umum kurang tertarik untuk membaca.

Sedangkan kelebihan sosialisasi RPJMN saat ini adalah sosialisasi RPJMN dilakukan pada Musrenbangnas dan Musrenbangprov yang dilakukan di seluruh Indonesia. Jaringan informasi formal tersebut dapat diperluas sampai ke desa agar dapat menjadi media sosialisasi RPJMN yang efektif.

5.1.4 Peran Bappenas dalam sosialisasi RPJMN

Direktorat TRP mempunyai kewajiban memberikan informasi atas permintaan masyarakat (*public rights to know*). Sejalan dengan perubahan paradigma di Bidang Komunikasi, komunikasi tidak lagi dapat dilakukan secara kasualitas linier (satu arah), tetapi relational dan transaksional (dua arah). Peran Bappenas dalam sosialisasi RPJMN diperlukan agar dokumen RPJMN dapat disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, Bappenas juga perlu berperan untuk mendorong agar isi sosialisasi mengenai dokumen RPJMN disesuaikan dengan target atau objek sosialisasi dan menggunakan cara penyaluran informasi yang tepat sehingga pesan yang penting dapat tersampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran (pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi).

5.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian strategi-strategi sosialisasi yang diajukan dapat dipahami bahwa tiap komponen strategi saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prioritas strategi apa yang harus dilaksanakan adalah tergantung pada tingkat pencapaian tujuan sosialisasi itu sendiri. Kajian ini lebih banyak menelaah pengembangan strategi untuk meningkatkan *awareness* dan pemahaman kelompok-kelompok sasaran terhadap RPJMN Bidang TRP.

Pencapaian tujuan seperti kajian ini bisa dikategorikan sebagai pencapaian hasil awal yang memang harus menjadi perhatian dan pertimbangan untuk diimplementasikan. Ini dilakukan melalui rekomendasi penting, yaitu antara lain: (1) pengembangan identitas komunikator (*identitas brand*) yang baik, matang dan konsisten untuk subyek kajian RPJMN TRP. Diharapkan pengembangan ini bisa dilakukan tidak hanya di Direktorat TRP, akan tetapi merupakan sistem identitas yang bisa diterapkan di direktorat-direktorat lain di Bappenas, terutama mengenai identitas RPJMN yang krusial untuk segera mendapat perhatian; (2) advokasi media adalah aspek penting yang terbukti efektif untuk meningkatkan *awareness*. Rekomendasi ini bisa melibatkan kelompok-kelompok sasaran dari kalangan akademis, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk pelaksanaannya. Seperti disebutkan sebelumnya advokasi media akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas pemberitaan tentang masalah-masalah RPJMN Bidang TRP, serta mempengaruhi cara orang mempersepsikannya; (3) pengembangan toolkit yang lengkap, tidak hanya berupa buku informasi RPJMN Bidang TRP, tapi juga material-material atau aplikasi-aplikasi diseminasi lainnya. Beberapa sudah dikembangkan selama kajian ini. Pengembangannya akan bergantung pada pemilihan dan penyebaran media terhadap tiap kelompok sasaran sosialisasi. Catatan penting mengenai hal ini adalah mengenai relevansi isi informasi yang harus disesuaikan untuk tiap kelompok sasaran dan pembatasan terhadap kelompok sasaran potensial, semisal untuk kalangan akademis difokuskan kepada kalangan perencanaan, ilmu-bumi, geo-informasi, dan studi pembangunan.

Rekomendasi tersebut akan cukup efektif untuk pencapaian tujuan awal. Langkah berikutnya adalah tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berbasis kemitraan dan kemasyarakatan. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah sebagai dukungan untuk melibatkan strategi-strategi sebelumnya dalam konteks sosial, sehingga keberadaannya dalam masyarakat lebih baik lagi. Salah satu contoh nyata dari rekomendasi ini adalah, usulan untuk memasukan materi-materi RPJMN ke dalam kurikulum pendidikan adalah salah satu bentuk sosialisasi yang sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Fishbein, M. 1980, *Understanding attitudes and predicting social behavior*, Upper Saddle River, New Jersey, Prentice Hall.
- Andreasen, AR 1995, *Marketing social change*, San Francisco, Jossey-Bass.
- Andreasen, AR 1997, *Challenges for the science and practice of social marketing*. In M.E. Goldberg, M. Fishbein, & S.E. Middlestadt (Eds.), *Social marketing: Theoretical and practical perspectives*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Aziz, RG 2006, *Analisa efektifitas penyebaran informasi dalam rangka sosialisasi pasar modal*, Jakarta.
- Bandura, A 1992, *Exercise of personal agency through the self-efficacy mechanism*. In R. Schwarzer (Ed.), *Self-efficacy: Thought control of action*. Washington, DC. Hemisphere.
- Barbour, RS 2005, 'Making sense of focus groups', *Medical Education*, vol.39, no.7, pp.742-750.
- Basch, CE 1987, 'Focus group interview: an underutilized research technique for improving theory and practice in health education', *Health Education Quarterly*, vol.14, no.4, pp.411-448.
- Becker, 1974, *The health belief model and personal health behavior*, Health education Monographs.
- Bender, DE & Ewbank, D 1994, 'The focus group as a tool for health research: issue in design and analysis', *Health Transition Review*, vol.4, no.1, pp.63-79.
- Bernard, B & Morris, J, ed., *Reader in public opinion and communication*, The Press of Glencoe, New York.
- Bungin, B 2008, *Analisis data penelitian kualitatif: pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Carey, MA 1995, 'Comments: concerns in the analysis of focus group data', *Qualitative Health Research*, vol.5, pp.487-95.
- Coffman, J 2003, *Lesson in evaluating communications campaigns*, Communication Consortium, Washington DC.
- Day BA dan Monroe, MC 2000, *Environmental Education & Communication for a sustainable world*, Academy For Educational Development.
- Devito, JA 1978, *Communicology: an introduction to the study of communication*, Harper & Row Publisher, New York-London.
- Dewey, R dan Humber, WJ 1967, *An Introduction to social psychology*, London, Collier-Macmillan.
- Dominick, JR 2002, *The dynamics of mass communications, Media in the digital age, 7th edn.*, University Of Georgia Athens, McGraw-Hill.
- Effendy, OU 1997, *Ilmu komunikasi teori dan praktek*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Fletcher AD dan Bowers TA 1991, *Fundamental of advertising research, 4th edition*, Wadsworth, Inc., United States.
- Folch-Lyon, E & Trost, JF 1981, 'Conducting focus group sessions', *Studies in Family Planning*, vol.12, no.12, pp.443-449.
- Hague, P 1993, *Interviewing*, Kogan Page, London.
- Hovland, Carl I., 1953, *Social Communication*
- Knodel, J & Pramualratana, A 1987, 'Focus group research as a means of demographic inquiry', *Research Report*, vol.87, no.106, pp.1-7.
- Krueger, RA 1994, *Focus groups: a practical guide for applied research*, 2nd edn, Thousand Oaks, California.
- Lasswell, HD 1972, *The structure and function of communication in society*
- Littlejohn, SW 1992, *Theories of human communications, 4th edn.*, Wadsworth Publishing Company, Belmont California.
- Lyengar, S & Kinder, DR 1987, *News that matters*, Chicago: University of Chicago Press.
- Macbride, S 1980, *Many voices one world*, UNESCO, The Anchor Press Ltd.
- McCombs, M & Shaw, DL 1973, *The agenda-setting function of the mass media*, *Public Opinion Quarterly*, 37, 62-75.
- Milward, LJ 1995, 'Focus group', in GM Breakwell, S Hamind & C Fife-Schaw (ed.), *Research methods in psychology*, pp.274-292, Sage, London.
- MoneySENSE 2003-2010, <http://www.moneysense.gov.sg>
- Morgan, DL 1988, *Focus group as qualitative research*, Sage, London.
- Mulyana, E 2005, *Ilmu komunikasi suatu pengantar*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- Prochaska, JO., DiClemente, CC., & Norcross, JC 1992, In *Search of how people change: applications to addictive behaviors*, *American Psychologist*, 47, 1102-1114.
- Quality 2006-2009, *Quality of life in a changing europe*, <http://www.projectquality.org/>
- Rakhmat, J 2000, *Psikologi komunikasi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Ries, Al dan Trout, Jack 2001, *Positioning: the battle for your mind*, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
- Rogers, EM dan Storey, JD 1987, *Communication campaigns*. In CR Berger & SH Chaffe (Eds.), *Handbook of communication science*, Newbury Park, Sage.
- Ross, RS 1974, *Persuasion: communication and interpersonal relations*, Eaglewood Clifs, Prentice-Hall Inc.
- Ross, RS 1974, *Persuasion: Communication and interpersonal relations*, Eaglewood Clifs, Prentice-Hall, Inc.
- Ruditio, B dan Famiola, M 2008, *Social mapping, metode pemetaan sosial*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Schramm, Wilbur dan Donald, F 1971, *The process and effects of mass communication*, University of Illinois Press, Urbana Chicago-London.
- Severin, WJ dan Tankard, JW Jr 1979, *Communication theories, origins, methods, uses*, Hastings House Publisher, New York.

- Sim, J & Snell, J 1996, 'Focus group in physiotherapy evaluation and research', *Physiotherapy*, vol.82, pp.189-98.
- Sim, J 1998, 'Collecting and analysing qualitative data: issues raised by the focus group', *Journal of Advanced Nursing*, vol.28, no.2, pp.345-52.
- Spradley, JP 1980, *Participant observer*, Holt Rinehart and Winston.
- Stewart, DW & Shandasani, PN 1990, *Focus groups: theory and practice*, Sage, Newbury Park.
- Treno, AJ dan Holder, HD 1997a, *Community mobilization: evaluation of environmental approach to local action*, *Addiction*, 92, S173-S187.
- Treno, AJ dan Holder, HD 1997b, *Community mobilization, organizing, and media advocacy: A discussion of methodological issues*, *Evaluation Review*, 21(2), 166-190.
- Treno, AJ., Breed, L., Holder, H., Roeper, P., Thomas, B.A., & Gruenewald, PJ 1996, *Evaluation of media advocacy efforts within a community trial to reduce alcohol involved injury*, *Evaluation Review*, 20(4), 404-423.
- Tversky, A & Kahneman, D 1981, *The framing of decisions and psychology of choice*. *Science*, 211, 453-458.
- Twinn, S 1998, 'An analysis of the effectiveness of focus groups as a method of qualitative data collection with Chinese population in nursing research', *Journal of Advanced Nursing*, vol.28, no.3, pp.654-61.
- Venus, A 2004, *Manajemen kampanye panduan teoritis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Ward, VM, Bertrand, JT & Brown, LF 1991, 'The comparability of focus group and survey results: three case studies', *Evaluation Review*, vol.15, no.2, pp.266-83.
- Wilbur Schramm, *Mass communication*, University of Illinois Press, Urbana-Chicago.
- Wilmshurst, John 1993, *The fundamental of advertising*, Butterworth Heinemann Ltd.